LAPORAN AKHIR

Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Disusun oleh:
TIM FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Alamat:
Kampus Lidah Wetan
Jl. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya,
Jawa Timur 60213

Telp: +6231 7532160
Laman: http:/fip.unesa.ac.id
Email: fip@unesa.ac.id

TIM PENYUSUN

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

Pengarah:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Penanggungjawab:

Dekan Fakultas ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

Tim Penyusun:

1. Dr. Nunuk Hariyati, S.Pd., M.Pd
2. Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si.
3. Prof. Dr. Andi Kristanto, S.Pd., M.Pd
4. Dr. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si
5. Dr. Lisnani, M.Pd.
6. Dr. Ayu Wulandari, S.Pd., M.Pd
7. Ali Fakhrudin, M.Pd.
8. Ramadhan Kurnia Habibie, S.Pd., M.Pd.
9. Zahidah Mahroini, S.Pd., M.Sc.
10. Insan Wastuwidya Mahardiani, S.Si., M.Sc

Tim Pendukung

1. Robiyatul Jannah, S.E

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen **Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Daerah (RIPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029** ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan arah kebijakan strategis pembangunan pendidikan daerah yang disusun sebagai tindak lanjut dari visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik menuju *"Gresik Baru yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Akhlakul Karimah."*

Penyusunan RIPPD ini dilaksanakan melalui proses yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data (*evidence-based policy*). Kajian dilakukan terhadap berbagai aspek pendidikan, meliputi kondisi eksisting satuan pendidikan, profil tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, mutu pembelajaran, hingga tantangan pembangunan pendidikan di era transformasi digital. Melalui pendekatan analisis situasi, SWOT, serta *gap analysis*, dokumen ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan yang realistis, terukur, dan berkelanjutan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berdaya saing.

RIPPD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 juga menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di daerah—baik pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun masyarakat—untuk berkolaborasi mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata. Dokumen ini mengintegrasikan berbagai kebijakan nasional dan daerah serta memuat peta jalan (roadmap) pengembangan pendidikan lima tahun ke depan, meliputi penguatan SDM pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran, penguatan sarana prasarana, serta tata kelola dan pembiayaan pendidikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, khususnya kepada **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Gresik**, **Dinas Pendidikan**, **Universitas Negeri Surabaya**, serta para tenaga ahli dan tim penyusun yang telah bekerja dengan penuh dedikasi.

Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan strategis bagi upaya bersama dalam membangun generasi Gresik yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Gresik, Oktober 2025
Tim Penyusun

EXECUTIVE SUMMARY

Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Daerah (RIPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis pembangunan pendidikan yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi kerangka kebijakan jangka menengah yang mengintegrasikan arah pembangunan pendidikan nasional dan daerah, sejalan dengan visi Kabupaten Gresik untuk mewujudkan "Gresik Baru yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Akhlakul Karimah." Penyusunan RIPPD ini dilaksanakan melalui pendekatan normatif-regulatif, empiris, partisipatif, dan sistemik dengan prinsip evidence-based policy, yang memadukan analisis kuantitatif dan kualitatif dari berbagai sumber data serta melibatkan pemangku kepentingan pendidikan di tingkat daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja pembangunan pendidikan di Kabupaten Gresik mengalami kemajuan yang signifikan dalam perluasan akses dan peningkatan partisipasi sekolah, meskipun masih terdapat ketimpangan antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan, perdesaan, dan kepulauan Bawean. Kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menunjukkan tren positif, namun masih diperlukan pemerataan distribusi guru dan peningkatan kompetensi berkelanjutan. Di sisi lain, sarana dan prasarana pendidikan relatif memadai di wilayah perkotaan, tetapi masih terbatas di beberapa kecamatan dengan topografi sulit. Aspek mutu pembelajaran juga memerlukan perhatian serius, terutama dalam penguatan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter peserta didik agar selaras dengan tuntutan abad ke-21.

Melalui analisis SWOT dan gap analysis, RIPPD ini mengidentifikasi isu-isu strategis utama, meliputi pemerataan akses pendidikan, penguatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran, penguatan tata kelola dan pembiayaan, serta transformasi digital dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan isu tersebut, arah kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Gresik dirumuskan dalam empat pilar utama, yakni: pemerataan dan peningkatan kualitas SDM pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran, penguatan sarana prasarana dan infrastruktur digital, serta tata kelola dan pembiayaan pendidikan yang transparan dan berkeadilan.

Sebagai dokumen strategis, RIPPD Kabupaten Gresik 2025–2029 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan program dan kebijakan pendidikan yang efektif, adaptif, dan inklusif. Implementasi dokumen ini diharapkan mampu memperkuat sistem pendidikan daerah yang berdaya saing, menghasilkan sumber daya manusia unggul, serta berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan berbasis nilai-nilai akhlakul karimah.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
EXECUTIVE SUMMARY ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan dan Manfaat 2
C. Ruang Lingkup Dokumen 3
D. Metodologi Penyusunan 4
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI PENDIDIKAN **22**
A. Kondisi Geografis dan Demografis 22
B. Profil Pendidikan Saat Ini 47
C. Permasalahan dan Tantangan Utama 198
BAB III ANALISIS STRATEGIS **202**
A. Analisis SWOT Pendidikan di Kabupaten Gresik 202
B. GAP Analysis 206
C. Isu-Isu Strategis Pendidikan 207
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN **216**
A. Visi dan Misi Pembangunan Pendidikan Daerah 216
B. Tujuan dan Sasaran Strategis 218
C. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pendidikan 224
BAB V PETA JALAN (ROADMAP) PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK **231**
A. Peta Jalan Sarana dan Prasarana 231
B. Peta Jalan Penguatan SDM Pendidikan 235
C. Peta Jalan Penguatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran 237
D. Peta Jalan Tata Kelola dan Pembiayaan Pendidikan 242
BAB VI RENCANA IMPLEMENTASI DAN MONITORING EVALUASI **249**
A. Rencana Kerja Bertahap 249
B. Indikator Kinerja (IKU) & Target Tahunan 254
C. Strategi Monitoring dan Evaluasi 256
BAB VII PENUTUP **262**
A. Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Utama 262
B. Komitmen Keberlanjutan RIPPD 267
DAFTAR PUSTAKA **270**
LAMPIRAN **273**
A. Data Kuantitatif 274
B. Peserta Didik 275
C. Tenaga Pendidik dan Kependidikan 276
D. Hasil Survei 277
E. FGD 284
F. Peta Sebaran Sekolah/Lembaga 285
G. Matriks Roadmap per Tahun 295
H. Template Evaluasi Pelaksanaan RIPPD Kabupaten Gresik 296

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tahapan Kegiatan Penyusunan RIIPD 5
Tabel 1.2 Kisi-Kisi Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan 10
Tabel 1.3 Persepsi Mutu Pendidikan 13
Tabel 1.4 Akses Pendidikan (Biaya, Transportasi, Jarak) 14
Tabel 1.5 Kebutuhan Pengembangan dan Pelatihan Guru 15
Tabel 1.6 Matriks Ringkasan Metode Penelitian 17
Tabel 2.1 Klasifikasi Jarak Satuan Pendidikan Berdasarkan Jenjang 34
Tabel 2.2 Kondisi Demografi Kabupaten Gresik 44
Tabel 2.3 Perbandingan Penduduk Menurut Umur dan Jumlah Sekolah 45
Tabel 2.4 Jumlah dan Sebaran TK/RA di Kabupaten Gresik 47
Tabel 2.5 Jumlah dan Sebaran SD/MI di Kabupaten Gresik 48
Tabel 2.6 Jumlah dan Sebaran SMP/MTs di Kabupaten Gresik 49
Tabel 2.7 Jumlah dan Sebaran SMA/MA dan SMK di Kabupaten Gresik 51
Tabel 2.8 Jumlah dan Sebaran SLB dan PKBM di Kabupaten Gresik 52
Tabel 2.9 Angka Putus Sekolah Kab. Gresik 63
Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Murid di Semua Jenjang Pendidikan 2019–2024 68
Tabel 2.11 Prediksi Jumlah Murid Kabupaten Gresik 2024–2028 70
Tabel 2.12 Rekapitulasi Pengaduan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 75
Tabel 2.13 Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Gresik 77
Tabel 2.14 Kualifikasi Pendidikan Guru di Kabupaten Gresik 78
Tabel 2.15 Sertifikasi Guru di Kabupaten Gresik 73
Tabel 2.16 Proyeksi Kebutuhan Guru RA Kabupaten Gresik 2023–2024 82
Tabel 2.17 Proyeksi Kebutuhan Guru TK Kabupaten Gresik 2024–2025 84
Tabel 2.18 Proyeksi Kebutuhan Guru SD Kabupaten Gresik 2024–2025 86
Tabel 2.19 Proyeksi Kebutuhan Guru MI Kabupaten Gresik 2023–2024 88
Tabel 2.20 Proyeksi Kebutuhan Guru SMP Kabupaten Gresik 2024–2025 90
Tabel 2.21 Proyeksi Kebutuhan Guru MTs Kabupaten Gresik 2023–2024 93
Tabel 2.22 Proyeksi Kebutuhan Guru SMA Kabupaten Gresik 2024–2025 96
Tabel 2.23 Proyeksi Kebutuhan Guru MA Kabupaten Gresik 2023–2024 99
Tabel 2.24 Proyeksi Kebutuhan Guru SMK Kabupaten Gresik 2024–2025 102
Tabel 2.25 Prediksi Kebutuhan Guru Kabupaten Gresik 2024-2025 sampai dengan 2028-2029 104
Tabel 2.26 Tabel Kebutuhan pengembangan dan pelatihan guru 110
Tabel 2.27 Tabel strategi pengembangan dan pelatihan guru 112
Tabel 2.28 Strategi pengembangan guru SD/MI 114
Tabel 2.29 Strategi pengembangan guru SMP/MTs 118
Tabel 2.30 Strategi pengembangan guru SMA/SMK 121
Tabel 2.31 Distribusi Tenaga Kependidikan di Kabupaten Gresik 123
Tabel 2.32 Distribusi Tenaga Perpustakaan di Kabupaten Gresik 126
Tabel 2.33 Distribusi Tenaga Laboran di Kabupaten Gresik 128
Tabel 2.34 Distribusi Konselor Sekolah di Kabupaten Gresik 130
Tabel 2.35 Ketersediaan WC Guru dan WC Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gresik 144
Tabel 2.36 Tabel perbandingan pagu dan realisasi anggaran Dinas Pendidikan 145
Tabel 2.37 Konsep BOSNAS yang Efektif dan Efisien 150

Tabel 2.38 Realisasi BOSDA SMP di Kabupaten Gresik tahun 2025 153
Tabel 2.39 Rekapitulasi Jumlah Penerima BOP 156
Tabel 2.40 Rapor Pendidikan jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar Kabupaten Gresik Tahun 2025 158
Tabel 2.41 Rapor Pendidikan jenjang Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2024 161
Tabel 2.42 Pelaksanaan Kurikulum dan Capaian Pembelajaran per Kecamatan di Kabupaten Gresik 165
Tabel 2.43 Hasil Asesmen Nasional (AN) Dan Laporan Capaian Pembelajaran 169
Tabel 2.44 Data Rekapitulasi Prestasi Akademik dan Non Akademik Jenjang SMA/SMK 173
Tabel 2.45 Data Rekapitulasi Prestasi Akademik dan Non Akademik Jenjang SD/SMP 177
Tabel 2.46 ABK di Kabupaten Gresik 182
Tabel 2.47 Persepsi Mutu dan Penyedia 186
Tabel 2.48 Ringkasan Persepsi Peserta Didik dan Masyarakat terhadap Mutu Pendidikan Kabupaten Gresik 191
Tabel 2.49 Capaian IKM Kabupaten Gresik 197
Tabel 3.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pendidikan 203
Tabel 3.2 Analisis SWOT Pendidikan di Kabupaten Gresik 204
Tabel 3.3 Gap Analysis antara Kondisi Kabupaten Gresik Saat Ini dengan Target Nasional 206
Tabel 4.1 Visi dan Penjelasan 216
Tabel 4.2 Misi dan Penjelasan 217
Tabel 4.3 Indikator Strategis TS 1 220
Tabel 4.4 Indikator Strategis TS 2 221
Tabel 4.5 Indikator Sasaran Strategis TS 3 222
Tabel 4.6 Indikator Sasaran Strategis TS 4 223
Tabel 4.7 Strategi Umum Program Prioritas 229
Tabel 5.1 Tahap Implementasi Sarana dan Prasarana 233
Tabel 5.2 Tahap Implementasi Perluasan Akses Pulau Bawean 234
Tabel 5.3 Tahap Impelementasi Rekruitmen, Redistribusi dan Pelatihan Guru 236
Tabel 5.4 Tahap Implementasi Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas 237
Tabel 5.5 Tahap Implementas Kurikulum Nasional 238
Tabel 5.6 Tahap Implemetasi Digitalisasi Pembelajaran Berbasis TIK 240
Tabel 5.7 Tahap Implementasi Penguatan Literasi, Numerasi dan Karakter 241
Tabel 5.8 Tahap Impelemnetasi Penguatan Peran Pesantren dalam Pendidikan Karakter dan Kemandirian Santri 242
Tabel 5.9 Tahap Implementasi Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah 243
Tabel 5.10 Tahap Implementasi Optimalisasi Anggaran Pendidikan dan Efisiensi Penggunaan Dana 246
Tabel 6.1 Rencana Kerja Bertahap Fokus 1 249
Tabel 6.2 Rencana Kerja Bertahap Fokus 2 250
Tabel 6.3 Rencana Kerja Bertahap Fokus 3 251
Tabel 6.4 Rencana Kerja Bertahap Fokus 4 252
Tabel 6.5 Rencana Kerja Bertahap Fokus 5 253
Tabel 6.6 Indikator Kinerja (IKU) & Target Utama 254
Tabel 6.7 Mekanisme Pelaksanaan Monev 257
Tabel 6.8 Kerangka Waktu Pelaksanaan Monev 260

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Persebaran TK 25
Gambar 2. Peta Persebaran SD 27
Gambar 3. Peta Persebaran SMP 24
Gambar 4. Peta Persebaran SMA 30
Gambar 5. Peta Persebaran SLB 31
Gambar 6. Peta Jarak Antar TK Sederajat 36
Gambar 7. Peta Jarak Antar SD Sederajat 38
Gambar 8. Peta Jarak Antar SMP Sederajat 38
Gambar 9. Peta Jarak Antar SMA Sederajat 41
Gambar 10. Peta Jarak Antar SLB 42
Gambar 11. Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA 54
Gambar 12. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 55
Gambar 13. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 57
Gambar 14. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 58
Gambar 15. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 60
Gambar 16 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 61
Gambar 17. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK 62
Gambar 18. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Sederajat 65
Gambar 19. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Sederajat 66
Gambar 20. Histogram ATS per Kecamatan Kabupaten Gresik 72
Gambar 21. Distribusi Kebutuhan Pengembangan dan Pelatihan Guru di Kabupaten Gresik 106
Gambar 22. Hasil Survei Kompetensi Tenaga Kependidikan di Kab. Gresik 124
Gambar 23. Hasil Survei Kompetensi Tenaga Perpustakaan di Kab. Gresik 126
Gambar 24. Hasil Survei Kompetensi Tenaga Perpustakaan di Kab. Gresik 128
Gambar 25. Hasil Survei Kompetensi Konselor di Kab. Gresik 131
Gambar 26. Kondisi Ruang Kelas di Kabupaten Gresik 133
Gambar 27. Kondisi Akses Listrik Sekolah di Kabupaten Gresik 134
Gambar 28. Kondisi Akses Internet di Kabupaten Gresik 135
Gambar 29. Kondisi Sumber Air Sekolah di Kabupaten Gresik 136
Gambar 30. Kondisi Toilet Sekolah di Kabupaten Gresik 137
Gambar 31. Kondisi Laboratorium 138
Gambar 32. Pagu BOSDA Kabupaten Gresik 154
Gambar 33. Angka Kelulusan SD/MI Sederajat 180
Gambar 34. Angka Kelulusan SMP/MTs Sederajat 181
Gambar 35. Pie chart Data Total Responden Kabupaten Gresik 184
Gambar 36. Grafik Radar persepsi mutu pendidikan dari sisi murid dan masyarakat 189
Gambar 37. Pie chart total data Responden dari sisi Penyedia dan Pengguna 192
Gambar 38. Histogram Indeks Kepuasan Masyrakat 196

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Kuantitatif 274
Lampiran 2. Peserta Didik 275
Lampiran 3. Tenaga Pendidik dan Kependidikan 276
Lampiran 4. Hasil Survei 277
Lampiran 5. FGD 284
Lampiran 6. Peta Sebaran Sekolah/Lembaga 285
Lampiran 7. Matriks Roadmap per Tahun 295
Lampiran 8. Template Evaluasi Pelaksanaan RIPPD Kabupaten Gresik 296
Lampiran 9. Klasifikasi Sekolah Penerima BOSDA 297

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Gresik, sebagai daerah yang terus berkembang, telah menetapkan visi **"Gresik Baru yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Akhlakul Karimah"**. Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis untuk mewujudkan visi tersebut melalui upaya perbaikan dalam pengelolaan pendidikan oleh pemangku kebijakan yang berfokus pada cara terbaik untuk mewujudkan mutu pendidikan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang handal, baik dalam bidang akademis, sosio-personal, maupun vokasional.

Perkembangan masyarakat demikian dinamis dan kompleks pada berbagai aspek kehidupan berimplikasi pada bergesernya persepsi masyarakat terhadap kebutuhan dan tingkat kepuasan layanan pendidikan. Selain itu, *trend* perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi salah satu aspek yang berkembang dinamis berimplikasi pada kebutuhan Sumber Daya Manusia. Kebutuhan dan perkembangan masyarakat dengan *kekhasannya* menuntut adanya sinkronisasi antara input, proses dan luaran penyelenggaraan pendidikan yang dirumuskan dalam Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Daerah (RIPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki kewenangan dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan konteks permasalahan penyelenggaraan pendidikan yang berkembang di Kabupaten Gresik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan tindak lanjut dari perwujudan tujuan pendidikan nasional yang diselenggarakan pada setiap daerah. Seluruh pengelolaan sub urusan termasuk unsur dan fungsi pengelolaan jenjang pendidikan menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan serta akreditasi secara nasional.

Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Daerah (RIPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah diharapkan dapat memetakan arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan secara realistik, dan sistemik untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang terarah,

bermutu, inklusif, dan berdaya saing. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan, strategi, serta peta jalan pendidikan yang sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Kebijakan Nasional, yang mencakup analisis kondisi pendidikan saat ini, perumusan tujuan yang selaras dengan misi daerah, serta strategi pengembangan pendidikan yang adaptif terhadap tantangan lokal dan global. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan RIPPD ini membutuhkan proses panjang yang mengakomodasi aspirasi segenap pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan untuk memetakan potensi dan konteks permasalahan pendidikan *existing* dan proyeksi dalam rentang waktu Tahun 2025-2029. Selain itu, Dokumen RIPPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun secara sistematis dengan memuat *milestone* yang menggambarkan langkah-langkah strategis, operasional disertai dengan indikator-indikator mutu pendidikan yang jelas, terukur dan berkelanjutan.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Daerah (RIPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

a. Menyediakan pedoman strategis yang komprehensif dalam pengembangan sektor pendidikan di Kabupaten Gresik;
b. Menghasilkan acuan bagi Pemerintah Daerah, terutama Dinas terkait, serta pihak-pihak lain dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang efektif dan efisien;
c. Menciptakan sistem pendidikan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

2. Manfaat

Penelitian yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Daerah (RIPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 bermanfaat memberikan gambaran secara komprehensif kepada **Pemerintah Kabupaten Gresik dan Organisasi Perangkat Daerah** terkait, tentang:

a. Analisis kondisi aktual tantang sistem pendidikan, seperti jumlah sekolah, kualitas guru, infrastruktur, dan akses layanan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran;

b. Identifikasi masalah dan kebutuhan spesifik dengan pemetaan potensi dan kendala daerah, rumusan isu utama seperti pemerataan akses, kualitas guru, atau ketimpangan fasilitas antar wilayah di Kabupaten Gresik;
c. Penyusunan strategi dan program berbasis data sebagai dasar dalam menyusun visi, sasaran, kebijakan, dan program yang realistis, relevan dengan kebutuhan;
d. Penetapan indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

C. Ruang Lingkup Dokumen

Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Daerah (RIPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dirancang untuk jangka waktu lima (5) tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan visi dan misi Kabupaten Gresik, yang kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan strategis untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang terarah, bermutu, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ruang lingkup penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Daerah (RIPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 mencakup:

1. **Analisis Kondisi Eksisting (data kuantitatif dan kualitatif),** memuat (1) kajian terhadap kebijakan nasional, regional, dan lokal terkait pendidikan, (2) analisis data pendidikan (jumlah siswa, guru, sarana prasarana, capaian akademik, dll), dan (3) identifikasi permasalahan dan tantangan pendidikan saat ini;
2. **Analisis SWOT**, Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, tantangan penyelenggaran pendidikan saat ini;
3. **Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pendidikan**, serta **Strategi** peningkatan mutu, akses dan pemerataan pendidikan;
4. **Penyusunan *Road Map***, yang meliputi: (1) pengembangan pendidikan dalam jangka Tahun 2025-2029 dan (2) penyusunan program unggulan dan *road map* implementasi;
5. **Pemetaan Kebutuhan dan Proyeksi Pendidikan**, yang meliputi: (1) kebutuhan guru, (2) fasilitas pendidikan, (3) dana pendidikan ke depan, dan (4) proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah;

6. **Penyusunan Monitoring dan Evaluasi**, yaitu menghasilkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Pendidikan secara berkala.

D. Metodologi Penyusunan

1. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif-Regulatif

Pendekatan ini digunakan untuk memastikan RIPPD selaras dengan kebijakan nasional dan regulasi daerah. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian dokumen (*document review*) terhadap regulasi dan rencana pembangunan di level nasional dan daerah (Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik);

b. Pendekatan Empiris (*Evidence-Based Policy*)

Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan dan profil pendidikan Kabupaten Gresik yang komprehensif (*base* line) berdasarkan data faktual, baik kuantitaif maupun kualitatif;

c. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan rencana pembangunan yang inklusif dan kontekstual dengan melibatkan dan mengakomodasi aspirasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui *Focused Group Discussion (*FGD) dan forum konsultasi publik;

d. Pendekatan Sistemik

Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi pendidikan di Kabupaten Gresik sebagai sistem yang saling terkait, melalui Analisis sistem Pendidikan (*Education System Analysis*) yang mencakup: (1) *Input* (sumber daya, guru, sarana); (2) *Process* (metode pembelajaran, manajemen sekolah); (3) *Output* (Lulusan, kompetensi lulusan); dan (4) *Outcome* (daya saing daerah, pembangunan manusia);

e. Pendekatan Perencanaan Strategis

Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama RIPPD Kabupaten Gresik dengan menghubungkan kondisi eksisting dengan visi jangka panjang melalui: (1) *SWOT Analysis*; (2)

Trend Analysis (Proyeksi kebutuhan pendidikan 5–10 tahun ke depan); (3) *Gap Analysis* (Identifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dengan target).

f. Pendekatan Multidisipliner

Pendekatan ini menghasilkan perpektif yang luas tentang penyelenggaran pendidikan dengan memadukan perspektif lintas ilmu untuk masalah kompleks dengan disiplin ilmu yang beragam, antara lain: (manajemen pendidikan, Ilmu pendidikan, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, Antropologi, serta Teknologi pendidikan; Administrasi publik;

2. Tahapan Penelitian

Penelitian dalam rangka penyusunan Dokumen RIPPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 direncanakan selama tiga (3) bulan, terhitung mulai awal Agustus hingga 15 Oktober 2025. Tahapan kegiatan dengan waktu dan urutan pelaksanaannya dideskripsikan pada Tabel 1.1 sebagai acuan sekaligus pengendalian capaian luaran dalam setiap tahapan.

Tabel 1.1 Tahapan Kegiatan Penyusunan RIIPD

TAHAP KEGIATAN	AGUSTUS					SEPTEMBER					OKTOBER				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Persiapan															
Pembentukan Tim dan Pembagian Tugas															
Penyusunan desain penelitian															
Persiapan Inventarisasi dan Identifikasi data															
Pengumpulan Data Sekunder															
Penyusunan Laporan Pendahuluan															
Paparan dan penyerahan Laporan Pendahuluan															
Pengumpulan Data Primer															
Pengolahan dan Analisis Data Sekunder															
Pengolahan dan Analisis Data Primer															
Focused Group Discussion (FGD)															
Tahap Analisis Data dan Prioritas Permasalahan															
Analisis SWOT															
Tahap Perumusan Rencana dan Arah Strategi															
Penyusunan *road map* Pembangunan Pendidikan															
Tahap Perumusan Indikator Utama Pembangunan Pendidikan															
Tahap Perumusan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RIPPD															
Tahap Konsultasi Publik															
Tahap Finalisasi Penyusunan RIPPD															
Penyusunan Laporan Akhir															
Paparan dan Penyerahan Laporan Akhir															

3. Sumber Data Penelitian

Kondisi eksisting pembangunan pendidikan dalam bentuk profil pembangunan pendidikan Kabupaten Gresik dapat dideskripsikan secara komprehensif melalui kombinasi kajian data sekunder, survei primer, wawancara dan/I (FGD), observasi lapangan, dan analisis statistik-proyeksi. Data sebagaimana dimaksud, antara lain:

a. **Data DAPODIK, PD SERU, EMIS** untuk memperoleh data: (1) Jumlah penduduk usia sekolah (PAUD, SD, SMP) per kecamatan/desa; (2) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang; (3) distribusi geografis (jarak dan aksesibilitas ke satuan pendidikan); (4) Profil sosial-ekonomi keluarga (pendapatan rata-rata, pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan);

b. **Data Infrastruktur dan Sarana Prasarana**, meliputi: (1) jumlah dan sebaran sekolah (PAUD, SD, SMP) per kecamatan/desa; (2) kapasitas ruang kelas (ideal dan real), Ketersediaan fasilitas penunjang (sanitasi, air bersih, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, ruang guru, ruang UKS, jamban); (3) kondisi bangunan (umur, status kepemilikan, kebutuhan rehabilitasi); dan aset teknologi (komputer, internet, proyektor, *e-learning*);

c. **Data Sumber Daya Manusia,** meliputi: (1) jumlah guru dan tenaga kependidikan per jenjang, kualifikasi akademik dan sertifikasi guru; (2) rasio siswa – guru; (3) kebutuhan formasi dan redistribusi guru; (4) program pelatihan dan pengembangan profesi yang sudah berjalan;

d. **Data Mutu dan Capaian Pembelajaran**, meliputi: (1) hasil *assesment*; (2) anka kelulusan; (3) capaian indikator mutu (literasi, numerasi dan karakter); (4) prestasi akademik dan non-akademik di tingkat Kabupaten s.d Nasional.

e. **Data Kurikulum dan Program Pembelajaran**, meliputi (1) buku dan modul/bahan ajar yang tersedia; (2) realisasi jam efektif pembelajaran; (3) program unggulan (misalnya inklusi, vokasi, *bilingual*).

f. **Data Anggaran dan Pembiayaan**, meliputi: (1) Alokasi Dana Pendidikan (APBD kabupaten, BOS, DAK, Hibah, CSR); (2) realisasi belanja per komponen (pegawai, operasional, pemeliharaan, pengembangan); (3) efisiensi penggunaan anggaran (*unit cost* per siswa); serta (4) kebutuhan tambahan untuk program prioritas.

g. **Data Kebijakan dan Regulasi**, meliputi: (1) Dokumen RPJMD, RPJPD, Renstra Dinas Pendidikan; (2) Peraturan Perundang-undangan terkait pendidikan (UU, PP, Permendikbudristek, Permendikbud Dasmen, PERBUP), dan (3) Standar Nasional Pendidikan dan Standar Internasional (jika relevan).

h. **Data Kebutuhan dan Aspirasi *Stakeholders***, meliputi: (1) survei kepuasan dan aspirasi siswa, orang tua, guru, dan masyarakat; dan (2) hasil FGD dengan Komisi/Badan Pendidikan dewan guru, kepala sekolah, organisasi masyarakat;

i. **Data *Trend* dan Proyeksi** berupa proyeksi jumlah siswa hingga 5 tahun ke depan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer sangat penting mendukung kpenyusunan Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Daerah (RIPPD) Kabupaten Gresik karena secara otentik, terkini, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui:

a. **Observasi**, dengan sasaran objek antara lain: kondisi fisik sekolah (gedung, sanitasi, ruang kelas, akses jalan), ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pendidikan, Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, kondisi lingkungan belajar dan suasana kelas;

b. **Wawancara dan *Focused Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholders***, dengan fokus: (1) aspirasi dan harapan orang tua, siswa, guru, dan kepala sekolah; (2) pandangan pemangku kepentingan (Dinas Pendidikan, DPRD, Bappeda, Dewan Pendidikan, CSR, tokoh masyarakat); serta (3) isu dan tantangan spesifik di lapangan;

c. **Studi Dokumentasi** dalam penelitian untuk penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Daerah (RIPPD) merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai dokumen resmi maupun non-resmi yang relevan dengan pembangunan pendidikan di Kabupaten Gresik. Studi dokumentasi ini dilakukan bermanfaat untuk : (1) melengkapi hasil survei, wawancara, maupun FGD; (2) memberikan dasar legal-formal penyusunan

RIPPD agar selaras dengan kebijakan nasional dan daerah; (3) menjadi bahan untuk analisis kesenjangan (gap analysis) antara kondisi eksisting dan target pembangunan pendidikan. Adapun dokumen yang akan ditelaah antara lain: (1) Dokumen peraturan perundangan yang relevan; (2) Dokumen perencanaan nasional: (3) Dokumen daerah: RPJPD, RPJMD, Renstra Dinas Pendidikan, Peraturan Bupati/Gubernur terkait pendidikan, dokumen statistik pendidikan daerah; (4) Data sekunder: laporan hasil akreditasi, laporan BOS, data APK/APS/AMH, profil sekolah, laporan program pendidikan khusus/inklusi, hasil evaluasi kinerja pendidikan; dan (5) Studi dan laporan penelitian sebelumnya: kajian akademik, riset perguruan tinggi, hasil survei LSM/NGO terkait pendidikan.

d. **Survei dan Kuesioner** untuk menggali data terkait: (1) kepuasan masyarakat terhadap Layanan pendidikan di Kabupaten Gresik; (2) kebutuhan pengembangan guru dan pelatihan; (3) hambatan akses pendidikan (biaya, transportasi, jarak); dan (4) persepsi Mutu Pendidikan**.** Data kepuasan masyarakat dapat memberikan gambaran langsung tentang kualitas dan keefektifan layanan pendidikan yang dirasakan masyarakat. Beberapa manfaat utamanya antara lain: (a) Evaluasi Kualitas Layanan Pendidikan, seperti kesesuaian layanan pendidikan dengan harapan masyarakat; (b) Dasar identifikasi masalah dan kesenjangan; (c) bahan penyusunan strategi peningkatan layanan pendidikan; (d) meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas; (e) indikator monitoring dan evaluasi; serta (f) memperkuat Relevansi RIPPD dengan SDGs & visi daerah. Sejalan dengan data kepauasan masyarakat, data persepsi mutu pendidikan dimensinya sling beririsan. Sementara survei untuk kebutuhan pengembangan guru dan pelatihan digunakan untuk menghasilkan data (a) Jumlah guru yang membutuhkan pelatihan sesuai bidang; (b) persentase guru yang pernah/ belum pernah mengikuti pelatihan dalam 1–5 tahun terakhir; dan (c) tingkat kepuasan guru terhadap pelatihan yang sudah ada. variabel kepuasan masyarakat, persepsi mutu, dan kebutuhan pengembangan dan pelatihan guru dijabarkan dengan merujuk pada teori mutu pendidikan yang menekankan bahwa mutu pendidikan harus direncanakan, dikendalikan, dan terus diperbaiki secara

sistematis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Juran, 1999). Sementara dalam konsep sekolah efektif diuraikan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mengelola kepemimpinan, iklim, pembelajaran, dan evaluasi secara terarah untuk memastikan semua siswa memperoleh hasil belajar optimal (Scheerens, J, (2000). Sementara survei hambatan akses pendidikan (biaya, transportasi, jarak untuk meggali data: (a) persentase anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah karena biaya; (b) Jumlah/proporsi peserta didik yang mengalami kesulitan transportasi ke sekolah; (c) Rata-rata jarak tempuh ke sekolah (km/menit) dan dampaknya pada kehadiran; dan (d)Perbandingan hambatan antar wilayah (desa-kota, pesisir-dataran tinggi). Kisi-kisi instrumen penelitian diuraikan pada Tabel di halaman berikut.

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK 2025-2029

A. Tabel 1.2. Kisi- Kisi Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pendidikan

Sub Variabel	Indikator	Item Pernyataan
Aksesibilitas layanan pendidikan	Kemudahan memperoleh informasi mengenai layanan pendidikan	Kejelasan informasi yang diberikan pihak sekolah/pengelola pendidikan.tentang penerimaan Peserta Didik baru, jadwal kegiatan, atau kebijakan sekolah.
		Ketersediaan media informasi yang memadai (papan pengumuman, *website*, media sosial, brosur, dan media lainnya) yang mudah diakses.
		Ketersediaan layanan administrasi yang cepat dan responsif.
		Informasi yang diberikan jelas, transparan, dan dapat dipahami oleh masyarakat.
	Kemudahan dan keterjangkauan masyarakat dalam mengakses fasilitas pendidikan.	Kemudahan menjangkau lokasi sekolah dengan jarak, akses jalan dan transportasi yang mendukung
		Keterjangkauan biaya pendidikan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat
Kualitas layanan pendidikan	Keterbukaan sistem komunikasi dan hubungan sekolah dengan orang tua/masyarakat.	Sekolah menyampaikan informasi kegiatan, kebijakan, dan program dengan baik kepada orang tua dan masyarakat
		Konsistensi pelaksanaan layanan sesuai aturan dan standar layanan.
		Orang tua mudah berkomunikasi dengan guru/kepala sekolah.
		Sekolah terbuka dalam menerima kritik dan saran.
		Masyarakat/orang tua dilibatkan dalam pengembangan program dan kegiatan sekolah termasuk pengembangan kurikulum.
		Sekolah membangun kerja sama dengan lingkungan sekitar sekolah.
		Waktu penyelesaian layanan administrasi cepat dan tepat.
		Kesopanan, keramahan, dan responsi tenaga kependidikan (staf administrasi).

Sub Variabel	Indikator	Item Pernyataan
	Kualitas Proses pembelajaran	Guru memiliki kompetensi mengajar yang baik dan profesional
		Guru mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik.
		Guru memberikan layanan yang ramah, adil, dan inspiratif bagi Peserta Didik.
		Metode pembelajaran bervariasi, atraktif dan sesuai dengan karakteristik Peserta Didik.
		Guru memanfaatkan teknologi, media, atau alat peraga dalam proses belajar.
		Pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan.
		Sistem penilaian dilaksanakan secara adil, transparan, dan objektif.
		Umpan balik hasil belajar diberikan secara jelas kepada Peserta Didik dan orang tua.
		Evaluasi tidak hanya berbasis angka, tetapi juga mengukur sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
	Relevansi Kurikulum	Kurikulum yang digunakan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik.
		Kurikulum mampu membekali Peserta Didik dengan pengetahuan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
		Kurikulum menekankan pembelajaran yang sesuai dengan tantangan zaman (teknologi, globalisasi).
		Kurikulum yang diterapkan mengakomodir pengembangan minat dan bakat peserta didik.
		Pelaksanaan kurikulum mendukung kesiapan Peserta Didik melanjutkan pendidikan/karier.
	Capaian/Hasil Pendidikan	Tingkat kepuasan terhadap hasil pendidikan berupa capaian prestasi akademik Peserta Didik
		Tingkat kepuasan terhadap hasil pendidikan berupa capaian prestasi non-akademik (minat dan bakat) Peserta Didik
		Tingkat kepuasan terhadap hasil pendidikan berupa kararkter Peserta Didik

Sub Variabel	Indikator	Item Pernyataan
Kualitas sarana dan prasarana	Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dll)	Ketersediaan ruang kelas yang memadai sesuai jumlah peserta didik.
		Ketersediaan fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, ruang praktik, ruang guru, dan ruang administrasi dan ruang ibadah.
		Ketersediaan sarana olahraga, kesenian, dan ruang terbuka hijau.
		Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatn ekstra kurikuler.
		Ketersediaan fasilitas belajar seperti buku, alat peraga, komputer, jaringan internet, LCD proyektor, dll.
		Ketersediaan fasilitas khusus bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus (aksesibilitas).
	Kualitas dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai	Kondisi bangunan sekolah yang layak, aman, dan nyaman.
		Sarana dan prasarana mendukung implementasi kurikulum dan kegiatan pembelajaran
		Fasilitas sesuai dengan jumlah Peserta Didik, tidak terlalu padat atau kurang terpakai.
		Kualitas fasilitas belajar seperti buku, alat peraga, komputer, jaringan internet, LCD proyektor, dll.
		Kebersihan, pencahayaan, ventilasi, serta sanitasi sekolah yang baik.
		Sarana dan prasrana termasuk perabotan (meja, kursi, papan tulis) yang sesuai standar ergonomis dan dalam kondisi baik dan terawat dengan baik.
	Keamanan dan Keselamatan (*Safety and Security*)	Gedung dan sarana sesuai standar keamanan (tahan gempa, ventilasi, instalasi listrik aman).
		Ketersediaan fasilitas keselamatan seperti alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, dan pagar sekolah.
		Lingkungan sekolah bebas dari potensi bahaya dan mendukung rasa aman.
Keadilan dan inklusivitas	Perlakuan adil tanpa diskriminasi terhadap semua Peserta Didik	Lingkungan sekolah ramah bagi semua Peserta Didik tanpa diskriminasi.

Sub Variabel	Indikator	Item Pernyataan
		Peserta didik memperoleh hak layanan pendidikan tanpa diskriminasi gender, ekonomi, atau latar belakang.
		Kesempatan belajar sama bagi Peserta Didik berprestasi maupun kurang berprestasi
		Sekolah melindungi Peserta Didik dari perundungan (*bullying*) dan diskriminasi

Catatan:

- Instrumen ini bisa dianalisis secara kuantitatif (*mean*, persentase, Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM);
- Skala yang digunakan adalah skala likert 1 - 4 (1 = Tidak Puas; 2 = Cukup Puas; 3 = Puas; 4 = Sangat Puas

B. Tabel 1.3. Persepsi Mutu Pendidikan

Pandangan Mutu Pendidikan	Bagaimana pendapat Saudara tentang **mutu pendidikan** sekolah di wilayah Kabupaten Gresik saat ini?
Keunggulan Pendidikan	Apa saja **keunggulan pendidikan** di sekolah/madrasah di Kabupaten Gresik saat ini?
Faktor kunci mutu Pendidikan	Menurut Saudara, **faktor utama** apa yang paling menentukan mutu pendidikan di Kabupaten Gresik?
Harapan dan Saran	Apa **harapan** dan saran Saudara untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gresik di masa yang akan datang?

Catatan:

Instrumen tentang persepsi mutu pendidikan dibuat dalam bentuk pertanyaan terbuka yang akan digabung dengan instrumen kepuasan terhadap layanan. pendidikan.

C. Tabel 1.4. Akses Pendidikan (Biaya, Transportasi, Jarak)

Sub Variabel	Indikator	Item Pernyataan
Aspek Biaya	Keterjangkauan biaya pendidikan	Biaya sekolah (SPP/iuran lain) menjadi beban berat bagi keluarga saya.
		Biaya pembelian buku, seragam, dan alat tulis terasa memberatkan.
		Biaya kegiatan tambahan sekolah (ekstrakurikuler, ujian, dll.) sulit dipenuhi.
		Keluarga sering menunda pembayaran biaya sekolah karena keterbatasan ekonomi
Aspek Transportasi	Ketersediaan alat transportasi	Transportasi menuju sekolah tidak tersedia secara memadai di wilayah saya.
		Ongkos/biaya transportasi ke sekolah terlalu mahal bagi keluarga.
		Keterbatasan sarana transportasi membuat anak sering terlambat atau tidak masuk sekolah.
		Fasilitas transportasi umum menuju sekolah tidak aman/nyaman untuk anak.
Aspek Jarak	Keterjangkauan jarak rumah ke lokasi sekolah	Jarak sekolah dari rumah terlalu jauh.
		Perjalanan menuju sekolah memerlukan waktu lama.
		Jarak yang jauh membuat anak sering merasa lelah atau enggan berangkat sekolah.
		Lokasi sekolah sulit dijangkau terutama saat cuaca buruk (hujan, banjir, dll.).
Pertanyaan terbuka	1. Menurut Saudara, apa hambatan terbesar yang dialami dalam mengakses pendidikan di wilayah Anda? 2. Apa solusi yang paling efektif untuk mengatasi hambatan tersebut menurut Saudara?	

Catatan:

- Skala yang digunakan adalah skala likert 1 - 4 (1 = Tidak Setuju; 2 = Cukup Setuju; 3 = Setuju; 4 = Sangat Setuju;

D. Tabel 1.5. Kebutuhan Pengembangan dan Pelatihan Guru

Sub Variabel	Indikator	Item Pernyataan
Pengembangan Guru	Pengembangan Karir Guru	Saya membutuhkan pelatihan tentang pengembangan diri untuk jenjang karier guru dan sertifikasi.
		Saya memerlukan pelatihan untuk mempersiapkan diri dalam kenaikan pangkat/golongan.
Pelatihan Guru	Pelatihan Kurikulum dan Pembelajaran	Saya membutuhkan pelatihan tentang implementasi kurikulum terbaru
		Saya memerlukan pelatihan penyusunan perangkat perencanaan pembelajaran seperti modul ajar yang kreatif dan sesuai kebutuhan Peserta Didik.
		Saya membutuhkan pelatihan **pendekatan, model dan strategi** pembelajaran inovatif
		Saya memerlukan pelatihan tentang pembelajaran berpusat pada Peserta Didik.
	Pelatihan Teknologi dan Media Pembelajaran	Saya membutuhkan pelatihan penggunaan teknologi digital (aplikasi belajar, *e-learning*, *Artificial Intelegence*, dan sejenisnya).
		Saya memerlukan pelatihan pengembangan media pembelajaran berbasis *Information and Technology* (IT).
		Saya membutuhkan pelatihan dalam memanfaatkan *platform* daring untuk pembelajaran dan evaluasi.
	Pelatihan Asesmen dan Evaluasi	Saya membutuhkan pelatihan tentang asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif.
		Saya memerlukan pelatihan penyusunan instrumen penilaian berbasis HOTS.
		Saya membutuhkan pelatihan tentang asesmen non-akademik (karakter, soft skills yang relevan profil lulusan 8 dimensi).
	Pelatihan Pengembangan Profesional Guru	Saya membutuhkan pelatihan penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas.

Sub Variabel	Indikator	Item Pernyataan
		Saya membutuhkan peningkatan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan yang saya ampu.
		Saya memerlukan pelatihan tentang kolaborasi dalam komunitas belajar guru (MGMP/KKG).
		Saya membutuhkan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kelas.
		Saya membutuhkan pelatihan dalam komunikasi efektif dengan Peserta Didik, orang tua, dan masyarakat.
Pertanyaan terbuka	1. Menurut Saudara, keterampilan atau kompetensi apa yang penting untuk ditingkatkan dalam mendukung tugas Anda sebagai guru? 2. Apa kesulitan atau tantangan utama yang Saudara hadapi dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari? 3. Bidang pengetahuan atau keterampilan apa yang ingin Saudara kuasai lebih dalam untuk menunjang kinerja mengajar?	

Catatan:

- Skala yang digunakan adalah skala likert 1 - 4 (1 = Tidak Membutuhkan; 2 = Cukup Membutuhkan; 3 = Membutuhkan; 4 = Sangat Membutuhkan;

MATRIKS METODE PENELITIAN
PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

Tabel 1.6. Matriks Ringkasan Metrode Penelitian

LUARAN DATA	METODE	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	SUMBER DAN JENIS DATA	
			PRIMER	SEKUNDER
Transkrip/*field note* kondisi fisik sekolah (gedung, sanitasi, ruang kelas, akses jalan)	Kualitatif	Observasi	Data pengamatan infrastruktur sarana dan prasarana	
Transkrip/*field note* pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran	Kualitatif	Observasi	Data pengamatan proses Pembelajaran	
Kondisi lingkungan belajar dan suasana kelas	Kualitatif	Observasi	Data lapangan proses Pembelajaran	
Transkrip/*field note* topik aspirasi dan harapan orang tua, siswa, guru, dan kepala sekolah	Kualitatif	1. Wawancara 2. *Focused Group Discussion* (FGD)	1. Perwakilan Orangtua/Wali Peserta Didik 2. Perwakilan Komite Sekolah 3. Guru (Perwakilan Guru per Wilayah Kerja pada semua jenjang, baik swasta, maupun negeri) 4. Kepala Sekolah (Perwakilan KS per Wilayah Kerja pada semua jenjang, baik swasta, maupun negeri)	
Transkrip/*field note* pandangan pemangku kepentingan tentang pendidikan mencakup *input*, *process*, output dan *outcome*	Kualitatif	1. Wawancara 2. *Focused Group Discussion* (FGD)	1. Dinas Pendidikan 2. DPRD, 3. Bappeda, 4. Dewan Pendidikan,	

LUARAN DATA	METODE	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	SUMBER DAN JENIS DATA	
			PRIMER	SEKUNDER
Transkrip/*field note* pemetaan perspektif *stakeholder* terhadap **lsu dan tantangan spesifik di lapangan**			5. *CSR*, tokoh masyarakat), 6. Perwakilan Komite Sekolah per Wilayah Kerja,	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan di Kabupaten Gresik	Kuantitif	*Survey* (Instrumen Kuesioner)	1. **Penerima Layanan** Pendidikan (Peserta didik, Orang tua/Wali Peserta Didik); 2. **Penyedia Layanan Pendidikan** ▪ Kepala Sekolah, ▪ Guru, ▪ Jajaran Dinas Pendidikan, ▪ Cabang Dinas Pendidikan, ▪ Kemenag Kabupaten Gresik); ▪ Pengawas Sekolah/Madrasah 3. **Pengguna Luaran Pendidikan** ▪ Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA), ▪ Representasi masyarakat umum)	
Data orientasi pada **Persepsi Mutu Pendidikan** (Berisisan dengan IKM terhadap layanan pendidikan)	Kuantitatif	*Survey* (Instrumen Kuesioner)		
Jumlah/proporsi peserta didik yang mengalami **Hambatan akses pendidikan** (biaya, transportasi, jarak)	Kuantitatif	*Survey* (Instrumen Kuesioner)	1. Peserta Didik 2. Orang tua/Wali Peserta Didik	

LUARAN DATA	METODE	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	SUMBER DAN JENIS DATA	
			PRIMER	SEKUNDER
1. Jumlah dan jenis **Kebutuhan pengembangan guru dan pelatihan** 2. Persentase guru yang pernah/ belum pernah mengikuti pelatihan dalam 3–5 tahun terakhir	Kuantitatif	*Survey* (Instrumen Kuesioner)	Representasi Guru pada semua jenjang	
Jumlah penduduk usia sekolah (PAUD, SD, SMP) per kecamatan/desa	Kualitatif	Studi Dokumentasi		Data DAPODIK, PD SER, EMIS, dan *Tracer Study* dan BPS
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni **(APM)** menurut jenjang	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Distribusi geografis jarak dan aksesibilitas ke satuan pendidikan)	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Profil sosial-ekonomi keluarga (pendapatan rata- rata, pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan)	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Tracer Study (dampak hasil pendidikan guna sinkronisasi dengan dunia kerja)	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Jumlah dan sebaran sekolah (PAUD, SD, SMP) per kecamatan/desa	Kualitatif	Studi Dokumentasi		BPS dan Dinas Pendidikan : Data Infrastruktur sarana dan prasarana
Kapasitas ruang kelas (ideal dan riil)	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Ketersediaan fasilitas penunjang (sanitasi, air bersih, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, ruang guru, ruang UKS, jamban)	Kualitatif	Studi Dokumentasi		Dinas Pendidikan : Data Infrastruktur, sarana dan prasarana
Kondisi bangunan (umur, status kepemilikan, kebutuhan rehabilitasi)	Kualitatif	Studi Dokumentasi		

LUARAN DATA	METODE	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	SUMBER DAN JENIS DATA	
			PRIMER	SEKUNDER
Aset teknologi (komputer, internet, proyektor, *e- learning*)	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Jumlah guru dan tenaga kependidikan per jenjang	Kualitatif	Studi Dokumentasi		Data Sumber Daya Manusia
Kualifikasi akademik dan sertifikasi guru	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Rasio siswa - guru	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Kebutuhan formasi dan redistribusi guru	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Program pelatihan dan pengembangan profesi yang sudah / telah berjalan	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Hasil Assesment	Kualitatif	Studi Dokumentasi		Data Mutu dan Capaian Pembelajaran
Angka kelulusan	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Capaian indikator mutu (literasi, numerasi)	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Prestasi akademik dan non-akademik di tingkat Kabupaten / Nasional	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Buku dan modul/bahan ajar yang tersedia	Kualitatif	Studi Dokumentasi		Data Kurikulum dan Pembelajaran
Realisasi jam efektif pembelajaran	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Program unggulan (misalnya, inklusi, vokasi, *bilingual*)	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Alokasi Dana Pendidikan (APBD Kabupaten, BOS, **OAK,** Hibah, CSR)	Kualitatif	Studi Dokumentasi		Data Anggaran dan Pembiayaan
Realisasi belanja per komponen (pegawai, operasional, pemeliharaan, pengembangan)	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Efisiensi penggunaan anggaran (*unit cost* per siswa)	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Kebutuhan tambahan untuk program prioritas	Kualitatif	Studi Dokumentasi		

LUARAN DATA	METODE	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	SUMBER DAN JENIS DATA	
			PRIMER	SEKUNDER
Dokumen RPJMD, RPJPD, Renstra Dinas Pendidikan	Kualitatif	Studi Dokumentasi		Data Kebijakan dan Regulasi
Peraturan perundang-undangan terkait pendidikan (UU, PP, Permendikbudristek, PERBUP)	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Standar Nasional Pendidikan dan standar intemasional (jika relevan)	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Dokumen Strategi Pengembangan Pendidikan lnklusif Berbasis Society 5.0	Kualitatif	Studi Dokumentasi		
Proyeksi jumlah siswa hingga 5 tahun ke depan	Kualitatif	Studi Dokumentasi		Data *Trend* dan Proyeksi

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI PENDIDIKAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Gresik secara geografis terletak di bagian barat laut Provinsi Jawa Timur, yang berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Lamongan. dan termasuk dalam kawasan strategis Gerbangkertosusila. Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit dan peta geologi yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kabupaten Gresik memiliki karakteristik geologi yang bervariasi dari utara hingga Selatan meliputi :

a. Bagian utara didominasi oleh satuan batu gamping *Miosen–Pliosen* (Tplr) dan sedimen *Oligo–Miosen* (Tomr), yang terdiri atas batu gamping terumbu, napal, dan batulempung dengan kandungan fosil foraminifera dan koral, menunjukkan lingkungan pengendapan laut dangkal.
b. Zona tengah hingga Kecamatan Sidayu didominasi oleh satuan aluvium muda (Qa) yang tersusun atas kerakal, pasir, dan lanau hasil endapan sungai, mencerminkan proses sedimentasi fluvial yang masih aktif.
c. Wilayah Gresik Kota tersusun atas sedimen *Plio–Plistosen* (Qts) dan batu gamping *Miosen–Pliosen* (Tplr), menandakan adanya transisi dari lingkungan laut ke darat. Sementara itu,
d. Bagian selatan didominasi oleh sedimen *Plistosen* (Qps), sedimen Plio–Plistosen (Qts), serta batuan gunung api *Plio–Plistosen* (Qpv) yang berasal dari aktivitas vulkanik Gunung Ringgit, Beser, dan Lurus.
e. Di Pulau Bawean, penyusun utama wilayah adalah batuan gunung api *Plio–Plistosen* (Qpv) dengan sebagian kecil sedimen Oligo–Miosen (Tomg) dan batu-pasir kuarsa *Miosen–Pliosen* (Tmps), yang menunjukkan proses vulkanik intensif dan pengendapan laut dangkal.

Secara keseluruhan, variasi satuan batuan tersebut memperlihatkan bahwa wilayah Gresik merupakan hasil interaksi kompleks antara proses sedimentasi laut dangkal, fluvial, dan aktivitas vulkanik, yang membentuk karakter geomorfologi beragam mulai dari dataran aluvial hingga perbukitan karst.

Berdasarkan hasil interpretasi peta hidrologi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kondisi hidrologi Kabupaten Gresik didominasi oleh ketersediaan air tanah sedang dengan debit 2–5 liter per detik dan kualitas baik. Sebagian wilayah memiliki potensi air tanah rendah (<2 liter/detik), sedangkan daerah yang dialiri Bengawan Solo menunjukkan debit tinggi (>5 liter/detik). Wilayah utara, khususnya Kecamatan Sidayu, memiliki potensi air payau. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik tersusun atas lempung lunak, dataran aluvial, dan dataran banjir yang tergolong zona likuefaksi sedang. Struktur tanah di wilayah ini berpotensi mengalami pergeseran lateral, penurunan tanah, dan semburan pasir.

Kabupaten Gresik memiliki tingkat kerawanan banjir yang tinggi karena minimnya tutupan hutan dan dominasi wilayah dataran rendah. Terdapat lima kecamatan rawan banjir, yaitu Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti, dan Kedamean. Kondisi ini menunjukkan rendahnya daya dukung lingkungan terhadap pengendalian limpasan air permukaan.

Menurut Fatah dkk (2015) tentang hasil kajian perubahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Gresik pada tahun 2010-2023 yang mana menunjukkan arah perkembangan wilayah Kabupaten Gresik bahwa secara umum terjadi **tren penurunan** luasan RTH di hampir seluruh kecamatan. Meskipun penurunannya relatif kecil, sekitar 1% secara rata-rata, kecenderungan ini menandakan adanya proses alih fungsi lahan dari RTH menjadi kawasan Non-RTH akibat tekanan pembangunan dan pertumbuhan industri. Sementara itu, luas Non-RTH memperlihatkan peningkatan yang sejalan dengan ekspansi aktivitas permukiman, infrastruktur, dan sektor industri.

Secara spasial, Kecamatan Panceng menempati posisi tertinggi dalam proporsi RTH, dengan tutupan hijau mencapai 72–73% dari total wilayahnya, menegaskan perannya sebagai kawasan yang masih sangat alami dan berfungsi penting sebagai penyangga ekologis bagi kabupaten. Wilayah lain seperti Wringinanom, Kebomas, dan Ujungpangkah juga menunjukkan dominasi RTH yang cukup tinggi (31–43%), mencerminkan masih kuatnya fungsi ekologis di kawasan tersebut. Sebaliknya, Kecamatan Duduksampeyan menampilkan

kondisi paling ekstrem dengan hanya sekitar 3% RTH, menunjukkan dominasi lahan non-hijau akibat padatnya aktivitas permukiman dan industri. Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Driyorejo, Manyar, dan Menganti juga memperlihatkan kondisi serupa dengan porsi RTH rendah antara 7–19%.

Beberapa kecamatan mengalami perubahan signifikan, di antaranya Driyorejo yang mengalami penurunan RTH dari 12% menjadi 11%, Gresik dari 20% menjadi 19%, Kebomas dari 33% menjadi 32%, serta Panceng dan Ujungpangkah masing-masing turun sekitar 1%. Walau perubahan tersebut tampak kecil secara angka, tren penurunan yang konsisten menunjukkan tekanan spasial akibat pertumbuhan kawasan industri dan urbanisasi yang semakin intensif.

Secara keseluruhan menegaskan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik, terutama di wilayah dengan RTH sangat rendah. Kecamatan Panceng dan Wringinanom perlu dipertahankan perannya sebagai penyangga ekologis, sementara kawasan dengan dominasi Non-RTH seperti Duduksampeyan, Driyorejo, dan Manyar harus menjadi prioritas dalam kebijakan peningkatan kembali proporsi ruang hijau. Penguatan kebijakan tata ruang dan pengendalian konversi lahan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di masa mendatang.

a. Peta Pesebaran Satuan Pendidikan Di Kabupaten Gresik

Identifikasi kondisi eksisting sebaran satuan pendidikan (sekolah), kesenjangan antar wilayah serta tingkat keteracakupan layanan pendidikan pada semua jenjang terhadap populasi usia sekolah. Analisis ini perlu dilakukan sebagai salah satu langkah strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan pendidikan untuk memastikan pemerataan dan keterjangkauan layanan pendidikan pada semua jenjang di Kabupaten Gresik.

Analisis ini juga berfungsi sebagai dasar dalam penentuan arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Gresik, baik melalui pendirian sekolah baru, optimalisasi sekolah yang sudah ada, maupun penguatan kerja sama dengan satuan pendidikan swasta. Dengan demikian, hasil analisis persebaran sekolah menjadi instrumen penting untuk

mewujudkan akses pendidikan yang merata, inklusif, dan berkeadilan sesuai amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022.

1) Peta Persebaran Taman Kanak-Kanak Sederajat

Peta Persebaran Taman Kanak-Kanak (TK) Sederajat di Kabupaten Gresik menggambarkan distribusi lembaga pendidikan anak usia dini yang meliputi RA (Raudhatul Athfal), TK (Taman Kanak-Kanak), dan UPT TK Negeri di seluruh wilayah administratif Kabupaten Gresik. Pola persebaran lembaga TK sederajat diilustrasikan pada Gambar 1 berikut.

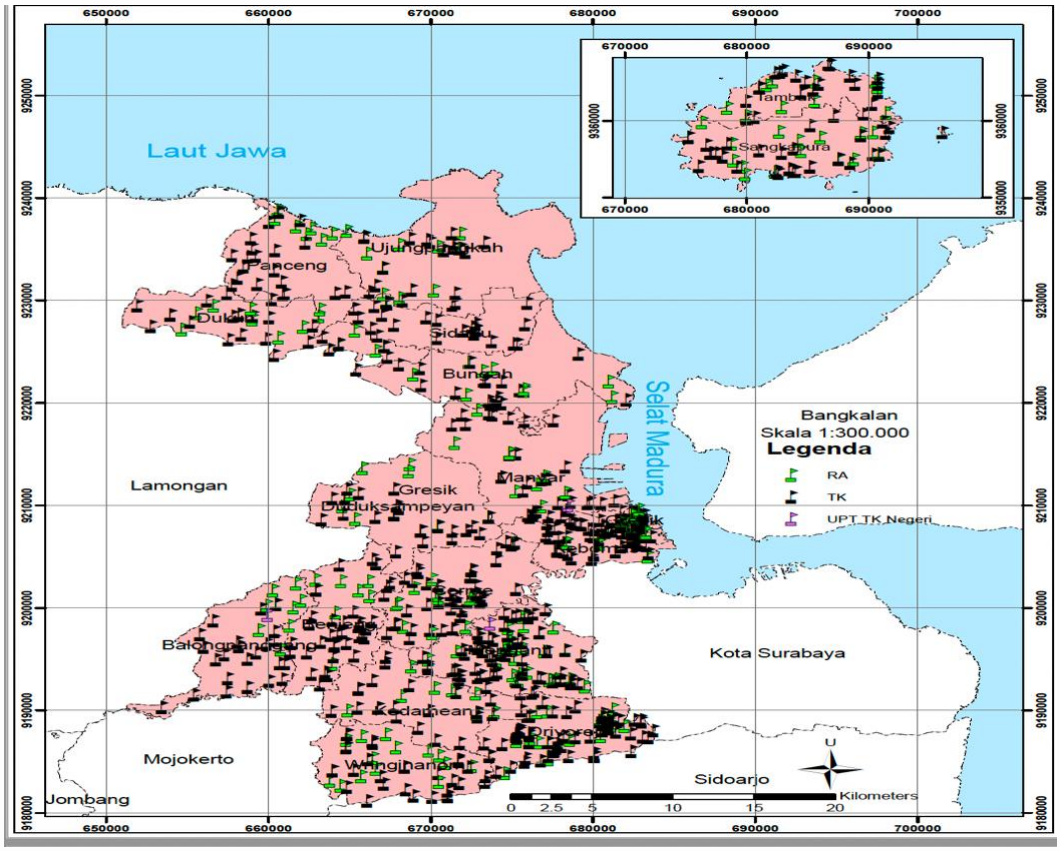

Gambar 1. Peta Persebaran TK Sederajat

Berdasarkan peta tersebut, terlihat bahwa lembaga TK sederajat tersebar cukup merata di seluruh kecamatan, baik di wilayah daratan utama maupun di wilayah kepulauan Pulau Bawean (Kecamatan Tambak dan Sangkapura). Kepadatan lembaga TK paling tinggi tampak di bagian selatan dan tengah Kabupaten Gresik, khususnya di Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Cerme, Menganti, Kedamean, Driyorejo, dan Wringinanom, yang merupakan

wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan kedekatan dengan kawasan perkotaan Surabaya. Sebaliknya, wilayah utara seperti Panceng, Ujungpangkah, dan Sidayu, meskipun tetap memiliki persebaran TK, menunjukkan jumlah lembaga yang relatif lebih sedikit dibandingkan daerah pusat kota.

Pola persebaran lembaga TK ini memperlihatkan kecenderungan mengelompok (*clustered*) di daerah padat penduduk dengan akses transportasi dan infrastruktur pendidikan yang lebih baik. Faktor-faktor yang memengaruhi persebaran tersebut antara lain kepadatan penduduk, tingkat ekonomi masyarakat, serta dukungan pemerintah terhadap pendidikan anak usia dini. Menariknya, pada wilayah Pulau Bawean, persebaran lembaga RA dan TK juga cukup banyak, menunjukkan adanya perhatian terhadap pemerataan akses pendidikan anak usia dini di wilayah kepulauan meskipun secara geografis terpisah dari daratan utama.

Secara keseluruhan, peta ini menunjukkan bahwa pemerataan lembaga pendidikan TK sederajat di Kabupaten Gresik sudah relatif baik, meskipun jumlah dan kerapatan lembaga masih lebih tinggi di daerah perkotaan dan pinggiran Surabaya. Oleh karena itu, hasil analisis ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas serta pemerataan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, terutama di wilayah perdesaan dan pesisir utara agar seluruh anak usia dini di Kabupaten Gresik memperoleh akses pendidikan yang setara.

2) Peta Persebaran Sekolah Dasar Sederajat

Peta Persebaran Sekolah Dasar (SD) Sederajat di Kabupaten Gresik memperlihatkan distribusi lembaga pendidikan dasar yang meliputi SD (Sekolah Dasar), MI (Madrasah Ibtidaiyah), dan UPT SD Negeri di seluruh wilayah administratif Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Satuan pendidikan dasar tersebar sangat merata di seluruh kecamatan, baik di wilayah daratan utama maupun di kepulauan Bawean (Kecamatan Tambak dan Sangkapura). Kepadatan persebaran sekolah dasar tampak tinggi di hampir semua wilayah, terutama di kawasan tengah dan selatan seperti Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Cerme, Menganti, Kedamean, Driyorejo, Benjeng, dan

Wringinanom. Sementara itu, wilayah utara seperti Panceng, Ujungpangkah, Sidayu, dan Bungah juga menunjukkan persebaran sekolah yang cukup banyak meskipun tidak sepadat daerah pusat kota. Pola persebaran lembaga SD sederajat diilustrasikan pada Gambar 2 berikut.

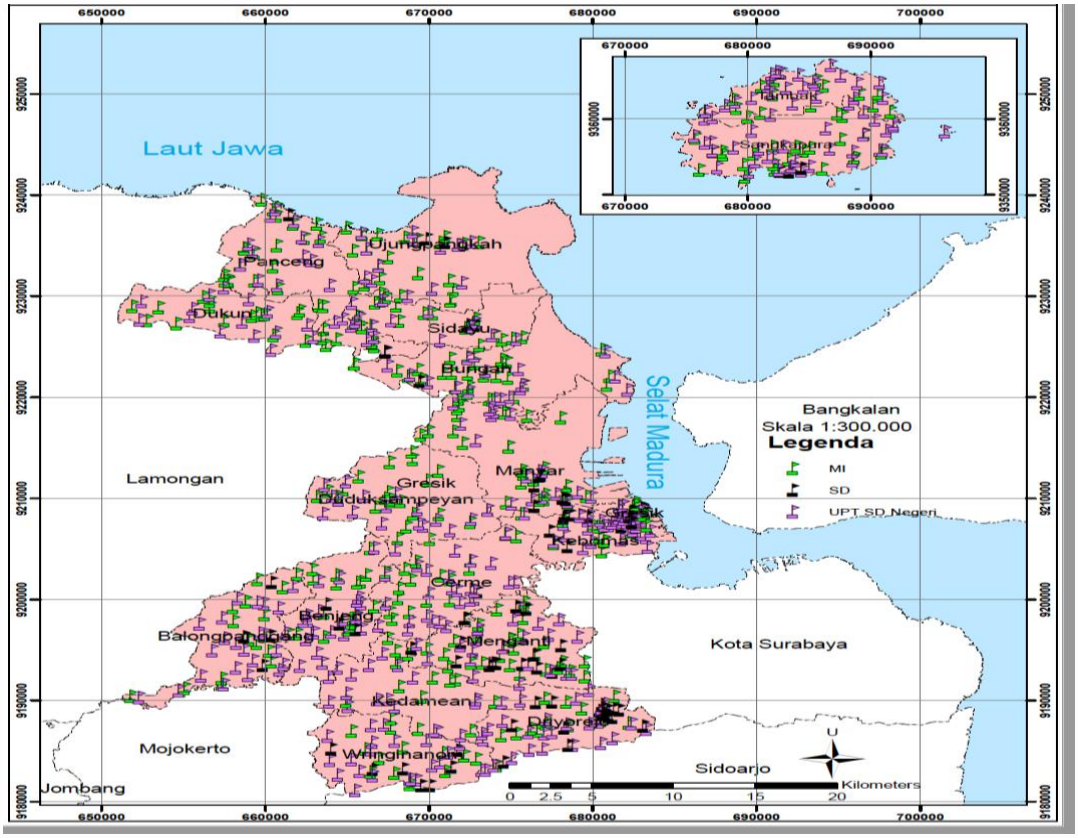

Gambar 2. Peta Persebaran SD Sederajat

Persebaran yang relatif merata ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Kabupaten Gresik sudah cukup baik dan menjangkau sebagian besar wilayah, termasuk daerah pedesaan dan kepulauan. Pola persebaran sekolah dasar cenderung mengikuti persebaran permukiman penduduk, di mana sekolah dibangun di wilayah dengan jumlah populasi yang tinggi dan aksesibilitas transportasi yang memadai. Di wilayah Pulau Bawean, terlihat adanya konsentrasi lembaga SD dan MI di sekitar pusat permukiman Kecamatan Tambak dan Sangkapura, menunjukkan adanya pemerataan layanan pendidikan dasar hingga wilayah kepulauan.

Secara keseluruhan, peta ini menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Gresik telah berhasil mendistribusikan lembaga pendidikan dasar secara merata, baik lembaga umum (SD) maupun lembaga berbasis keagamaan

(MI). Meskipun demikian, daerah dengan topografi sulit atau akses terbatas, seperti bagian utara dan pulau, masih perlu mendapat perhatian dalam hal peningkatan fasilitas, kualitas tenaga pendidik, serta akses sarana pendukung. Oleh karena itu, peta ini dapat menjadi dasar penting bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerataan pendidikan dasar di Kabupaten Gresik agar seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang setara dan berkualitas.

3) Peta Persebaran Sekolah Menengah Pertama Sederajat

Peta Persebaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sederajat di Kabupaten Gresik menampilkan distribusi lembaga pendidikan tingkat menengah pertama yang meliputi SMP (Sekolah Menengah Pertama), MTs (Madrasah Tsanawiyah), dan UPT SMP Negeri. Pola persebaran lembaga SMP sederajat diilustrasikan pada Gambar 3 berikut.

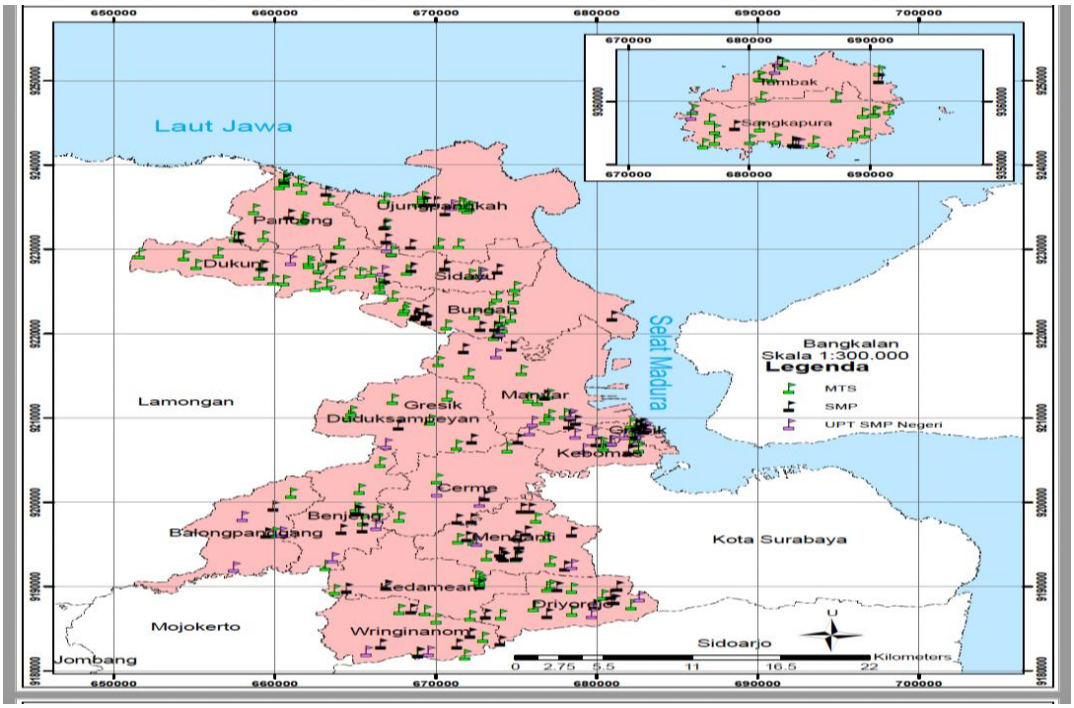

Gambar 3. Peta Persebaran SMP Sederajat

Berdasarkan peta tersebut, terlihat bahwa lembaga SMP sederajat tersebar cukup merata di seluruh kecamatan, baik di wilayah daratan utama maupun di wilayah kepulauan Pulau Bawean (Kecamatan Tambak dan Sangkapura).Persebaran sekolah terlihat lebih padat di bagian selatan dan

tengah Kabupaten Gresik, terutama di Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Cerme, Menganti, Kedamean, Driyorejo, dan Wringinanom, yang merupakan daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan aksesibilitas yang lebih baik karena dekat dengan kawasan perkotaan Surabaya.

Sementara itu, wilayah utara seperti Panceng, Ujungpangkah, dan Sidayu memiliki jumlah lembaga SMP sederajat yang lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah tengah dan selatan, meskipun tetap menunjukkan adanya distribusi sekolah di hampir setiap kecamatan. Pola persebaran ini menunjukkan kecenderungan mengelompok di kawasan padat penduduk, di mana akses transportasi dan fasilitas pendidikan lebih lengkap. Di sisi lain, di Pulau Bawean, persebaran sekolah juga relatif merata dengan keberadaan beberapa SMP dan MTs di dua kecamatan utama, menandakan adanya perhatian terhadap pemerataan layanan pendidikan menengah pertama di wilayah kepulauan meskipun secara geografis terpisah dari daratan utama.

Secara umum, peta ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tingkat menengah pertama di Kabupaten Gresik telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat perbedaan tingkat kepadatan antar wilayah. Persebaran SMP dan MTs yang cukup luas mencerminkan adanya upaya pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah menengah pertama. Namun demikian, peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan di wilayah perdesaan dan kepulauan tetap diperlukan agar seluruh peserta didik di Kabupaten Gresik memperoleh kesempatan belajar yang setara dan bermutu.

4) Peta Persebaran Sekolah Menengah Atas Sederajat

Peta Persebaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat di Kabupaten Gresik menampilkan distribusi lembaga pendidikan tingkat menengah atas yang meliputi SMA (Sekolah Menengah Atas), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), dan MA (Madrasah Aliyah) di seluruh wilayah administratif Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan peta persebaran, terlihat bahwa lembaga pendidikan menengah atas tersebar di hampir seluruh kecamatan, baik di wilayah daratan utama maupun di wilayah kepulauan Pulau Bawean (Kecamatan Tambak dan Sangkapura). Persebaran sekolah paling

padat tampak di wilayah tengah dan selatan Kabupaten Gresik, terutama di Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Cerme, Menganti, Kedamean, Driyorejo, dan Wringinanom, yang merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan kedekatan dengan pusat kegiatan ekonomi serta perkotaan seperti Surabaya.

Sementara itu, di wilayah utara seperti Panceng, Ujungpangkah, Sidayu, dan Bungah, jumlah lembaga SMA sederajat tampak lebih sedikit dibandingkan wilayah lainnya, meskipun tetap terdapat beberapa sekolah yang berfungsi melayani kebutuhan pendidikan masyarakat setempat. Di Pulau Bawean, persebaran lembaga MA, SMA, dan SMK juga cukup merata di dua kecamatan utama, yaitu Tambak dan Sangkapura, yang menjadi pusat kegiatan pendidikan di wilayah kepulauan tersebut. Pola persebaran sekolah menunjukkan kecenderungan mengelompok di kawasan berpenduduk padat dan memiliki aksesibilitas yang baik, sejalan dengan distribusi infrastruktur transportasi dan fasilitas umum. Pola persebaran lembaga SMA sederajat diilustrasikan pada Gambar 4 berikut.

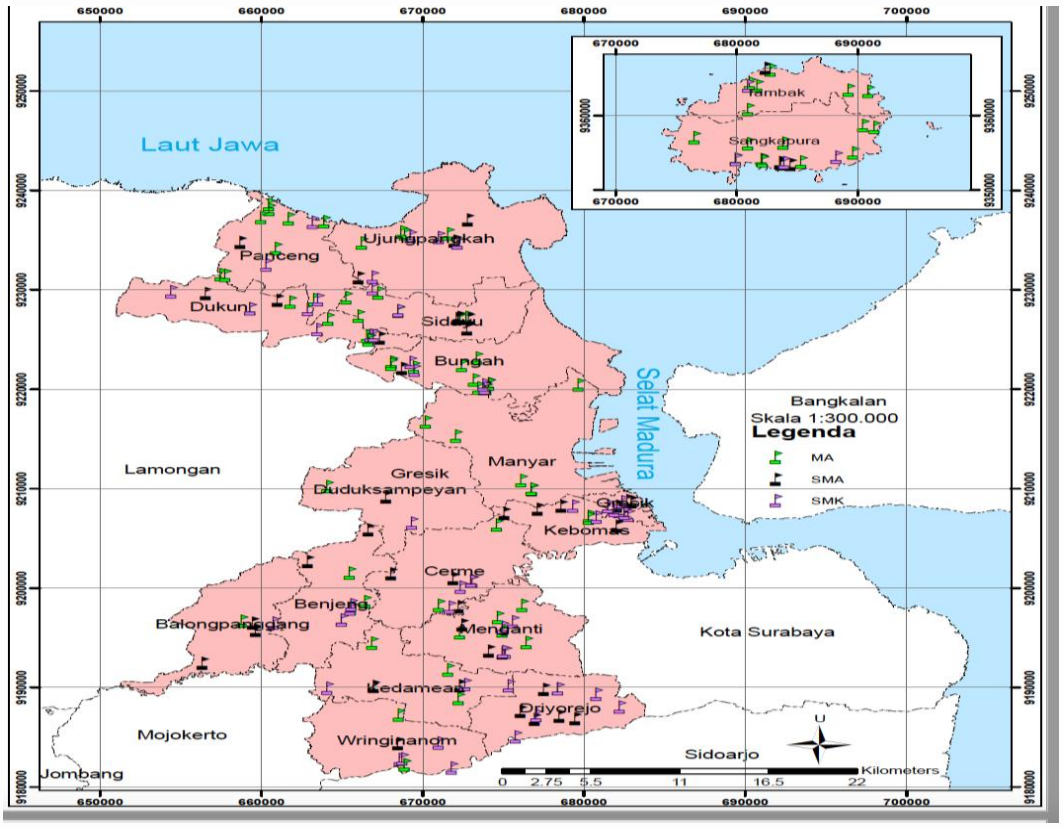

Gambar 4. Peta Persebaran SMA Sederajat

Secara umum, peta ini menunjukkan bahwa pemerataan lembaga pendidikan menengah atas di Kabupaten Gresik sudah cukup baik, meskipun tingkat kepadatan antar wilayah masih berbeda. Keberadaan berbagai jenis sekolah menengah atas, baik umum (SMA), kejuruan (SMK), maupun keagamaan (MA), menunjukkan adanya keragaman pilihan pendidikan bagi masyarakat. Namun demikian, wilayah yang relatif jauh dari pusat kota dan daerah pesisir utara masih memerlukan pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan serta peningkatan kualitas sarana dan tenaga pendidik agar kesempatan memperoleh pendidikan menengah atas yang setara dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Kabupaten Gresik.

5) Peta Persebaran Sekolah Luar Biasa

Persebaran jarak layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) sederajat di Kabupaten Gresik beserta wilayah sekitarnya. Lokasi SLB ditunjukkan dengan simbol segitiga hitam, sedangkan jarak pelayanan divisualisasikan melalui zona buffer konsentris dengan interval 2.500 meter. Zona berwarna kuning menandakan radius paling dekat (0–2.500 m), diikuti oleh gradasi warna jingga hingga cokelat tua yang mewakili jarak lebih jauh, yakni >10.000 meter. Pola persebaran SLB diilustrasikan pada Gambar 5 berikut.

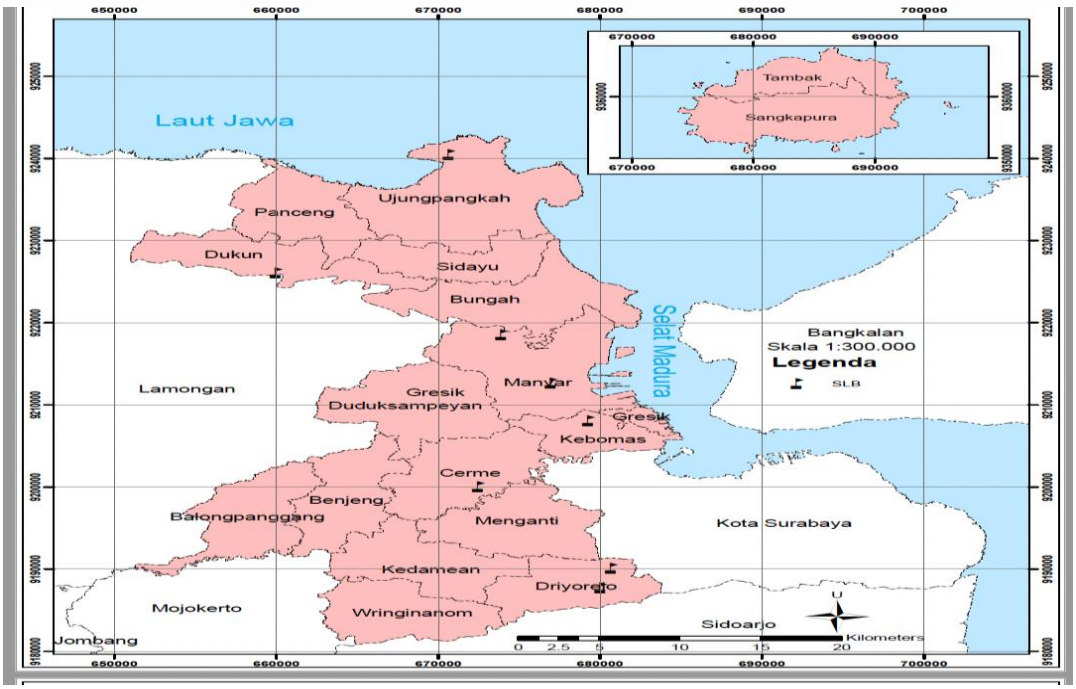

Gambar 5. Peta Persebaran SLB

Secara umum, SLB di Kabupaten Gresik terkonsentrasi di wilayah tengah dan timur, terutama di sekitar pusat kota Gresik dan daerah perbatasan dengan Surabaya serta Sidoarjo. Hal ini membuat wilayah-wilayah di pesisir barat dan selatan Gresik memiliki jarak akses yang lebih jauh terhadap SLB, ditunjukkan oleh dominasi warna cokelat tua. Dengan kata lain, aksesibilitas SLB lebih tinggi di wilayah perkotaan atau padat penduduk, sedangkan daerah pedalaman dan pesisir barat relatif kurang terjangkau.

Menariknya, terdapat SLB yang berlokasi dekat pesisir atau pinggir laut, misalnya di kawasan utara Gresik yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Posisi SLB ini strategis untuk melayani masyarakat pesisir, namun jangkauan layanannya masih terbatas pada radius sekitar sekolah tersebut. Hal ini terlihat dari lingkaran buffer berwarna kuning hingga jingga yang relatif sempit di sepanjang garis pantai, sementara wilayah pesisir lain yang tidak dilayani tetap masuk dalam kategori jarak jauh (>7.500–10.000 m). Dengan demikian, meskipun ada SLB di daerah pantai, penyebarannya masih belum merata di seluruh garis pesisir.

Peta inset juga menunjukkan posisi Pulau Bawean (Tambak dan Sangkapura) yang masuk dalam administrasi Kabupaten Gresik. Namun, pada pulau tersebut tidak ditampilkan buffer SLB, sehingga mengindikasikan keterbatasan atau ketiadaan SLB sederajat di wilayah kepulauan tersebut.

Berdasarkan peta tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SLB di Gresik masih belum merata, dengan konsentrasi layanan hanya di pusat-pusat tertentu, termasuk sebagian wilayah pesisir. Hal ini menimbulkan jarak tempuh yang relatif jauh bagi masyarakat di wilayah barat, selatan, dan kepulauan, sehingga bisa menjadi dasar perencanaan pemerataan fasilitas pendidikan khusus di Kabupaten Gresik.

b. Peta Jarak Antar Satuan Pendidikan Kabupaten Gresik

Penentuan jarak ideal antar satuan pendidikan didasarkan pada prinsip Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa penyediaan

layanan pendidikan dasar harus berada dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki, yaitu maksimal 3 Km untuk SD/MI dan 6 Km untuk SMP/MTs dari permukiman permanen di daerah terpencil. Ketentuan ini menjadi acuan utama dalam menentukan klasifikasi jarak ideal bagi jenjang pendidikan lainnya dengan mempertimbangkan usia peserta didik, kemampuan mobilitas, serta kebutuhan khusus dalam akses pendidikan. Secara teoritis, semakin muda usia peserta didik maka semakin pendek jarak ideal menuju sekolah karena keterbatasan fisik dan faktor keselamatan. Sebaliknya, peserta didik di jenjang yang lebih tinggi memiliki daya mobilitas dan kemandirian yang lebih baik sehingga dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dengan aman.

Klasifikasi jarak ideal ini juga mengacu pada prinsip aksesibilitas pendidikan dalam teori perencanaan spasial pendidikan (*Spatial Education Planning*), yang menekankan pentingnya jarak tempuh, waktu tempuh, dan ketersediaan sarana transportasi sebagai faktor utama pemerataan layanan pendidikan. Dalam konteks ini, interval jarak (*distance interval*) digunakan untuk mengelompokkan tingkat keterjangkauan pendidikan di setiap jenjang. Untuk jenjang SD sederajat, digunakan interval 500 meter karena mengacu pada kemampuan rata-rata anak usia 7–12 tahun berjalan kaki sejauh ±3 km dalam waktu 30–40 menit, sesuai batas maksimal Permendiknas No. 32 Tahun 2022. Sedangkan untuk jenjang SMP sederajat, digunakan interval 1.000 meter dengan batas maksimal 6 Km, berdasarkan asumsi bahwa peserta didik usia 13–15 tahun memiliki kemampuan mobilitas lebih tinggi serta dukungan sarana transportasi sederhana di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Sementara itu, untuk TK sederajat dan SLB, klasifikasi jaraknya dibuat lebih sempit karena kelompok ini memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap pendampingan orang tua maupun guru. Oleh karena itu, jarak ideal maksimal ditetapkan antara 1–2,5 Km untuk TK dan hingga 10 Km untuk SLB, dengan interval 250 meter untuk TK dan 2.500 meter untuk SLB. Hal ini bertujuan agar layanan pendidikan anak usia dini dan peserta didik berkebutuhan khusus tetap dapat dijangkau secara aman, nyaman, dan inklusif. Adapun untuk SMA sederajat, peserta didik berusia 16–18 tahun dianggap lebih mandiri dan memiliki akses terhadap transportasi umum atau pribadi,

sehingga jarak maksimal diperpanjang hingga 10 km dengan interval 1.000 meter.

Klasifikasi ini merupakan hasil adaptasi dari SPM Pendidikan Dasar dalam Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 yang dikombinasikan dengan pendekatan spasial dan pedagogis. Melalui pengelompokan berbasis interval jarak (250 m, 500 m, 1.000 m, 1.500, 2.000 m, hingga 2.500 m), pemerintah daerah dapat melakukan analisis keterjangkauan fasilitas pendidikan (*Education Accessibility Analysis*) untuk memastikan seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, memperoleh akses pendidikan yang aman, terjangkau, dan merata. Pendekatan ini juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs 4), yakni menjamin pemerataan akses terhadap pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Tabel 2.1 berikut menguraikan klasifikasi jarak satuan pendidikan/sekolah berdasarkan jenjang.

Tabel 2.1 Klasifikasi Jarak Satuan Pendidikan Berdasarkan Jenjang

Jenjang Pendidikan	Jenis Sekolah	Jarak Maksimal (m)	Kelas Interval Jarak (m)	Pertimbangan Teoritis
SLB (Sekolah Luar Biasa)	SLB	≤12.000	2.500 5.000 7.500 10.000 >10.000	Peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan akses yang relatif dekat dan dukungan transportasi khusus; jumlah lembaga terbatas dengan jangkauan wilayah luas.
TK Sederajat	TK, RA	≤ 3.000	500 1.000 1.500 2.000 2.500 >2.500	Anak usia dini memerlukan akses sangat dekat (≤2,5 Km) untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan pendampingan orang tua.
SD Sederajat	SD, MI	≤ 3.000	500 1.000 1.500 2.000 2.500 >2.500	Berdasarkan Permendikbudristek 32/2022; anak usia 7–12 tahun mampu berjalan sejauh ±3 Km dengan aman dan layak.
SMP Sederajat	SMP, MTs	≤ 6.000	1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 >5.000	Berdasarkan Permendikburistek No. 32/2022; siswa usia 13–15 tahun memiliki mobilitas lebih tinggi dan dukungan sarana transportasi dasar.
SMA Sederajat	SMA, MA, SMK	≤ 6.000	1.000 2.000	Peserta didik usia 16–18 tahun memiliki kemandirian

Jenjang Pendidikan	Jenis Sekolah	Jarak Maksimal (m)	Kelas Interval Jarak (m)	Pertimbangan Teoritis
			3.000 4.000 5.000 >5.000	dan akses transportasi yang memadai, sehingga jarak 10 km masih tergolong wajar.

Penentuan klasifikasi jarak ideal antar satuan pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada prinsip Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022, khususnya mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin keterjangkauan layanan pendidikan dasar bagi seluruh peserta didik. Regulasi tersebut menetapkan bahwa jarak maksimal menuju SD/MI adalah 3 Km dan jarak maksimal menuju SMP/MTs adalah 6 Km dari permukiman penduduk. Ketentuan ini menjadi dasar normatif dalam menentukan jangkauan ideal bagi jenjang pendidikan lainnya, baik di bawah maupun di atas pendidikan dasar.

Berdasarkan rasional tersebut, dilakukan ekstrapolasi logis dan pedagogis dengan mempertimbangkan usia peserta didik, tingkat kemandirian, kemampuan mobilitas, dan kebutuhan pendampingan. Semakin rendah usia peserta didik, semakin kecil radius jangkauan sekolah yang dianggap ideal, sedangkan semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar pula jarak yang masih dapat diterima secara wajar. Oleh karena itu, TK sederajat ditetapkan memiliki jangkauan paling pendek (maksimal ±2,5 km), SD sederajat sejauh ±3 Km, SMP sederajat hingga ±6 Km, SMA sederajat hingga ±10 Km, dan SLB diberikan toleransi jangkauan lebih luas (hingga ±10 Km) karena jumlah lembaga yang terbatas namun disertai kebutuhan akses khusus.

Klasifikasi jarak ini selanjutnya dipecah ke dalam interval tertentu (250 m, 500 m, 1.000 m, 2000 m, hingga 2.500 m) untuk memudahkan analisis spasial dalam pemetaan keterjangkauan pendidikan. Pendekatan tersebut selaras dengan teori *Spatial Education Planning* yang menekankan pemerataan layanan berdasarkan jarak tempuh dan waktu akses. Dengan demikian, pemilihan klasifikasi ini tidak hanya bersumber dari ketentuan administratif (Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022), tetapi juga didukung oleh pendekatan ilmiah yang mempertimbangkan aspek geografis, demografis, dan

pedagogis dalam upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang adil, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

1) Peta Jarak Antar Taman Kanak-Kanak Sederajat

Peta Jarak TK Sederajat di Kabupaten Gresik menunjukkan sebaran spasial jarak jangkauan terhadap lembaga pendidikan anak usia dini yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan UPT TK Negeri di seluruh wilayah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis spasial, peta ini menggambarkan zona jangkauan (*buffer distance*) dari masing-masing satuan pendidikan dengan interval setiap 500 meter hingga jarak lebih dari 2.500 meter. Warna kuning muda menunjukkan area dengan jarak paling dekat terhadap lembaga TK sederajat (0–500 meter), sedangkan warna coklat tua hingga merah gelap menunjukkan wilayah yang berjarak lebih dari 2.500 meter dari lembaga TK terdekat. Peta Jarak TK Sederajat di Kabupaten Gresik diilustrasikan pada Gambar 6 berikut.

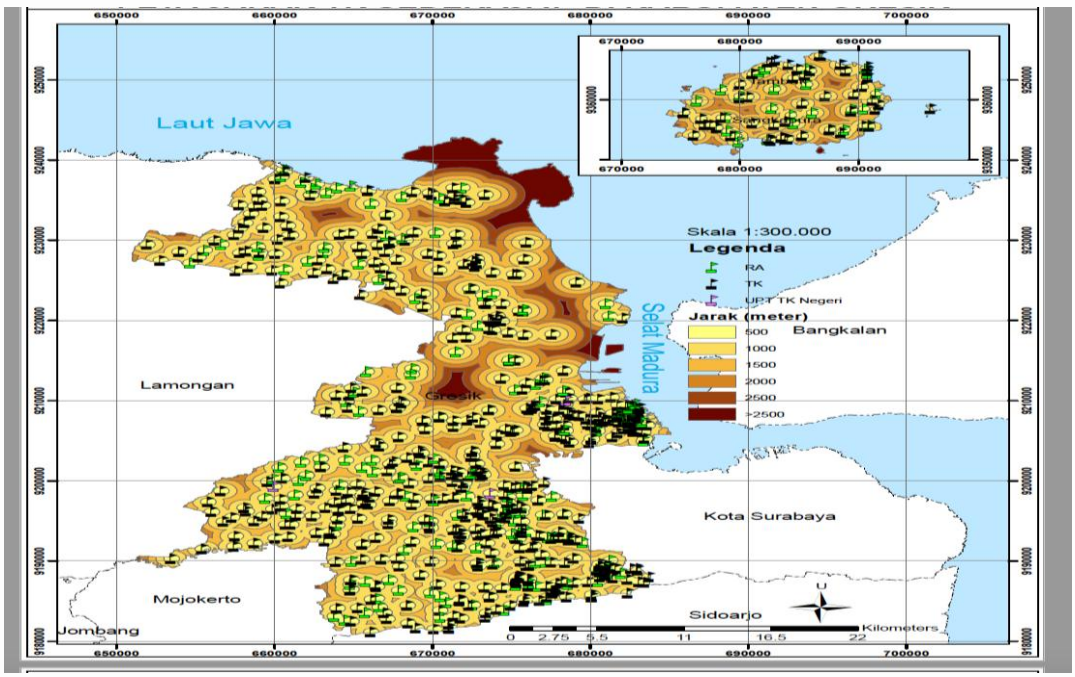

Gambar 6. Peta Jarak Antar TK Sederajat

Berdasarkan peta tersebut tampak bahwa wilayah dengan akses paling baik terhadap lembaga TK tersebar merata di bagian tengah dan selatan Kabupaten Gresik, khususnya di Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Cerme, Menganti, Kedamean, Driyorejo, dan Wringinanom. Daerah-daerah ini memiliki kerapatan lembaga TK yang tinggi dan jaringan permukiman padat, sehingga

sebagian besar penduduknya berada dalam radius kurang dari 1 km dari lembaga pendidikan anak usia dini. Sebaliknya, wilayah dengan jarak lebih jauh dari lembaga TK tampak di bagian utara seperti Panceng, Ujungpangkah, dan sebagian Bungah, serta di beberapa bagian pulau Bawean. Warna merah tua pada peta menunjukkan adanya area yang berjarak lebih dari 2,5 km dari lembaga TK terdekat, menandakan bahwa masyarakat di wilayah tersebut masih mengalami keterbatasan akses pendidikan anak usia dini.

Secara keseluruhan, peta ini menunjukkan bahwa aksesibilitas lembaga TK sederajat di Kabupaten Gresik relatif baik, terutama di kawasan perkotaan dan daerah padat penduduk, namun masih terdapat ketimpangan spasial di wilayah utara dan kepulauan. Berdasarkan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010, yang menekankan pentingnya ketersediaan satuan pendidikan dalam jarak terjangkau, idealnya lembaga pendidikan anak usia dini dapat dijangkau dalam radius ≤ 1 km. Oleh karena itu, hasil analisis ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam perencanaan penambahan fasilitas TK atau RA di wilayah-wilayah yang memiliki jarak tempuh melebihi standar, guna mendukung pemerataan akses pendidikan anak usia dini di seluruh Kabupaten Gresik.

2) Peta Jarak Antar Sekolah Dasar Sederajat

Peta Jarak SD Sederajat di Kabupaten Gresik menampilkan pola persebaran dan jangkauan akses terhadap satuan pendidikan dasar, yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan UPT SD Negeri di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Peta ini menggambarkan zona jarak jangkauan (*buffer distance*) yang dibagi dalam interval setiap 500 meter, mulai dari radius 0–500 meter hingga lebih dari500 meter dari lokasi sekolah. Warna kuning muda menunjukkan area yang berada paling dekat dengan sekolah dasar sederajat, sedangkan warna coklat hingga merah tua menandakan wilayah yang berjarak jauh, yakni lebih dari 2,5 km dari sekolah terdekat. Peta Jarak SD Sederajat di Kabupaten Gresik diilustrasikan pada Gambar 2.7 di halaman berikut.

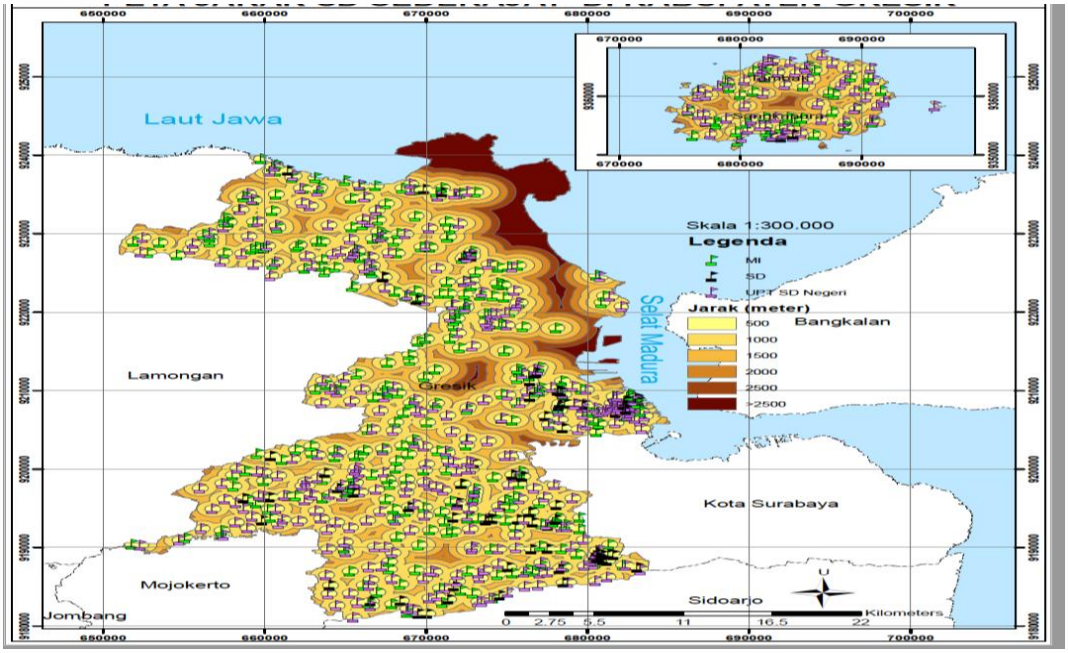

Gambar 7. Peta Jarak Antar SD Sederajat

Secara spasial, peta menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan dasar di Kabupaten Gresik tergolong sangat baik. Sebagian besar wilayah, terutama di bagian tengah, selatan, dan barat seperti Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Cerme, Benjeng, Menganti, Kedamean, Driyorejo, dan Wringinanom, berada dalam radius kurang dari 1 km dari sekolah dasar sederajat. Hal ini menandakan bahwa masyarakat di daerah tersebut memiliki akses yang mudah dan sesuai dengan standar jarak maksimal 3 km sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Namun, terdapat beberapa area yang masih berjarak jauh dari lembaga SD sederajat, terutama di bagian utara Kabupaten Gresik seperti Panceng, Ujungpangkah, dan sebagian Bungah, serta di beberapa titik di Pulau Bawean (Kecamatan Tambak dan Sangkapura), yang ditunjukkan dengan warna merah gelap.

Pola sebaran tersebut menunjukkan bahwa sekolah dasar umumnya dibangun mengikuti persebaran permukiman penduduk, sehingga daerah padat penduduk memiliki kerapatan sekolah yang tinggi, sedangkan wilayah dengan kepadatan rendah atau kondisi geografis sulit cenderung memiliki akses terbatas. Secara keseluruhan, peta ini memperlihatkan bahwa akses

layanan pendidikan dasar di Kabupaten Gresik sudah memenuhi standar nasional, dengan sebagian besar wilayah memiliki jarak tempuh yang sangat terjangkau. Meski demikian, pemerataan pembangunan lembaga pendidikan di wilayah utara dan kepulauan Bawean masih perlu ditingkatkan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dasar dapat memperoleh pendidikan yang setara dan mudah diakses di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

3) Peta Jarak Antar Sekolah Menengah Pertama Sederajat

Peta Jarak SMP Sederajat di Kabupaten Gresik menggambarkan persebaran spasial dan jangkauan layanan terhadap satuan pendidikan tingkat menengah pertama yang meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan UPT SMP Negeri. Peta ini menyajikan zona jarak jangkauan (*buffer*) dengan interval setiap 1.000 meter, mulai dari radius 0–1.000 meter hingga lebih dari 5.000 meter. Warna kuning muda menunjukkan area yang berada paling dekat dengan sekolah menengah pertama sederajat, sementara warna coklat tua hingga merah gelap menandakan wilayah yang memiliki jarak lebih jauh, yaitu lebih dari 5 km dari sekolah terdekat. Peta Jarak SMP Sederajat di Kabupaten Gresik diilustrasikan pada Gambar 8 berikut.

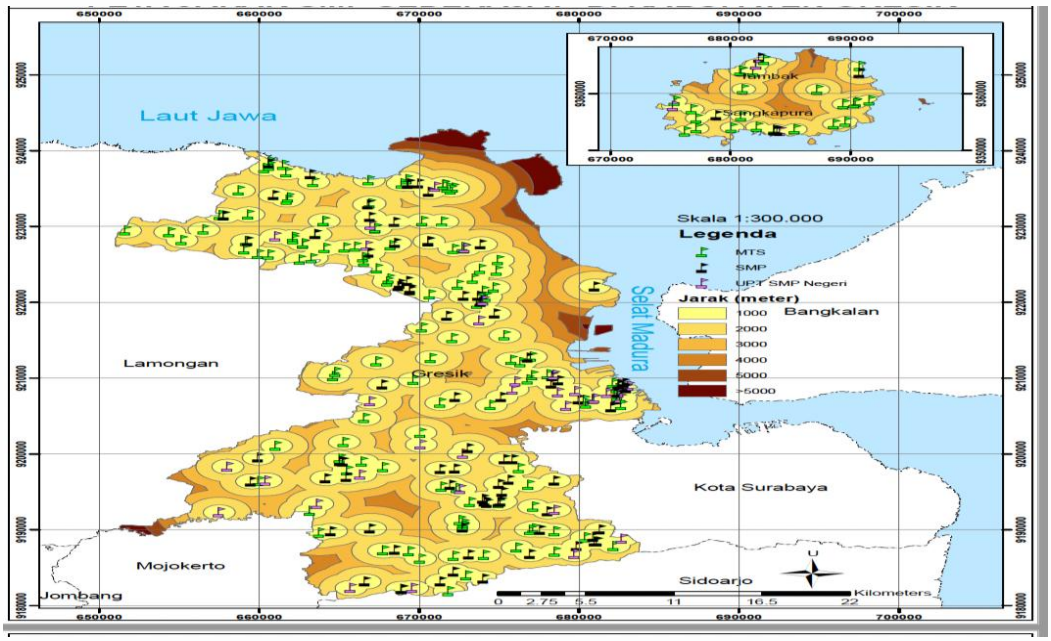

Gambar 8. Peta Jarak Antar SMP Sederajat

Secara umum, peta menunjukkan bahwa aksesibilitas terhadap lembaga pendidikan SMP sederajat di Kabupaten Gresik tergolong baik dan relatif merata, terutama di bagian tengah dan selatan wilayah kabupaten, meliputi Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Cerme, Menganti, Kedamean, Driyorejo, dan Wringinanom. Wilayah-wilayah tersebut memiliki kerapatan sekolah yang tinggi dan sebagian besar area penduduknya berada dalam radius kurang dari 3 km, sesuai dengan standar jarak maksimal 6 km sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Sementara itu, wilayah utara seperti Panceng, Ujungpangkah, dan Sidayu, serta beberapa bagian di Pulau Bawean (Tambak dan Sangkapura) menunjukkan warna yang lebih gelap, menandakan adanya area yang berjarak lebih dari 4 hingga 5 km dari sekolah terdekat. Kondisi ini menunjukkan bahwa di beberapa kecamatan terpencil dan pesisir, peserta didik masih harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan akses pendidikan menengah pertama.

Pola persebaran SMP sederajat terlihat mengikuti pola permukiman padat penduduk dan akses transportasi utama, terutama di sepanjang koridor jalan raya antar kecamatan. Hal ini memperkuat bahwa pembangunan sekolah menengah pertama cenderung difokuskan pada wilayah dengan populasi besar dan infrastruktur yang baik. Secara keseluruhan, peta ini menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan tingkat menengah pertama di Kabupaten Gresik sudah cukup baik, meskipun masih perlu peningkatan di beberapa wilayah utara dan kepulauan untuk mencapai pemerataan yang ideal sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan. Dengan demikian, hasil analisis peta ini dapat menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan menengah pertama yang lebih inklusif dan proporsional di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

4) Peta Jarak Antar Sekolah Menengah Atas Sederajat

Peta Jarak SMA Sederajat di Kabupaten Gresik menampilkan pola sebaran spasial dan jangkauan layanan terhadap satuan pendidikan menengah atas yang terdiri atas Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA). Peta ini memvisualisasikan zona jangkauan (*buffer distance*) dengan interval setiap 1.000 meter, mulai dari jarak

0–1.000 meter hingga lebih dari 5.000 meter. Warna kuning muda menggambarkan area dengan akses sangat dekat ke lembaga SMA sederajat, sedangkan warna coklat tua hingga merah gelap menunjukkan wilayah dengan jarak yang lebih jauh, yaitu lebih dari 5 km dari sekolah terdekat.

Secara umum, peta menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan menengah atas di Kabupaten Gresik tergolong cukup baik namun belum merata sepenuhnya. Konsentrasi lembaga SMA, SMK, dan MA terlihat lebih dominan di wilayah tengah dan selatan, seperti Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Cerme, Menganti, Kedamean, Driyorejo, dan Wringinanom. Daerah-daerah tersebut memiliki kepadatan sekolah tinggi dan sebagian besar penduduknya berada dalam jangkauan kurang dari 3 km, yang masih dalam kategori mudah diakses oleh peserta didik. Sementara itu, wilayah utara Kabupaten Gresik seperti Panceng, Ujungpangkah, dan Sidayu, serta beberapa bagian pulau Bawean (Kecamatan Tambak dan Sangkapura) menunjukkan warna yang lebih gelap, menandakan adanya area yang berjarak lebih dari 4–5 km dari sekolah terdekat. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan spasial dalam akses pendidikan tingkat menengah atas, khususnya di daerah dengan kepadatan penduduk rendah dan kondisi geografis yang lebih sulit dijangkau. Peta Jarak SMA sederajat di Kabupaten Gresik diilustrasikan pada Gambar 9 berikut.

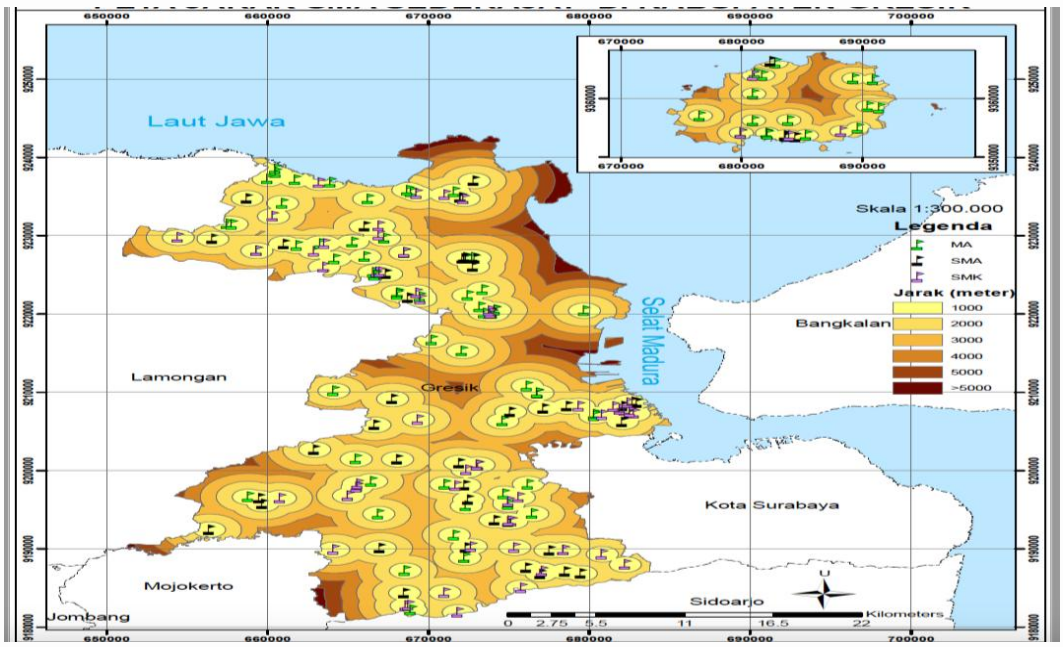

Gambar 9. Peta Jarak Antar SMA Sederajat

Jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, sebaran sekolah menengah atas memang cenderung lebih jarang, sejalan dengan karakteristik pendidikan pada jenjang ini yang memiliki cakupan wilayah pelayanan lebih luas. Berdasarkan prinsip Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan teori aksesibilitas pendidikan, jarak ideal untuk SMA sederajat dapat mencapai 8–10 km, karena peserta didik pada usia 16–18 tahun umumnya lebih mandiri dan memiliki akses transportasi yang lebih baik. Dengan demikian, sebagian besar wilayah di Kabupaten Gresik masih dapat dikatakan terlayani dengan cukup baik. Namun, peta ini juga mengindikasikan perlunya pemerataan pembangunan satuan pendidikan menengah atas di wilayah utara dan kepulauan, agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

5) Peta jarak Antar Sekolah Luar Biasa

Peta ini menampilkan sebaran jarak layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) sederajat di Kabupaten Gresik beserta wilayah sekitarnya. Lokasi SLB ditunjukkan dengan simbol segitiga hitam, sedangkan jarak pelayanan divisualisasikan melalui zona buffer konsentris dengan interval 2.500 meter. Zona berwarna kuning menandakan radius paling dekat (0–2.500 m), diikuti oleh gradasi warna jingga hingga cokelat tua yang mewakili jarak lebih jauh, yakni >10.000 meter. Peta Jarak SLB di Kabupaten Gresik diilustrasikan pada Gambar 10 berikut.

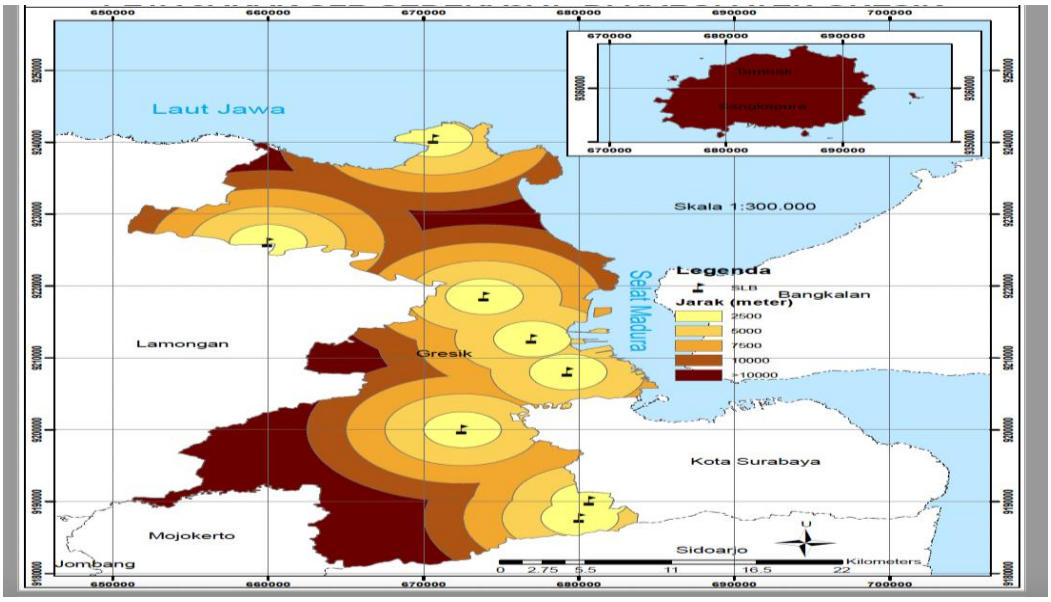

Gambar 10. Peta Jarak Antar SLB

Secara umum, SLB di Kabupaten Gresik terkonsentrasi di wilayah tengah dan timur, terutama di sekitar pusat kota Gresik dan daerah perbatasan dengan Surabaya serta Sidoarjo. Hal ini membuat wilayah-wilayah di pesisir barat dan selatan Gresik memiliki jarak akses yang lebih jauh terhadap SLB, ditunjukkan oleh dominasi warna cokelat tua. Dengan kata lain, aksesibilitas SLB lebih tinggi di wilayah perkotaan atau padat penduduk, sedangkan daerah pedalaman dan pesisir barat relatif kurang terjangkau.

Peta inset juga menunjukkan posisi Pulau Bawean (Tambak dan Sangkapura) yang masuk dalam administrasi Kabupaten Gresik. Namun, pada pulau tersebut tidak ditampilkan buffer SLB, sehingga mengindikasikan keterbatasan atau ketiadaan SLB sederajat di wilayah kepulauan tersebut.

Berdasarkan peta ini dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SLB di Gresik masih belum merata, dengan konsentrasi layanan hanya di pusat-pusat tertentu. Hal ini menimbulkan jarak tempuh yang relatif jauh bagi masyarakat di wilayah barat, selatan, dan kepulauan, sehingga bisa menjadi dasar perencanaan pemerataan fasilitas pendidikan khusus.

2. Kondisi Demografis dan Distribusi Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Gresik

Berdasarkan data demografi Kabupaten Gresik, jumlah penduduk menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Kecamatan Menganti memiliki jumlah penduduk tertinggi, yaitu 133.875 jiwa, disusul oleh Manyar dengan 122.645 jiwa dan Driyorejo sebanyak 108.924 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tambak dengan 31.009 jiwa dan Sidayu dengan 44.542 jiwa. Dari segi luas wilayah, Kecamatan Panceng merupakan wilayah terluas mencapai 5.584,56 km^2, diikuti Kecamatan Tambak dengan 78,70 km^2, sedangkan Kebomas (30,06 km^2) dan Sidayu (47,13 km^2) merupakan wilayah dengan cakupan terendah. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Gresik yang mencapai 14.441 jiwa/km^2, menunjukkan karakter wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi dan permukiman yang padat. Sebaliknya, Kecamatan Tambak dan Sangkapura memiliki kepadatan terendah masing-masing sebesar 394 dan 457 jiwa/km^2, mencerminkan

karakter wilayah pedesaan dan kepulauan dengan intensitas pembangunan yang lebih rendah.

Tabel 2.2 Kondisi Demografi Kabupaten Gresik

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km^2)	Luas Wilayah (Km^2)
Wringinanom	74154	1184	62,62
Driyorejo	108924	2124	51,29
Kedamean	64213	974	65,95
Menganti	133875	1948	68,7135
Cerme	83903	1170	71,73
Benjeng	66608	1087	61,2843
Balongpanggang	56862	890	63,88
Duduksampeyan	49736	669	74,29
Kebomas	115078	3828	30,06
Gresik	80005	14441	1.191,25
Manyar	122645	1285	95,42
Bungah	69581	876	**79,46**
Sidayu	44542	945	47,13
Dukun	66086	1118	59,09
Panceng	53606	856	5.584,56
Ujungpangkah	52359	552	94,8323
Sangkapura	54311	457	118,72
Tambak	31009	394	7870,27 ha
Total	**1327497**	**1114**	**1.191,25 Km^2**

Sumber: BPS Kabupaten Gresik (2025)

Berdasarkan data demografi Kabupaten Gresik, jumlah penduduk menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Kecamatan Menganti memiliki jumlah penduduk tertinggi, yaitu 133.875 jiwa, disusul oleh Manyar dengan 122.645 jiwa dan Driyorejo sebanyak 108.924 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tambak dengan 31.009 jiwa dan Sidayu dengan 44.542 jiwa. Dari segi luas wilayah, Kecamatan Panceng merupakan wilayah terluas mencapai 5.584,56 km^2, diikuti Kecamatan Tambak dengan 78,70 km^2, sedangkan Kebomas (30,06 km^2) dan Sidayu (47,13 km^2) merupakan wilayah dengan cakupan terendah. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Gresik yang mencapai 14.441 jiwa/km^2, menunjukkan karakter wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi dan permukiman yang padat. Sebaliknya, Kecamatan Tambak dan Sangkapura memiliki kepadatan terendah masing-masing sebesar 394 dan 457 jiwa/km^2, mencerminkan karakter wilayah pedesaan dan kepulauan dengan intensitas pembangunan yang lebih rendah.

a. Sebaran Satuan Pendidikan, Ketimpangan Layanan, dan Kebutuhan Berdasarkan Persebaran Penduduk

Sebaran satuan pendidikan pada semua jenjang di Kabupaten Gresik dideskripsikan dengan membandingkan jumlah sekolah dengan kelompok umur usia sekolah sebagaimana dideskripsikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.3 Perbandingan Penduduk Menurut Umur dan Jumlah sekolah

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur				Jumlah Sekolah			
	0-4Th	5-9 Th	10-14 Th	15-19 Th	RA/TK	SD/MI	SMP/ MTs	SMA/ MA/ SMK
Wringinanom	4164	5328	5686	5508	44	44	13	6
Driyorejo	5955	8049	9182	8826	86	55	20	7
Kedamean	3582	4405	4598	4623	34	37	12	6
Menganti	7416	9681	10536	9722	107	64	22	10
Cerme	4852	5842	6142	5864	55	46	8	5
Benjeng	3439	4741	5023	4913	47	48	12	6
Balongpanggang	2971	3651	4195	4231	45	48	8	2
Duduksampeyan	3050	3750	4076	3925	37	38	9	3
Kebomas	7385	8365	8727	8364	51	37	9	4
Gresik	6346	7093	7301	6955	31	33	13	6
Manyar	7881	9025	9920	9532	48	53	21	10
Bungah	4554	5078	5456	5261	37	47	24	15
Sidayu	2818	3221	3536	3565	26	38	15	9
Dukun	3930	4533	5149	5311	44	51	20	12
Panceng	3019	3714	4009	4135	38	44	23	13
Ujungpangkah	3176	3785	4141	4075	31	42	20	10
Sangkapura	2575	4718	6181	6363	54	69	23	16
Tambak	1786	2934	3506	3521	34	47	12	7
Total	78899	97913	107364	104694	849	841	284	147

Sumber: BPS Kab. Gresik (2025)

Sebaran satuan pendidikan (sekolah) di Kabupaten Gresik menunjukkan pola yang belum sepenuhnya seimbang dengan distribusi penduduk usia sekolah. Berdasarkan data BPS, jumlah anak usia dini (0–4 tahun) tertinggi terdapat di Kecamatan Menganti sebanyak 7.416 anak, disusul Manyar dan Kebomas. Ketersediaan lembaga PAUD di Menganti mencapai 107 unit, jumlah tertinggi di kabupaten dan relatif sebanding dengan kebutuhan. Sebaliknya, Kecamatan Tambak memiliki anak usia dini paling sedikit, yakni 1.786 anak, namun masih memiliki 34 lembaga PAUD, menunjukkan rasio lembaga terhadap anak yang cukup tinggi dan berpotensi kelebihan kapasitas.

Pada jenjang Pendidikan Dasar, jumlah anak usia SD (5–9 tahun) terbanyak juga ditemukan di Kecamatan Menganti sebanyak 9.681 anak, diikuti Manyar 9.025 anak. Jumlah Sekolah Dasar di kedua kecamatan tersebut

masing-masing 64 dan 53 unit, yang relatif kurang sebanding dengan jumlah anak usia SD yang tinggi. Ketimpangan terlihat di Kecamatan Kebomas yang memiliki 8.365 anak usia SD dengan hanya 37 sekolah dasar, sedangkan Kecamatan Tambak dengan 2.934 anak justru memiliki 47 sekolah, menunjukkan distribusi fasilitas pendidikan dasar yang tidak merata.

Pada jenjang Menengah Pertama (10–14 tahun), jumlah usia sekolah tertinggi terdapat di Kecamatan Menganti sebanyak 10.536 anak dan Driyorejo sebanyak 9.182 anak. Kedua wilayah ini masing-masing memiliki 22 dan 20 sekolah SMP/MTs, yang masih belum sebanding dengan jumlah populasi usia SMP yang besar. Di sisi lain, kecamatan seperti Bungah dan Panceng memiliki jumlah sekolah menengah pertama yang relatif banyak dibandingkan jumlah anak usia sekolahnya, masing-masing 24 dan 23 unit, sehingga menunjukkan kapasitas yang lebih mencukupi.

Pada jenjang Menengah Atas (15–19 tahun), jumlah usia sekolah terbanyak terdapat di Kecamatan Menganti (9.722 anak), Manyar (9.532 anak), dan Driyorejo (8.826 anak). Namun, jumlah SMA/SMK di ketiga wilayah tersebut masih terbatas, masing-masing 10, 10, dan 7 unit. Sebaliknya, Kecamatan Bungah dan Sangkapura memiliki jumlah sekolah menengah atas lebih banyak, yaitu 15 dan 16 unit, dengan jumlah anak sekitar 5.000–6.000 jiwa, sehingga menunjukkan adanya potensi surplus lembaga pendidikan di daerah tersebut.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa sebaran lembaga pendidikan di Kabupaten Gresik masih belum proporsional dengan distribusi penduduk usia sekolah. Wilayah-wilayah padat penduduk seperti Menganti, Manyar, dan Driyorejo memerlukan penambahan kapasitas lembaga pendidikan, terutama pada jenjang SMP dan SMA, untuk menyeimbangkan kebutuhan dengan ketersediaan fasilitas. Sebaliknya, daerah seperti Tambak dan Sangkapura menunjukkan adanya kelebihan kapasitas lembaga pendidikan, sehingga perlu dilakukan optimalisasi dan pemerataan distribusi fasilitas agar layanan pendidikan lebih efisien dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

B. Profil Pendidikan Saat ini

1. Jumlah dan Sebaran Sekolah

Berdasarkan perbandingan jumlah sekolah dengan penduduk menurut umur ditemukan bahwa sebaran sekolah di Kabupaten Gresik masih belum proporsional dengan distribusi penduduk usia sekolah, mulai PAUD, Dasar sampai Menengah. Jumlah dan sebaran sekolah di beberapa wilayah Kabupaten Gresik sejak tahun 2022 menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan yang luas bagi seluruh masyarakat. Dengan wilayah yang terdiri dari daerah perkotaan hingga pedesaan, distribusi sekolah menjadi indikator penting dalam menilai pemerataan layanan pendidikan. Data berikut menyajikan gambaran mengenai jumlah serta persebaran sekolah di Kabupaten Gresik berdasarkan jenjang dan statusnya.

a) Jumlah dan sebaran TK/RA di Kabupaten Gresik

Tabel 2.4 Jumlah dan sebaran TK/RA di kabupaten Gresik

Kecamatan	TK			RA		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Wringinanom	30	30	31	16	13	-
Driyorejo	62	63	65	11	21	-
Kedamean	20	20	20	11	14	-
Menganti	62	69	69	13	38	-
Cerme	48	47	48	10	7	-
Benjeng	38	38	38	15	9	-
Balongpanggang	33	33	33	9	12	-
Duduksampeyan	23	22	22	14	15	-
Kebomas	45	46	48	3	3	-
Gresik	31	31	31	8	0	-
Manyar	39	40	40	7	8	-
Bungah	22	22	22	15	15	-
Sidayu	23	23	23	37	3	-
Dukun	27	28	28	3	16	-
Panceng	27	27	27	21	11	-
Ujungpangkah	21	21	21	0	10	-
Sangkapura	35	36	37	16	17	-
Tambak	21	21	21	13	13	-
Jumlah	**607**	**617**	**624**	**222**	**225**	

Sumber: BPS Kab. Gresik (2024); BPS Kab. Gresik (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 2.4 diuraikan bahawa jumlah dan sebaran TK/RA di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) meningkat dari 607 unit pada tahun 2022 menjadi 624 unit pada tahun 2024, menandakan adanya upaya perluasan layanan pendidikan anak usia dini di berbagai kecamatan. Peningkatan jumlah TK terlihat cukup signifikan di beberapa wilayah seperti Menganti, Driyorejo, dan Sangkapura. Sementara itu, jumlah Raudhatul Athfal (RA) relatif fluktuatif dengan total yang cenderung stabil, menandakan distribusi lembaga berbasis keagamaan yang masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa akses pendidikan anak usia dini di Kabupaten Gresik terus mengalami perkembangan meskipun dengan variasi antarwilayah.

b) Jumlah dan sebaran SD/MI di Kabupaten Gresik

Tabel 2.5 Jumlah dan sebaran SD/MI di Kabupaten Gresik

Kecamatan	SD			MI		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Wringinanom	28	28	30	13	14	-
Driyorejo	40	41	42	13	13	-
Kedamean	21	21	21	16	16	-
Menganti	39	39	39	25	25	-
Cerme	27	27	27	19	19	-
Benjeng	28	28	28	20	20	-
Balongpanggang	30	30	30	17	18	-
Duduksampeyan	16	16	16	22	22	-
Kebomas	26	26	26	10	11	-
Gresik	23	23	23	10	10	-
Manyar	20	21	21	32	32	-
Bungah	20	20	20	27	27	-
Sidayu	16	16	16	22	22	-
Dukun	22	22	22	29	29	-
Panceng	17	17	17	27	27	-
Ujungpangkah	18	18	18	24	24	-
Sangkapura	38	38	39	30	30	-
Tambak	30	30	30	17	17	-
Jumlah	**459**	**461**	**465**	**373**	**376**	**-**

Sumber: BPS Kab. Gresik (2024); BPS Kab. Gresik (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 2.5 diuraikan bahwa jumlah dan sebaran Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Gresik menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah SD meningkat dari 459 sekolah pada tahun 2022 menjadi 465 sekolah pada tahun 2024, menandakan adanya penambahan lembaga pendidikan dasar di beberapa kecamatan seperti Wringinanom, Driyorejo, Manyar, dan Sangkapura. Sementara itu, jumlah MI juga menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, yaitu dari 373 lembaga pada tahun 2022 menjadi 376 lembaga pada tahun 2024. Distribusi MI tampak lebih merata di wilayah pedesaan, seperti Dukun, Bungah, dan Panceng, yang umumnya memiliki karakter masyarakat religius. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa penyediaan layanan pendidikan dasar di Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara bertahap, dengan keseimbangan antara sekolah umum dan madrasah sebagai wujud pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

c) Jumlah dan sebaran SMP/MTs di Kabupaten Gresik

Tabel 2.6 Jumlah dan Sebaran SMP/MTs di Kabupaten Gresik

Kecamatan	SMP			MTs		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Wringinanom	6	6	6	6	7	-
Driyorejo	10	11	12	8	8	-
Kedamean	4	4	4	8	8	-
Menganti	13	14	14	8	8	-
Cerme	5	4	5	3	3	-
Benjeng	6	6	6	6	6	-
Balongpanggang	5	6	6	2	2	-
Duduksampeyan	3	3	3	6	6	-
Kebomas	7	7	7	2	2	-
Gresik	11	11	11	2	2	-
Manyar	10	10	10	9	11	-
Bungah	11	11	11	13	13	-
Sidayu	6	6	7	8	8	-
Dukun	2	2	2	18	18	-

Kecamatan	SMP			MTs		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Panceng	6	6	6	17	17	-
Ujungpangkah	7	7	7	13	13	-
Sangkapura	5	5	5	18	18	-
Tambak	3	3	3	9	9	-
Jumlah	**120**	**122**	**125**	**156**	**159**	**-**

Sumber: BPS Kabupaten Gresik (2024) dan (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 2.6 diuraikan bahwa jumlah dan sebaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Gresik menunjukkan peningkatan yang relatif stabil dalam tiga tahun terakhir. Jumlah SMP bertambah dari 120 sekolah pada tahun 2022 menjadi 125 sekolah pada tahun 2024, dengan kenaikan terutama terjadi di kecamatan Driyorejo, Menganti, dan Sidayu. Sementara itu, jumlah MTs juga meningkat dari 156 menjadi 159 lembaga pada periode yang sama, menunjukkan konsistensi dalam pengembangan pendidikan berbasis keagamaan. Sebaran MTs tampak lebih dominan di wilayah utara dan kepulauan seperti Dukun, Panceng, Ujungpangkah, dan Sangkapura, yang dikenal memiliki basis pendidikan madrasah yang kuat. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa akses pendidikan menengah pertama di Kabupaten Gresik terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat, baik melalui jalur pendidikan umum maupun keagamaan.

d) Jumlah dan Sebaran SMA/MA dan SMK di Kabupaten Gresik

Tabel 2.7 Jumlah dan Sebaran SMA/MA dan SMK di Kabupaten Gresik

Kecamatan	SMA			MA			SMK		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Wringinanom	1	1	1	2	2	-	4	4	4
Driyorejo	5	5	5	1	1	-	6	6	6
Kedamean	2	2	2	4	4	-	2	2	2
Menganti	4	4	4	5	6	-	4	4	4
Cerme	4	4	4	1	1	-	4	4	4
Benjeng	3	3	3	3	3	-	3	3	3

Kecamatan	SMA			MA			SMK		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Balongpanggang	3	3	3	1	1	-	1	1	1
Duduksampeyan	1	1	1	2	2	-	1	1	1
Kebomas	4	4	4	2	2	-	2	2	2
Gresik	4	4	4	0	0	-	6	6	6
Manyar	3	3	3	6	6	-	4	4	4
Bungah	3	3	3	11	11	-	4	4	4
Sidayu	3	3	3	6	7	-	1	2	2
Dukun	4	4	4	5	5	-	7	7	7
Panceng	1	1	1	10	10	-	3	3	3
Ujungpangkah	3	3	3	6	6	-	4	4	4
Sangkapura	3	3	3	12	12	-	4	4	4
Tambak	1	1	1	6	7	-	0	0	0
Jumlah	**52**	**52**	**52**	**83**	**86**	**-**	**60**	**61**	**61**

Sumber: BPS Kabupaten Gresik (2024) dan (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 2.7 diuraikan bahawa jumlah dan sebaran Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Gresik menunjukkan kondisi yang relatif stabil selama periode 2022–2024. Jumlah SMA tercatat tetap sebanyak 52 sekolah, menandakan bahwa ketersediaan pendidikan menengah umum telah merata di seluruh kecamatan. Sementara itu, jumlah MA mengalami sedikit peningkatan dari 83 lembaga pada tahun 2022 menjadi 86 lembaga pada tahun 2024, menggambarkan adanya pertumbuhan lembaga pendidikan berbasis keagamaan di beberapa wilayah seperti Menganti, Sidayu, dan Tambak. Untuk jenjang kejuruan, jumlah SMK juga menunjukkan kestabilan dengan sedikit kenaikan dari 60 menjadi 61 sekolah, yang tersebar cukup merata di kecamatan berpotensi industri seperti Driyorejo, Gresik, dan Dukun. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki keseimbangan dalam penyediaan layanan pendidikan menengah umum, keagamaan, dan kejuruan, yang mampu mengakomodasi kebutuhan serta minat peserta didik di berbagai bidang.

e) Jumlah dan Sebaran Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Tabel 2.8 Jumlah dan Sebaran SLB dan PKBM di Kabupaten Gresik

Kecamatan	SLB	PKBM
Wringinanom	0	1
Driyorejo	2	1
Kedamean	0	1
Menganti	0	2
Cerme	1	0
Benjeng	0	0
Balongpanggang	0	1
Duduksampeyan	0	0
Kebomas	2	1
Gresik	0	2
Manyar	1	1
Bungah	0	0
Sidayu	1	1
Dukun	0	1
Panceng	0	0
Ujungpangkah	1	1
Sangkapura	0	0
Tambak	0	0
Jumlah	**8**	**13**

Berdasarkan data sebaran satuan pendidikan khusus dan nonformal di Kabupaten Gresik, tercatat terdapat 8 Sekolah Luar Biasa (SLB) dan 13 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di beberapa kecamatan. Keberadaan SLB masih terkonsentrasi di wilayah Kebomas dan Driyorejo (masing-masing 2 SLB), sementara kecamatan lain seperti Cerme, Manyar, Sidayu, dan Ujungpangkah hanya memiliki satu SLB, serta sebagian besar kecamatan belum memiliki layanan pendidikan khusus. Sementara itu, PKBM tersebar lebih merata, dengan jumlah terbanyak berada di Menganti dan Gresik (masing-masing 2 PKBM), serta beberapa kecamatan lain memiliki minimal satu PKBM. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kecamatan yang

belum memiliki SLB maupun PKBM, seperti Benjeng, Duduksampeyan, Bungah, Panceng, Sangkapura, dan Tambak, yang menunjukkan bahwa akses layanan pendidikan inklusif dan kesetaraan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

2. Pemerataan Akses Pendidikan

Akses pendidikan secara konseptual mengacu pada kemampuan setiap individu untuk memperoleh kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan, tanpa hambatan geografis, ekonomi, sosial, budaya, maupun gender. Indikator kuantitif yang dapat mengukur ketercapaian pemerataan akses pendidikan diantaranya melalui analisis Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM menggambarkan keadilan partisipasi anak usia sekolah, sedangkan APK menunjukkan keluasan daya tampung sistem pendidikan. APM dan APK menjadi refleksi dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkeadilan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Secara umum, data APK dan APM menjadi rujukan penting untuk menilai keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Akses pendidikan di Kabupaten Gresik mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat menikmati layanan pendidikan pada setiap jenjang. Melalui pengukuran menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), dapat dilihat tingkat keterlibatan peserta didik dalam sistem pendidikan formal. Kedua indikator ini memberikan gambaran tentang capaian pemerataan pendidikan serta keefektifan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi sekolah. Secara umum, data APK dan APM menjadi acuan penting untuk menilai keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun.

1) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni TK/RA

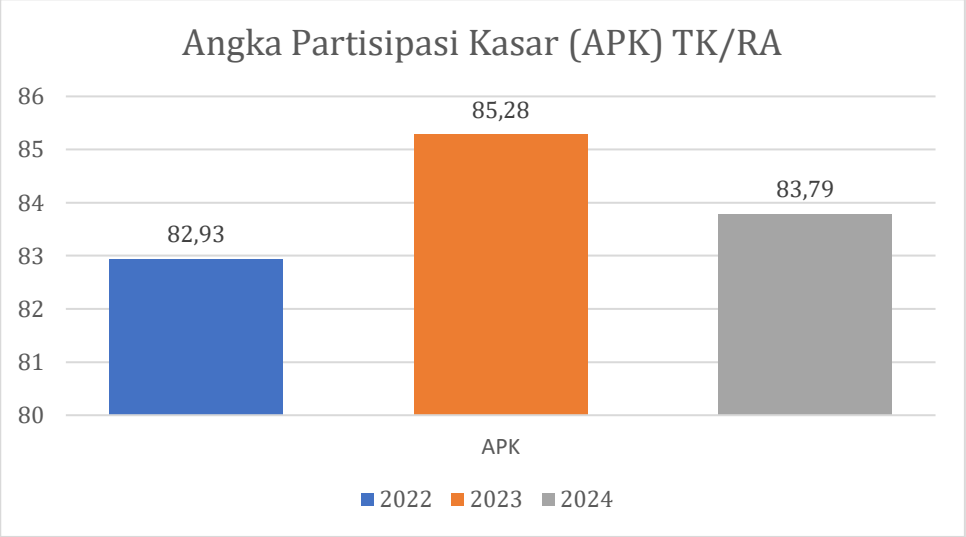

Gambar 11. Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (2025)

Selama tiga tahun terakhir, Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2022, capaian APK berada di angka 82,93%, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 85,28% pada tahun 2023, namun kembali menurun menjadi 83,79% pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa akses anak usia dini terhadap layanan PAUD/TK/RA di Kabupaten Gresik belum sepenuhnya stabil, meskipun secara umum partisipasi masih berada pada level tinggi, yakni di atas 80%.

Dalam konteks regulasi, Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan layanan PAUD yang merata, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh anak usia dini. Dengan demikian, APK TK/RA tidak hanya menjadi indikator angka partisipasi, tetapi juga mencerminkan sejauh mana sistem pendidikan daerah mampu memenuhi standar minimal layanan yang ditetapkan secara nasional.

Penurunan APK pada tahun 2024 mengindikasikan adanya tantangan dalam pemerataan dan keberlanjutan akses layanan PAUD. Kondisi ini terkait dengan beberapa aspek, di antaranya ketimpangan distribusi satuan PAUD/TK/RA antar wilayah, keterbatasan jumlah dan

kualifikasi pendidik PAUD di beberapa kecamatan, kendala keterjangkauan layanan bagi keluarga berpenghasilan rendah, serta pendataan yang belum sepenuhnya mencakup seluruh anak usia dini, terutama di luar jalur formal.

Selain itu, APK TK/RA memiliki keterkaitan langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dimensi pendidikan. Partisipasi anak usia dini dalam layanan PAUD berperan penting dalam membentuk kesiapan belajar di jenjang pendidikan dasar, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah, rata-rata lama belajar, serta pencapaian hasil belajar dalam jangka panjang. Dengan demikian, kondisi fluktuasi APK TK/RA di Kabupaten Gresik memberikan gambaran nyata mengenai tantangan pemerataan layanan pendidikan usia dini dan dampaknya terhadap pembangunan manusia di daerah.

2) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/MI

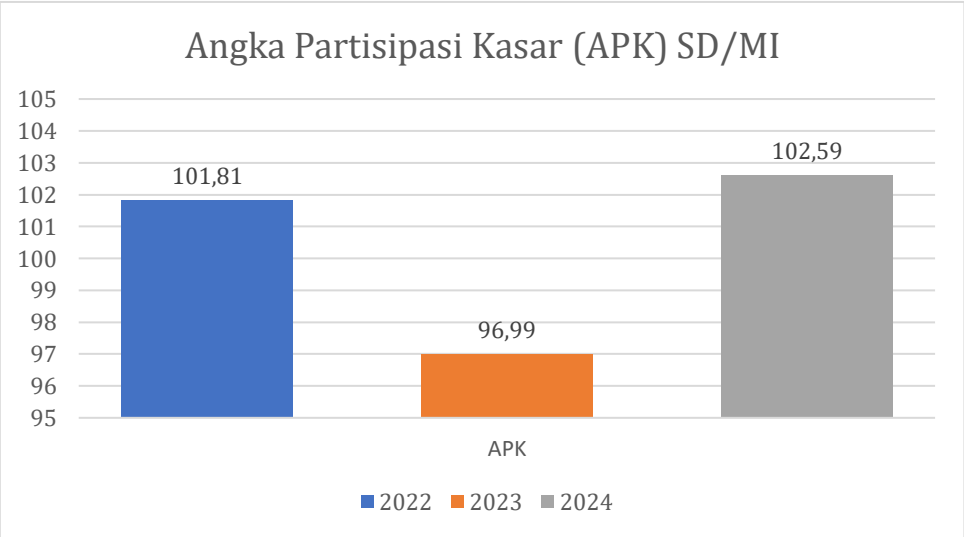

Gambar 12. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (2025)

Dalam tiga tahun terakhir, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Gresik memperlihatkan dinamika yang cukup mencolok. Capaian APK pada tahun 2022 berada pada angka 101,81%, kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 96,99% pada tahun 2023, dan selanjutnya kembali meningkat hingga 102,59% pada tahun 2024. Perubahan yang cukup tajam ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi

pendidikan dasar di Kabupaten Gresik belum menunjukkan pola yang stabil dan konsisten.

Capaian APK di atas 100% pada tahun 2022 dan 2024 mengindikasikan bahwa jumlah peserta didik yang terdaftar di jenjang SD/MI melebihi jumlah penduduk dalam kelompok usia sekolah dasar. Hal ini umumnya terjadi karena adanya peserta didik yang mulai bersekolah lebih awal atau melanjutkan pendidikan pada usia yang lebih tua dari rentang usia ideal. Sementara itu, penurunan yang cukup tajam pada tahun 2023 mengisyaratkan adanya penurunan daya jangkau atau keterlibatan anak usia sekolah dasar dalam sistem pendidikan formal, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor kependudukan, mobilitas peserta didik, maupun kendala administratif dalam pendataan.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dasar memperoleh layanan pendidikan secara merata, bermutu, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, APK SD/MI bukan sekadar indikator partisipasi, melainkan cerminan dari kemampuan sistem pendidikan daerah dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan dasar.

Penurunan APK pada tahun 2023 memberikan sinyal adanya tantangan struktural dalam penyediaan dan pemerataan layanan pendidikan dasar. Tantangan tersebut dapat muncul akibat ketidakseimbangan sebaran satuan pendidikan, perbedaan antara data kependudukan dan data peserta didik, mobilitas penduduk, maupun kesenjangan akses layanan pendidikan di berbagai wilayah.

Selain itu, APK SD/MI memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada aspek pendidikan. Partisipasi yang tinggi pada jenjang pendidikan dasar menjadi fondasi penting bagi peningkatan rata-rata lama sekolah dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, fluktuasi capaian APK SD/MI dalam tiga tahun terakhir menggambarkan kondisi yang perlu

dicermati secara serius sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Gresik. Tidak hanya APK, dibawah ini akan dijabarkan mengenai Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Gresik.

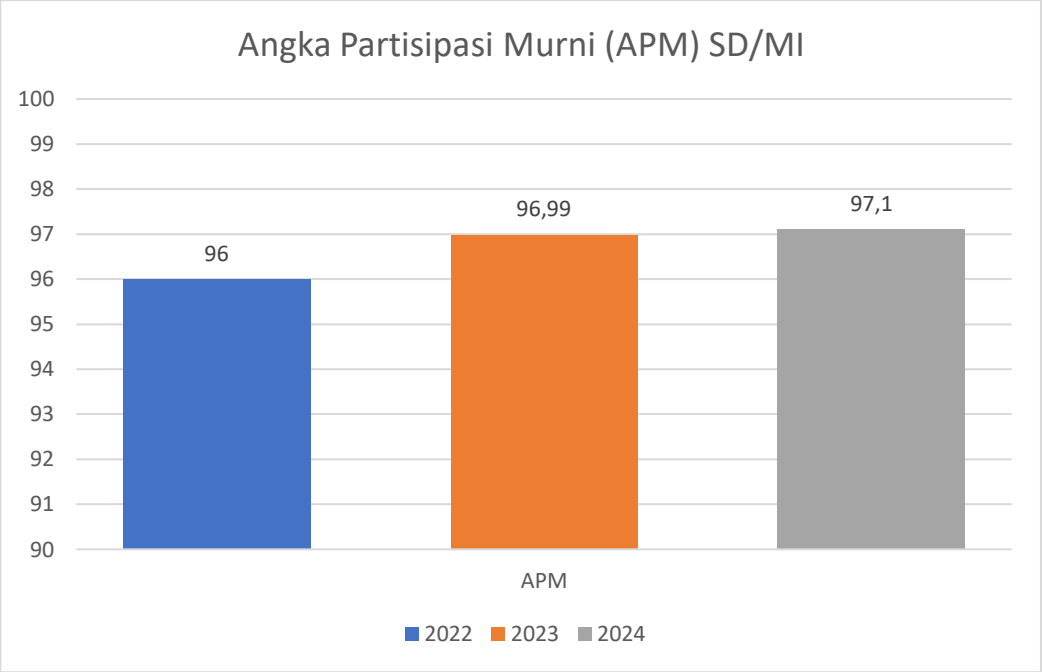

Gambar 13. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (2025)

Selama periode tiga tahun terakhir, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil. Pada tahun 2022, APM berada pada level 96%, kemudian meningkat menjadi 96,99% pada 2023, dan kembali mengalami kenaikan hingga 97,10% pada 2024. Kenaikan bertahap ini memperlihatkan bahwa mayoritas anak usia sekolah dasar di Kabupaten Gresik telah berpartisipasi dalam pendidikan pada usia yang sesuai, yang mencerminkan efektivitas sistem penjangkauan layanan pendidikan dasar.

Tingginya capaian APM ini juga merefleksikan peran penting kebijakan daerah dalam memperluas akses pendidikan dasar secara merata. Dalam kerangka Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, pemerintah daerah berkewajiban menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar memperoleh layanan pendidikan tepat waktu tanpa hambatan geografis maupun sosial-ekonomi. APM yang mendekati 100% mengindikasikan bahwa tugas dasar penyediaan akses sudah berjalan

relatif baik, meskipun tetap diperlukan penguatan dari sisi pemerataan mutu layanan.

Secara lebih luas, partisipasi murni pada jenjang SD/MI berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Gresik. Ketika anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar pada usia ideal, maka dampaknya akan tercermin pada peningkatan rata-rata lama sekolah dan penguatan komponen pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, APM yang tinggi bukan sekadar pencapaian angka, melainkan pondasi penting dalam membangun daya saing sumber daya manusia daerah ke depan.

3) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs

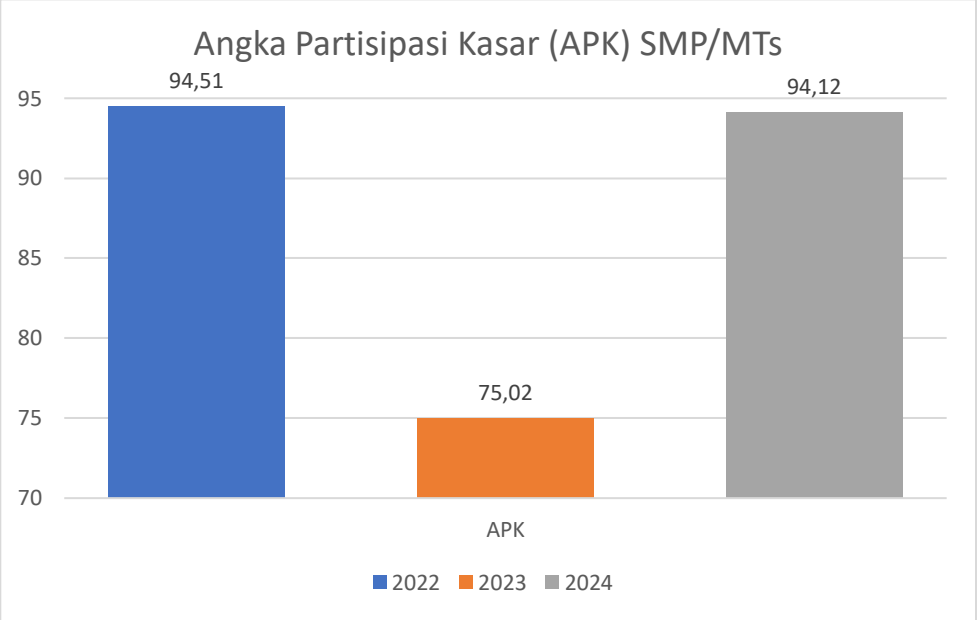

Gambar 14. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (2025)

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Gresik dalam tiga tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup tajam. Pada tahun 2022, APK tercatat sebesar 94,51%, menggambarkan cakupan layanan pendidikan menengah pertama yang sangat luas. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis hingga 75,02%, sebelum kembali meningkat ke 94,12% pada tahun 2024. Pola fluktuatif ini menandakan adanya ketidakstabilan dalam keberlangsungan akses pendidikan jenjang SMP/MTs, yang dapat berkaitan dengan perubahan

kondisi sosial-ekonomi, faktor transisi dari SD ke SMP, serta aspek daya tampung satuan pendidikan.

Dalam konteks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022, pemerintah daerah wajib menjamin bahwa seluruh anak usia 13–15 tahun memperoleh layanan pendidikan menengah pertama tanpa hambatan akses. Oleh sebab itu, penurunan yang cukup signifikan pada 2023 dapat mencerminkan adanya celah dalam pemenuhan kewajiban layanan dasar tersebut, meskipun pemulihan cepat pada 2024 menunjukkan adanya penguatan kembali pada sisi penyediaan maupun partisipasi.

Lebih jauh lagi, APK SMP/MTs memiliki hubungan erat dengan peningkatan komponen pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jenjang pendidikan menengah pertama merupakan fase krusial dalam membangun keterampilan dasar lanjutan, kesiapan kerja, maupun kesiapan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Fluktuasi angka partisipasi pada jenjang ini dapat berdampak pada stabilitas capaian rata-rata lama sekolah dan mutu SDM daerah secara umum. Dengan demikian, stabilitas APK SMP/MTs menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana sistem pendidikan daerah mampu menopang pembangunan manusia yang berkelanjutan. Lebih lanjut dibawah ini akan ditampilkan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs di Kabupaten Gresik.

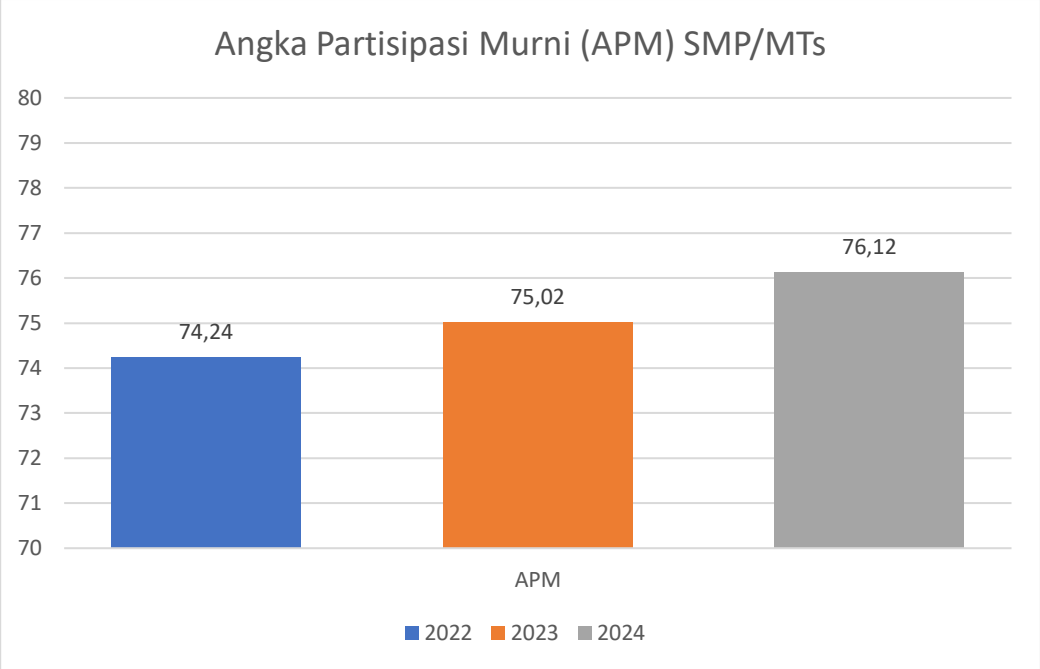

Gambar 15. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (2025)

Selama tiga tahun terakhir, Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dari 74,24% pada 2022 menjadi 75,02% pada 2023, dan meningkat lagi menjadi 76,12% pada 2024. Tren positif ini menggambarkan semakin banyak anak usia 13–15 tahun yang dapat bersekolah sesuai jenjangnya, menandakan perbaikan dalam kesinambungan akses pendidikan dari jenjang dasar ke menengah pertama.

Kenaikan ini juga mencerminkan penguatan fungsi layanan pendidikan dasar lanjutan di tingkat daerah, terutama dalam hal pemerataan kesempatan belajar bagi kelompok usia sekolah. Stabilitas peningkatan partisipasi ini menjadi sinyal bahwa upaya penjangkauan dan pemerataan akses mulai menunjukkan hasil, baik melalui penyediaan sarana pendidikan, peningkatan daya tampung, maupun perbaikan mekanisme pendataan peserta didik.

Dari perspektif pembangunan manusia, partisipasi pendidikan pada jenjang SMP/MTs memiliki peran yang sangat strategis. Pendidikan pada usia remaja awal merupakan fondasi penting dalam membentuk keterampilan dasar lanjutan, kesiapan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, serta kesiapan memasuki dunia kerja di masa depan. Oleh

karena itu, peningkatan APM pada jenjang ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah, yang menjadi salah satu komponen kunci dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dengan kata lain, perbaikan akses pendidikan menengah pertama tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Gresik secara menyeluruh, mendukung arah pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

4) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA

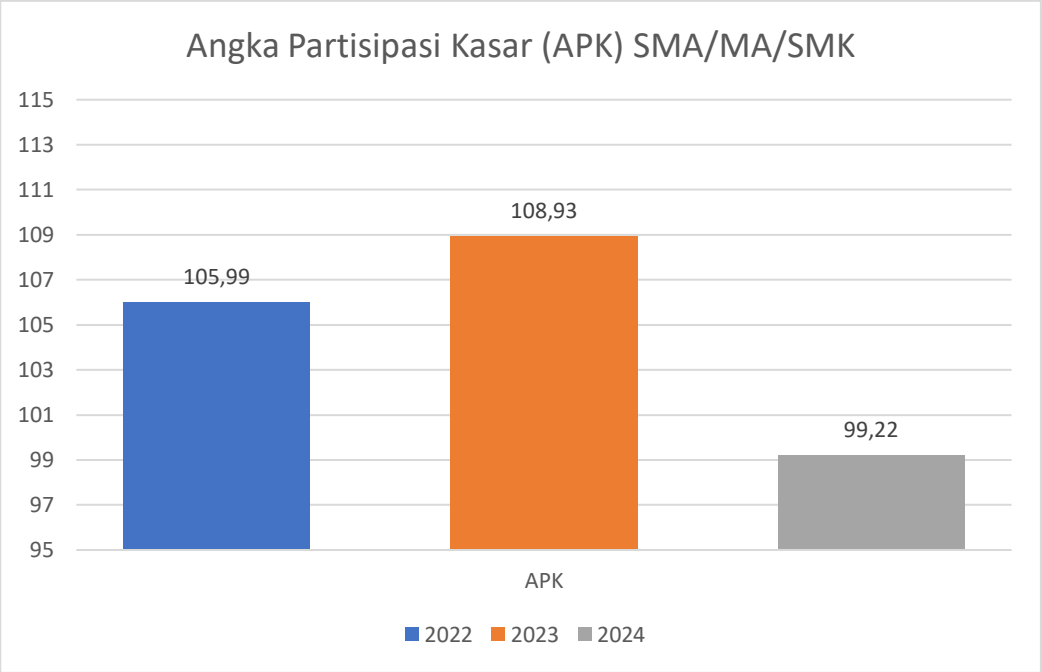

Gambar 16. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
Sumber: BPS Kab. Gresik (2024); BPS Kab. Gresik (2025)

Dalam tiga tahun terakhir, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/MA/SMK di Kabupaten Gresik mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, APK tercatat sebesar 105,99%, meningkat menjadi 108,93% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup mencolok hingga berada di angka 99,22%.

Peningkatan pada 2022 hingga 2023 menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan menengah atas masih relatif terbuka luas, bahkan melampaui jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut. Hal ini

mengindikasikan adanya mobilitas siswa dari luar wilayah Kabupaten Gresik, serta tingginya tingkat keberlanjutan pendidikan dari jenjang sebelumnya.

Sebaliknya, penurunan yang terjadi pada 2024 menggambarkan adanya penyesuaian atau perubahan komposisi peserta didik, baik karena faktor demografis (penurunan jumlah penduduk usia sekolah) maupun mobilitas pelajar ke wilayah lain. Selain itu, dinamika ini juga dapat mencerminkan tantangan dalam menjaga kesinambungan akses dan daya tampung, terutama pada wilayah-wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang lebih rendah atau fasilitas pendidikan yang terbatas.

Meskipun demikian, capaian ini secara umum menunjukkan bahwa akses pendidikan menengah atas di Kabupaten Gresik telah relatif terbuka bagi kelompok usia sekolah, dengan daya serap lembaga pendidikan yang cukup tinggi. Stabilitas APK di atas 90% memperlihatkan kapasitas layanan pendidikan yang kuat, namun tetap memerlukan upaya pengendalian dan pemerataan agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah dan antarjenjang. Dibawah ini juga diuraikan mengenai Angka Partisipasi Murni (APM) SMK/MA/SMK Kabupaten Gresik

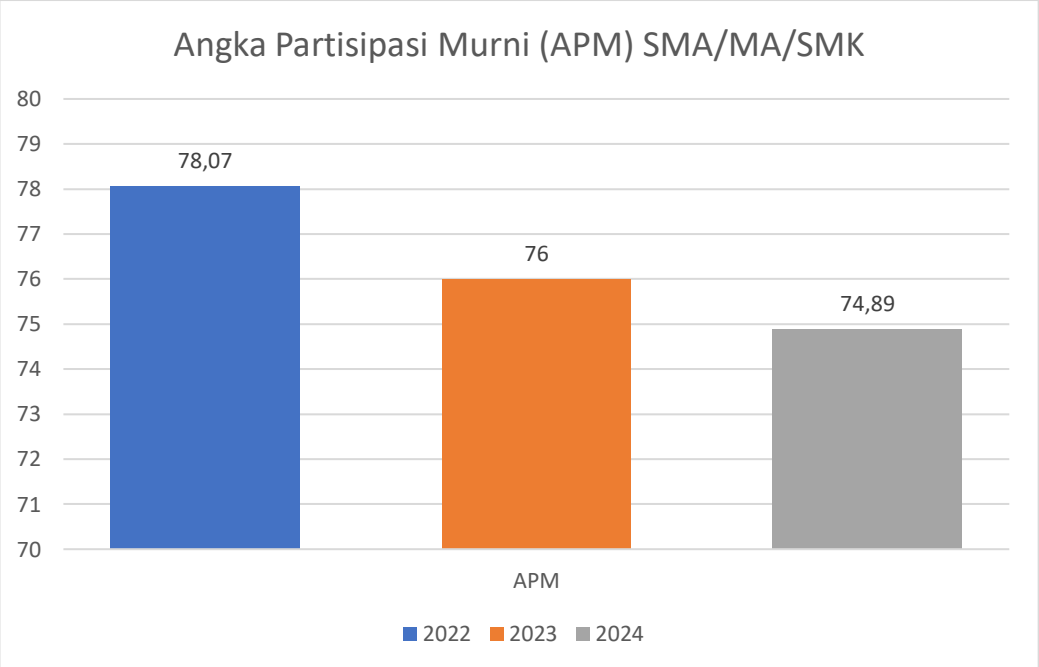

Gambar 17. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
Sumber: BPS Kab. Gresik (2024); BPS Kab. Gresik (2025)

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMA/MA/SMK Kabupaten Gresik dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan layanan pendidikan. Pada tahun 2022, APM berada di angka 78,07%, kemudian turun menjadi 76,00% pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 74,89% di tahun 2024. Meskipun angka tersebut masih berada dalam kategori cakupan layanan yang relatif tinggi, tren penurunan ini menunjukkan perlunya penguatan strategi pemerataan akses pendidikan, terutama bagi kelompok usia sekolah yang rentan tidak melanjutkan ke jenjang menengah.

b. Angka Putus Sekolah

Putus sekolah merupakan salah satu permasalahan mendasar dalam pembangunan pendidikan daerah yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kendala dalam akses dan keberlanjutan pendidikan, tetapi juga menjadi indikator ketimpangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat. Anak-anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal berisiko mengalami keterbatasan dalam memperoleh keterampilan, pekerjaan layak, serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, penanganan masalah putus sekolah menjadi prioritas penting dalam upaya mewujudkan pemerataan layanan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Gresik. Berikut adalah angka putus sekolah di Kab. Gresik

Tabel 2.9 Angka Putus Sekolah Kab. Gresik

APK/ JENJANG	2022	2023	2024
SD	55	106	-
SMP	22	56	-
SMA	15	10	-
SMK	82	28	-
Jumlah	**174**	**200**	**-**

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah (Kemdikbud, 2023)

Berdasarkan Tabel 2.11, jumlah angka putus sekolah di Kabupaten Gresik mengalami fluktuasi selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 174 siswa yang putus sekolah, meningkat menjadi 200 siswa

pada tahun 2023. Jika dilihat per jenjang, pada tahun 2023 tingkat putus sekolah tertinggi terjadi di jenjang SD dengan 106 siswa, diikuti oleh SMK sebanyak 28 siswa, SMP 56 siswa, dan SMA 10 siswa. Meskipun terdapat kenaikan total angka putus sekolah dibanding tahun sebelumnya, data ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan dasar masih menjadi penyumbang terbesar. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan program penuntasan wajib belajar dan peningkatan dukungan bagi siswa dari keluarga rentan agar dapat terus melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

c. Angka Partisipasi

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah. Indikator ini menggambarkan sejauh mana penduduk usia sekolah dapat mengakses dan berpartisipasi aktif dalam sistem pendidikan formal, baik pada jenjang dasar maupun menengah. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran dan kesempatan yang baik terhadap pentingnya pendidikan, sementara angka yang rendah dapat menjadi sinyal adanya hambatan dalam pemerataan akses, seperti kondisi ekonomi, geografis, maupun sosial budaya. Oleh karena itu, analisis terhadap angka partisipasi sekolah menjadi landasan penting dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Daerah (RIPPD), karena memberikan gambaran nyata tentang sejauh mana pemerataan dan keberlanjutan pendidikan telah terwujud, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan akses dan mutu pendidikan di masa mendatang.

1) Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Sederajat

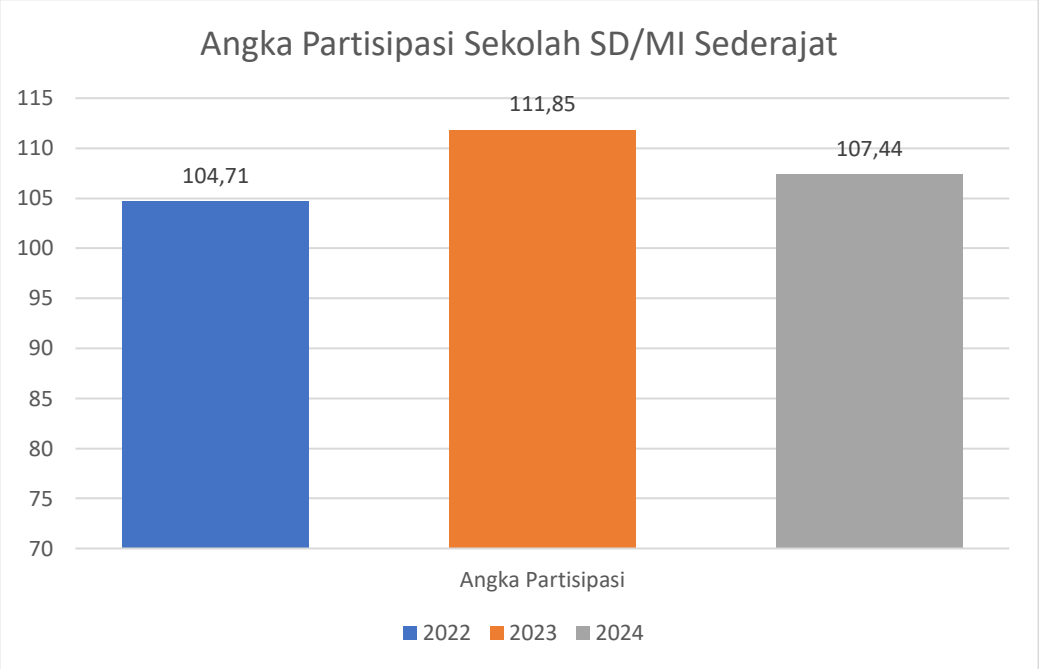

Gambar 18. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Sederajat
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (2025)

Berdasarkan grafik yang menampilkan Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Sederajat, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, angka partisipasi tercatat sebesar 104,71%, kemudian mengalami peningkatan cukup tinggi pada tahun 2023 menjadi 111,85%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, partisipasi siswa di jenjang pendidikan dasar sangat tinggi, bahkan melampaui jumlah anak usia sekolah dasar, yang mengindikasikan adanya keterlibatan siswa dari luar kelompok usia tersebut. Namun, pada tahun 2024 angka partisipasi menurun 107,44%.

2) Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Sederajat

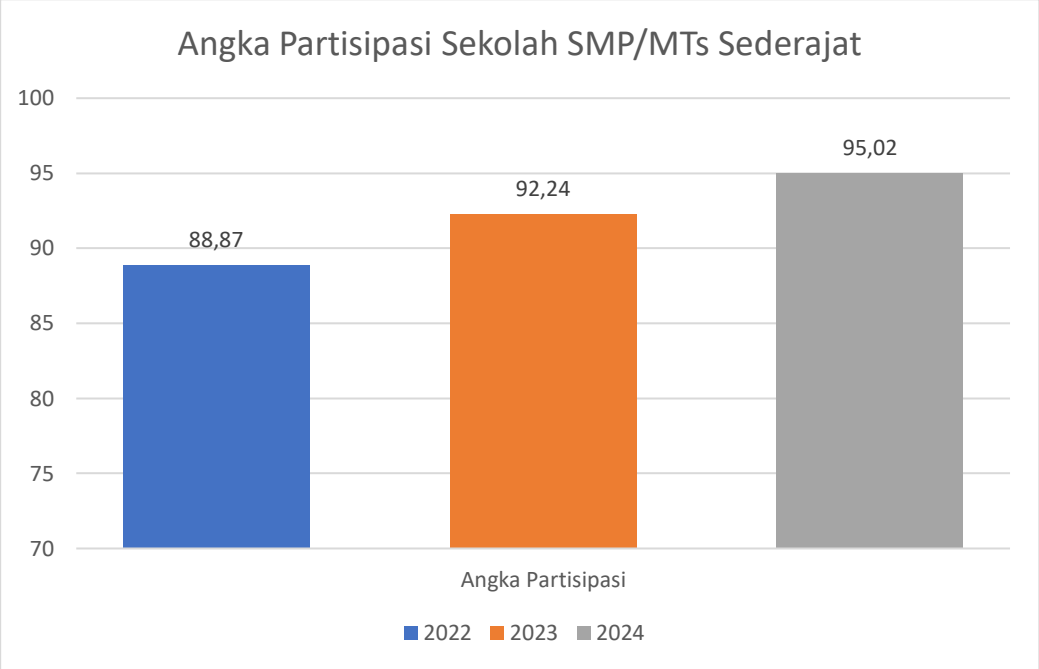

Gambar 19. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Sederajat
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (2025)

Berdasarkan grafik yang menampilkan Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Sederajat, terlihat adanya tren peningkatan yang stabil selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, angka partisipasi tercatat sebesar 88,87%, kemudian meningkat menjadi 92,24% pada tahun 2023. Peningkatan positif ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan capaian 95,02%. Kenaikan yang konsisten tersebut menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam upaya memperluas akses pendidikan di jenjang menengah pertama. Hal ini dapat mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mendorong anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP/MTs serta menekan angka putus sekolah yang masih menjadi tantangan di beberapa wilayah.

3) Laju Pertumbuhan Peserta Didik

Laju pertumbuhan peserta didik menunjukkan persentase perubahan jumlah murid dalam periode tertentu dalam kasus ini dari tahun 2019 ke 2024 (selama 5 tahun). Nilai LP ini digunakan untuk melihat tren kenaikan atau penurunan jumlah peserta didik di setiap kecamatan dan

jenjang pendidikan. Rumus yang digunakan adalah rumus pertumbuhan majemuk *(Compound Annual Growth Rate / CAGR):*

$$\text{LP} = \left(\frac{M_{2024}}{M_{2019}} \right)^{\frac{1}{5}} - 1$$

Keterangan:

M2024M_{2024}M2024 = jumlah murid pada tahun 2024

M2019M_{2019}M2019 = jumlah murid pada tahun 2019

555 = jumlah tahun antar periode (2019–2024)

Analisis :

Nilai LP (%)	Arti/Interpretasi
> 0%	Jumlah murid meningkat (pertumbuhan positif)
= 0%	Jumlah murid stabil
< 0%	Jumlah murid menurun (pertumbuhan negatif)

Tabel 2.10 Prediksi Jumlah Murid Kabupaten Gresik 2024-2025 sampai dengan 2028-2029

Kecamatan	LP RA	LP TK	LP SD	LP MI	LP SMP	LP MTS	LP SMA	LP MA	LP SMK
Wringinanom	4%	3%	-2%	0%	1%	4%	3%	24%	2%
Driyorejo	4%	1%	-1%	4%	3%	5%	2%	10%	6%
Kedamean	3%	4%	-1%	1%	3%	-4%	0%	-6%	-7%
Menganti	4%	4%	2%	2%	1%	3%	1%	20%	4%
Cerme	-2%	3%	-1%	0%	0%	2%	0%	-2%	4%
Benjeng	5%	3%	-2%	0%	-2%	2%	-1%	3%	-3%
Balongpanggang	2%	1%	0%	5%	1%	-14%	4%	-11%	-5%
Duduksampeyan	-1%	2%	-2%	5%	-3%	-11%	2%	-7%	0%
Kebomas	18%	1%	1%	0%	-2%	-5%	12%	-6%	8%
Gresik	0%	0%	-3%	-6%	-2%	-17%	-8%	-100%	0%
Manyar	4%	4%	1%	0%	4%	2%	2%	6%	2%
Bungah	3%	3%	1%	-1%	7%	4%	2%	1%	1%
Sidayu	-8%	4%	-2%	-2%	4%	-5%	0%	14%	3%
Dukun	0%	1%	-3%	0%	7%	1%	6%	-1%	-11%
Panceng	-5%	-1%	3%	-2%	-2%	-2%	36%	-5%	-9%
Ujungpangkah	3%	2%	0%	1%	13%	-2%	3%	-5%	7%
Sangkapura	3%	-2%	0%	-3%	-3%	5%	-1%	-1%	-2%
Tambak	-2%	-5%	0%	-1%	-6%	7%	11%	-1%	-100%

Selama periode lima tahun terakhir (2019–2024), dinamika jumlah murid di berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Gresik menunjukkan pola pertumbuhan yang bervariasi antar kecamatan dan jenjang. Secara umum, jenjang pendidikan dasar (SD dan MI) cenderung mengalami pertumbuhan yang stagnan hingga menurun, dengan banyak kecamatan mencatat penurunan 1–3% per tahun, seperti di Kecamatan Cerme, Benjeng, dan Duduksampeyan. Sebaliknya, jenjang pendidikan menengah dan kejuruan (SMP, SMA, SMK) menunjukkan pertumbuhan yang lebih fluktuatif, dipengaruhi oleh faktor jumlah lulusan SD/MI dan persebaran sekolah.

Beberapa wilayah menunjukkan laju pertumbuhan murid yang tinggi, misalnya Kecamatan Kebomas dengan pertumbuhan mencolok di jenjang RA (18%) dan SMA (12%), serta Ujungpangkah yang mengalami peningkatan signifikan di jenjang SMP (13%) dan SMK (7%). Pertumbuhan yang tinggi di wilayah-wilayah tersebut dapat mencerminkan meningkatnya akses dan minat masyarakat terhadap pendidikan menengah, terutama di wilayah urban dan sub-urban yang memiliki daya tarik ekonomi lebih besar.

Di sisi lain, beberapa kecamatan mengalami penurunan tajam, seperti Balongpanggang dan Duduksampeyan pada jenjang MTs (turun 14% dan 11%), serta Gresik dan Tambak yang bahkan mencatat penurunan ekstrem di jenjang MA dan SMK (hingga -100%), menandakan berkurangnya lembaga aktif atau migrasi siswa ke wilayah lain. Penurunan ini perlu mendapat perhatian karena bisa berdampak pada efisiensi guru dan sarana pendidikan di daerah tersebut.

Adapun jenjang RA dan TK secara umum menunjukkan tren positif di sebagian besar kecamatan, dengan pertumbuhan rata-rata 2–4% per tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini. Namun, terdapat anomali di beberapa wilayah seperti Sidayu (-8%) dan Tambak (-5%) yang perlu dikaji lebih lanjut, kemungkinan karena keterbatasan lembaga PAUD formal atau penurunan jumlah penduduk usia dini

Tabel 2.11 Prediksi Jumlah Murid Kabupaten Gresik 2024-2025 sampai dengan 2027-2028

No.	Tahun	RA	TK	SD	MI	SMP	MTS	SMA	MA	SMK
1.	2019-2020	9752	31018	-	50251	-	22933	-	12062	-
2.	2020-2021	9149	30397	75457	51717	34123	23235	20101	13024	21506
3.	2021-2022	9283	29672	74280	50882	35106	23627	19984	12441	23246
4.	2022-2023	9932	-	73382	51068	34177	23732	20208	12667	21563
5.	2023-2024	10529	33502	73274	50137	34715	23371	20654	12452	22265
6.	2024-2025	10733	33506	74054	50109	35666	23482	21145	12551	23134
7.	2025-2026	10940	34159	73707	50080	36463	23593	21414	12652	23560
8.	2026-2027	11152	34824	73362	50052	36869	23705	21687	12753	23994
9	2027-2028	11368	35502	73019	50023	37237	23817	21963	12855	24435

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Tabel prediksi jumlah murid Kabupaten Gresik tahun 2024–2029 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah peserta didik secara bertahap di hampir semua jenjang pendidikan, meskipun dengan laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Pada jenjang RA dan TK, jumlah murid terus meningkat setiap tahun, dari 10.733 dan 33.506 pada tahun 2024–2025 menjadi 11.588 dan 36.194 pada tahun 2028–2029. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini.

Pada jenjang SD dan MI, pertumbuhan cenderung stabil bahkan sedikit menurun. Jumlah murid SD turun dari 74.054 pada tahun 2024–2025 menjadi 72.677 pada tahun 2028–2029, sementara MI juga mengalami penurunan tipis dari 50.109 menjadi 49.995. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berkurangnya angka kelahiran serta distribusi siswa ke sekolah swasta atau madrasah.

Berbeda dengan tingkat dasar, jenjang SMP dan MTS menunjukkan tren yang relatif positif. Murid SMP meningkat dari 35.666 menjadi 37.279 selama periode tersebut, sedangkan MTS juga mengalami kenaikan dari 23.482 menjadi 23.930 siswa. Kenaikan ini menunjukkan adanya minat yang stabil terhadap pendidikan tingkat menengah pertama baik di sekolah umum maupun berbasis agama.

Sementara itu, jenjang pendidikan menengah atas (SMA, MA, dan SMK) memperlihatkan peningkatan paling konsisten dan signifikan. Jumlah murid SMA meningkat dari 21.145 menjadi 22.243, MA naik dari 12.551 menjadi 12.957, dan SMK menunjukkan kenaikan paling besar dari 23.134 menjadi 24.885 siswa hingga tahun 2028–2029. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa minat siswa terhadap pendidikan lanjutan, khususnya pendidikan kejuruan, semakin meningkat seiring dengan kebutuhan tenaga kerja terampil di wilayah industri Gresik.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan jumlah murid yang stabil di sebagian besar jenjang pendidikan, terutama pada tingkat menengah dan kejuruan.

4) Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Gresik

Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Gresik menunjukkan variasi signifikan antar kecamatan, mencerminkan ketimpangan partisipasi pendidikan yang perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan kebijakan daerah. Berikut histogram jumlah anak tidak sekolah (ATS) per kecamatan di Kabupaten Gresik yakni:

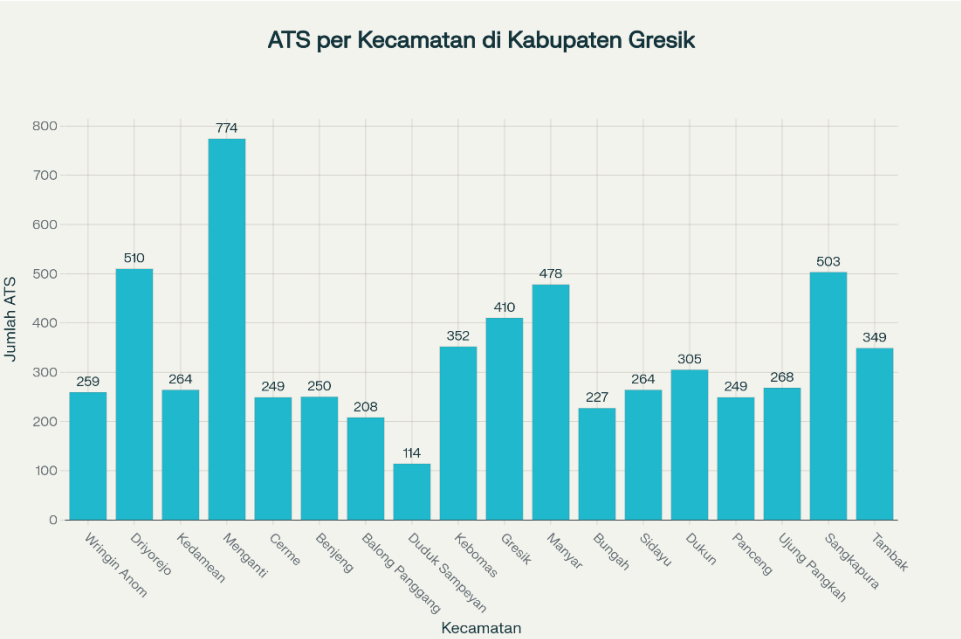

Gambar 20. Histogram ATS per Kecamatan Kabupaten Gresik

Berdasarkan data, jumlah ATS paling rendah terdapat di Kecamatan Duduk Sampeyan, yaitu sebanyak 114 anak, sementara angka tertinggi tercatat di Kecamatan Menganti, dengan 774 anak. Lima kecamatan dengan jumlah ATS tertinggi secara berurutan adalah:

1) Menganti (774 anak)
2) Driyorejo (510 anak)
3) Sangkapura (503 anak)
4) Manyar (478 anak)
5) Gresik (410 anak)

Data tersebut mengindikasikan bahwa kawasan perkotaan dan pinggiran cenderung menghadapi tantangan lebih besar dalam hal partisipasi sekolah. Hal ini bisa berkaitan dengan faktor mobilitas penduduk, tekanan ekonomi, atau keterbatasan akses dan dukungan

pendidikan yang memadai. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah ATS terendah adalah:

1) Duduk Sampeyan (114 anak)
2) Balongpanggang (208 anak)
3) Bungah (227 anak)
4) Cerme dan Panceng (masing-masing 249 anak)

Wilayah-wilayah ini menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik, namun tidak sepenuhnya bebas dari tantangan, sehingga tetap membutuhkan perhatian kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Secara umum, rata-rata jumlah ATS per kecamatan berada pada kisaran 250–350 anak, namun terdapat deviasi yang cukup besar antarwilayah, menandakan perlunya intervensi yang berbasis data lokal dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kecamatan. Evaluasi yang menyeluruh dan berbasis kewilayahan menjadi kunci dalam menyusun program penanganan ATS yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Perlu dicermati pula bahwa tingginya angka ATS di beberapa wilayah juga dipengaruhi oleh dinamika kependudukan, terutama anak-anak yang telah mengikuti orang tuanya keluar dari Kabupaten Gresik, tetapi masih tercatat sebagai penduduk dan belum terdata sebagai peserta didik di wilayah tujuan. Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data administratif dan realitas di lapangan, yang berpotensi memperbesar angka ATS secara administratif, meskipun sebagian dari anak-anak tersebut sudah mengakses pendidikan di luar wilayah Gresik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pendidikan di tingkat kabupaten.

Berikut rekomendasi kebijakan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Gresik yakni :

1) Pemetaan Ulang dan Validasi Data ATS Secara Berkala
   - Melakukan pembaruan data ATS secara periodik di tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan.
   - Mengintegrasikan data dari Dinas Pendidikan, Dukcapil, dan instansi lain untuk meminimalisasi data ganda atau tidak sinkron.

- Menyisir keberadaan anak yang telah keluar dari wilayah Gresik namun masih terdata sebagai penduduk aktif.

2) Intervensi Spesifik Wilayah Berbasis Data
   - Menyusun program penanganan ATS sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing kecamatan.
   - Fokus pada kecamatan dengan ATS tinggi seperti Menganti, Driyorejo, Sangkapura, Manyar, dan Gresik melalui pendekatan lintas sektor (pendidikan, sosial, dan ketenagakerjaan).
   - Memberikan dukungan tambahan untuk wilayah dengan ATS rendah agar tetap terjaga dan tidak mengalami kenaikan.
3) Peningkatan Akses dan Layanan Pendidikan Alternatif
   - Memperluas layanan pendidikan non-formal seperti PKBM, Kejar Paket A/B/C, dan pendidikan berbasis komunitas.
   - Menyediakan insentif atau bantuan pendidikan (transportasi, seragam, perlengkapan sekolah) bagi keluarga rentan.
   - Mendorong pelibatan dunia usaha dan industri dalam program pendidikan vokasional untuk anak usia sekolah yang putus sekolah.
4) Penguatan Sosialisasi dan Peran Satuan Pendidikan
   - Meningkatkan peran sekolah dalam deteksi dini anak berisiko putus sekolah melalui pemantauan kehadiran dan prestasi belajar.
   - Melibatkan guru, wali kelas, dan komite sekolah dalam pelacakan dan pendekatan kepada keluarga siswa yang rawan putus sekolah.
5) Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Wilayah
   - Membangun sistem koordinasi yang efektif antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, Kecamatan, dan Pemerintah Desa.
   - Menyusun mekanisme pelaporan ATS yang dinamis, termasuk kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam pendataan siswa migran.
6) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
   - Menetapkan indikator keberhasilan yang terukur dalam program penanganan ATS.

- Melakukan evaluasi program setiap tahun untuk menilai efektivitas dan merumuskan strategi lanjutan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

5) Kelompok Rentan Kabupaten Gresik

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Gresik menempatkan kelompok rentan sebagai prioritas penting dalam upaya mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Kelompok ini mencakup anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, anak di wilayah terpencil, serta mereka yang menghadapi hambatan sosial dan ekonomi dalam mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan agar seluruh anak, tanpa terkecuali, dapat memperoleh kesempatan belajar yang setara dan bermutu sesuai dengan prinsip *no one left behind* dalam pembangunan pendidikan daerah.

Tabel 2.12 Rekapitulasi Pengaduan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Jenis PPKS	2023	2024
Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	0	2
Anak Jalanan	1	5
Anak terlantar	0	1
Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	1	0
Gelandangan dan Gelandangan Psikotik	12	12
Korban Bencana Sosial	1	0
Lansia Terlantar	4	6
Pengamen	1	4
Penyandang Disabilitas Mental	100	149
Tanpa Keterangan (Hasil Razia POL PP	0	1
Tuna Sulisa	0	9
Total	120	189

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gresik (2025)

Menurut Dinas Sosial, kelompok masyarakat yang rentan atau mengalami hambatan dalam mencapai kesejahteraan dapat menimbulkan masalah sosial. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mencakup berbagai kelompok yang jumlahnya terus meningkat seiring kompleksitas

masalah sosial. Di Kabupaten Gresik terdapat 26 jenis PPKS yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi kerentanan dalam aspek kesehatan, ekonomi, mental, dan sosial.

Tabel ini menunjukkan bahwa pengaduan terhadap kelompok rentan meningkat signifikan pada tahun 2024. Peningkatan paling tajam terjadi pada **penyandang disabilitas mental**, diikuti oleh **anak jalanan** dan **tuna susila**. Hal ini bisa menjadi indikator bahwa masalah sosial di masyarakat semakin kompleks, atau bahwa pelaporan dan deteksi kasus semakin membaik.

Berdasarkan data pada Tabel terdapat beberapa temuan dan simpulan menarik terkait perkembangan pengaduan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara tahun 2023 dan 2024. Jumlah pengaduan mengalami kenaikan drastis sebesar 69 kasus, dari 120 menjadi 189, yang dapat mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu sosial atau bertambahnya kasus yang memang memerlukan penanganan. Kategori dengan kenaikan pengaduan tertinggi adalah Penyandang Disabilitas Mental, yang naik dari 100 kasus menjadi 149 kasus.

Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang semakin kompleks bagi kelompok ini, sekaligus peningkatan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kondisi mereka. Selain itu, muncul kategori baru yang sebelumnya tidak tercatat, seperti Tuna Susila (9 kasus) dan Tanpa Keterangan (1 kasus), yang kemungkinan besar merupakan hasil dari razia atau pendataan baru oleh aparat. Sementara itu, kategori Gelandang & Gelandangan Psikotik tetap stabil dengan 12 kasus di kedua tahun, yang bisa menunjukkan penanganan yang belum berkembang atau jumlah yang memang tidak berubah signifikan.

Di sisi lain, beberapa kategori mengalami penurunan seperti Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Korban Bencana Sosial, masing-masing turun menjadi nol kasus, yang mungkin dipengaruhi oleh menurunnya insiden atau peristiwa terkait. Menariknya, perhatian terhadap kelompok anak tampak meningkat, dengan naiknya jumlah pengaduan terhadap Anak Jalanan, Anak Terlantar, dan Anak dengan

Kedisabilitasan (ADK), yang dapat mencerminkan kerentanan anak di ruang publik yang semakin terlihat dan direspons oleh masyarakat.

4. Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan

a. Guru

1) Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Gresik

Tabel 2.13 Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Gresik

JENJANG	JENIS PTK	JUMLAH PTK
TK/RA Sederajat	GURU	5.869
	TENDIK	437
SD/MI Sederajat	GURU	9.662
	TENDIK	815
SMP/MTs Sederajat	GURU	5.072
	TENDIK	673
SMA/MA/SMK	GURU	4326
Sederajat	TENDIK	503

Sumber: BPS Kab. Gresik (2025); Data Dinas Pendidikan Kab. Gresik (2025); Data Cabang Dinas Kab. Gresik (2025)

Berdasarkan data jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di Kabupaten Gresik, terlihat bahwa distribusi guru dan tenaga kependidikan tersebar di seluruh jenjang pendidikan dengan jumlah yang cukup signifikan. Pada jenjang TK/RA sederajat, terdapat 5.869 guru dan 437 tenaga kependidikan, sedangkan pada jenjang SD/MI sederajat jumlahnya meningkat menjadi 9.662 guru dan 815 tenaga kependidikan. Untuk jenjang SMP/MTs sederajat, tercatat 5.072 guru dengan 673 tenaga kependidikan. Sementara itu, pada jenjang SMA/MA/SMK sederajat terdapat 4.326 guru dan 503 tenaga kependidikan. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki sumber daya manusia pendidikan yang cukup besar, namun tetap memerlukan pemerataan, peningkatan kompetensi, serta penguatan kapasitas bagi guru dan tenaga kependidikan di setiap jenjang agar mutu layanan pendidikan semakin optimal.

2) Kualifikasi Pendidikan Guru di Kabupaten Gresik

Tabel 2.14 Kualifikasi Pendidikan Guru di Kabupaten Gresik

JENJANG	SD	SMP	SMAK	D1	D2	D3	S1D4	S2	S3
TK/RA Sederajat	2	16	906	25	63	54	3826	26	-
SD/MI Sederajat	1	1	46	3	15	5	5,026	232	-
SMP/MTs Sederajat	1	11	5	3	6	2,001	310	5	-
SMA/MA/SMK Sederajat	-	-	-	-	-	32	2905	617	7
Jumlah	**4**	**28**	**957**	**31**	**84**	**2092**	**12067**	**880**	**7**

Sumber: BPS Kab. Gresik (2025); Data Dinas Pendidikan Kab. Gresik (2025); Data Cabang Dinas Kab. Gresik (2025)

Berdasarkan data kualifikasi pendidikan guru di Kabupaten Gresik, sebagian besar pendidik telah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4, sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan. Dari total keseluruhan guru di berbagai jenjang, tercatat 12.067 orang atau mayoritas telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang S1/D4, sementara 880 guru telah menempuh pendidikan S2 dan 7 guru telah mencapai jenjang S3. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil guru yang berpendidikan di bawah jenjang sarjana, seperti lulusan D3 (2.092 orang), D2 (84 orang), dan SMAK atau sederajat (957 orang). Jika ditinjau per jenjang, guru pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs masih terdapat yang berpendidikan di bawah S1, sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK dominan telah menyelesaikan pendidikan sarjana dan bahkan magister. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kualifikasi pendidikan guru di Kabupaten Gresik sudah cukup baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan jenjang pendidikan bagi guru yang belum memenuhi standar minimal S1 guna mendukung peningkatan mutu pembelajaran di semua satuan pendidikan.

3) Sertifikasi Guru

Tabel 2.15 Sertifikasi Guru di Kabupaten Gresik

JENJANG	SERTIFIKASI	
	SUDAH	BELUM
TK/RA Sederajat	1485	3461
SD/MI Sederajat	2253	3076
SMP/MTs Sederajat	1201	1136
SMA/MA/SMK Sederajat	1965	1511
Jumlah	**6904**	**9184**

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kab. Gresik (2025); Data Cabang Dinas Kab. Gresik (2025)

Berdasarkan data sertifikasi guru di Kabupaten Gresik, terlihat bahwa jumlah pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik masih lebih sedikit dibandingkan dengan yang belum tersertifikasi. Dari total 16.088 guru, sebanyak 6.904 guru (sekitar 43%) telah memiliki sertifikasi, sementara 9.184 guru (sekitar 57%) belum tersertifikasi. Pada jenjang TK/RA sederajat, terdapat 1.485 guru yang sudah tersertifikasi, sedangkan 3.461 guru lainnya belum. Pada jenjang SD/MI sederajat, jumlah guru bersertifikat mencapai 2.253 orang, lebih rendah dibandingkan 3.076 guru yang belum. Untuk jenjang SMP/MTs sederajat, perbandingan antara guru yang sudah dan belum bersertifikat relatif seimbang, yakni 1.201 dan 1.136 guru. Sementara pada jenjang SMA/MA/SMK sederajat, jumlah guru yang telah bersertifikat sebanyak 1.965, sedangkan yang belum 1.511. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar guru telah memenuhi kualifikasi profesional, upaya peningkatan jumlah guru bersertifikat tetap menjadi prioritas penting guna menjamin mutu dan profesionalisme tenaga pendidik di Kabupaten Gresik.

4) Rasio Guru dengan Siswa

a) Rasio Guru SD/MI Sederajat dan SMP/MTS Sederajat dengan Siswa

Berdasarkan data dari Neraca Pendidikan Daerah (Kemdikbud, 2023), rasio guru terhadap siswa pada jenjang SD/MI sederajat adalah 1:16, sedangkan pada jenjang SMP/MTs sederajat sebesar 1:17. Artinya, setiap satu orang guru di tingkat SD/MI membimbing rata-rata 16 siswa, sementara di tingkat SMP/MTs membimbing sekitar 17 siswa. Rasio ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga pendidik pada kedua jenjang pendidikan relatif seimbang dan tergolong ideal untuk mendukung efektivitas proses belajar mengajar. Dengan rasio yang cukup rendah, diharapkan interaksi antara guru dan siswa dapat berjalan optimal sehingga kualitas pembelajaran dapat lebih terjamin.

Sedangkan, berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah (Kemdikbud, 2023) rasio guru PNS di Kabupaten Gresik terhadap siswa pada jenjang SD/MI sederajat adalah 1:52, sedangkan pada jenjang SMP/MTs sederajat sebesar 1:44. Hal ini menunjukkan bahwa setiap satu guru berstatus PNS di SD/MI membimbing rata-rata 52 siswa, sedangkan di SMP/MTs membimbing sekitar 44 siswa. Rasio yang cukup tinggi ini mengindikasikan bahwa jumlah guru PNS masih terbatas dibandingkan jumlah siswa yang dilayani, terutama di tingkat SD/MI. Kondisi tersebut menggambarkan perlunya penambahan formasi guru PNS atau pemerataan distribusi tenaga pendidik agar beban mengajar lebih proporsional dan kualitas pembelajaran dapat meningkat.

b) Rasio Guru SMA/MA dan SMK Sederajat dengan Siswa

Berdasarkan sumber dari Neraca Pendidikan Daerah (Kemdikbud, 2023) , rasio guru terhadap siswa pada jenjang SMA/MA sederajat di Kabupaten Gresik adalah 1:16, sedangkan pada jenjang SMK sederajat sebesar 1:15. Artinya, setiap satu orang guru di SMA/MA membimbing rata-rata 16 siswa,

sementara di SMK membimbing sekitar 15 siswa. Rasio ini tergolong ideal dan menunjukkan bahwa ketersediaan guru di tingkat pendidikan menengah atas relatif mencukupi untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Dengan rasio yang seimbang antara guru dan siswa, diharapkan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal, baik pada jalur akademik (SMA/MA) maupun vokasional (SMK).

Sedangkan berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah (Kemdikbud, 2023), rasio guru PNS di Kabupaten Gresik terhadap siswa pada jenjang SMA/MA sederajat adalah 1:51, sedangkan pada jenjang SMK sederajat mencapai 1:133. Data ini menunjukkan bahwa setiap satu guru PNS di SMA/MA membimbing rata-rata 51 siswa, sementara di SMK jumlahnya jauh lebih tinggi, yaitu 133 siswa. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa ketersediaan guru PNS di SMK masih sangat terbatas dibandingkan jumlah siswa yang dilayani. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya upaya penambahan dan pemerataan penempatan guru PNS, khususnya di SMK, agar beban mengajar lebih proporsional dan mutu pembelajaran di pendidikan vokasi dapat terjaga dengan baik.

5) Proyeksi Kebutuhan Guru Kabupaten Gresik

Tabel 2.16 Proyeksi Kebutuhan Guru RA Kabupaten Gresik 2023-2024

Kecamatan	Jumlah Sekolah RA	Jumlah Guru RA	Jumlah Murid RA	Ratio Ideal	Kebutuhan Guru Ideal	Guru Pensiun misal (3%)	Guru Setelah Pensiun	Kelebihan/ Kekurangan
Wringinanom	13	51	556	15	37	2	49	12
Driyorejo	21	95	1130	15	75	3	92	17
Kedamean	14	41	837	15	56	1	40	-16
Menganti	38	189	2316	15	154	6	183	29
Cerme	7	29	244	15	16	1	28	12
Benjeng	9	34	326	15	22	1	33	11
Balongpanggang	12	26	210	15	14	1	25	11
Duduksampeyan	15	47	576	15	38	1	46	7
Kebomas	3	14	185	15	12	0	14	1
Gresik	0	0	0	15	0	0	0	0
Manyar	8	69	932	15	62	2	67	5
Bungah	15	54	689	15	46	2	52	6
Sidayu	3	12	62	15	4	0	12	8
Dukun	16	75	718	15	48	2	73	25
Panceng	11	63	378	15	25	2	61	36
Ujungpangkah	10	49	446	15	30	1	48	18
Sangkapura	17	60	519	15	35	2	58	24
Tambak	13	43	405	15	27	1	42	15
Total	225	951	10529	15	702	29	922	221

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan data dari 18 kecamatan, tercatat 225 sekolah RA dengan total 951 guru dan 10.529 murid. Jika menggunakan rasio ideal 1 guru untuk 15 murid, maka jumlah kebutuhan guru ideal di seluruh kabupaten seharusnya sebanyak 702 orang guru.

Namun, setelah memperhitungkan guru yang pensiun (sekitar 3%), jumlah guru aktif menjadi 922 orang. Artinya, Kabupaten Gresik masih memiliki surplus 221 guru dibandingkan kebutuhan idealnya.

Kecamatan dengan kelebihan guru tertinggi antara lain Panceng, Menganti, Dukun, Sangkapura, dan Ujungpangkah. Kecamatan Panceng menempati posisi pertama dengan surplus 36 guru, karena dari 63 guru aktif hanya dibutuhkan 25 guru sesuai rasio ideal. Disusul Kecamatan Menganti dengan kelebihan 29 guru, yang juga tercatat sebagai wilayah dengan jumlah guru terbanyak di kabupaten (189 orang). Selanjutnya, Kecamatan Dukun memiliki surplus 25 guru, Sangkapura 24 guru, dan Ujungpangkah 18 guru. Kelebihan tenaga pendidik di wilayah-wilayah ini menunjukkan potensi untuk dilakukan redistribusi guru ke daerah yang masih kekurangan.

Sebaliknya, hanya Kecamatan Kedamean yang mengalami kekurangan tenaga guru RA, yakni defisit 16 guru dari kebutuhan ideal sebanyak 56 guru. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penambahan tenaga pendidik agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai rasio yang ideal, yaitu 1 guru untuk 15 murid.

Sementara itu, beberapa kecamatan lain seperti Wringinanom, Cerme, Benjeng, Balongpanggang, dan Tambak menunjukkan kelebihan guru dalam jumlah sedang, berkisar antara 11 hingga 15 orang. Distribusi guru di wilayah-wilayah ini tergolong cukup baik, namun sebagian guru dapat dialihkan untuk membantu daerah yang masih mengalami kekurangan, khususnya Kecamatan Kedamean, agar pemerataan kualitas pendidikan RA di Kabupaten Gresik dapat tercapai secara optimal.

Tabel 2.17 Proyeksi Kebutuhan Guru TK Kabupaten Gresik 2024-2025

Kecamatan	Jumlah Sekolah TK	Jumlah Guru TK	Jumlah Murid TK	Ratio Ideal	Kebutuhan Guru Ideal	Guru Pensiun misal (3%)	Guru Setelah Pensiun	Kelebihan/ Kekurangan
Wringinanom	31	104	1649	15	110	3	101	-9
Driyorejo	65	227	3265	15	218	7	220	3
Kedamean	20	67	1006	15	67	2	65	-2
Menganti	69	235	3318	15	221	7	228	7
Cerme	48	184	2645	15	176	6	178	2
Benjeng	38	115	1553	15	104	3	112	8
Balongpanggang	33	98	1274	15	85	3	95	10
Duduksampeyan	22	79	915	15	61	2	77	16
Kebomas	48	261	3798	15	253	8	253	0
Gresik	31	210	2664	15	178	6	204	26
Manyar	40	253	3691	15	246	8	245	-1
Bungah	22	113	1441	15	96	3	110	14
Sidayu	23	103	1242	15	83	3	100	17
Dukun	28	106	1120	15	75	3	103	28
Panceng	27	115	1084	15	72	3	112	39
Ujungpangkah	21	96	1104	15	74	3	93	20
Sangkapura	37	151	1207	15	80	5	146	66
Tambak	21	72	530	15	35	2	70	35
Total	624	2589	33506	15	2234	78	2511	278

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Secara keseluruhan, hasil proyeksi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki surplus tenaga guru TK secara agregat, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pemerataan distribusi antar kecamatan.

Berdasarkan Tabel Proyeksi Kebutuhan Guru TK Kabupaten Gresik Tahun 2024–2025, terlihat bahwa secara keseluruhan terdapat 624 sekolah TK dengan total 2.589 guru dan 33.506 murid. Dengan menggunakan rasio ideal 1 guru untuk 15 murid, maka kebutuhan guru ideal di Kabupaten Gresik seharusnya sebanyak 2.234 guru. Setelah memperhitungkan kemungkinan guru pensiun sebesar 3% (sekitar 78 orang), jumlah guru aktif diproyeksikan menjadi 2.511 orang, sehingga secara total terdapat kelebihan 278 guru di seluruh wilayah kabupaten.

Kelebihan guru terbesar ditemukan di beberapa kecamatan, antara lain Sangkapura dengan surplus 66 guru, disusul oleh Panceng (39 guru), Tambak (35 guru), Dukun (28 guru), dan Gresik (26 guru). Kecamatan-kecamatan ini menunjukkan distribusi tenaga pendidik yang berlebih, sehingga dapat menjadi sumber redistribusi guru ke daerah lain yang masih mengalami kekurangan.

Sementara itu, beberapa kecamatan menunjukkan kondisi yang relatif seimbang antara jumlah guru dan kebutuhan ideal, seperti Kebomas, Cerme, Menganti, dan Driyorejo, dengan selisih hanya berkisar antara –1 hingga +7 guru. Hal ini menandakan bahwa penyebaran tenaga pendidik di wilayah-wilayah tersebut sudah cukup proporsional dan tidak memerlukan intervensi besar.

Namun, terdapat pula beberapa kecamatan yang masih kekurangan tenaga pendidik, di antaranya Wringinanom (–9 guru), Kedamean (–2 guru), dan Manyar (–1 guru). Kekurangan ini tergolong kecil namun tetap perlu diperhatikan agar tidak mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran di tingkat pendidikan anak usia dini.

Tabel 2.18 Proyeksi Kebutuhan Guru SD Kabupaten Gresik 2024-2025

Kecamatan	Jumlah Sekolah SD	Jumlah Guru SD	Jumlah Murid SD	Ratio Ideal	Kebutuhan Guru Ideal	Guru Pensiun misal (3%)	Guru Setelah Pensiun	Kelebihan/ Kekurangan
Wringinanom	30	293	4710	20	236	9	284	49
Driyorejo	42	543	9403	20	470	16	527	57
Kedamean	21	214	3064	20	153	6	208	54
Menganti	39	485	9584	20	479	15	470	-9
Cerme	27	326	5232	20	262	10	316	55
Benjeng	28	262	2992	20	150	8	254	105
Balongpanggang	30	264	2908	20	145	8	256	111
Duduksampeyan	16	144	1393	20	70	4	140	70
Kebomas	26	381	8555	20	428	11	370	-58
Gresik	23	378	6325	20	316	11	367	50
Manyar	21	305	5699	20	285	9	296	11
Bungah	20	192	2259	20	113	6	186	73
Sidayu	16	159	1865	20	93	5	154	61
Dukun	22	212	1915	20	96	6	206	110
Panceng	18	162	1587	20	79	5	157	78
Ujungpangkah	18	162	1587	20	79	5	157	78
Sangkapura	39	338	3292	20	165	10	328	163
Tambak	465	5053	74054	20	3703	152	4901	1199
Total	465	5053	74054	20	3703	152	4901	1199

Secara umum, hasil proyeksi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki surplus tenaga guru SD secara total, namun pemerataan distribusi antar kecamatan masih menjadi tantangan utama.

Berdasarkan Tabel Proyeksi Kebutuhan Guru SD Kabupaten Gresik Tahun 2024–2025, diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan terdapat 465 sekolah dasar dengan total 5.053 guru dan 74.054 murid. Melalui refleksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 serta Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 diperoleh rasio ideal 1 guru untuk 20 murid, maka jumlah kebutuhan guru ideal di seluruh Kabupaten Gresik diperkirakan sebanyak 3.703 guru. Setelah memperhitungkan kemungkinan guru pensiun sebesar 3% (sekitar 152 orang), jumlah guru aktif yang tersisa diproyeksikan menjadi 4.901 orang. Artinya, secara keseluruhan Kabupaten Gresik masih memiliki kelebihan sekitar 1.199 guru SD dibandingkan dengan kebutuhan ideal.

Kelebihan guru terbesar terdapat di beberapa kecamatan seperti Sangkapura dengan surplus 163 guru, Balongpanggang (111 guru), Dukun (110 guru), Panceng dan Ujungpangkah (masing-masing 78 guru), serta Bungah (73 guru). Kelebihan ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki jumlah tenaga pendidik yang jauh melampaui kebutuhan, sehingga berpotensi menjadi sumber redistribusi guru ke kecamatan yang masih kekurangan.

Sebaliknya, beberapa kecamatan mengalami defisit guru SD, antara lain Kebomas dengan kekurangan 58 guru dan Menganti dengan defisit 9 guru. Kekurangan ini berpotensi menimbulkan beban kerja berlebih bagi guru yang ada, sehingga perlu mendapatkan prioritas dalam penempatan tenaga pendidik baru.

Selain itu, sejumlah kecamatan menunjukkan kondisi relatif seimbang atau hanya mengalami kelebihan ringan, seperti Manyar, Cerme, dan Wringinanom, dengan selisih sekitar 10–50 guru di atas kebutuhan ideal. Hal ini menandakan bahwa distribusi guru di wilayah-wilayah tersebut sudah mendekati kondisi ideal dan tidak membutuhkan intervensi besar.

Tabel 2.19 Proyeksi Kebutuhan Guru MI Kabupaten Gresik 2023-2024

Kecamatan	Jumlah Sekolah MI	Jumlah Guru MI	Jumlah Murid MI	Ratio Ideal	Kebutuhan Guru Ideal	Guru Pensiun misal (3%)	Guru Setelah Pensiun	Kelebihan /Kekurangan
Wringinanom	14	143	1593	15	107	4	139	32
Driyorejo	13	169	2568	15	172	5	164	-8
Kedamean	16	154	2223	15	149	5	149	0
Menganti	25	320	5855	15	391	10	310	-81
Cerme	19	190	2517	15	168	6	184	16
Benjeng	20	184	2153	15	144	6	178	34
Balongpanggang	18	155	1253	15	84	5	150	66
Duduksampeyan	22	229	2336	15	156	7	222	66
Kebomas	11	155	2200	15	147	5	150	3
Gresik	10	171	2805	15	187	5	166	-21
Manyar	32	438	6263	15	418	13	425	7
Bungah	27	328	4101	15	274	10	318	44
Sidayu	22	257	2067	15	138	8	249	111
Dukun	29	364	3332	15	223	11	353	130
Panceng	27	342	2740	15	183	10	332	149
Ujungpangkah	24	308	2896	15	194	9	299	105
Sangkapura	30	292	2120	15	142	9	283	141
Tambak	17	134	1115	15	75	4	130	55
Total	376	4333	50137	15	3343	130	4203	860

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel Proyeksi Kebutuhan Guru MI (Madrasah Ibtidaiyah) Kabupaten Gresik Tahun 2023–2024, diketahui bahwa terdapat 376 sekolah MI dengan total 4.333 guru dan 50.137 murid. Melalui refleksi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 dan Permendikdasmen No 11 Tahun 2025 diperoleh rasio ideal 1 guru untuk 15 murid, kebutuhan guru ideal di seluruh Kabupaten Gresik seharusnya berjumlah sekitar 3.343 guru. Setelah memperhitungkan potensi guru pensiun sebesar 3% (sekitar 130 orang), jumlah guru aktif diproyeksikan menjadi 4.203 orang. Artinya, secara keseluruhan, Kabupaten Gresik memiliki kelebihan guru MI sebesar 860 orang dibandingkan dengan kebutuhan ideal.

Kelebihan guru paling besar ditemukan di beberapa kecamatan seperti Panceng (surplus 149 guru), Sangkapura (141 guru), Dukun (130 guru), Sidayu (111 guru), dan Ujungpangkah (105 guru). Wilayah-wilayah tersebut menunjukkan disparitas tinggi antara jumlah guru dan kebutuhan murid, sehingga berpotensi menjadi sumber redistribusi tenaga pendidik bagi kecamatan lain yang kekurangan.

Selain itu, kecamatan seperti Balongpanggang (66 guru), Duduksampeyan (105 guru), Tambak (55 guru), dan Bungah (44 guru) juga memiliki kelebihan signifikan yang memperkuat indikasi bahwa secara umum distribusi guru MI di Kabupaten Gresik masih belum merata.

Sementara itu, kecamatan dengan kondisi relatif seimbang antara jumlah guru dan kebutuhan ideal adalah Kedamean, Kebomas, dan Manyar. Namun demikian, terdapat dua kecamatan yang mengalami kekurangan guru, yaitu Menganti dengan defisit 81 guru dan Gresik dengan defisit 21 guru. Kondisi ini perlu diperhatikan agar proses pembelajaran tidak terganggu dan beban mengajar tidak terlalu berat bagi guru yang tersedia. Oleh karena itu pemetaan, redistribusi, dan penataan lebih lanjut perlu dipertimbangkan agar pendidikan di wilayah kabupaten Gresik bisa lebih optimal.

Tabel 2.20 Proyeksi Kebutuhan Guru SMP Kabupaten Gresik 2024-2025

Kecamatan	Jumlah Sekolah SMP	Jumlah Guru SMP	Jumlah Murid SMP	Ratio (PP 74 2008)	Kebutuhan Guru (PP 74 2008)	Guru Pensiun misal (3%)	Guru Setelah Pensiun	Kelebihan/ Kekurangan	Ratio (Permen 11 2025)	Kebutuhan Guru (Permen 11 2025)	Kelebihan/ Kekurangan
Wringinanom	6	100	1913	20	96	3	97	1	17	115	-18
Driyorejo	12	162	2518	20	126	5	157	31	17	152	5
Kedamean	4	79	1521	20	76	2	77	1	17	92	-15
Menganti	14	260	5126	20	256	8	252	-4	17	308	-56
Cerme	5	135	2397	20	120	4	131	11	17	144	-13
Benjeng	6	106	1867	20	93	3	103	9	17	112	-9
Balongpanggang	6	100	1715	20	86	3	97	11	17	103	-6
Duduksampeyan	3	47	771	20	39	1	46	7	17	47	-1
Kebomas	7	160	2790	20	140	5	155	16	17	168	-13
Gresik	11	269	4309	20	215	8	261	45	17	259	2
Manyar	10	197	3795	20	190	6	191	1	17	228	-37
Bungah	11	124	2281	20	114	4	120	6	17	137	-17
Sidayu	7	113	1496	20	75	3	110	35	17	90	20
Dukun	2	41	727	20	36	1	40	3	17	44	-4
Panceng	6	62	595	20	30	2	60	30	17	36	24
Ujungpangkah	7	71	767	20	38	2	69	31	17	47	22
Sangkapura	5	59	719	20	36	2	57	21	17	44	13
Tambak	3	37	359	20	18	1	36	18	17	22	14
Total	125	2122	35666	20	1783	64	2058	275	17	115	-82

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel Proyeksi Kebutuhan Guru SMP Kabupaten Gresik Tahun 2024–2025, diketahui bahwa terdapat 125 sekolah SMP dengan total 2.122 guru dan 35.666 murid. Melalui refleksi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 dengan menggunakan rasio ideal 1 guru untuk 20 murid, maka kebutuhan guru ideal di seluruh Kabupaten Gresik diperkirakan mencapai 1.783 guru. Setelah memperhitungkan kemungkinan guru pensiun sebesar 3% (sekitar 64 orang), jumlah guru aktif yang tersisa diproyeksikan menjadi 2.058 orang. Dengan demikian, secara keseluruhan Kabupaten Gresik masih memiliki kelebihan sekitar 275 guru SMP dibandingkan dengan kebutuhan ideal.

Kelebihan guru terbesar terdapat di beberapa kecamatan, antara lain Gresik dengan surplus 45 guru, Sidayu (35 guru), Ujungpangkah (31 guru), Driyorejo (31 guru), serta Panceng (30 guru). Kelebihan ini menandakan bahwa di wilayah-wilayah tersebut jumlah tenaga pendidik sudah melampaui kebutuhan berdasarkan jumlah murid yang ada, sehingga berpotensi untuk dilakukan redistribusi ke kecamatan lain yang kekurangan.

Sementara itu, sebagian besar kecamatan lainnya menunjukkan kondisi yang relatif seimbang, seperti Wringinanom, Kedamean, dan Manyar, yang masing-masing hanya memiliki kelebihan 1 guru dari kebutuhan ideal. Kondisi ini menunjukkan distribusi tenaga pengajar yang sudah mendekati proporsional di wilayah tersebut.

Namun demikian, terdapat satu kecamatan yang mengalami kekurangan guru, yaitu Menganti, dengan defisit 4 guru dari kebutuhan ideal sebanyak 256 guru. Meskipun jumlah kekurangannya kecil, kondisi ini tetap perlu diperhatikan agar proses pembelajaran tidak terganggu dan beban mengajar tidak terlalu berat bagi guru yang tersedia.

Kondisi Proyeksi Kebutuhan Guru SMP Kabupaten Gresik Tahun 2024–2025 akan berbeda jika ditinjau dengan penyesuaian beban kerja guru sesuai Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025. Dengan menggunakan rasio ideal 1 guru untuk 17 murid, maka kebutuhan guru ideal di seluruh Kabupaten Gresik diperkirakan mencapai 2.140 guru. Setelah memperhitungkan kemungkinan guru pensiun sebesar 3% (sekitar 64 orang), jumlah guru aktif yang tersisa diproyeksikan menjadi 2.058 orang. Dengan demikian, secara keseluruhan

Kabupaten Gresik masih memiliki kekurangan sekitar 82 guru SMP dibandingkan dengan kebutuhan ideal.

Kelebihan guru terbesar terdapat di beberapa kecamatan, antara lain Panceng dengan surplus 24 guru, Ujungpangkah (22 guru), serta Sidayu (20 guru). Kelebihan ini menandakan bahwa di wilayah-wilayah tersebut jumlah tenaga pendidik sudah melampaui kebutuhan berdasarkan jumlah murid yang ada, sehingga berpotensi untuk dilakukan redistribusi ke kecamatan lain yang kekurangan.

Sementara itu, sebagian besar kecamatan lainnya menunjukkan kondisi yang relatif seimbang, seperti Gresik, Duduksampeyan, Dukun, dan Driyorejo, yang masing-masing hanya memiliki surplus/defisit ±5 guru dari kebutuhan ideal. Kondisi ini menunjukkan distribusi tenaga pengajar yang sudah mendekati proporsional di wilayah tersebut.

Namun demikian, terdapat dua kecamatan yang mengalami kekurangan guru cukup signifikan, yaitu Menganti dengan defisit 56 guru dan Manyar dengan defisit 37 guru. Kondisi ini perlu diperhatikan agar proses pembelajaran tidak terganggu dan beban mengajar tidak terlalu berat bagi guru yang tersedia.

Tinjauan proyeksi dari dua aturan yang berjalan simultan ini perlu diperhatikan dalam rangka pemetaan SDM Guru SMP wilayah kerja kabupaten Gresik secara lebih lanjut. Keunikan beban kerja yang melekat pada tiap mapel perlu menjadi pertimbangan dalam penataan, pelatihan, pendistribusian, dan pengadaan guru SMP kedepannya. Sehingga proporsi guru SMP di wilayah kabupaten Gresik bisa lebih baik lagi untuk memaksimalkan potensi pendidikan kabupaten Gresik.

Tabel 2.21 Proyeksi Kebutuhan Guru MTs Kabupaten Gresik 2023-2024

Kecamatan	Jumlah Sekolah MTS	Jumlah Guru MTS	Jumlah Murid MTS	Rasio (PP 74 2008)	Kebutuhan Guru Ideal	Guru Pensiun misal (3%)	Guru Setelah Pensiun	Kelebihan/ Kekurangan	Rasio (Permen 11 2025)	Kebutuhan Guru Ideal	Kelebihan/ Kekurangan
Wringinanom	7	106	849	15	57	3	103	46	13	65	38
Driyorejo	8	164	1928	15	129	5	159	31	13	148	11
Kedamean	8	112	1066	15	71	3	109	38	13	82	27
Menganti	8	119	1087	15	72	4	115	43	13	84	32
Cerme	3	27	460	15	31	1	26	-4	13	35	-9
Benjeng	6	144	1507	15	100	4	140	39	13	116	24
Balongpanggang	2	30	219	15	15	1	29	15	13	17	12
Duduksampeyan	6	53	403	15	27	2	51	25	13	31	20
Kebomas	2	56	596	15	40	2	54	15	13	46	8
Gresik	2	19	450	15	30	1	18	-12	13	35	-16
Manyar	11	446	3987	15	266	13	433	167	13	307	126
Bungah	13	244	2500	15	167	7	237	70	13	192	44
Sidayu	8	116	898	15	60	3	113	53	13	69	43
Dukun	18	307	2283	15	152	9	298	146	13	176	122
Panceng	17	212	1172	15	78	6	206	128	13	90	115
Ujungpangkah	13	218	1126	15	75	7	211	136	13	87	125
Sangkapura	18	251	1982	15	132	8	243	111	13	152	91
Tambak	9	111	858	15	57	3	108	50	13	66	42
Total	159	2735	23371	15	1558	82	2653	1095	13	1798	855

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Secara umum, hasil proyeksi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki kelebihan guru MTs yang sangat besar, menunjukkan ketersediaan tenaga pendidik yang melampaui kebutuhan aktual. Berdasarkan Tabel Proyeksi Kebutuhan Guru MTs (Madrasah Tsanawiyah) Kabupaten Gresik Tahun 2023–2024, diketahui bahwa terdapat 159 sekolah MTs dengan total 2.735 guru dan 23.371 murid. Dengan rasio ideal 1 guru untuk 15 murid sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, maka kebutuhan guru ideal di seluruh Kabupaten Gresik seharusnya mencapai 1.558 orang. Setelah memperhitungkan guru yang pensiun sekitar 3% (82 orang), jumlah guru aktif diproyeksikan menjadi 2.653 orang. Artinya, secara keseluruhan Kabupaten Gresik mengalami surplus guru MTs sebanyak 1.095 orang, atau hampir dua kali lipat dari jumlah kebutuhan ideal.

Kelebihan guru terbesar terdapat di beberapa kecamatan, di antaranya Manyar dengan surplus 167 guru, Dukun (146 guru), Ujungpangkah (136 guru), Panceng (128 guru), dan Sangkapura (111 guru). Kelebihan yang signifikan di wilayah-wilayah tersebut menunjukkan bahwa distribusi tenaga pendidik masih belum proporsional, dengan sebagian kecamatan memiliki jumlah guru jauh melebihi kebutuhan berdasarkan rasio ideal.

Selain itu, kecamatan seperti Bungah (70 guru), Sidayu (53 guru), dan Tambak (50 guru) juga mencatat kelebihan tenaga pengajar yang cukup tinggi. Sementara itu, sebagian besar kecamatan lainnya seperti Menganti, Wringinanom, Kedamean, Benjeng, dan Driyorejo menunjukkan kelebihan sedang di kisaran 31–46 guru.

Hanya terdapat dua kecamatan yang mengalami kekurangan guru, yaitu Gresik dan Cerme, dengan defisit 12 guru dan 4 guru dari kebutuhan ideal. Meskipun jumlahnya kecil, kondisi ini tetap memerlukan perhatian agar proses belajar mengajar tidak terganggu.

Kondisi Proyeksi Kebutuhan Guru MTs Kabupaten Gresik Tahun 2024–2025 masih serupa jika ditinjau dengan penyesuaian beban kerja guru sesuai Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025. Dengan menggunakan rasio ideal 1 guru untuk 13 murid, maka kebutuhan guru ideal di seluruh Kabupaten Gresik diperkirakan mencapai 1.798 guru. Setelah memperhitungkan kemungkinan

guru pensiun sebesar 3% (sekitar 82 orang), jumlah guru aktif yang tersisa diproyeksikan menjadi 2.653 orang. Dengan demikian, secara keseluruhan Kabupaten Gresik masih memiliki kelebihan sekitar 855 guru MTs dibandingkan dengan kebutuhan ideal.

Kelebihan guru terbesar terdapat di beberapa kecamatan, di antaranya Manyar dengan surplus 126 guru, Ujungpangkah (125 guru), Dukun (122 guru) Panceng (115 guru), dan Sangkapura (91 guru). Kelebihan yang signifikan di wilayah-wilayah tersebut menunjukkan bahwa distribusi tenaga pendidik masih belum proporsional, dengan sebagian kecamatan memiliki jumlah guru jauh melebihi kebutuhan berdasarkan rasio ideal. Selain itu, sebagian besar kecamatan lainnya seperti Menganti, Wringinanom, Bungah, Sidayu, dan Tambak menunjukkan kelebihan sedang di kisaran 32–44 guru.

Hanya terdapat dua kecamatan yang mengalami kekurangan guru, yaitu Gresik dan Cerme, dengan defisit 16 guru dan 9 guru dari kebutuhan ideal. Meskipun jumlahnya kecil, kondisi ini tetap memerlukan perhatian agar proses belajar mengajar tidak terganggu.

Tinjauan proyeksi dari dua aturan yang berjalan simultan ini perlu diperhatikan dalam rangka pemetaan SDM Guru MTs wilayah kerja kabupaten Gresik secara lebih lanjut. Keunikan beban kerja yang melekat pada tiap mapel perlu menjadi pertimbangan dalam penataan, pelatihan, pendistribusian, dan pengadaan guru MTs kedepannya. Sehingga proporsi guru MTs di wilayah kabupaten Gresik bisa lebih baik lagi untuk memaksimalkan potensi pendidikan kabupaten Gresik.

Tabel 2.22 Proyeksi Kebutuhan Guru SMA Kabupaten Gresik 2024-2025

Kecamatan	Jumlah Sekolah SMA	Jumlah Guru SMA	Jumlah Murid SMA	Rasio (PP 74 2008)	Kebutuhan Guru Ideal	Guru Pensiun misal (3%)	Guru Setelah Pensiun	Kelebihan/ Kekurangan	Rasio (Permen 11 2025)	Kebutuhan Guru Ideal	Kelebihan/ Kekurangan
Wringinanom	1	66	1226	20	61	2	64	3	15	82	-18
Driyorejo	5	90	1579	20	79	3	87	8	15	105	-18
Kedamean	2	58	1166	20	58	2	56	-2	15	78	-21
Menganti	4	125	2416	20	121	4	121	0	15	161	-40
Cerme	4	114	1743	20	87	3	111	23	15	116	-6
Benjeng	3	27	170	20	9	1	26	18	15	11	15
Balongpanggang	3	66	1011	20	51	2	64	13	15	67	-3
Duduksampeyan	1	18	159	20	8	1	17	10	15	11	7
Kebomas	4	152	2170	20	109	5	147	39	15	145	3
Gresik	4	151	2534	20	127	5	146	20	15	169	-22
Manyar	3	108	1857	20	93	3	105	12	15	124	-19
Bungah	3	56	1029	20	51	2	54	3	15	69	-14
Sidayu	3	96	1467	20	73	3	93	20	15	98	-5
Dukun	4	71	1034	20	52	2	69	17	15	69	0
Panceng	1	8	166	20	8	0	8	-1	15	11	-3
Ujungpangkah	3	34	327	20	16	1	33	17	15	22	11
Sangkapura	3	67	845	20	42	2	65	23	15	56	9
Tambak	1	13	246	20	12	0	13	0	15	16	-4
Total	52	1320	21145	20	1057	40	1280	223	15	1410	-129

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Secara keseluruhan, Kabupaten Gresik memiliki 52 sekolah SMA dengan total 1.320 guru yang melayani sekitar 21.145 siswa. Berdasarkan rasio ideal pengajaran 1 guru untuk 20 siswa, dibutuhkan sekitar 1.057 guru, sehingga secara umum terdapat kelebihan 223 guru meskipun memperhitungkan potensi 40 guru pensiun di tahun berjalan.

Beberapa kecamatan menunjukkan surplus tenaga pendidik cukup tinggi, seperti Kebomas (39 guru), Cerme (23 guru), Sangkapura (23 guru), Gresik (20 guru), dan Sidayu (20 guru). Kondisi ini menunjukkan efektivitas distribusi guru yang relatif baik di kawasan tengah dan utara Gresik, serta potensi daerah-daerah ini untuk menjadi sumber redistribusi tenaga pendidik ke kecamatan yang masih defisit.

Sebaliknya, hanya sedikit kecamatan yang mengalami kekurangan guru. Kedamean mencatat defisit 2 guru, sementara Panceng kekurangan 1 guru. Kekurangan ini tergolong kecil dan dapat segera diatasi melalui penataan ulang distribusi guru dari kecamatan yang berlebih seperti Kebomas atau Cerme.

Selain itu, beberapa wilayah menunjukkan keseimbangan ideal, seperti Menganti dan Tambak yang memiliki jumlah guru sesuai kebutuhan. Secara umum, kondisi distribusi guru SMA di Kabupaten Gresik dapat dikategorikan cukup merata dan efisien, dengan kelebihan tenaga pendidik di beberapa daerah yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah kabupaten.

Kondisi Proyeksi Kebutuhan Guru SMA Kabupaten Gresik Tahun 2024–2025 bertolakbelakang jika ditinjau dengan penyesuaian beban kerja guru sesuai Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025. Dengan menggunakan rasio ideal 1 guru untuk 15 murid, maka kebutuhan guru ideal di seluruh Kabupaten Gresik diperkirakan mencapai 1.410 guru. Setelah memperhitungkan kemungkinan guru pensiun sebesar 3% (sekitar 40 orang), jumlah guru aktif yang tersisa diproyeksikan menjadi 1.280 orang. Dengan demikian, secara keseluruhan Kabupaten Gresik masih memiliki kekurangan sekitar 129 guru SMA dibandingkan dengan kebutuhan ideal.

Kelebihan guru hanya terdapat di beberapa kecamatan, di antaranya Benjeng dengan surplus 15 guru, Ujungpangkah (11 guru), dan Sangkapura (9 guru). Kelebihan yang ada dapat dijadikan acuan sumber redistribusi guru SMA untuk beberapa wilayah lainnya.

Sementara itu beberapa wilayah kecamatan lainnya mengalami defisit guru. Beberapa kecamatan dengan kekurangan guru terbesar, yaitu Menganti dengan defisit 40 guru, Gresik (22 guru), dan Kedamean (21 guru) dari kebutuhan ideal. Kondisi ini memerlukan perhatian agar proses belajar mengajar tidak terganggu.

Tinjauan proyeksi dari dua aturan yang berjalan simultan ini perlu diperhatikan dalam rangka pemetaan SDM Guru SMA di wilayah kerja kabupaten Gresik secara lebih lanjut. Keunikan beban kerja yang melekat pada tiap mapel perlu menjadi pertimbangan dalam penataan, pelatihan, pendistribusian, dan pengadaan guru SMA kedepannya. Sehingga proporsi guru SMA di wilayah kabupaten Gresik bisa lebih baik lagi untuk memaksimalkan potensi pendidikan kabupaten Gresik.

Tabel 2.23 Proyeksi Kebutuhan Guru MA Kabupaten Gresik 2023-2024

Kecamatan	Jumlah Sekolah MA	Jumlah Guru MA	Jumlah Murid MA	Rasio (PP 74 2008)	Kebutuhan Guru Ideal	Guru Pensiun misal (3%)	Guru Setelah Pensiun	Kelebihan/ Kekurangan	Rasio (Permen 11 2025)	Kebutuhan Guru Ideal	Kelebihan/ Kekurangan
Wringinanom	2	34	252	15	17	1	33	16	12	21	12
Driyorejo	1	20	226	15	15	1	19	4	12	19	1
Kedamean	4	46	423	15	28	1	45	16	12	35	9
Menganti	6	86	580	15	39	3	83	45	12	48	35
Cerme	1	6	38	15	3	0	6	3	12	3	3
Benjeng	3	96	1203	15	80	3	93	13	12	100	-7
Balongpanggang	1	13	50	15	3	0	13	9	12	4	8
Duduksampeyan	2	3	103	15	7	0	3	-4	12	9	-6
Kebomas	2	27	410	15	27	1	26	-1	12	34	-8
Gresik	0	0	0	15	0	0	0	0	12	0	0
Manyar	6	218	2508	15	167	7	211	44	12	209	2
Bungah	11	243	2409	15	161	7	236	75	12	201	35
Sidayu	7	102	381	15	25	3	99	74	12	32	67
Dukun	5	106	849	15	57	3	103	46	12	71	32
Panceng	10	128	589	15	39	4	124	85	12	49	75
Ujungpangkah	6	102	411	15	27	3	99	72	12	34	65
Sangkapura	12	151	1245	15	83	5	146	63	12	104	43
Tambak	7	92	775	15	52	3	89	38	12	65	25
Total	86	1473	12452	15	830	44	1429	599	12	1038	391

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil proyeksi, terdapat 86 sekolah MA di Kabupaten Gresik dengan total 1.473 guru yang mengajar 12.452 siswa. Dengan rasio ideal 1 guru untuk 15 siswa, maka kebutuhan ideal hanya sekitar 830 guru. Bahkan setelah memperhitungkan potensi 44 guru yang pensiun, jumlah guru aktif tersisa 1.429 orang, yang masih menunjukkan kelebihan sangat besar yaitu 599 guru. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, jenjang MA di Gresik mengalami surplus tenaga pendidik yang signifikan.

Kecamatan yang mencatat kelebihan guru terbesar adalah Panceng (85 guru), Bungah (75 guru), Sidayu (74 guru), Ujungpangkah (72 guru), dan Sangkapura (63 guru). Daerah-daerah ini menjadi pusat penumpukan guru MA, terutama di wilayah pesisir dan utara Gresik. Kondisi ini membuka peluang redistribusi guru ke wilayah yang lebih membutuhkan agar beban kerja menjadi seimbang.

Sebaliknya, kekurangan guru hanya terjadi di Kecamatan Duduksampeyan dan Kebomas, yang memiliki defisit 4 guru dan 1 guru. Sementara kecamatan seperti Wringinanom, Kedamean, Menganti, Benjeng, dan Tambak menunjukkan kelebihan sedang antara 13–45 guru, yang dapat menjadi sumber penyeimbang bagi kecamatan defisit atau yang rasio murid-gurunya belum ideal.

Kondisi Proyeksi Kebutuhan Guru MA Kabupaten Gresik Tahun 2024–2025 masih serupa jika ditinjau dengan penyesuaian beban kerja guru sesuai Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025. Dengan menggunakan rasio ideal 1 guru untuk 12 murid, maka kebutuhan guru ideal di seluruh Kabupaten Gresik diperkirakan mencapai 1.038 guru. Setelah memperhitungkan kemungkinan guru pensiun sebesar 3% (sekitar 44 orang), jumlah guru aktif yang tersisa diproyeksikan menjadi 1.429 orang. Dengan demikian, secara keseluruhan Kabupaten Gresik masih memiliki kelebihan sekitar 391 guru MA dibandingkan dengan kebutuhan ideal.

Kelebihan guru terbesar terdapat di beberapa kecamatan, di antaranya Panceng (75 guru), Sidayu (67 guru), Ujungpangkah (65 guru), dan Sangkapura (43 guru). Kelebihan yang signifikan di wilayah-wilayah tersebut menunjukkan bahwa distribusi tenaga pendidik masih belum

proporsional, dengan sebagian kecamatan memiliki jumlah guru jauh melebihi kebutuhan berdasarkan rasio ideal. Selain itu, sebagian besar kecamatan lainnya seperti Menganti, Wringinanom, Bungah, Dukun, dan Tambak menunjukkan kelebihan sedang di kisaran 12–35 guru.

Hanya terdapat tiga kecamatan yang mengalami kekurangan guru, yaitu Kebomas dengan defisit 8 guru, Benjeng (7 guru), dan Duduksampeyan (6 guru) dari kebutuhan ideal. Meskipun jumlahnya kecil, kondisi ini tetap memerlukan perhatian agar proses belajar mengajar tidak terganggu.

Tinjauan proyeksi dari dua aturan yang berjalan simultan ini perlu diperhatikan dalam rangka pemetaan SDM Guru MA wilayah kerja kabupaten Gresik secara lebih lanjut. Keunikan beban kerja yang melekat pada tiap mapel perlu menjadi pertimbangan dalam penataan, pelatihan, pendistribusian, dan pengadaan guru MA kedepannya. Sehingga proporsi guru MA di wilayah kabupaten Gresik bisa lebih baik lagi untuk memaksimalkan potensi pendidikan kabupaten Gresik.

Tabel 2.24 Proyeksi Kebutuhan Guru SMK Kabupaten Gresik 2024-2025

Kecamatan	Jumlah Sekolah SMK	Jumlah Guru SMK	Jumlah Murid SMK	Rasio (PP 74 2008)	Kebutuhan Guru Ideal	Guru Pensiun misal (3%)	Guru Setelah Pensiun	Kelebihan/ Kekurangan	Rasio (Permen 11 2025)	Kebutuhan Guru Ideal	Kelebihan/ Kekurangan
Wringinanom	4	63	1095	15	73	2	61	-12	12	91	-30
Driyorejo	6	185	3263	15	218	6	179	-38	12	272	-92
Kedamean	2	12	146	15	10	0	12	2	12	12	-1
Menganti	4	140	3042	15	203	4	136	-67	12	254	-118
Cerme	4	190	3553	15	237	6	184	-53	12	296	-112
Benjeng	3	51	499	15	33	2	49	16	12	42	8
Balongpanggang	1	32	493	15	33	1	31	-2	12	41	-10
Duduksampeyan	1	56	929	15	62	2	54	-8	12	77	-23
Kebomas	2	22	256	15	17	1	21	4	12	21	0
Gresik	6	214	3956	15	264	6	208	-56	12	330	-122
Manyar	4	111	1780	15	119	3	108	-11	12	148	-41
Bungah	4	116	1515	15	101	3	113	12	12	126	-14
Sidayu	2	72	1071	15	71	2	70	-2	12	89	-19
Dukun	7	97	517	15	34	3	94	60	12	43	51
Panceng	3	56	264	15	18	2	54	37	12	22	32
Ujungpangkah	4	71	439	15	29	2	69	40	12	37	32
Sangkapura	4	45	316	15	21	1	44	23	12	26	17
Tambak	0	0	0	15	0	0	0	0	12	0	0
Total	61	1533	23134	15	1542	46	1487	-55	12	1928	-441

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki kecenderungan untuk perlu redistribusi guru SMK di sebagian besar wilayah.

Berdasarkan hasil proyeksi, terdapat 61 sekolah SMK di Kabupaten Gresik dengan total 1.533 guru yang mengajar 23.134 siswa. Dengan rasio ideal 1 guru untuk 15 siswa, kebutuhan idealnya adalah 1.542 guru. Setelah memperhitungkan 46 guru yang diperkirakan pensiun, jumlah guru aktif tersisa 1.487 orang, yang masih menunjukkan kekurangan guru sebesar 55 orang. Hal ini menegaskan bahwa secara umum, jenjang pendidikan kejuruan di Gresik mengalami defisit tenaga pendidik.

Beberapa kecamatan memang memiliki kelebihan guru cukup tinggi, semisal Dukun surplus 60 guru, Ujungpangkah (40 guru), Panceng (37 guru), dan Sangkapura (23 guru). Pola ini menunjukkan bahwa kelebihan guru SMK umumnya terjadi di wilayah pesisir utara dan pulau Bawean, di mana rasio guru jauh melebihi kebutuhan ideal. Kondisi ini membuka peluang besar untuk melakukan redistribusi tenaga pendidik agar pemerataan kualitas pengajaran dapat lebih optimal di seluruh kecamatan.

Sementara itu, kecamatan lainnya justru mengalami kekurangan guru. Kecamatan tersebut adalah Menganti dengan defisit 67 guru, Gresik (56 guru), Cerme (53 guru) dan Driyorejo (38 guru). Wilayah tersebut perlu menjadi prioritas utama untuk penambahan atau penempatan guru baru.

Kondisi Proyeksi Kebutuhan Guru SMK Kabupaten Gresik Tahun 2024–2025 masih serupa jika ditinjau dengan penyesuaian beban kerja guru sesuai Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025. Dengan menggunakan rasio ideal 1 guru untuk 12 murid, maka kebutuhan guru ideal di seluruh Kabupaten Gresik diperkirakan mencapai 1.928 guru. Setelah memperhitungkan kemungkinan guru pensiun sebesar 3% (sekitar 46 orang), jumlah guru aktif yang tersisa diproyeksikan menjadi 1.487 orang. Dengan demikian, secara keseluruhan Kabupaten Gresik masih memiliki kekurangan sekitar 441 guru SMK dibandingkan dengan kebutuhan ideal.

Kelebihan guru masih terdapat di beberapa kecamatan, di antaranya Dukun dengan surplus 51 guru, Panceng (32 guru), dan Ujungpangkah (65 guru). Kelebihan di wilayah-wilayah tersebut menunjukkan bahwa distribusi tenaga pendidik masih belum proporsional. Selain itu, sebagian besar kecamatan lainnya mengalami kondisi defisit guru.

Kecamatan dengan kondisi defisit tersebesar tersebar di beberapa wilayah, yaitu Gresik dengan defisit 122 guru, Menganti (118 guru), Cerme (112 guru) dan Driyorejo (92 guru) dari kebutuhan ideal. Jumlah tersebut cukup besar dan memerlukan perhatian agar proses belajar mengajar tidak terganggu.

Tinjauan proyeksi dari dua aturan yang berjalan simultan ini perlu diperhatikan dalam rangka pemetaan SDM Guru SMK wilayah kerja kabupaten Gresik secara lebih lanjut. Keunikan beban kerja yang melekat pada tiap mapel perlu menjadi pertimbangan dalam penataan, pelatihan, pendistribusian, dan pengadaan guru SMK kedepannya. Sehingga proporsi guru SMK di wilayah kabupaten Gresik bisa lebih baik lagi untuk memaksimalkan potensi pendidikan kabupaten Gresik.

Dari tabel proyeksi kebutuhan guru perjenjang di Kabupaten Gresik, maka berikut ini akan dipaparkan prediksi kebutuhan guru di Kabupaten Gresik dari 2024-2024 hingga 2028-2029.

Tabel 2.25 Prediksi Kebutuhan Guru Kabupaten Gresik 2024-2025 sampai dengan 2028-2029

No.	Tahun	RA	TK	SD	MI	SMP	MTS	SMA	MA	SMK
1.	2019-2020	864	2684	-	4076	-	2131	-	986	-
2.	2020-2021	895	2633	4881	4262	2074	2281	1196	1201	1354
3.	2021-2022	865	2391	4697	3849	2006	2311	1223	1246	1469
4.	2022-2023	917	-	4933	4262	2103	2610	1312	1421	1467
5.	2023-2024	951	2540	5001	4076	2155	2735	1318	1473	1535
6.	2024-2025	716	2589	5053	2505	2122	1174	1320	628	1533
7.	2025-2026	729	2277	3685	2504	1823	1180	1071	633	1178
8.	2026-2027	743	2322	3668	2503	1843	1185	1084	638	1200
9	2027-2028	758	2367	3651	2501	1861	1191	1098	643	1222
10	2028-2029	773	2413	3634	2500	1864	1197	1112	648	1244

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Tabel prediksi kebutuhan guru Kabupaten Gresik tahun 2024–2029 menunjukkan adanya fluktuasi kebutuhan tenaga pendidik di seluruh jenjang pendidikan, yang berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan jumlah murid pada periode yang sama. Secara umum, kebutuhan guru mengalami kecenderungan penurunan bertahap di beberapa jenjang pendidikan dasar dan menengah, namun tetap menunjukkan stabilitas di tingkat tertentu seperti RA, TK, dan SMK.

Pada jenjang RA dan TK, jumlah kebutuhan guru terus mengalami sedikit peningkatan setiap tahun. Kebutuhan guru RA meningkat dari 716 orang pada tahun 2024–2025 menjadi 773 orang pada tahun 2028–2029, sedangkan guru TK bertambah dari 2.589 menjadi 2.413 guru pada periode yang sama. Meskipun peningkatannya relatif kecil, tren ini sejalan dengan pertumbuhan peserta didik di tingkat pendidikan anak usia dini yang terus meningkat di Gresik.

Sebaliknya, jenjang SD dan MI menunjukkan tren yang lebih dinamis. Kebutuhan guru SD menurun secara perlahan dari 5.053 guru pada tahun 2024–2025 menjadi 3.634 guru pada tahun 2028–2029. Sementara itu, MI menunjukkan stabilitas di angka sekitar 2.500 guru. Penurunan di jenjang SD ini bisa dihubungkan dengan proyeksi penurunan jumlah murid serta efisiensi rasio guru-murid yang semakin baik.

Pada jenjang SMP dan MTS, kebutuhan guru cenderung stagnan dengan sedikit fluktuasi. SMP menurun dari 2.122 guru pada tahun 2024–2025 menjadi 1.864 guru di tahun 2028–2029, sementara MTS sedikit meningkat dari 1.174 menjadi 1.197 guru. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan sesuai jumlah murid yang relatif stabil di tingkat menengah pertama.

Untuk pendidikan menengah atas, baik SMA, MA, maupun SMK menunjukkan tren yang bervariasi. Kebutuhan guru SMA mengalami penurunan dari 1.320 menjadi 1.112 guru, sedangkan MA relatif stabil di kisaran 628–648 guru. SMK justru menunjukkan peningkatan moderat dari 1.533 guru pada tahun 2024–2025 menjadi 1.244 guru pada tahun 2028–2029, yang sejalan dengan meningkatnya jumlah siswa SMK selama periode tersebut.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Gresik sedang bergerak menuju rasionalisasi kebutuhan tenaga pendidik yang lebih efisien. Beberapa jenjang menunjukkan penurunan kebutuhan karena optimalisasi distribusi guru dan berkurangnya jumlah murid, sementara peningkatan di tingkat kejuruan dan pendidikan dini mencerminkan arah pembangunan pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan masa depan tenaga kerja serta peningkatan kualitas pendidikan dasar. Selain itu perlu adanya pemetaan dan distribusi yang lebih mendalam sesuai dengan aturan yang berlaku.

6) Analisis Kebutuhan Pengembangan dan Pelatihan Guru

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan dan pelatihan guru di Kabupaten Gresik, diperoleh gambaran bahwa tingkat kebutuhan peningkatan kapasitas guru di seluruh jenjang pendidikan sangat tinggi dan beragam. Perbedaan karakteristik satuan pendidikan, perkembangan kebijakan kurikulum nasional, serta tuntutan kompetensi abad ke-21 menyebabkan kebutuhan pengembangan profesional guru semakin kompleks. Secara umum, guru di Kabupaten Gresik menunjukkan motivasi dan kesadaran tinggi terhadap pentingnya peningkatan kompetensi profesional dan pedagogik, dengan rata-rata kebutuhan pengembangan berada di atas 90% pada sebagian besar indikator. Berikut pie chart yang menggambarkan distribusi total kebutuhan pengembangan dan pelatihan guru di Kabupaten Gresik berdasarkan jenjang pendidikan: TK/KB/TPA/SPS/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yakni :

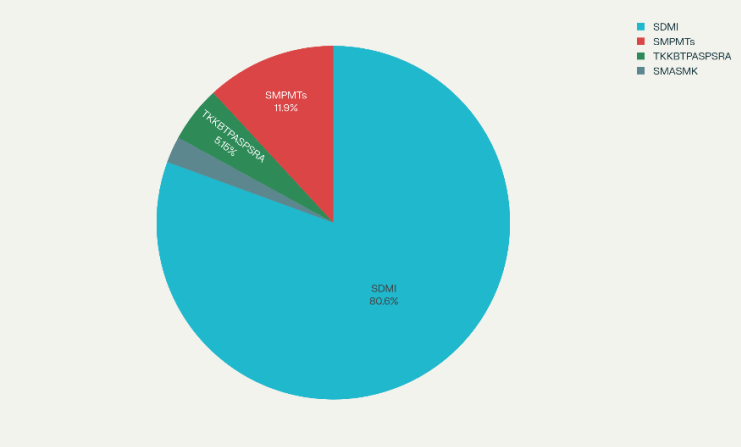

Gambar 21. Distribusi Kebutuhan Pengembangan dan Pelatihan Guru di Kabupaten Gresik

Pie chart ini memperlihatkan proporsi kebutuhan pengembangan dan pelatihan guru pada masing-masing jenjang pendidikan berdasarkan data terkini dari Kabupaten Gresik dengan survey guru TK/KB/TPA/SPS/RA sebanyak 407 guru, SD/MI sebanyak 6.372 guru, SMP/MTs sebanyak 939 guru dan SMA/SMK/MA sebanyak 190 guru. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kebutuhan pengembangan dan pelatihan guru di Kabupaten Gresik sangat tinggi dan bervariasi pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik satuan pendidikan, dinamika kebijakan nasional, serta tuntutan kompetensi guru pada era transformasi digital dan implementasi kurikulum baru. Secara umum, seluruh guru di Kabupaten Gresik menunjukkan motivasi tinggi untuk meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik, dengan tingkat kebutuhan pengembangan di atas 90% pada hampir semua aspek. Aspek yang diukur Pemahaman dan Pengembangan Karier Guru, Kebutuhan Pelatihan Implementasi Kurikulum, Penguasaan Teknologi Digital dan Platform Daring, Assessment, HOTS, dan Pendidikan Inklusif, Kompetensi Karya Ilmiah dan Penelitian Tindakan Kelas dan Kolaborasi, Kepemimpinan, dan Komunikasi.

Sebagian besar guru di seluruh jenjang (PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK) memiliki pemahaman baik terhadap kriteria kompetensi, administrasi karier, dan sertifikasi guru. Persentase pemahaman mencapai lebih dari 90%, bahkan guru SD/MI menunjukkan angka tertinggi, sekitar 97%. Kebutuhan pelatihan terkait kenaikan pangkat dan golongan juga tinggi di jenjang ini (sekitar 96%). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesiapan administratif, namun tetap memerlukan dukungan sistem pembinaan karier berkelanjutan agar guru mampu mengelola jenjang kariernya secara profesional dan produktif sehingga lebih berdampak terhadap kualitas pembelajaran.

Sedangkan Kebutuhan guru terhadap pelatihan implementasi kurikulum terbaru menjadi prioritas utama di seluruh jenjang pendidikan. Persentase kebutuhan pelatihan ini mencapai lebih dari 96%, dengan jenjang SD/MI hampir menyentuh 99%. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum menuntut guru beradaptasi dengan paradigma baru

pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi peserta didik, asesmen formatif, dan pembelajaran berbasis proyek (P5) sehingga peningkatan kapasitas guru dalam memahami substansi kurikulum, menyusun perangkat ajar inovatif, serta menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi dan profil pelajar Pancasila. Pada indikator ini juga Guru SMP/MTs serta SMA/SMK juga menunjukkan kebutuhan tinggi terhadap pelatihan yang berfokus pada inovasi pembelajaran, integrasi teknologi digital, serta pengembangan asesmen berbasis proyek dan capaian kompetensi.

Dari hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi guru di Kabupaten Gresik, aspek penguasaan teknologi digital muncul sebagai fokus utama yang memerlukan perhatian strategis. Transformasi digital dalam dunia pendidikan menuntut guru untuk memiliki kemampuan yang adaptif dalam memanfaatkan berbagai teknologi pembelajaran. Data menunjukkan bahwa lebih dari 95% guru di seluruh jenjang pendidikan memerlukan peningkatan kapasitas dalam penggunaan platform digital, aplikasi e-learning, serta integrasi Artificial Intelligence (AI) dalam proses pembelajaran. Kebutuhan paling tinggi teridentifikasi pada guru jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK, diikuti oleh guru SD/MI dan PAUD/TK. Meskipun demikian, guru pada jenjang dasar dan PAUD juga menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengembangkan media pembelajaran digital, meskipun masih membutuhkan pendampingan dan pelatihan lanjutan dalam bidang IT education serta strategi pembelajaran daring yang efektif. Selain itu, kemampuan dalam pengembangan media pembelajaran digital masih menjadi area yang perlu diperkuat secara sistematis. Oleh karena itu, program pelatihan lanjutan yang berfokus pada desain media interaktif, integrasi teknologi pembelajaran, dan strategi pembelajaran berbasis platform digital perlu dijadikan agenda prioritas dalam upaya peningkatan profesionalisme guru di Kabupaten Gresik.

Kemampuan guru dalam menyusun instrumen penilaian berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) masih tergolong rendah, khususnya pada jenjang PAUD, TK, dan Kelompok Bermain (KB), dengan capaian berkisar antara 65–76%. Kondisi ini menunjukkan perlunya pelatihan

intensif yang berfokus pada pengembangan asesmen berpikir tingkat tinggi, penyusunan instrumen penilaian autentik, serta penerapan asesmen formatif berbasis kompetensi. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan pelatihan dalam bidang pendidikan inklusif dan pembelajaran mendalam *(deep learning)* sangat tinggi di seluruh jenjang pendidikan. Kebutuhan ini menandakan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif masih menjadi tantangan utama yang perlu segera direspons melalui program penguatan kapasitas guru agar mampu melayani peserta didik dengan kebutuhan yang beragam. Lebih lanjut, kebutuhan pelatihan terkait teknik asesmen bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) juga muncul secara konsisten di berbagai jenjang. Dengan demikian, kebijakan pengembangan profesional guru di Kabupaten Gresik perlu diarahkan pada penguatan kompetensi asesmen, penerapan pembelajaran mendalam *(deep learning)*, serta implementasi pendidikan inklusif secara sistematis dan berkelanjutan.

Sedangkan Kemampuan guru dalam menulis karya ilmiah dan melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK) masih perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan hasil analisis, tingkat kemampuan tersebut baru mencapai sekitar 52–55% pada jenjang PAUD/TK, serta 69–76% pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebiasaan refleksi ilmiah terhadap praktik pembelajaran di kelas masih terbatas, dan sebagian besar guru belum terbiasa mendokumentasikan hasil inovasi pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah. Oleh karena itu, perlu dirancang program pelatihan penyusunan karya ilmiah, penelitian tindakan kelas, dan publikasi hasil penelitian guru secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Program tersebut menjadi bagian strategis dalam pengembangan profesionalisme guru serta berperan penting dalam membangun budaya ilmiah dan inovatif di lingkungan pendidikan Kabupaten Gresik. Kebutuhan lainnya yang ditanyakan pada guru tentang Kemampuan kolaborasi guru di komunitas profesional serta pelaksanaan kepemimpinan pembelajaran sudah tergolong tinggi, dengan capaian antara 80–99% di hampir semua jenjang. Meskipun demikian, tetap diperlukan pelatihan penguatan manajemen kelas, kepemimpinan

pembelajaran, dan komunikasi efektif dengan peserta didik maupun orang tua. Penguatan kegiatan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) diharapkan menjadi sarana praktik baik dalam membangun budaya kolaboratif antarpendidik. Berikut rangkuman tabel kebutuhan pengembangan dan pelatihan guru pada setiap jenjang di kabupten Gresik yakni :

Tabel 2.26 Tabel Kebutuhan pengembangan dan pelatihan guru

Jenjang	Kebutuhan Dominan	Catatan Utama
PAUD/KB/TK	Kurikulum, HOTS, IT, Inklusi, Penelitian Tindakan	Aspek HOTS dan penelitian masih sangat lemah
SD/MI	Karier, Kurikulum, IT, HOTS, Assessment, Inklusi	Kebutuhan pelatihan tertinggi di semua aspek
SMP/MTs	Kurikulum, IT, Assessment, Inklusi, Kolaborasi	Unggul dalam digitalisasi dan asesmen
SMA/SMK	Kurikulum, IT, Assessment, Inklusi	Fokus pada penguatan digital dan kepemimpinan kelas

Sumber: Diolah peneliti dari analisis hasil angket (2025)

Berikut akan dijelaskna secara detail dari hasil survey pertanyaan terbuka yang telah di lakukan pada setiap jenjang guru kabupaten Gresik

a) Guru TK/KB/TPA/SPS/RA

Analisis deskriptif terhadap dari 1712 Guru TK/KB/TPA/SPS/RA dalam survey kebutuhan pengembangan dan pelatihan guru di Kabupaten Gresik menunjukkan beberapa poin utama yang mencerminkan kondisi aktual kompetensi dan tantangan guru di lapangan. Kompetensi yang perlu ditingkatkan guru menekankan perlunya peningkatan pada empat kompetensi utama, yaitu:

1) Kompetensi pedagogik, meliputi kemampuan pengelolaan kelas, pemahaman karakteristik anak usia dini, pengembangan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta penerapan manajemen kelas yang efektif.
2) Kompetensi profesional, seperti penguasaan materi pelajaran, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran, serta kemampuan mengembangkan media dan bahan ajar yang variatif.

3) Kompetensi sosial dan kepribadian, termasuk kemampuan berkomunikasi efektif dengan peserta didik, orang tua, dan rekan sejawat, serta pengelolaan emosi dan sikap teladan sebagai pendidik.
4) Kemampuan membuat alat peraga edukatif (APE) dan media pembelajaran menarik berbasis teknologi digital.

Tantangan yang dihadapi guru di Kabupaten Gresik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural. Beberapa isu utama yang ditemukan antara lain:

1) Keterbatasan fasilitas pendidikan yang tidak merata di antara wilayah.
2) Kapasitas guru dalam penggunaan teknologi yang masih bervariasi.
3) Keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran anak masih rendah.
4) Tingginya beban administratif menyebabkan guru kurang fokus pada inovasi pembelajaran.

Selain itu, guru berharap adanya program pengembangan kompetensi yang menyeluruh, meliputi:

1) Peningkatan kemampuan teknologi pendidikan (IT) dan pembelajaran digital.
2) Pelatihan metode pembelajaran inovatif dan kreatif.
3) Penguatan asesmen autentik dan evaluasi pembelajaran.
4) Peningkatan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan manajemen kelas inklusif.
5) Pemahaman kurikulum terkini yang berorientasi pada karakter dan potensi anak.

Hasil temuan lainnya pada beberapa sekolah di Kabupaten Gresik telah menunjukkan inisiatif positif melalui:

1) Penerapan pembelajaran berbasis digital dan inovasi kurikulum.
2) Kolaborasi dengan universitas dan dunia industri.
3) Program unggulan seperti Sekolah Penggerak, Kelas Tahfidz, dan Sekolah Ramah Anak.
4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan karakter dan religius.

Tanggapan lainnya menyatakan faktor yang paling berpengaruh terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Gresik mencakup:

1) Kualitas guru dan tenaga pendidik.
2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
3) Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan dunia kerja.
4) Manajemen sekolah yang efektif dan berbasis data.
5) Partisipasi aktif masyarakat dan orang tua.

Harapan lainnya para guru dan pengelola pendidikan berharap pemerintah daerah dapat:

1) Menyelenggarakan pelatihan berkala dan relevan dengan kebutuhan terkini.
2) Menjamin pemerataan fasilitas pendidikan dan akses digital.
3) Meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya non-ASN dan non-PPPK.
4) Mendorong integrasi teknologi dalam proses pembelajaran.
5) Menguatkan kemitraan antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan dunia usaha.

Secara umum, upaya-upaya ini diharapkan mampu mewujudkan mutu pendidikan yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Gresik, hasil analisis menunjukkan kebutuhan mendesak untuk:

1) Meningkatkan kompetensi guru pada empat ranah utama: pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.
2) Memperluas akses dan pemerataan fasilitas pendidikan yang memadai.
3) Mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem pembelajaran dan manajemen sekolah.
4) Memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Berikut beberapa strategi dalam pengembangan di setiap bidang strategis guru Kabupaten Gresik Guru TK/RA/SPS/TPA yakni :

Tabel 2.27 Tabel strategi pengembangan dan pelatihan guru

Bidang Strategis	Fokus Pengembangan
Peningkatan kompetensi guru	Pelatihan CPD, workshop Kurikulum yang ditetapkan pemerintah, bimbingan teknis perangkat ajar
Transformasi digital sekolah	Pelatihan TIK, pengadaan perangkat digital, media interaktif

Bidang Strategis	Fokus Pengembangan
Pemerataan sarpras pendidikan	Rehabilitasi kelas, pengadaan APE, penguatan PAUD/TK/RA
Kesejahteraan guru meningkat	Program insentif, penghargaan 'Guru Inovatif', sertifikasi
Kolaborasi pendidikan	Kerja sama dengan universitas dan industri, forum guru
Tata kelola berbasis data	Pelatihan manajemen Dapodik/EMIS, supervisi akademik
Pendidikan inklusif & karakter	Pelatihan guru ABK, pendidikan karakter, sekolah ramah anak

Sumber: Diolah peneliti dari hasil analisis angket (2025)

b) Guru SD/MI

Analisis deskriptif terhadap 1791 Guru pengisian survey kebutuhan pengembangan dan pelatihan guru SD/MI di Kabupaten Gresik menunjukkan adanya tren kebutuhan nyata dan beragam harapan dari para pendidik di satuan pendidikan dasar. Hasil ini diperoleh berdasarkan tanggapan guru terhadap sejumlah pertanyaan yang menggali kompetensi, tantangan, kebutuhan, dan harapan terhadap mutu pendidikan di daerah. Keterampilan dan Kompetensi yang diperlukan Mayoritas guru SD/MI menilai bahwa peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, kepribadian, serta literasi digital merupakan prioritas utama. Guru menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran, keterampilan manajemen kelas yang efektif (termasuk bagi kelas inklusif dan siswa berkebutuhan khusus), pengembangan metode serta media pembelajaran yang inovatif dan menarik, serta kemampuan komunikasi dan kolaborasi dengan siswa, kolega, dan wali murid.

Tantangan dan Kesulitan dalam Pelaksanaan Pembelajaran. Guru menghadapi sejumlah tantangan utama, antara lain: keberagaman karakter, kemampuan, dan motivasi belajar siswa, keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana pendukung seperti media digital dan perangkat pembelajaran, beban administratif yang cukup tinggi, perubahan kurikulum yang menuntut adaptasi cepat, rendahnya keterlibatan orang tua, serta ketimpangan distribusi guru di beberapa wilayah. Sedangkan Pengetahuan dan Keterampilan yang Ingin Dikembangkan, Guru memiliki

keinginan kuat untuk meningkatkan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi pendidikan, penguasaan strategi pembelajaran inovatif, pengelolaan kelas inklusif dan penanganan siswa ABK, pendalaman materi ajar, asesmen autentik, serta teknik evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan konteks kurikulum terkini.

Selain itu, Penilaian terhadap Mutu Pendidikan secara umum, guru menilai mutu pendidikan di Kabupaten Gresik tergolong baik, namun masih diperlukan pemerataan dan peningkatan fasilitas di wilayah terpencil. Beberapa sekolah telah menerapkan inovasi pembelajaran seperti joyful learning, kelas digital, program tahfidz, serta pembinaan karakter dan nilai religius yang menjadi ciri khas pendidikan dasar di Gresik. Pendapat lain tentang keunggulan Pendidikan di Kabupaten Gresik yakni keunggulan pendidikan di Kabupaten Gresik antara lain komitmen kuat terhadap pendidikan karakter dan religius, munculnya inovasi pembelajaran dari guru dan sekolah, prestasi siswa di tingkat nasional, serta penerapan digitalisasi sekolah dan pembelajaran inklusif di beberapa wilayah. Faktor-faktor utama yang dinilai berpengaruh terhadap mutu pendidikan dasar di Kabupaten Gresik meliputi kualitas dan profesionalisme guru, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan orang tua dan masyarakat, implementasi kurikulum yang adaptif dan kontekstual, serta peran pemerintah daerah dalam kebijakan, pendanaan, dan pembinaan satuan pendidikan. Guru berharap agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih pada pelaksanaan pelatihan berkelanjutan yang berbasis praktik, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, serta penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan. Berikut beberapa strategi dalam pengembangan di setiap bidang strategis guru SD/MI Kabupaten Gresik yakni :

Tabel 2.28 Strategi pengembangan guru SD/MI

Bidang Strategis	Fokus Pengembangan
Penguatan Kompetensi Pedagogik	1) Pelatihan perencanaan dan implementasi pembelajaran mendalam (*deep learning*). 2) Workshop manajemen kelas inklusif dan pembelajaran mendalam.

Bidang Strategis	Fokus Pengembangan
Peningkatan Kompetensi Profesional	1) Program pengembangan konten mata pelajaran dan asesmen autentik. 2) Penguatan kemampuan guru dalam mengembangkan perangkat ajar dan modul ajar berbasis kurikulum yang ditetapkan pemerintah.
Penguatan Kompetensi Sosial dan Kepribadian	1) Pelatihan komunikasi efektif dengan siswa dan wali murid. 2) Kegiatan pembinaan etika profesi dan integritas guru. 3) Pengembangan program guru sebagai teladan karakter dan agen perubahan sekolah.
Literasi Digital dan Inovasi Pembelajaran	1) Pelatihan penggunaan TIK, aplikasi pembelajaran, dan media interaktif. 2) Pengembangan *learning management system* (LMS) sekolah dasar berbasis local. 3) Pembuatan konten digital pembelajaran oleh komunitas guru.
Penguatan Dukungan Kelembagaan dan Fasilitas	1) Pemerataan sarana prasarana pendidikan dasar di seluruh kecamatan. 2) Penambahan perangkat TIK dan media pembelajaran digital. 3) Fasilitasi kemitraan antara sekolah
Pembinaan dan Kesejahteraan Guru	1) Peningkatan insentif bagi guru non-ASN. 2) Penguatan sistem penghargaan berbasis kinerja dan inovasi pembelajaran. 3) Program pendampingan dan supervisi akademik berkelanjutan.

Sumber: Diolah peneliti dari analisis hasil angket (2025)

c) Guru SMP/MTs

Analisis deskriptif terhadap 939 guru survey dalam pertanyaan terbuka mengenai kebutuhan pengembangan dan pelatihan guru SMP/MTs di Kabupaten Gresik menunjukkan adanya kecenderungan

kebutuhan yang beragam, baik dalam aspek kompetensi, tantangan pembelajaran, maupun arah pengembangan profesional guru. Hasil analisis ini menggambarkan kondisi aktual guru dalam melaksanakan proses pembelajaran serta ekspektasi mereka terhadap peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Survey menyatakan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Guru, mayoritas guru SMP/MTs menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, terutama dalam konteks penerapan teknologi pembelajaran dan pengembangan perangkat ajar yang inovatif. Guru menghendaki pelatihan yang memperkuat kemampuan dalam perencanaan dan implementasi pembelajaran berbasis *deep learning* serta *student-centered learning* sebagai penguatan terhadap pembelajaran aktif dan bermakna. Selain itu, peningkatan keterampilan dalam penyusunan LKPD kreatif, pengelolaan kelas inklusif, refleksi pembelajaran, serta komunikasi dan kolaborasi antarguru juga menjadi kebutuhan utama.

Sedangkan hasil survey menyatakan tantangan utama dalam pembelajaran Guru SMP/MTs menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran, antara lain perbedaan karakter dan kemampuan peserta didik, rendahnya motivasi dan kedisiplinan belajar, serta keterbatasan sarana prasarana di beberapa satuan pendidikan. Tantangan lain mencakup perubahan kurikulum yang cepat, penyesuaian metode pembelajaran terhadap gaya belajar siswa yang beragam, serta penanganan peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) dalam konteks pendidikan inklusif. Keterbatasan fasilitas digital juga menjadi kendala utama dalam penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Hal lain dalam bidang pengetahuan dan keterampilan yang ingin dikuasai para guru di jenjang SMP/MTs menghendaki penguatan kapasitas di bidang:

1) Teknologi pendidikan dan integrasi TIK dalam pembelajaran,
2) Pembuatan media pembelajaran interaktif serta konten digital edukatif,
3) Penerapan strategi pembelajaran inovatif seperti *project-based learning*, *differentiated learning*, dan *blended learning*,
4) Pengembangan asesmen autentik dan manajemen kelas inklusif,

5) Peningkatan kemampuan komunikasi efektif, kolaborasi tim, serta keterampilan berbicara di depan umum (*public speaking*).

Tanggapan lainnya tentang mutu dan keunggulan pendidikan di Kabupaten Gresik, secara umum, mutu pendidikan di Kabupaten Gresik dinilai cukup baik dan menunjukkan tren peningkatan. Inovasi pembelajaran berbasis digital mulai diterapkan di berbagai satuan pendidikan, disertai dengan penguatan program keagamaan seperti tahfidz dan pendidikan karakter. Sekolah dan madrasah juga mulai membangun lingkungan yang ramah anak dan inklusif. Kolaborasi dengan perguruan tinggi serta dunia industri memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan nyata masyarakat serta dunia kerja.

Berdasarkan hasil survey guru sebanyak 939 guru SMP/MTs menyatakan faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan di Gresik meliputi:

1) Kualitas dan profesionalisme guru,
2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai,
3) Dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah daerah maupun pusat,
4) Keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan,
5) Pemanfaatan teknologi digital secara optimal dalam kegiatan pembelajaran.

Harapan dan Saran Pengembangan Guru berharap agar pemerintah daerah memperkuat program pelatihan berkelanjutan yang aplikatif dan kontekstual dengan kondisi kelas. Pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, serta dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai lokal dan keagamaan menjadi prioritas utama. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan dunia usaha/industri perlu ditingkatkan guna membangun ekosistem pendidikan yang adaptif, inovatif, dan inklusif. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa guru SMP/MTs di Kabupaten Gresik membutuhkan peningkatan kompetensi yang integratif, mencakup aspek pedagogik, profesional, dan digital. Dukungan terhadap pengembangan kapasitas guru harus disertai dengan kebijakan yang

berorientasi pada penguatan ekosistem pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan pemerataan mutu serta daya saing pendidikan di tingkat lokal maupun global. Berikut beberapa strategi dalam pengembangan di setiap bidang strategis guru SMP/MTs Kabupaten Gresik yakni :

Tabel 2.29 Strategi pengembangan guru SMP/MTs

Bidang Strategis	Fokus Pengembangan
Penguatan kompetensi pedagogik dan pembelajaran inovatif	1) Pelatihan *Student-Centered Learning* dan *Deep Learning* 2) Workshop penyusunan RPP dan LKPD kreatif berbasis proyek 3) Bimbingan teknis implementasi kurikulum yang ditetapkan pemerintah di SMP/MTs
Penguasaan teknologi pembelajaran dan digitalisasi pendidikan	1) Pelatihan pembuatan media ajar digital interaktif 2) Pelatihan *Learning Management System (LMS)* dan aplikasi edukasi (Canva, Wordwall, Quizizz) 3) Workshop konten video pembelajaran
Penguatan kompetensi asesmen dan refleksi pembelajaran	1) Workshop asesmen diagnostik dan autentik 2) Pelatihan evaluasi hasil belajar berbasis kompetensi 3) Forum refleksi pembelajaran antar guru (*lesson study*)
Manajemen kelas inklusif dan penanganan siswa ABK	1) Pelatihan *inclusive classroom management* 2) Pendampingan kolaboratif antara guru reguler dan guru pendamping khusus 3) Workshop komunikasi empatik dan sosial-emosional
Penguatan kolaborasi dan kepemimpinan pembelajaran	1) Pelatihan *coaching and mentoring for teachers* 2) Pengembangan *Professional Learning Community (PLC)* tingkat sekolah dan kabupaten 3) Forum inovasi praktik baik guru
Peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja guru	1) Program penghargaan dan insentif guru berprestasi 2) Dialog kebijakan dan advokasi kesejahteraan guru 3) Kegiatan penguatan kesejahteraan non-finansial (apresiasi publik, ruang ekspresi)

Sumber: Diolah peneliti dari hasil angket (2025)

d) Guru SMA/ MA/SMK

Analisis deskriptif terhadap hasil kajian kebutuhan pengembangan dan pelatihan guru SMA/MA/SMK di Kabupaten Gresik yang melibatkan 189 responden menunjukkan adanya kebutuhan mendesak dalam penguatan kompetensi profesional dan pedagogik yang relevan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Kajian ini mencakup beberapa aspek utama, antara lain kompetensi prioritas yang perlu dikembangkan, tantangan pembelajaran, bidang pengetahuan yang diinginkan, serta faktor-faktor penentu mutu pendidikan menengah di daerah. Hasil survey Mayoritas guru SMA/MA/SMK menilai bahwa penguatan kompetensi pedagogik dan profesional menjadi prioritas utama. Fokus peningkatan diarahkan pada kemampuan menerapkan pembelajaran mendalam, pengembangan metode inovatif, serta pengelolaan kelas yang efektif. Selain itu, guru menekankan pentingnya penguasaan teknologi pendidikan, terutama dalam penggunaan teknologi informasi (IT), kecerdasan buatan (AI), dan media digital interaktif. Kompetensi sosial dan kepribadian, seperti komunikasi efektif, kolaborasi, serta kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*), juga menjadi bagian penting yang perlu dikembangkan untuk mendukung proses pembelajaran yang adaptif dan humanis. Guru juga menunjukkan kebutuhan akan peningkatan literasi digital dan kemampuan menerapkan strategi pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik individu peserta didik.

Sedangkan guru menyatakan Tantangan Utama dalam Pembelajaran Guru di jenjang pendidikan menengah menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Heterogenitas kemampuan, minat, dan motivasi belajar siswa menjadi salah satu kendala utama dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Selain itu, keterbatasan akses dan pemerataan fasilitas pendidikan—seperti alat praktik, perangkat komputer, dan jaringan internet—masih menjadi hambatan signifikan di beberapa wilayah. Tantangan lain yang sering dihadapi ialah penyesuaian terhadap perubahan kurikulum yang dinamis, peningkatan beban administratif guru, serta ketimpangan fasilitas antara sekolah di kawasan perkotaan dan perdesaan. Hal ini menuntut peningkatan dukungan sistemik dalam bentuk kebijakan dan sarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi.

Selain itu, kompetensi atau pengetahuan yang ingin dikuasai, Berdasarkan hasil survey, bidang-bidang pengembangan yang paling diinginkan oleh guru SMA/MA/SMK meliputi:

1) Implementasi pembelajaran mendalam dan strategi pengajaran adaptif;
2) Pemanfaatan teknologi pembelajaran (e-learning, coding, AI, dan multimedia interaktif);
3) Pengembangan asesmen autentik dan pembuatan perangkat ajar inovatif;
4) Peningkatan pembelajaran praktik dan kewirausahaan (terutama untuk SMK);
5) Penguatan program tahfidz, karakter, dan literasi religius (khusus untuk SMA/MA berbasis agama).

Kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa guru menginginkan pelatihan yang aplikatif, relevan dengan kondisi lapangan, serta mampu menjawab tantangan perubahan paradigma pembelajaran dari *teaching-based* menuju *learning-based*. Lainnya tentang Penilaian Mutu dan Keunggulan Pendidikan, Sebagian besar guru menilai bahwa mutu pendidikan menengah di Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan positif. Inovasi pembelajaran terus meningkat melalui penerapan program-program seperti kelas digital, sekolah tahfidz, sekolah ramah anak, dan program double track. Peningkatan prestasi akademik maupun non-akademik siswa juga menjadi indikator kemajuan signifikan. Meskipun demikian, guru masih menyoroti adanya ketimpangan fasilitas dan mutu layanan pendidikan antara sekolah di perkotaan dan perdesaan, serta antara satuan pendidikan negeri dan swasta. Kolaborasi antara sekolah dengan dunia industri, universitas, dan dukungan pemerintah daerah diakui sebagai salah satu keunggulan yang memperkuat mutu pendidikan menengah di Gresik.

Faktor Penentu Mutu Pendidikan Guru mengidentifikasi beberapa faktor utama yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan, yaitu:

1) Kompetensi dan profesionalisme guru, termasuk kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kurikulum;
2) Ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan di seluruh wilayah;

3) Peran serta orang tua dan masyarakat dalam mendukung pembelajaran;
4) Kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan suportif;
5) Kolaborasi dunia industri dan lembaga pendidikan tinggi, terutama bagi sekolah menengah kejuruan (SMK);
6) Kebijakan dan pembinaan berkelanjutan dari pemerintah daerah.

Faktor-faktor tersebut menjadi penentu strategis bagi peningkatan kualitas dan daya saing lulusan di Kabupaten Gresik. Terakhir harapan dan saran para guru berharap adanya pemerataan akses dan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Gresik, termasuk peningkatan insentif dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Selain itu, guru menginginkan pelatihan yang berkelanjutan dan kontekstual dengan kondisi kelas, sehingga hasil pelatihan dapat langsung diterapkan dalam praktik pembelajaran. Guru juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan—antara sekolah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan industri—untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa guru SMA/MA/SMK di Kabupaten Gresik memerlukan penguatan kompetensi profesional, pedagogik, dan digital yang terintegrasi. Pengembangan kapasitas guru harus disertai dengan pemerataan fasilitas dan dukungan kebijakan yang kondusif agar mampu menjawab tantangan pendidikan di era digital. Melalui strategi pelatihan yang responsif terhadap perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, serta kebutuhan siswa yang beragam, diharapkan guru di jenjang pendidikan menengah dapat berperan optimal dalam mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Berikut beberapa strategi dalam pengembangan di setiap bidang strategis guru SMA/MA/SMK Kabupaten Gresik yakni :

Tabel 2.30 Strategi pengembangan guru SMA/SMK

Bidang Strategis	Fokus Pengembangan
Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Inovasi Pembelajaran	Menyelenggarakan pelatihan intensif berbasis praktik baik untuk *differentiated learning*, *project-based learning*, dan *deep learning approach* di SMA/MA/SMK.
Penguatan Kompetensi Digital dan Teknologi Pembelajaran	Workshop dan pendampingan pembuatan media digital, konten interaktif, serta

Bidang Strategis	Fokus Pengembangan
	pemanfaatan AI dalam perencanaan pembelajaran.
Penguatan Kompetensi Profesional dan Asesmen Autentik	Pelatihan pembuatan perangkat ajar (CP, TP, Modul Ajar) dan asesmen autentik berbasis kurikulum terkini.
Penguatan *Soft Skills* dan Etos Profesional	Kegiatan pengembangan *soft skills* seperti komunikasi efektif, kolaborasi, public speaking, dan *problem solving* melalui pelatihan dan *peer mentoring*.
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Praktik dan Kewirausahaan (SMK)	Pelatihan dan *link and match* dengan industri untuk memperkuat praktik kerja lapangan dan pengembangan unit usaha sekolah.
Penguatan Pendidikan Karakter dan Keagamaan (MA/SMA berbasis agama)	Workshop penguatan nilai-nilai karakter, integrasi tahfidz dan spiritual learning dalam kurikulum dan pembelajaran.
Pemerataan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Pemetaan kebutuhan fasilitas (IT, jaringan, alat praktik) dan penganggaran bertahap untuk pemerataan fasilitas antar wilayah.
Penguatan Ekosistem Kolaboratif Pendidikan	Pembentukan forum koordinasi antara sekolah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk inovasi pendidikan daerah.

Sumber: Diolah peneliti dari hasil analisis angket (2025)

Maka jika dilihat dari hasil kebutuhan pengembangan profesional guru di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa prioritas utama terletak pada peningkatan kompetensi implementasi kurikulum aktual, penguasaan teknologi digital, asesmen berbasis HOTS, pendidikan inklusif, serta pengembangan karya ilmiah dan kolaborasi profesional. Upaya strategis pemerintah daerah perlu diarahkan pada penyusunan program pelatihan berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata, agar pengembangan kapasitas guru selaras dengan arah kebijakan pendidikan nasional dan visi peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Gresik.

b. Tenaga Administrasi Sekolah

Tenaga kependidikan merupakan komponen strategis dalam sistem pendidikan yang berperan menjaga keberlangsungan, efisiensi, dan mutu layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Dalam konteks Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Kabupaten Gresik, keberadaan tenaga kependidikan tidak hanya dipandang sebagai unsur pendukung administratif, tetapi juga sebagai elemen kunci dalam manajemen sekolah

yang efektif dan akuntabel. Kualitas tata kelola pendidikan sangat bergantung pada kapasitas tenaga kependidikan dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengelolaan sumber daya, pelayanan teknis, serta dukungan profesional bagi guru dan peserta didik. Oleh karena itu, pembangunan tenaga kependidikan diarahkan pada peningkatan kompetensi, pemerataan distribusi, serta optimalisasi kinerja berbasis standar profesionalisme dan kebutuhan institusional. Pendekatan ini diharapkan memperkuat ekosistem pendidikan yang adaptif, berorientasi pada mutu, dan berkelanjutan di Kabupaten Gresik. Berikut adalah tabel distribusi tenaga kependidikan di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.31 Distribusi Tenaga Kependidikan di Kabupaten Gresik

JENJANG	JENIS PTK	JUMLAH PTK
TK/RA Sederajat	TENDIK	437
SD/MI Sederajat	TENDIK	815
SMP/MTs Sederajat	TENDIK	673
SMA/MA/SMK Sederajat	TENDIK	503

Sumber: BPS Kab. Gresik (2025); Data Dinas Pendidikan Kab. Gresik (2025); Data Cabang Dinas Kab. Gresik (2025)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah tenaga administrasi sekolah (Tendik) sebanyak 437 orang pada jenjang TK/RA, 815 orang pada jenjang SD/MI, 673 orang pada jenjang SMP/MTs, dan 503 orang pada jenjang SMA/MA/SMK. Lebih lanjut, tim telah melakukan survey terhadap tenaga kependidikan untuk memetakan kebutuhan kompetensi tenaga kependidikan. Survey ini diikuti oleh 79 repsonden dan berikut adalah hasilnya.

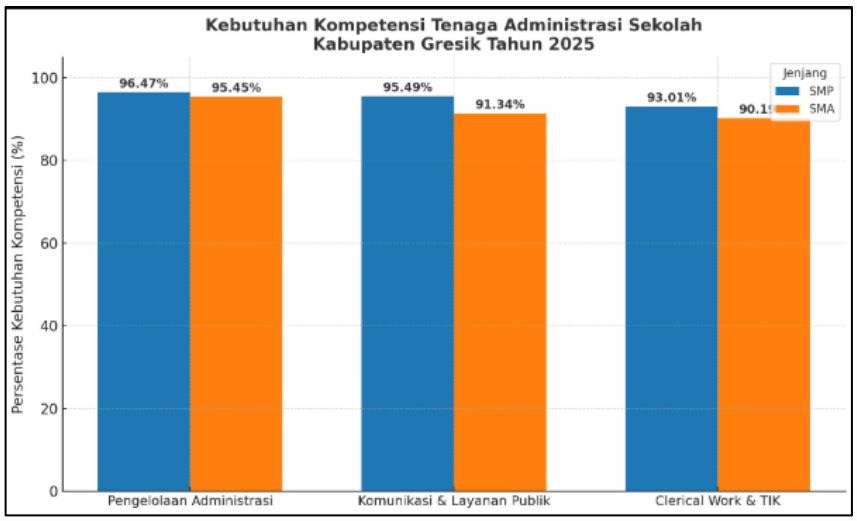

Gambar 22. Hasil Survei Kompetensi Tenaga Kependidikan di Kab. Gresik
Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan grafik mengenai Kebutuhan Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2025, terlihat bahwa tingkat kebutuhan kompetensi pada tenaga kependidikan, khususnya tenaga administrasi di jenjang SMP dan SMA, menunjukkan angka yang relatif tinggi dan merata di seluruh aspek kompetensi yang diukur.

Pada aspek pengelolaan administrasi, kebutuhan kompetensi tercatat paling tinggi, yakni 96,47% untuk jenjang SMP dan 95,45% untuk jenjang SMA. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi administrasi masih menjadi pilar utama dalam mendukung tata kelola sekolah yang efisien dan tertib. Selanjutnya, pada aspek komunikasi dan layanan publik, kebutuhan kompetensi mencapai 95,49% di SMP dan 91,34% di SMA, mengindikasikan pentingnya kemampuan interpersonal dan pelayanan prima sebagai bagian dari profesionalisme tenaga kependidikan. Komponen kompetensi yang paling dibutuhkan berdasarkan instrumen dalam angket adalah pelatihan pengelolaan layanan informasi kepada warga sekolah dan orangtua siswa melalui platform digital.

Sementara itu, pada aspek *clerical work* dan TIK, kebutuhan kompetensi berada pada kisaran 93,01% di SMP dan 90,10% di SMA. Angka tersebut menunjukkan sub-komepetensi yang dibutuhkan oleh tenaga administrasi sekolah adalah keterampilan dalam administrasi keuangan dan pengelolaan data guru. Hal ini memperlihatkan bahwa penguasaan teknologi informasi dan keterampilan kerja perkantoran menjadi tuntutan

yang semakin esensial dalam sistem administrasi pendidikan modern. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa tenaga administrasi sekolah memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan layanan pendidikan. Kemampuan dalam pengelolaan administrasi, komunikasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kompetensi dasar yang perlu diperkuat untuk menunjang tata kelola sekolah yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan sistem informasi pendidikan.

Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib memiliki tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan layanan pembelajaran dan administrasi sekolah. Tenaga administrasi berfungsi sebagai pengelola data dan dokumen pendidikan, penggerak layanan administrasi, serta penghubung antara sistem manajemen sekolah dengan pemangku kepentingan. Dalam kerangka perencanaan pembangunan pendidikan Kabupaten Gresik, penguatan kompetensi tenaga administrasi sekolah menjadi prioritas strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan. Tenaga administrasi yang profesional akan mendukung tercapainya target layanan pendidikan minimal, mempercepat implementasi program prioritas daerah, serta memperkuat sistem informasi manajemen pendidikan secara menyeluruh.

c. Tenaga Perpustakaan Sekolah

Tenaga perpustakaanatau disebut dengan pustakawan memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembelajaran, pengembangan literasi, serta perluasan akses terhadap sumber pengetahuan di satuan pendidikan. Dalam konteks Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Kabupaten Gresik, tenaga perpustakaan tidak hanya diposisikan sebagai pengelola koleksi bahan bacaan, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran literasi informasi dan pendukung implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Berikut adalah sebaran pustakwan di sekolah Kabupaten Gresik dihimpun dari responden hasil survey kebutuhan

kompetensi pustakawan dan data dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Gresik.

Tabel 2.32 Distribusi Tenaga Perpustakaan di Kabupaten Gresik

JENJANG	JENIS PTK	JUMLAH PTK
SMP/MTs Sederajat	Pustakawan	28
SMA/MA/SMK Sederajat	Pustakawan	91

Sumber: Data Cabang Dinas Kab. Gresik (2025); Analisis Hasil survey Tenaga Perpustakaan (2025)

Tabel tersebut menunjukkan jumlah sebaran pustakwan di Kabupaten Gresik yakni 28 tenaga pustakawan pada jenjang SMP/MTs dan 91 tenaga pustakawan pada jenjang SMA/MA/SMK. Tim juga melakukan survei untuk memetakan kebutuhan kompetensi pustakawan guna peningkatan mutu pembelajaran di sekolah Kabupaten Gresik. Berikut adalah hasil survei kebutuhan kompetensi tersebut.

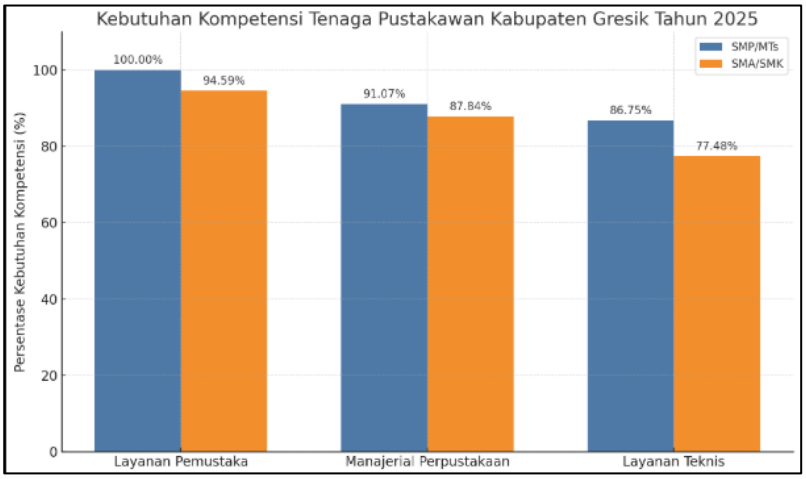

Gambar 23. Hasil Survei Kompetensi Tenaga Perpustakaan di Kab. Gresik
Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pada jenjang SMP, kompetensi yang paling banyak dibutuhkan adalah kompetensi layanan pemustaka (100%), diikuti kompetensi manajerial perpustakaan yakni pelatihan administrasi perpustakaan (91,07%), serta layanan teknis yaitu pelatihan tentang perawatan dan preservasi bahan pustaka (86,75%). Untuk jenjang SMA, kebutuhan utama juga berada pada kompetensi layanan pemustaka (94,59%), manajerial perpustakaan (87,84%), dan layanan teknis

(77,48%). Detailnya berdasarkan instrumen dalam angket, pustawakan sekolah di Kabupaten Gresik memerlukan pelatihan bidang administrasi perpustakaan (manajerial perpustakaan) dan perawatan serta preservasi bahan pustaka (layanan teknis).

Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi layanan perpustakaan semakin penting dalam mendukung pembelajaran di satuan pendidikan. Pustakawan tidak hanya berperan dalam pengelolaan koleksi, tetapi juga menjadi penggerak literasi dan pendukung proses belajar siswa serta guru. Sesuai Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), setiap satuan pendidikan yang memiliki perpustakaan wajib memiliki tenaga pustakawan atau petugas kepustakaan. Tenaga ini harus mampu menjalankan fungsi pengelolaan sumber belajar, layanan literasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Bila pustakawan bersertifikat belum tersedia, sekolah dapat menunjuk guru atau tenaga kependidikan yang telah mendapatkan pelatihan kepustakaan.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan pendidikan daerah, penguatan kompetensi pustakawan menjadi bagian strategis untuk meningkatkan mutu layanan literasi sekolah. Kehadiran pustakawan yang profesional akan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan mendukung tercapainya target pelayanan minimal pendidikan secara berkelanjutan.

d. Tenaga Laboran Sekolah

Tenaga laboratorium sekolah memegang peran penting dalam menjamin mutu pembelajaran sains dan praktik keterampilan di satuan pendidikan. Dalam Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Kabupaten Gresik, tenaga laboran dipandang sebagai elemen profesional yang berkontribusi langsung terhadap efektivitas pembelajaran berbasis eksperimen dan penerapan konsep ilmiah. Perannya tidak terbatas pada pengelolaan peralatan dan bahan praktik, tetapi juga mencakup dukungan terhadap keselamatan kerja, validitas hasil percobaan, serta kesiapan sarana laboratorium dalam menunjang kurikulum. Berikut adalah tabel jumlah

laboran di sekolah Kabupaten Gresik dihimpun dari responden survei dan data dari Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Gresik.

Tabel 2.33 Distribusi Tenaga Laboran di Kabupaten Gresik

JENJANG	JENIS PTK	JUMLAH PTK
SMP/MTs Sederajat	Laboran	42
SMA/MA/SMK Sederajat	Laboran	130

Sumber: Data Cabang Dinas Kab. Gresik (2025); Analisis Hasil survey Tenaga Laboran (2025)

Hasil survei menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki 42 orang tenaga laboran pada jenjang SMP/MTs dan 130 orang tenaga laboran pada jenjang SMA/MA/SMK. Tenaga laboran di sekolah Kabupaten Gresik terdapat pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, hal ini disebabkan karena jenjang pendidikan dasar sebagian besar tidak memiliki ruang laboratorium untuk menunjang proses belajar mengajar. Untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Gresim, tim telah melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi laboran. Hasilnya dipaparkan dalam gambar berikut.

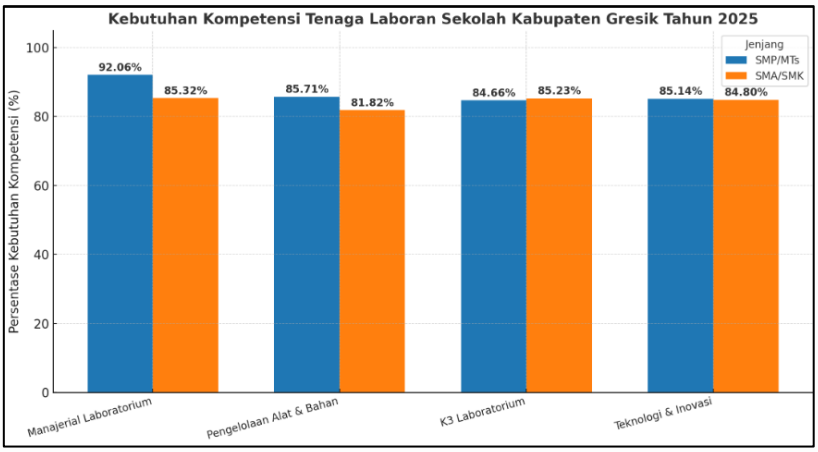

Gambar 24. Hasil Survei Kompetensi Tenaga Laboran di Kab. Gresik
Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil survei diatas terdapat beberapa kompetensi yang dibutuhkan oleh tenaga laboran. Pada jenjang SMP, kompetensi yang paling banyak dibutuhkan adalah kompetensi manajerial laboratorium dengan tingkat kebutuhan mencapai 92,06%. Selain itu, tenaga laboran SMP juga memerlukan peningkatan pada kompetensi pengelolaan alat dan

bahan (85,71%), keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (84,66%), serta teknologi dan inovasi laboratorium (85,14%).

Pola kebutuhan yang serupa juga muncul pada jenjang SMA. Kompetensi manajerial laboratorium menjadi prioritas dengan tingkat kebutuhan 85,32%, diikuti oleh pengelolaan alat dan bahan (81,82%), K3 laboratorium (85,23%), serta teknologi dan inovasi laboratorium (84,80%). Berdasarkan instrumen dalam angket, komponen dalam kompetensi manajerial laboratorium yang dibutuhkan oleh laboran adalah pelatihan mengenai pengelolaan laboratorium dengan standar manajemen laboratorium sekolah dan pengelolaan jadwal serta administrasi penggunaan laboratorium. Sedangkan untuk kompetensi pengelolaan alat dan bahan, yang dibutuhkan oleh laboran adalah pelatihan keterampilan pemliharaan alat. Komponen kompetensi K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dibutuhkan laboran adalah prosedur pembersihan pasca praktikum. Dan komponen kompetensi teknologi dan inovasi, laboran membutuhkan pelatihan membuat media praktikum sederhana dengan bahan lokal.

Tingginya angka kebutuhan pada aspek tersebut menunjukkan peran penting laboran dalam mendukung proses pembelajaran berbasis praktikum, baik dalam menyiapkan peralatan, menjaga keselamatan kerja, maupun mendukung inovasi pembelajaran di laboratorium.

Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022, satuan pendidikan menengah yang memiliki laboratorium wajib memiliki tenaga laboran atau teknisi. Laboran memiliki peran strategis dalam pengelolaan sarana laboratorium, memastikan keamanan dan keselamatan saat kegiatan praktikum, serta mendukung keberlangsungan proses pembelajaran yang aktif dan kontekstual.

Dengan demikian, penguatan kapasitas tenaga laboran, baik dalam aspek manajerial, teknis, K3, maupun inovasi teknologi, menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian standar layanan pendidikan di satuan pendidikan menengah dan kejuruan.

e. Konselor Sekolah

Tenaga konselor sekolah berperan strategis dalam memastikan tumbuh kembang peserta didik berlangsung secara utuh—baik secara akademik, sosial, maupun emosional. Dalam Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Kabupaten Gresik, konselor dipandang sebagai komponen profesional yang berfungsi mengintegrasikan layanan bimbingan dan konseling ke dalam sistem pembelajaran yang holistik. Kehadiran konselor yang kompeten menjadi krusial dalam membantu peserta didik mengenali potensi diri, mengatasi permasalahan pribadi dan sosial, serta merencanakan karier secara realistis sesuai minat dan kemampuan. Dibawah ini dipaparkan jumlah konselor di sekolah Kabupaten Gresik berdasarkan data dari Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Kabupaten Gresik dan responden survei pemetaan kebutuhan kompetensi konselor.

Tabel 2.34 Distribusi Konselor Sekolah di Kabupaten Gresik

JENJANG	JENIS PTK	JUMLAH PTK
TK/RA Sederajat	Konselor	9
SMP/MTs Sederajat	Konselor	95
SMA/MA/SMK Sederajat	Konselor	20

Sumber: Hasil Analisis Survei Kebutuhan Pengembangan dan Pelatihan Konselor Sekolah (2025)

Hasil survei yang dilakukan terhadap tenaga konselor di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa jumlah konselor pada berbagai jenjang pendidikan masih terbatas. Berdasarkan data, jumlah konselor di jenjang TK/RA Sederajat sebanyak 9 orang, di jenjang SMP/MTs Sederajat sebanyak 95 orang, dan di jenjang SMA/MA/SMK Sederajat sebanyak 20 orang. Selain jumlah, survei juga menggali kebutuhan kompetensi konselor, terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Berikut adalah hasil pemetaan kebutuhan kompetensi konselor sekolah Kabupaten Gresik.

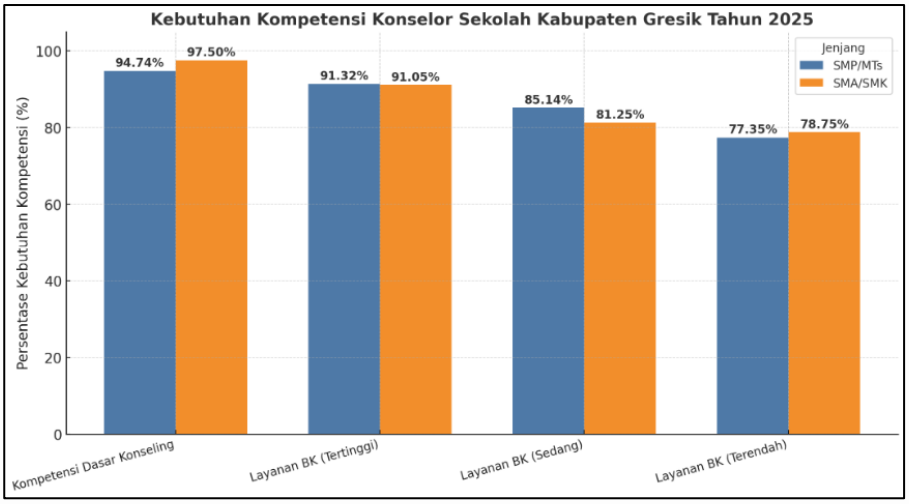

Gambar 25. Hasil Survei Kompetensi Konselor di Kab. Gresik
Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Hasilnya, pada jenjang SMP, kompetensi yang paling dibutuhkan adalah Kompetensi Dasar Konseling dengan tingkat kebutuhan mencapai 94,74%, diikuti oleh Kompetensi Layanan Bimbingan dan Konseling dengan tingkat kebutuhan antara 77% hingga 91%. Sementara itu, pada jenjang SMA, kebutuhan akan Kompetensi Dasar Konseling bahkan lebih tinggi, yakni mencapai 97,50%, disusul oleh kompetensi layanan BK dengan kebutuhan antara 78% hingga 91%. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar konselor membutuhkan penguatan kapasitas profesional dalam memberikan layanan konseling yang efektif, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan praktik konseling di satuan pendidikan. Adapun pemetaan kompetensi berdasarkan instrumen dalam angket yang dibutuhkan oleh konselor adalah pelatihan keterampilan komunikasi konseling, menginterpretasi hasil asesmen secara tepat, penggunaan *e-counseling,* dan melaksanakan konseling daring dengan efektif.

Apabila kondisi ini dibandingkan dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022, maka terlihat adanya gap pemenuhan layanan konseling di sekolah. Berdasarkan SPM, setiap satuan pendidikan pada jenjang SMP dan SMA wajib memiliki konselor dengan rasio minimal 1 (satu) konselor untuk setiap 150 peserta didik. Konselor juga harus memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan

kepribadian, serta melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yang mencakup layanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem.

Dengan jumlah peserta didik SMP dan SMA di Kabupaten Gresik yang cukup besar, jumlah konselor yang ada saat ini belum sepenuhnya mencukupi jika dibandingkan dengan standar rasio tersebut. Artinya, banyak satuan pendidikan yang kemungkinan besar masih memiliki rasio konselor–peserta didik jauh di atas standar ideal 1:150, sehingga beban layanan per konselor menjadi lebih tinggi. Kondisi ini dapat berdampak pada kualitas pendampingan peserta didik, terutama dalam aspek psikososial, perencanaan karier, serta dukungan terhadap peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.

Selain dari sisi jumlah, hasil survei juga memperlihatkan adanya kesenjangan kompetensi konselor sekolah dibandingkan standar kompetensi minimal dalam SPM. Kebutuhan tinggi terhadap kompetensi dasar konseling dan layanan BK mencerminkan bahwa konselor membutuhkan penguatan kapasitas profesional yang berkelanjutan, agar mampu memberikan layanan yang sesuai standar nasional.

6. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu komponen penting yang menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah. Ketersediaan, kelayakan, dan pemerataan fasilitas pendidikan—baik ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, maupun sarana penunjang lainnya—menjadi faktor pendukung utama dalam menciptakan proses belajar yang efektif, nyaman, dan bermakna. Dalam konteks penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Daerah (RIPPD), analisis terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana infrastruktur pendidikan telah mampu memenuhi kebutuhan peserta didik di setiap jenjang. Hal ini sekaligus menjadi dasar dalam perumusan strategi peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Gresik.

a. Kondisi Ruang Kelas di Kabupaten Gresik

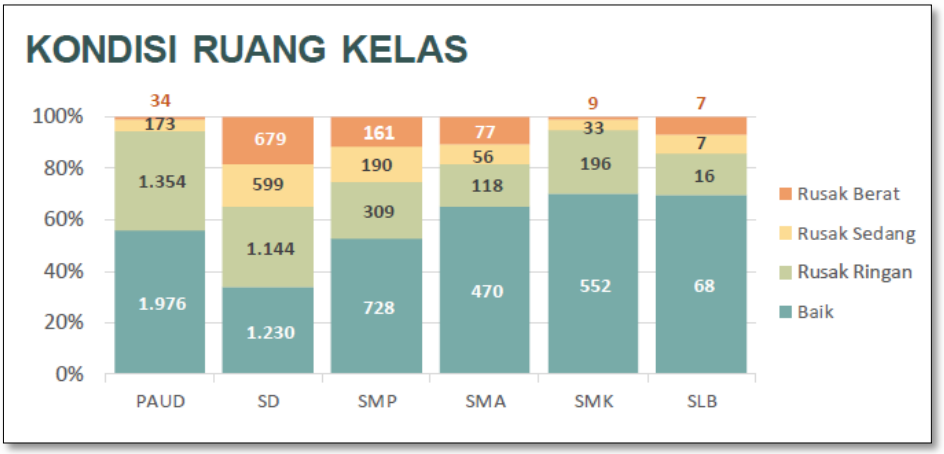

Gambar 26. Kondisi Ruang Kelas di Kabupaten Gresik
Sumber: Neraca Pendidikan Daerah (2023)

Berdasarkan data kondisi ruang kelas di Kabupaten Gresik, terlihat bahwa sebagian besar ruang kelas di semua jenjang pendidikan berada dalam kondisi baik, meskipun masih terdapat sejumlah ruang yang mengalami kerusakan ringan hingga berat. Pada jenjang PAUD, dari total ruang kelas yang ada, sebanyak 1.976 ruang atau sekitar separuhnya tergolong baik, sementara 1.354 ruang rusak ringan, 173 ruang rusak sedang, dan 34 ruang rusak berat. Kondisi serupa juga terlihat pada jenjang SD, di mana terdapat 1.230 ruang kelas dalam kondisi baik dan 1.144 ruang rusak ringan, namun masih ada 599 ruang rusak sedang dan 679 ruang rusak berat yang perlu perhatian.

Untuk jenjang SMP, dari total ruang yang ada, 728 ruang tercatat dalam kondisi baik, diikuti 309 ruang rusak ringan, 190 rusak sedang, dan 161 rusak berat. Sementara pada jenjang SMA, terdapat 470 ruang kelas dalam kondisi baik, 118 rusak ringan, 56 rusak sedang, dan 77 rusak berat. Pada jenjang SMK, kondisi relatif lebih baik dengan 552 ruang kelas baik, 196 rusak ringan, 33 rusak sedang, dan 9 rusak berat. Adapun pada jenjang SLB, dari total ruang yang relatif lebih sedikit, terdapat 68 ruang kelas dalam kondisi baik, 16 rusak ringan, 7 rusak sedang, dan 7 rusak berat.

Secara keseluruhan, meskipun dominasi ruang kelas dalam kondisi baik menunjukkan adanya perhatian terhadap sarana pendidikan, masih diperlukan upaya revitalisasi dan rehabilitasi terhadap ruang-ruang kelas

yang mengalami kerusakan agar seluruh peserta didik di Kabupaten Gresik dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan layak.

b. Kondisi Akses Listrik Sekolah

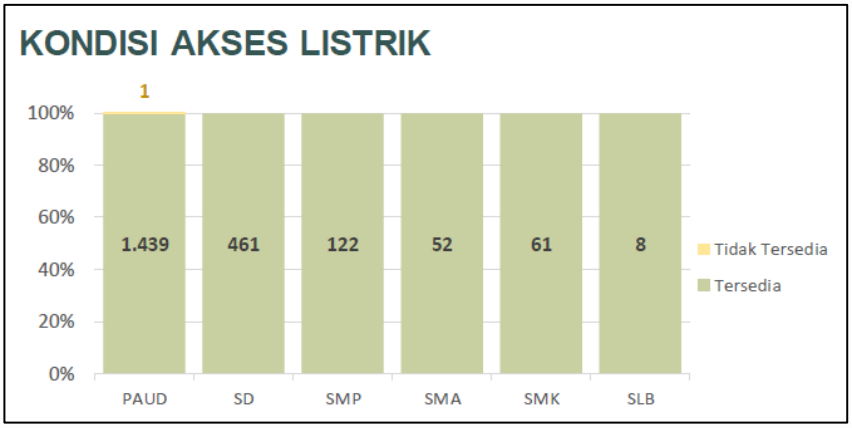

Gambar 27. Kondisi Akses Listrik Sekolah di Kabupaten Gresik
Sumber: Neraca Pendidikan Daerah (2023)

Berdasarkan data kondisi akses listrik pada satuan pendidikan di Kabupaten Gresik, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh lembaga pendidikan telah memiliki akses listrik yang memadai. Pada jenjang PAUD, dari total 1.440 lembaga, sebanyak 1.439 telah memiliki akses listrik, sementara hanya 1 lembaga yang tercatat belum teraliri listrik. Untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, serta SLB, seluruh lembaga tercatat telah memiliki akses listrik secara penuh (100%).

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan listrik di sekolah-sekolah di Kabupaten Gresik sudah sangat baik dan merata, sehingga mampu mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, termasuk penggunaan perangkat teknologi pembelajaran. Namun demikian, perlu tetap dilakukan pemantauan berkala untuk memastikan kestabilan dan keandalan pasokan listrik, terutama bagi lembaga di wilayah pedesaan atau daerah dengan potensi gangguan infrastruktur.

c. Kondisi Akses Internet Sekolah

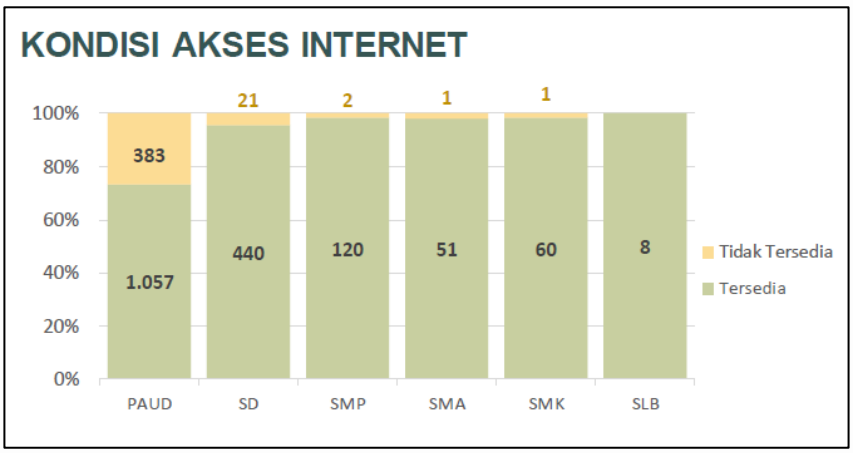

Gambar 28. Kondisi Akses Internet di Kabupaten Gresik
Sumber: Neraca Pendidikan Daerah (2023)

Dari gambar tersebut dapat dikatakan untuk jenjang TK dan MI, internet belum menjadi kebutuhan utama dalam kegiatan pembelajaran, tetapi sudah patut dimanfaatkan untuk administrasi sekolah dan komunikasi guru-orang tua. Jenjang SD dan SMP, ketersediaan internet yang tinggi mendukung integrasi pembelajaran digital dan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer.

Jenjang SMA dan SMK, pemanfaatan internet telah mencapai tahap optimal untuk mendukung pembelajaran vokasional, magang daring, dan pengembangan kompetensi kejuruan. Sedangkan sekolah di bawah Kemenag memiliki akses internet sebesar 95% menunjukkan kesiapan lembaga madrasah dalam transformasi digital, namun perlu penguatan dalam penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis daring.

Ketersediaan internet di Kabupaten Gresik sudah memenuhi sebagian besar indikator Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada jenjang SD hingga SMK. TK dan sebagian sekolah di bawah Kemenag masih memerlukan peningkatan infrastruktur TIK agar setara dengan jenjang lainnya. Kondisi ini selaras dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 dan Permendikbud No. 23 Tahun 2013, yang menegaskan pentingnya sarana TIK dalam menunjang mutu dan pemerataan pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kemenag perlu melakukan program afirmatif berupa dukungan jaringan, pelatihan guru, dan pembiayaan operasional TIK untuk

memastikan setiap sekolah dapat mengimplementasikan pembelajaran digital secara efektif.

d. Kondisi Sanitasi Sekolah di Kabupaten Gresik

1) Kondisi Sumber Air Sekolah di Kabupaten Gresik

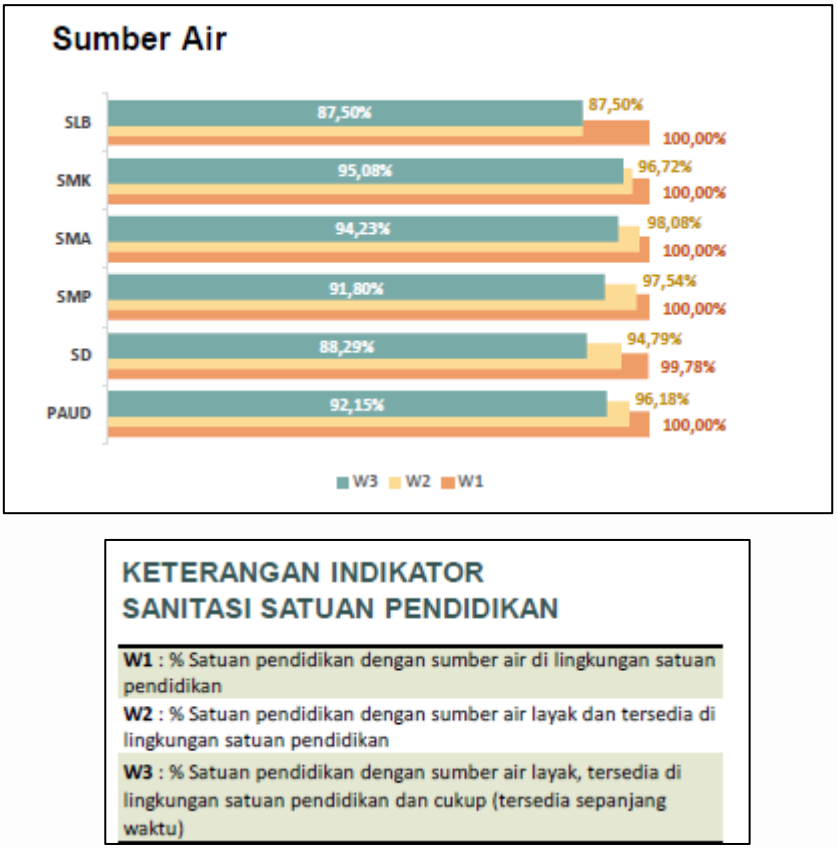

Gambar 29. Kondisi Sumber Air Sekolah di Kabupaten Gresik
Sumber: Neraca Pendidikan Daerah (2023)

Berdasarkan data kondisi sumber air pada satuan pendidikan di Kabupaten Gresik, hampir seluruh lembaga pendidikan dari jenjang PAUD hingga SLB telah memiliki sumber air di lingkungannya (indikator W1) dengan capaian mencapai 100%. Namun, dari sisi kelayakan dan ketersediaan air sepanjang waktu (indikator W2 dan W3), masih terdapat sedikit perbedaan antarjenjang. SMA dan SMK menunjukkan kondisi terbaik dengan lebih dari 95% satuan pendidikan memiliki sumber air layak dan cukup, sedangkan PAUD, SD, dan SLB masih memiliki sebagian kecil lembaga yang belum terlayani optimal. Secara umum, ketersediaan air di sekolah-sekolah Kabupaten Gresik sudah baik, namun peningkatan kualitas dan kontinuitas pasokan air tetap perlu menjadi perhatian.

2) Kondisi Toilet Sekolah di Kabupaten Gresik

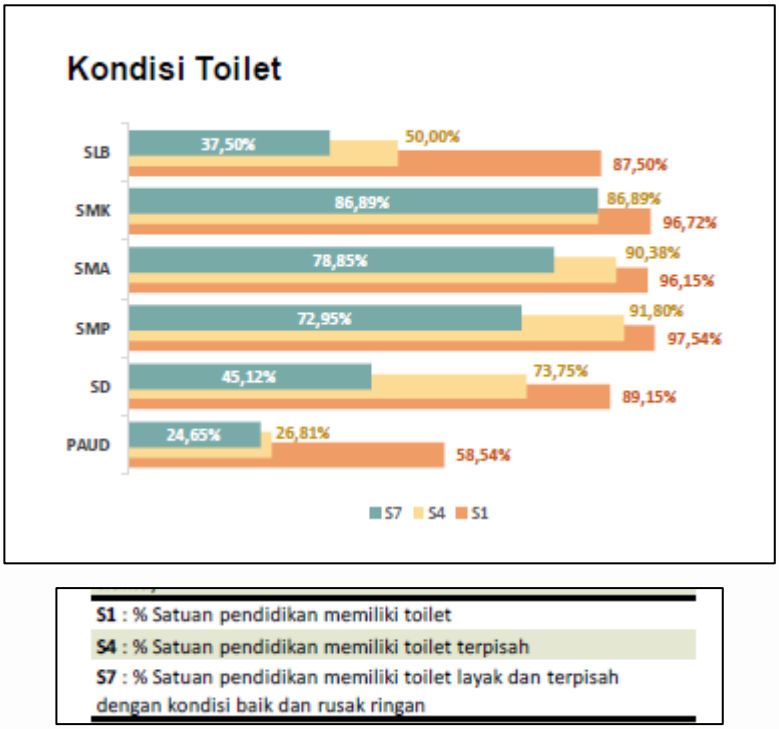

Gambar 30. Kondisi Toilet Sekolah di Kabupaten Gresik
Sumber: Neraca Pendidikan Daerah (2023)

Berdasarkan grafik Kondisi Toilet pada berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Gresik, tampak bahwa meskipun sebagian besar satuan pendidikan telah memiliki fasilitas toilet (S1) dengan persentase yang cukup tinggi bahkan mencapai 97,54% pada jenjang SMP namun kualitas dan kelayakannya masih menjadi tantangan. Ketika indikator dinaikkan menjadi toilet yang layak dan terpisah dengan kondisi baik atau rusak ringan (S7), persentasenya menurun cukup tajam. Kondisi ini paling terlihat pada jenjang PAUD dan SD, di mana toilet layak dan terpisah hanya mencapai 24,65% dan 45,12%. Sebaliknya, jenjang SMK dan SMA menunjukkan kondisi yang lebih baik dengan toilet layak mencapai 86,89% dan 78,85%. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam aspek sanitasi pendidikan bukan lagi pada ketersediaan fasilitas toilet semata, melainkan pada upaya memastikan kelayakan, kebersihan, serta pemisahan toilet sesuai standar terutama di satuan pendidikan dasar dan anak usia dini.

e. Kondisi Laboratorium

Kondisi laboratorium berikut ini dianalisis berdasarkan Standar Laboratorium dalam Standar Mutu Pendidikan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan data laboratorium yang tercantum pada lampiran wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dilakukan analisis deskriptif terhadap kondisi laboratorium berdasarkan kecamatan. Data ini mencakup laboratorium Fisika, IPA, Bahasa, Biologi, dan Komputer pada jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Gresik. Setiap sekolah dicatat kondisi laboratoriumnya dengan kategori baik, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, serta jumlah total laboratorium. Kecamatan yang tercatat antara lain Driyorejo, Kebomas, Menganti, Wringinanom, Sidayu, Bungah, Manyar, dan kecamatan lainnya yakni pada gambar berikut ini :

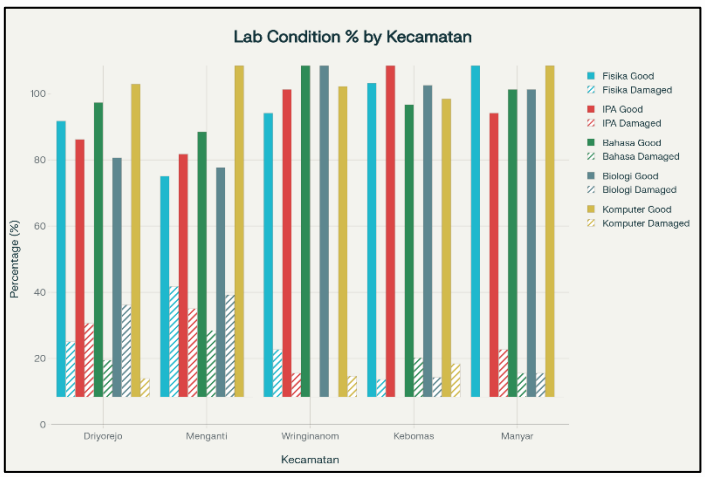

Gambar 31. Kondisi Laboratorium

Gambar diatas menunjukan data laboratorium untuk bidang Fisika, IPA, Bahasa, Biologi, dan Komputer di wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yakni :

1) Kecamatan Driyorejo memiliki persentase laboratorium baik tertinggi di bidang Komputer (94.44%) dan terendah di Biologi (72.22%).

2) Kecamatan Menganti menunjukkan angka laboratorium baik bervariasi, dengan persentase terendah di Fisika (66.67%) dan tertinggi di Komputer (100%).
3) Kecamatan Wringinanom umumnya memiliki persentase laboratorium baik tinggi, dengan beberapa bidang seperti Bahasa dan Biologi mencapai 100%.
4) Kecamatan Kebomas memiliki kinerja laboratorium yang sangat baik, terutama di bidang IPA dengan 100% laboratorium dalam kondisi baik.
5) Kecamatan Manyar menunjukkan kondisi laboratorium yang sangat baik, dengan beberapa bidang seperti Fisika, Bahasa, dan Komputer memiliki 100% laboratorium baik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas laboratorium di Kabupaten Gresik berada dalam kondisi baik, meskipun masih terdapat beberapa bidang dan kecamatan yang memerlukan perbaikan sarana dan prasarana. Kondisi ini penting untuk diperhatikan agar seluruh laboratorium memenuhi kriteria standar minimal sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013, yaitu:

1) Tersedianya ruang laboratorium dengan luas yang memadai sesuai jumlah peserta didik.
2) Adanya perlengkapan dan peralatan praktikum yang sesuai dengan kurikulum.
3) Tersedianya tempat penyimpanan alat dan bahan, serta sistem keamanan dan keselamatan kerja.
4) Ketersediaan petugas laboratorium yang memiliki kompetensi teknis.

Jika disandingkan dengan standar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi laboratorium di Kabupaten Gresik secara umum telah memenuhi sebagian besar aspek sarana dan prasarana pendidikan yang dipersyaratkan, khususnya pada bidang Komputer dan IPA. Namun, beberapa laboratorium di bidang Fisika dan Biologi masih memerlukan revitalisasi agar dapat mencapai standar mutu pendidikan nasional secara menyeluruh. Upaya peningkatan kualitas laboratorium diharapkan dapat memperkuat proses pembelajaran berbasis praktik dan

mendukung penguasaan kompetensi peserta didik sesuai arah kebijakan Standar Nasional Pendidikan, yaitu menjamin mutu pendidikan secara nasional dalam konteks pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

f. Kondisi Ketersediaan Meja, Kursi, Papan Tulis Dan Komputer

Secara umum, persentase ketersediaan meja dibandingkan dengan jumlah siswa di setiap kecamatan berkisar antara 101% hingga 106% pada seluruh jenjang pendidikan, yang berarti jumlah meja telah mencukupi bahkan melebihi kebutuhan siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan meja telah memenuhi standar sarana pendidikan, di mana setiap peserta didik berhak atas satu meja belajar dalam kondisi layak pakai. Untuk ketersediaan kursi, sebagian besar kecamatan dan jenjang pendidikan juga telah memenuhi standar, dengan tingkat ketersediaan di atas 100%. Namun, terdapat pengecualian pada Kecamatan Wringinanom, di mana tingkat ketersediaan kursi masih sebesar 97,75% dari jumlah siswa. Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013, setiap peserta didik wajib memiliki kursi yang ergonomis dan layak guna mendukung kenyamanan serta efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan penambahan kursi di Kecamatan Wringinanom agar seluruh siswa dapat terlayani dengan optimal.

Seluruh kecamatan, baik pada jenjang TK hingga SMA/SMK dan madrasah (MTs dan MA), telah memiliki papan tulis minimal satu unit di setiap ruang kelas, sehingga telah memenuhi standar sarana utama ruang belajar sebagaimana diatur dalam lampiran Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013, yang mewajibkan setiap ruang kelas dilengkapi dengan papan tulis sebagai media pembelajaran. Sementara itu, ketersediaan komputer di seluruh satuan pendidikan, baik di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama, telah memenuhi standar minimal sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Setiap satuan pendidikan telah memiliki setidaknya satu unit komputer yang digunakan untuk kegiatan administrasi sekolah, pelaporan data, maupun pembelajaran berbasis teknologi. Pada jenjang SMA dan SMK, rata-rata sekolah telah memiliki laboratorium komputer yang representatif,

dengan pemanfaatan yang lebih luas untuk mendukung kegiatan praktikum dan pembelajaran digital.

Khusus pada madrasah (MTs dan MA), ketersediaan sarana pembelajaran juga menunjukkan kecenderungan positif. Sebagian besar madrasah telah menyediakan meja, kursi, papan tulis, dan komputer sesuai dengan standar mutu. Meski demikian, masih ditemukan beberapa madrasah yang memerlukan peningkatan jumlah perangkat komputer untuk mendukung kegiatan asesmen berbasis digital dan pembelajaran berbasis TIK. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan meja, kursi, papan tulis, dan komputer di seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Gresik telah sesuai dengan Standar Mutu Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 dan sejalan dengan prinsip Standar Nasional Pendidikan (SNP). Meskipun demikian, perlu dilakukan upaya penyempurnaan pada beberapa satuan pendidikan di Kecamatan Wringinanom dan beberapa madrasah, khususnya terkait penambahan kursi dan komputer, agar seluruh wilayah dan jenjang pendidikan di Kabupaten Gresik dapat mencapai kesesuaian penuh dengan standar mutu sarana pembelajaran nasional.

g. Kondisi Ruang Kelas, Ruang Guru dan Ruang Kepala Sekolah

Analisis berikut menggambarkan kondisi ketersediaan ruang kelas, ruang guru, dan ruang kepala sekolah pada satuan pendidikan di Kabupaten Gresik yang mencakup jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, MTs, dan MA. Data diperoleh dari hasil rekapitulasi wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Tahun Pelajaran 2024/2025, yang kemudian dibandingkan dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 dan prinsip-prinsip Standar Nasional Pendidikan (SNP).

1) Ruang Kelas

Secara umum, ketersediaan ruang kelas di Kabupaten Gresik telah mencukupi kebutuhan peserta didik di sebagian besar kecamatan. Berdasarkan data, rasio ruang kelas terhadap jumlah rombongan belajar (rombel) berada pada kisaran 1:1 hingga 1:1,05, yang berarti hampir seluruh sekolah memiliki jumlah ruang kelas yang sesuai dengan jumlah rombel aktif. Namun, pada

beberapa kecamatan seperti Driyorejo dan Menganti, ditemukan adanya kekurangan ruang kelas di beberapa satuan pendidikan jenjang SD dan SMP akibat peningkatan jumlah siswa baru yang signifikan. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah melakukan optimalisasi ruang melalui sistem shift dan penggunaan ruang multifungsi, yang menunjukkan adanya upaya adaptif untuk menjaga kelancaran proses pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013, setiap rombongan belajar wajib memiliki satu ruang kelas dengan luas minimal 56 m^2 untuk SD/MI dan 72 m^2 untuk SMP/MTs dan jenjang di atasnya, serta dilengkapi ventilasi, pencahayaan, dan sarana pendukung pembelajaran. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sekolah di Kabupaten Gresik telah memenuhi kriteria tersebut, meskipun beberapa sekolah di daerah padat penduduk masih membutuhkan tambahan ruang kelas baru.

2) Ruang Guru

Ketersediaan ruang guru pada setiap satuan pendidikan juga menunjukkan kondisi yang relatif memadai. Hampir seluruh sekolah memiliki ruang khusus bagi guru untuk kegiatan administrasi, persiapan pembelajaran, dan koordinasi. Rasio ruang guru terhadap jumlah tenaga pendidik menunjukkan angka 1 ruang guru untuk setiap satuan pendidikan, sesuai dengan standar minimal. Beberapa sekolah di jenjang SMA, SMK, dan MA bahkan telah mengembangkan ruang guru yang lebih representatif dengan fasilitas teknologi informasi sederhana seperti komputer dan jaringan internet internal, mendukung kegiatan administrasi digital dan kolaborasi antarpendidik. Sesuai lampiran Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013, ruang guru berfungsi sebagai tempat kerja, istirahat, dan komunikasi bagi para pendidik, dengan luas minimal 4 m^2 ditambah 1,8 m^2 untuk setiap guru. Dengan demikian, kondisi ruang guru di Kabupaten Gresik dapat dikategorikan memenuhi standar mutu, meskipun beberapa sekolah dasar di daerah pinggiran masih memerlukan perbaikan fasilitas dasar seperti meja kerja dan pendingin ruangan.

3) Ruang Kepala Sekolah

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Gresik telah memiliki ruang kepala sekolah yang berfungsi dengan

baik. Ruang kepala sekolah digunakan untuk kegiatan administrasi, koordinasi, dan pertemuan dengan guru maupun tamu sekolah. Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013, ruang kepala sekolah merupakan bagian wajib dari sarana administrasi sekolah dengan luas minimal 12 m^2 untuk jenjang SD dan 16 m^2 untuk SMP, SMA, SMK, dan madrasah. Dari hasil observasi data, lebih dari 95% sekolah di Kabupaten Gresik telah memenuhi kriteria tersebut, baik dari segi luas ruangan maupun ketersediaan perlengkapan administrasi seperti meja kerja, kursi tamu, lemari arsip, dan perangkat komputer. Beberapa sekolah yang masih berstatus kecil atau memiliki jumlah siswa terbatas, terutama di jenjang TK dan MI swasta, masih menggabungkan ruang kepala sekolah dengan ruang administrasi. Meskipun demikian, kondisi tersebut masih dianggap memadai secara fungsional, sepanjang kegiatan manajerial sekolah dapat berjalan efektif.

Secara keseluruhan, ketersediaan ruang kelas, ruang guru, dan ruang kepala sekolah di Kabupaten Gresik telah sesuai dengan Standar Mutu Pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 dan prinsip Standar Nasional Pendidikan (SNP). Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek pemerataan dan revitalisasi ruang di beberapa wilayah padat seperti Driyorejo dan Menganti, serta peningkatan fasilitas kenyamanan bagi ruang guru dan kepala sekolah di beberapa satuan pendidikan kecil. Upaya peningkatan sarana ini penting untuk mendukung tercapainya lingkungan belajar yang layak, aman, dan mendukung kualitas proses pembelajaran.

h. Kondisi WC Guru dan WC Siswa

Berdasarkan data sarana prasarana pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan Kementerian Agama Kabupaten Gresik tahun pelajaran 2024/2025, dilakukan analisis terhadap ketersediaan fasilitas sanitasi berupa WC guru dan WC siswa di seluruh jenjang pendidikan, yaitu TK, SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTs, dan MA. Analisis ini mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 serta prinsip Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menekankan pentingnya sarana pendukung kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan di

lingkungan sekolah. Berikut tabel ketersediaan WC untuk di setiap jenjang Pendidikan:

Tabel 2.35 Ketersediaan WC Guru dan WC Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gresik

Jenjang Pendidikan	Persentase Ketersediaan WC Siswa	Persentase Ketersediaan WC Guru	Keterangan
TK	92%	85%	Beberapa TK di wilayah pedesaan belum memiliki WC terpisah untuk guru dan siswa
SD	95%	88%	Umumnya memenuhi, tetapi masih kurang di beberapa sekolah kecil di daerah utara
SMP	98%	93%	Sebagian besar sekolah telah memenuhi rasio 1 WC per 25 siswa
SMA	100%	95%	Kondisi WC baik dan terawat, terutama di sekolah negeri
SMK	99%	96%	Fasilitas WC guru dan siswa memadai, namun beberapa perlu perawatan berkala
MI	94%	90%	Madrasah swasta kecil masih memiliki keterbatasan sarana air bersih
MTs	96%	92%	Umumnya memenuhi standar, perlu peningkatan sanitasi di beberapa wilayah pesisir
MA	97%	94%	Sarana memadai, namun pemeliharaan belum merata antar madrasah

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (2025); Kementerian Agama Kabupaten Gresik (2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan di Kabupaten Gresik telah memiliki fasilitas WC untuk guru dan siswa, namun tingkat kecukupan dan kondisi kebersihannya bervariasi antar jenjang dan wilayah kecamatan. Pada jenjang TK dan SD, ketersediaan WC siswa rata-rata mencapai 95% dari kebutuhan ideal, sementara WC guru baru mencapai 88%. Beberapa sekolah di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Ujungpangkah dan Sidayu masih memiliki keterbatasan jumlah WC yang memadai, terutama untuk guru perempuan. Untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK, fasilitas sanitasi cenderung lebih baik. Persentase kecukupan WC siswa mencapai 98–100%, sedangkan WC guru berkisar antara 92–96%. Sekolah negeri umumnya telah

memenuhi standar minimal 1 unit WC untuk setiap 25 siswa dan 1 unit WC guru untuk setiap 10 guru, sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013.

Pada sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama (MI, MTs, dan MA), fasilitas WC guru dan siswa juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat beberapa madrasah swasta di Kecamatan Dukun, Bungah, dan Panceng yang memiliki keterbatasan sarana air bersih dan perawatan fasilitas, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam upaya pemenuhan standar mutu pendidikan. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun secara umum ketersediaan WC guru dan WC siswa di Kabupaten Gresik telah mendekati atau memenuhi standar mutu pendidikan, masih terdapat beberapa satuan pendidikan yang perlu mendapat dukungan program rehabilitasi dan penambahan fasilitas sanitasi. Upaya perbaikan dan pemeliharaan fasilitas ini sangat penting untuk mendukung lingkungan belajar yang sehat, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah.

7. Pembiayaan Pendidikan

Komponen pembiayaan pendidikan merupakan salah satu pilar strategis dalam Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Kabupaten Gresik. Keefektifitasan pembangunan pendidikan sangat ditentukan oleh bagaimana sumber daya keuangan direncanakan, dialokasikan, dan dikelola secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembiayaan tidak hanya dipahami sebagai proses penganggaran rutin, tetapi sebagai instrumen manajerial untuk mencapai pemerataan, mutu, dan efisiensi sistem pendidikan daerah. Analisis terhadap struktur, sumber, serta proporsi pembiayaan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Berikut ditampilkan tabel mengenai perbandingan pagu dan realisasi pembiayaan pendidikan di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.36 Tabel perbandingan pagu dan realisasi anggaran Dinas Pendidikan

Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2022		
Pagu	Rp.	957.446.812.465,00
Realisasi	Rp.	908.740.125.559,00
Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2023		

Pagu	Rp.	951.881.030.098,00
Realisasi	Rp.	855.352.604.124,00
Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2024		
Pagu	Rp.	1.030.998.567.356,00
Realisasi	Rp.	993.929.098.740,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (2025)

Berdasarkan data realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam periode 2022–2024, terlihat adanya dinamika yang mencerminkan keefektifitasan dan kemampuan adaptif dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan daerah. Pada tahun 2022, realisasi mencapai Rp908,74 miliar dari pagu Rp957,45 miliar (tingkat serapan 94,9%), menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang relatif optimal. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan dengan realisasi Rp855,35 miliar dari pagu Rp951,88 miliar (sekitar 89,8%), yang mengindikasikan adanya kendala dalam perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan, atau penyesuaian kebijakan fiskal. Memasuki tahun 2024, kinerja serapan meningkat signifikan, dengan realisasi Rp993,93 miliar dari pagu Rp1,03 triliun (sekitar 96,4%), menandakan perbaikan dalam sinkronisasi perencanaan, efisiensi pelaksanaan, dan penguatan tata kelola anggaran pendidikan.

Berdasarkan perspektif makro fiskal, dukungan pembiayaan sektor pendidikan di Kabupaten Gresik menunjukkan prioritas tinggi dalam kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan pemberitaan dan sumber resmi, kepala daerah menegaskan bahwa anggaran fungsi pendidikan tahun 2026 direncanakan mendekati Rp1,26 triliun, menandakan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas layanan dan luaran pendidikan. Besaran ini selaras dengan ketentuan belanja wajib fungsi pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah, sebagaimana diatur dalam pedoman penyusunan APBD terbaru yang mulai diberlakukan sejak tahun 2025.

Pada tahun anggaran 2025, postur Perubahan APBD Kabupaten Gresik menunjukkan belanja daerah sekitar Rp3,945 triliun, dengan porsi fungsi pendidikan disebut mencapai 25–26%, atau lebih dari seperlima total belanja daerah. Hal ini memperkuat posisi pendidikan sebagai fungsi prioritas dalam

struktur fiskal daerah. Adapun belanja daerah tahun 2024 tercatat sekitar Rp3,959 triliun, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran P-APBD 2024, meskipun rincian nominal fungsi pendidikan perlu diverifikasi langsung melalui dokumen lampiran resmi di JDIH atau SIPD-RI.

Secara keseluruhan, tren kebijakan fiskal Kabupaten Gresik menunjukkan arah yang konsisten dan progresif dalam menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Komitmen ini tercermin tidak hanya melalui porsi alokasi anggaran yang tinggi, tetapi juga melalui program afirmatif seperti BOSDA, seragam gratis, dan peningkatan kapasitas SDM pendidikan. Langkah ini sejalan dengan mandat pelayanan dasar dan penguatan mutu satuan pendidikan, sekaligus menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Kabupaten Gresik ke depan. Pembiayan pendidikan di Kabupaten Gresik bersumber dari beberapa pos, yang utama adalah BOSNAS dan BOSDA.

BOSNAS merupakan akronim dari Bantuan Operasional Sekolah Nasional. Sehingga, dirunut dari namanya BOSNAS ini bersumber dari negara. Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pendidikan yang berperan strategis dalam menjamin keberlangsungan layanan pendidikan dasar dan menengah di seluruh satuan pendidikan. Dalam konteks penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Daerah (RIPPD) Kabupaten Gresik, BOSNAS memiliki posisi penting sebagai instrumen pendukung pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan indikator kinerja utama (IKU) pendidikan daerah.

BOSNAS secara prinsip dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada satuan pendidikan melalui mekanisme transfer ke rekening sekolah, dengan besaran dana yang ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik. Skema ini bertujuan untuk memastikan adanya pemerataan pembiayaan operasional di seluruh satuan pendidikan tanpa membedakan lokasi geografis maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, BOSNAS menjadi pilar utama dalam mendukung kegiatan pembelajaran, pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana dasar, serta peningkatan mutu layanan pendidikan.

Analisis terhadap alokasi BOSNAS dalam kerangka RIPPD menjadi penting untuk memastikan sinergi antara kebijakan nasional dan arah pembangunan pendidikan daerah. Evaluasi mencakup kesesuaian antara besaran dana BOSNAS dengan kebutuhan riil operasional sekolah, keefektifitasan penggunaannya terhadap capaian indikator kinerja pendidikan, serta pemerataan alokasi antar wilayah dan jenjang pendidikan. Hasil kajian awal menunjukkan bahwa meskipun BOSNAS telah memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlangsungan operasional sekolah, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penggunaannya, terutama pada aspek efisiensi pembelanjaan, pemetaan kebutuhan berbasis data, dan integrasi dengan sumber pendanaan lain seperti BOSDA dan dukungan APBD. Oleh karena itu, dalam dokumen RIPPD, alokasi BOSNAS dianalisis tidak hanya sebagai komponen pendanaan rutin, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pembiayaan pendidikan yang berorientasi pada kinerja dan pemerataan mutu. Kedepan, perencanaan BOSNAS di tingkat daerah perlu diarahkan untuk:

1. Sinkronisasi perencanaan BOSNAS dan BOSDA, sehingga terjadi kesinambungan pembiayaan operasional dan pengembangan mutu sekolah.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan BOSNAS, melalui penguatan sistem pelaporan berbasis digital dan supervisi oleh pemerintah daerah.
3. Pendekatan berbasis kebutuhan dan kinerja, di mana satuan pendidikan dengan capaian kinerja tinggi atau berada di wilayah tertinggal dapat memperoleh afirmasi tambahan.
4. Integrasi BOSNAS dalam perencanaan makro pendidikan daerah, agar peran BOSNAS dapat dikaitkan langsung dengan target capaian Indeks Pembangunan Pendidikan Daerah (IPPD) dan indikator dalam RIPPD.

Alokasi BOSNAS dalam RIPPD Kabupaten Gresik bukan hanya dipandang sebagai mekanisme transfer rutin dari pusat ke sekolah, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi pembiayaan, dan mempercepat terwujudnya pemerataan serta peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Agar BOSNAS dapat memberikan dampak optimal terhadap mutu dan pemerataan

pendidikan, maka perencanaan dan pengelolaannya harus berlandaskan prinsip keefektifitasan dan efisiensi.

1. Keefektifan BOSNAS

Keefektifan dalam konteks BOSNAS diartikan sebagai kemampuan dana yang dialokasikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. BOSNAS yang efektif adalah yang:

a. Berorientasi pada peningkatan hasil belajar, dengan penggunaan dana difokuskan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, dan penguatan literasi serta numerasi siswa.
b. Tepat sasaran, yakni dana digunakan sesuai kebutuhan prioritas sekolah berdasarkan hasil evaluasi diri dan Rapor Pendidikan.
c. Terintegrasi dengan perencanaan daerah, melalui sinkronisasi antara program BOSNAS dan arah kebijakan dalam RIPPD agar penggunaan dana nasional berkontribusi langsung pada target kinerja daerah seperti peningkatan mutu, pemerataan akses, dan tata kelola.
d. Berbasis data dan kinerja, di mana alokasi serta evaluasi BOSNAS memperhatikan indikator capaian pendidikan dan perkembangan capaian SPM serta IKU daerah.

Keefektifitasan BOSNAS tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, melainkan dari sejauh mana dana tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan pencapaian indikator strategis dalam RIPPD.

2. Efisiensi BOSNAS

Efisiensi BOSNAS berarti bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal dengan hasil maksimal dan pemborosan minimal. Dalam konteks ini, BOSNAS yang efisien dicirikan oleh:

a. Perencanaan berbasis kebutuhan riil, di mana setiap pengeluaran memiliki dasar rasional sesuai kondisi dan karakteristik sekolah.
b. Pengendalian biaya dan prioritas belanja, melalui pemetaan program yang berdampak langsung terhadap layanan pendidikan, misalnya penguatan pembelajaran digital, pemeliharaan sarana minimal, dan dukungan kegiatan pembelajaran kontekstual.

c. Pemanfaatan sinergi sumber pendanaan, dengan memadukan BOSNAS dan BOSDA secara terpadu untuk menutupi kesenjangan pembiayaan tanpa tumpang tindih penggunaan.
d. Akuntabilitas dan transparansi, melalui pelaporan berbasis sistem digital (ARKAS/Manajemen BOS) serta pengawasan oleh pemerintah daerah agar setiap rupiah BOSNAS dapat ditelusuri manfaat dan dampaknya.

Efisiensi BOSNAS menekankan pentingnya *value for money* yakni setiap dana yang dikeluarkan harus menghasilkan nilai tambah yang nyata bagi peningkatan mutu pendidikan. Konsep implementatif agar BOSNAS efektif dan efisien dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37 Konsep BOSNAS yang Efektif dan Efisien

Komponen	Prinsip Utama	Strategi Implementasi di Tingkat Daerah/Sekolah
Penggunaan Dana BOSNAS	*Berorientasi hasil belajar dan mutu layanan*	1. Prioritas belanja untuk kegiatan pembelajaran, penguatan literasi, numerasi, dan karakter. 2. Dukungan terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan asesmen nasional 3. Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan.
Efisiensi Pengelolaan Keuangan	*Value for money dan pengendalian biaya*	1. Optimalisasi belanja berbasis analisis biaya satuan. 2. Sinergi dengan BOSDA dan APBD untuk menghindari duplikasi kegiatan. 3. Digitalisasi pelaporan BOS melalui ARKAS dan SIPLah.
Akuntabilitas dan Transparansi	*Transparan, partisipatif, dan dapat diaudit*	1. Pelaporan penggunaan dana secara periodik dan terbuka kepada komite sekolah dan masyarakat. 2. Supervisi rutin oleh Dinas Pendidikan. 3. Audit internal daerah terhadap pemanfaatan BOSNAS.
Sinergi dan Integrasi Pendanaan	*Kolaboratif dan adaptif terhadap kebutuhan daerah*	1. Integrasi BOSNAS dan BOSDA dalam perencanaan daerah berbasis kinerja sekolah. 2. Penggunaan BOSNAS untuk mendukung prioritas RIPPD seperti penguatan SDM guru, digitalisasi sekolah, dan pengurangan kesenjangan mutu.
Evaluasi dan Pemantauan Kinerja	*Berbasis data dan perbaikan berkelanjutan*	1. Pemantauan kinerja sekolah menggunakan indikator hasil BOSNAS dan IKU daerah.

	2. Evaluasi tahunan terhadap keefektifitasan BOSNAS dalam mendukung sasaran RIPPD. 3. Penyesuaian kebijakan BOS daerah berdasarkan temuan lapangan.

Sumber: Diolah peneliti (2025)

Selain dari BOSNAS, **BOSDA** juga menjadi anggaran pembiayaan utama dalam menyelengggarakan pendidikan di Kabupaten Gresik. BOSDA hadir sebagai pelengkap dari BOSNAS dengan tujuan untuk menutupi kekurangan pendanaan dan memperkuat daya dukung sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara optimal. Melalui BOSDA, Pemerintah Kabupaten Gresik berupaya memastikan agar seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, dapat menjalankan fungsi pendidikan secara efektif tanpa terbebani oleh keterbatasan sumber daya finansial.

Program BOSDA menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin keberlangsungan operasional sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dana BOSDA digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, pemeliharaan sarana dan prasarana dasar, serta berbagai kebutuhan administratif dan pengembangan sekolah. Lebih dari itu, BOSDA juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan mutu antarwilayah, terutama antara sekolah di wilayah perkotaan dengan sekolah di daerah terpencil atau dengan kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, keberadaan BOSDA tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan dan keadilan sosial dalam bidang pendidikan di Kabupaten Gresik.

Selain berperan dalam aspek pemerataan akses, BOSDA juga menjadi pendorong peningkatan mutu pendidikan. Melalui alokasi dana yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan sekolah, BOSDA memungkinkan satuan pendidikan untuk melakukan berbagai inovasi dalam proses pembelajaran, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong agar pengelolaan dana BOSDA dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, dengan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Transparansi ini penting untuk memastikan

bahwa setiap rupiah dana publik yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Dalam konteks perencanaan jangka panjang, BOSDA diposisikan sebagai salah satu instrumen strategis untuk mencapai sasaran utama pembangunan pendidikan Kabupaten Gresik, yaitu terwujudnya akses pendidikan yang inklusif, peningkatan mutu dan daya saing lulusan, serta terbangunnya tata kelola pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan BOSDA yang terencana dan adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional maupun dinamika kebutuhan lokal, Pemerintah Kabupaten Gresik bertekad menjadikan BOSDA sebagai fondasi kuat bagi pembangunan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan komitmen yang konsisten dan sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta masyarakat, BOSDA diharapkan mampu menjadi motor penggerak kemajuan pendidikan di Kabupaten Gresik menuju masa depan yang lebih cerdas, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Besaran alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang diterima oleh setiap satuan pendidikan di Kabupaten Gresik ditetapkan melalui mekanisme perhitungan yang terukur dan transparan. Penetapan alokasi dana dilakukan dengan cara mengalikan jumlah peserta didik dengan besaran satuan biaya operasional yang telah ditentukan, kemudian ditambah dengan hasil perkalian antara jumlah peserta didik di kelas I dan kelas VII dengan standar satuan biaya untuk pengadaan seragam sekolah. Jumlah peserta didik yang dijadikan dasar perhitungan bersumber dari data resmi yang terdapat pada sistem GRESIK PD SERU, yang menjadi basis data terpadu dalam pengelolaan informasi pendidikan daerah.

Satuan biaya yang digunakan dalam perhitungan BOSDA mengacu pada Standar Harga Satuan Belanja Pemerintah Daerah, yang ditetapkan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Penetapan satuan biaya ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara kebutuhan riil di lapangan dengan kemampuan fiskal daerah, serta memastikan penggunaan dana publik secara efisien, efektif, dan akuntabel. Selain itu, pengalokasian besaran dana BOSDA juga mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas fiskal pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Gresik melalui mekanisme ini, berupaya mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kebutuhan satuan pendidikan. BOSDA tidak hanya menjadi instrumen pendukung operasional sekolah, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin keberlangsungan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik, baik di sekolah negeri maupun swasta. Realisasi BOSDA tahun 2025 di Kabupaten Gresik dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.38 Realisasi BOSDA SMP di Kabupaten Gresik tahun 2025

No	Instansi	Jumlah
1	Negeri	Rp 14.597.490.000,-
2	Swasta	Rp 20.661.400.000,-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (2025)

Pada tahun pelaksanaan ini, Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengalokasikan dana BOSDA sebesar Rp 14.597.490.000,- untuk sekolah negeri dan Rp 20.661.400.000,- untuk sekolah swasta. Besaran alokasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan dukungan yang proporsional dan adil terhadap seluruh satuan pendidikan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Porsi alokasi yang lebih besar kepada sekolah swasta menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap kontribusi penting lembaga pendidikan swasta dalam memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Gresik. Sekolah swasta selama ini berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sehingga dukungan BOSDA menjadi stimulus penting bagi peningkatan kualitas pengelolaan dan mutu pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut.

Besaran alokasi BOSDA yang lebih besar untuk sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri disebabkan oleh beberapa faktor kebijakan dan teknis. Pertama, jumlah satuan pendidikan swasta di Kabupaten Gresik umumnya lebih banyak daripada sekolah negeri, terutama pada jenjang

pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Hal ini menyebabkan kebutuhan total dana operasional di sektor swasta menjadi lebih besar meskipun besaran bantuan per sekolah mungkin relatif sama atau bahkan lebih kecil.

BOSDA untuk sekolah swasta juga berfungsi sebagai bentuk insentif dan kompensasi atas peran aktif lembaga pendidikan swasta dalam membantu pemerintah daerah menyediakan layanan pendidikan. Karena sekolah swasta tidak memperoleh dukungan penuh dari APBD dalam bentuk pembiayaan gaji guru, sarana prasarana, dan biaya operasional lainnya seperti halnya sekolah negeri, maka BOSDA diberikan untuk membantu menutup sebagian kebutuhan tersebut. Dengan demikian, bantuan ini menjadi bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan swasta agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga dan tidak membebani masyarakat dengan biaya pendidikan yang tinggi. Dalam mekanisme perhitungannya, alokasi BOSDA biasanya dihitung berdasarkan jumlah peserta didik, bukan hanya jumlah sekolah. Jika jumlah siswa di sekolah swasta secara keseluruhan lebih besar daripada di sekolah negeri, maka total dana BOSDA yang dialokasikan pun secara otomatis menjadi lebih tinggi. Pagu BOSDA di Kabupaten Gresik dialokasikan sebagai berikut.

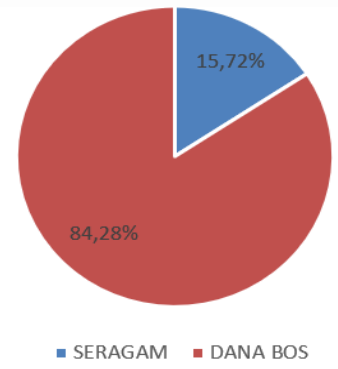

Gambar 32. Pagu BOSDA Kabupaten Gresik

(Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik)

Pemerintah Kabupaten Gresik melalui kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) memberikan dukungan pembiayaan bagi sekolah swasta sebagai bagian dari upaya pemerataan mutu pendidikan dan peningkatan akses layanan belajar bagi masyarakat. Pada tahun pelaksanaan

ini, total pagu BOSDA untuk sekolah swasta mencapai Rp 20.661.400.000,-, dengan komposisi penggunaan dana yang diarahkan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah serta pengadaan perlengkapan peserta didik.

Berdasarkan perencanaan anggaran, sekitar 84,28% dari total dana BOSDA swasta atau setara dengan Rp 17.419.019.992,- dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah yang meliputi pelaksanaan proses pembelajaran, administrasi pendidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara itu, sekitar 15,72% atau sebesar Rp 3.242.380.008,- digunakan untuk program bantuan seragam sekolah bagi peserta didik. Program bantuan seragam ini menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap peserta didik dari keluarga kurang mampu, sekaligus untuk mendorong pemerataan kesempatan belajar tanpa hambatan ekonomi.

Selain dua sumber utama tersebut, masih terdapat sumber pembiayaan yang lain yaitu BOP. **Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)** merupakan salah satu bentuk dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk membantu lembaga pendidikan dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. BOP ditujukan pada satuan pendidikan nonformal dan lembaga pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan keagamaan, pondok pesantren, serta pendidikan kesetaraan. Secara spesifik, BOP diberikan kepada TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), TPQ (Taman Pendidikan Qur'an), Madrasah Diniyah (MADIN), pondok pesantren, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan lembaga pendidikan kesetaraan guna mendukung operasional sehari-hari mereka agar dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, terjangkau, dan merata kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. BOP menjadi bagian penting dari kebijakan pembiayaan pendidikan daerah yang berorientasi pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan anak usia dini, lembaga pendidikan keagamaan, pondok pesantren, serta pendidikan kesetaraan.

Pemberian BOP diarahkan untuk mendukung kebutuhan dasar lembaga pendidikan seperti kegiatan pembelajaran, administrasi penyelenggaraan pendidikan, pengadaan bahan ajar, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Melalui skema bantuan ini, Pemerintah Kabupaten Gresik berupaya meringankan beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat, sekaligus memperkuat peran lembaga pendidikan nonformal sebagai mitra strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Pengalokasian dana BOP juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mengacu pada Standar Harga Satuan Belanja Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun, sehingga pelaksanaan program ini dapat berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah rekapitulasi jumlah penerima BOP Kabupaten Gresik tahun 2025.

Tabel 2.39 Rekapitulasi jumlah penerima BOP

No	Uraian		Jumlah Siswa	Bantuan Per Siswa Per Tahun	Total Bantuan
1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) TPA/TPQ/MADIN	TPA/TPQ	95.069	250.000	25.682.090.000
		MADIN	11.820	162.000	
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pondok Pesantren		22.000	132.000	2.904.000.000
3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD		56.356	250.000	14.089.000.000
4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan (JAKETKU)		1.570	500.000	785.000.000
Jumlah Total			**186.815**	**1.294.000**	**43.460.090.000**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (2025)

Pada tahun anggaran 2025, total dana yang dialokasikan untuk program BOP mencapai sebesar Rp 43.460.090.000,-, yang tersebar di sejumlah lembaga pendidikan dengan jumlah peserta didik sebanyak 186.815 siswa. Program BOP untuk TPA dan TPQ, serta Madrasah Diniyah (MADIN), menjadi salah satu yang terbesar dari segi cakupan peserta didik. Bantuan ini diberikan kepada 95.069 siswa TPA/TPQ dengan besaran dana sebesar Rp 250.000 per siswa per tahun, dan 11.820 siswa Madin dengan alokasi dana sebesar Rp 162.000 per siswa per tahun. Dengan demikian, total anggaran yang disalurkan kepada lembaga-

lembaga ini mencapai Rp 25.682.090.000,-. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran keagamaan dan pengembangan karakter siswa di lembaga-lembaga tersebut, sehingga pendidikan keagamaan tetap berjalan optimal dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

BOP juga dialokasikan untuk pondok pesantren dengan jumlah peserta didik sebanyak 22.000 santri, dimana setiap peserta menerima bantuan sebesar Rp 132.000 per tahun, sehingga total anggaran untuk pondok pesantren mencapai Rp 2.904.000.000,-. Bantuan ini mendukung penyelenggaraan pendidikan pesantren yang berperan penting dalam pembentukan karakter dan keilmuan keagamaan di Kabupaten Gresik. Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemerintah memberikan dukungan kepada 56.356 peserta didik dengan besaran bantuan Rp 250.000 per peserta didik per tahun, sehingga total alokasi dana mencapai Rp 14.089.000.000,-. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan di jenjang PAUD, yang merupakan fondasi penting bagi perkembangan dan pembentukan karakter anak sejak dini. Selanjutnya, program BOP untuk pendidikan kesetaraan, yang dikenal dengan program JAKETKU, diberikan kepada 1.570 peserta didik dengan besaran dana Rp 500.000 per siswa per tahun, sehingga total anggaran yang disalurkan adalah sebesar Rp 785.000.000,-. Bantuan ini bertujuan mendukung pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal, sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan peserta didik.

Total bantuan operasional sebesar Rp 43.460.090.000,- yang tersebar di berbagai jenis lembaga pendidikan, Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem pendidikan nonformal dan keagamaan sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya operasional lembaga pendidikan serta memperluas akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gresik.

8. Capaian Mutu Pendidikan

a. Rapor Pendidikan

Pengukuran capaian mutu dengan pendekatan kinerja (*performance*) salah satunya adalah dengan mengkaji Rapor Pendidikan yang telah dicapai Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil capaian Rapor Pendidikan masing-masing satuan pendidikan maka capaian indikator mutu untuk literasi,numerasi dan karakter.

Tabel 2.40 Rapor Pendidikan jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indeks SPM			**82,76 (Tuntas Madya)**
No	**Jenjang**	**Capaian**	**Indikator Prioritas**
1	PAUD	Peningkatan Tertinggi	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4
		Capaian terbaik	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4
		Capaian Terendah	B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B
2	SD Umum	Peningkatan Tertinggi	A.2 Kemampuan numerasi
		Capaian terbaik	A.1 Kemampuan literasi
		Capaian Terendah	A.2 Kemampuan numerasi
3	SMP Umum	Peningkatan Tertinggi	A.2 Kemampuan numerasi
		Capaian terbaik	A.1 Kemampuan literasi
		Capaian Terendah	A.2 Kemampuan numerasi

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (2025)

Pada Tabel 2.39, menunjukkan bahwa capaian nilai **82,76** menunjukkan bahwa daerah tersebut telah memenuhi sekitar 82,76% indikator Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar layanan dasar pendidikan telah tersedia dan berjalan dengan baik, tetapi masih ada sekitar 17–18% aspek layanan yang belum optimal atau perlu diperkuat. Capaian rapor pendidikan kabupaten Gresik masuk Katergori Tuntas Madya berada pada rentang nilai Indeks SPM 75 - 89,99 yang berarti bahwa layanan dasar sebagian besar terpenuhi, masih ada aspek yang perlu perbaikan. Capaian ini menandakan kinerja positif pemerintah daerah dalam menjamin layanan dasar pendidikan.

Pada Jenjang PAUD capaian tertinggi dan peningkatan tertinggi pada indikator prioritas C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4. Indikator C.1 (Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4) merupakan

bagian dari Dimensi C: Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Rapor Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor input pendidikan standar kualifikasi guru PAUD telah meningkat signifikan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan dukungan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualifikasi guru PAUD berjalan efektif**.** Sementara capaian terendah pada Indikator B.8: Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B merupakan bagian dari Dimensi B, yaitu Mutu dan Relevansi Pembelajaran dalam Rapor Pendidikan. Hal ini mengindikasikan hal ini mengindikasikan perlu adanya perbaikan kualitas kelembagaan PAUD di Kabupaten Gresik, baik dari aspek tata kelola, kurikulum, maupun proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan predikat akreditasi dari minimal B menjadi kelembagaan PAUD terakreditasi A. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pendampingan akreditasi serta menjamin keberlanjutan mutu melalui program penjaminan mutu internal.

Pada Jenjang SD dideskripsikan bahwa A.2 Kemampuan numerasi meningkat signifikan meskipun indikator kemampuan numerasi ini menduduki capaian terendah atau masih di bawah indikator lain. Hal ini mengindikasikan terdapat kemajuan besar dibandingkan tahun sebelumnya, artinya berbagai program atau intervensi peningkatan numerasi mulai menunjukkan hasil positif. Indikator A.2 Kemampuan Numerasi merupakan bagian dari Dimensi A, yaitu Hasil Belajar Peserta Didik dalam Rapor Pendidikan. Indikator ini mengukur kemampuan peserta didik SD dalam memahami, menggunakan, dan menalar konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana diukur melalui Asesmen Nasional (AN), khususnya komponen Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi.

Capaian terbaik pada jenjang SD pada indikator A.1 Kemampuan literasi. Indikator A.1 (Kemampuan Literasi) termasuk dalam Dimensi A, yaitu Hasil Belajar Peserta Didik pada Rapor Pendidikan yang berfokus pada kemampuan peserta didik dalam memahami bacaan, mengambil informasi penting dari teks, menafsirkan makna secara tepat serta menggunakan informasi bacaan untuk menyelesaikan masalah atau

menjawab pertanyaan. Capaian ini mengindikasikan bahwa: (1) Peserta didik memiliki kemampuan literasi berada dalam kategori tinggi atau melampaui target nasional; (2) Peserta didik mampu memahami bacaan dengan baik, tidak hanya membaca permukaan tetapi juga menafsirkan isi; (3) Pembelajaran di SD telah berhasil membangun dasar literasi yang kuat, baik dari aspek pemahaman teks maupun kemampuan bernalar dan (4) Budaya literasi kemungkinan sudah berjalan baik. Capaian ini menunjukkan bahwa intervensi peningkatan literasi dan numerasi di Kabupaten Gresik berjalan efektif, dan menjadi dasar kuat untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis siswa di jenjang pendidikan berikutnya. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah pemerataan peningkatan kemampuan numerasi antarwilayah, serta penguatan pendampingan berkelanjutan bagi guru agar peningkatan mutu dapat terjaga secara konsisten.

Pada jenjang SMP peningkatan tertinggi dideskripsikan bahwa A.2 Kemampuan numerasi meningkat signifikan meskipun indikator kemampuan numerasi ini menduduki capaian terendah atau masih di bawah indikator lain. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kemajuan positif, yaitu tren peningkatan numerasi di mana upaya pembelajaran matematika atau penalaran angka berjalan efektif. Namun demikian, kemampuan numerasi masih menjadi indikator paling rendah, artinya meskipun naik, kemampuan numerasi siswa SD masih tertinggal dibanding kemampuan literasi atau indikator lainnya. Sementara capaian terbaik pada indikator prioritas A.1 Kemampuan literasi. Kemampuan Literasi menjadi capaian terbaik di jenjang SMP, maka ini menunjukkan bahwa: (1) peserta didik memiliki kemampuan memahami, menganalisis, dan menyimpulkan informasi dari teks dengan baik; (2) Proses pembelajaran berbasis literasi di sekolah sudah berjalan efektif – seperti pembiasaan membaca, diskusi berbasis teks, atau pembelajaran yang menuntut pemahaman bacaan; dan (3) Penerapan model pembelajaran aktif, seperti membaca kritis, elaborasi teks, dan penugasan yang berbasis pemahaman bacaan, bukan hanya hafalan sudah berjalan efektif. Capaian ini merupakan

modalitas mendasar bagi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang mendorong peserta didik lebih berpikir kritis dan analitis.

Capaian ini menjadi modal penting bagi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang mendorong berpikir kritis dan analitis. Penguatan budaya literasi lintas mata pelajaran dan pengembangan praktik literasi yang berkelanjutan adalah strategi harus dilaksanakan secara konsisten untuk dapat memperkuat literasi peserta didik.

Hal yang menarik pada Rapor Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Gresik adalah tidak munculnya Dimensi karakter. Hal ini mengindikasikan bahwa Indikator prioritas hanya menampilkan area dengan capaian yang paling kritis atau menjadi fokus utama perbaikan. Dimensi Karakter tidak masuk daftar indikator prioritas, mengindikasikan bahwa Dimensi Karakter tidak termasuk area yang paling bermasalah atau paling membutuhkan intervensi mendesak. Capaian karakter peserta didik relatif stabil atau tidak berada dalam posisi terendah dibanding dimensi lain seperti literasi, numerasi, maupun lingkungan belajar. Meskipun Dimensi Karakter tidak muncul sebagai indikator prioritas, bukan berarti dimensi karakter sudah sempurna atau tidak perlu diperhatikan

Tabel 2.41 Rapor Pendidikan jenjang Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Jenjang	Capaian	Kategori	Jumlah Lembaga Capaian (%)
1	SMK	Literasi	Baik	36 Lembaga (58%)
			Sedang	21 Lembaga (34%)
			Kurang	2 Lembaga (3%)
		Numerasi	Baik	33 Lembaga (53%)
			Sedang	22 Lembaga (35%)
			Kurang	4 Lembaga (6%)
		Karakter	Baik	46 Lembaga (74%)
			Sedang	13 Lembaga (26%)
			Kurang	0 Lembaga (0%)
2	SMA	Literasi	Baik	39 Lembaga (75%)
			Sedang	10 Lembaga (19%)
			Kurang	3 Lembaga (6%)
		Numerasi	Baik	32 Lembaga (62%)
			Sedang	16 Lembaga (31%)
			Kurang	4 Lembaga (8%)

No	Jenjang	Capaian	Kategori	Jumlah Lembaga Capaian (%)
		Karakter	Baik	45 Lembaga (87%)
			Sedang	7 Lembaga (13%)
			Kurang	0 Lembaga (0%)

Sumber : Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Gresik

Berdasarkan data Rapor Pendidikan Jenjang Menengah, teridentifikasi bahwa 58% SMK capaian literasi pada kategori *baik* sementara 34% lembaga masih pada kategori *sedang*, dan 3% pada kategori *kurang*. Sementara capaian numerasi sedikit lebih rendah, di mana 53% SMK pada kategori *baik*, 35% pada kategori *sedang*, dan 4% pada kategori *kurang*. Capaian literasi dan numerasi pada SMA jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada SMK. Capaian literasi pada SMK menunjukkan bahwa 75% berada pada kategori *baik*, 19% kategori *sedang*, dan 6% kategori *kurang*. Demikian pula dengan capaian numerasi, di mana 62% SMA pada kategori *baik*, 31% kategori *sedang* dan 8% pada kategori *kurang*. Perbedaan capaian literasi dan numerasi pada SMA menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan SMK. Kesenjangan capaian literasi antara SMK dan SMA pada dasarnya bukan hanya mencerminkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menunjukkan perbedaan orientasi pendidikan, budaya belajar, serta kebiasaan literasi yang berkembang di kedua jenis sekolah tersebut. Perbedaan capaian literasi yang cukup jauh antara SMK dan SMA dapat disebabkan oleh perbedaan orientasi pendidikan kedua jenis sekolah. Orientasi pembelajaran pada SMA lebih berfokus pada penguatan kemampuan akademik sebagai bekal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga literasi, baik membaca, menulis, maupun berpikir kritis lebih ditekankan dalam berbagai mata pelajaran. Sementara itu, SMK lebih diarahkan pada penguasaan keterampilan vokasional dan praktik kerja, sehingga porsi pembelajaran akademik, termasuk literasi, relatif lebih sedikit dibandingkan SMA.

Temuan menarik pada capaian karakter di mana SMA dan SMK berada pada kategori baik dan sedang, dan tidak terdapat lembaga, baik SMA maupun SMK yang berada pada tegori *kurang* (0%). Capaian karakter

pada SMA memang lebih tinggi dibandingkan dengan SMK, dimana 87% SMA pada kategori *baik*, 13% berada pada kategori *sedang*. Capaian karakter SMK 74% pada kategori *baik*, 26% pada kategori sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa program penguatan karakter yang diterapkan di sekolah berjalan dengan efektif dan mampu membentuk perilaku positif pada peserta didik SMA dan SMK. Meski demikian, capaian 0% pada kategori *kurang* tidak berarti bahwa pembentukan karakter sudah optimal, melainkan mengindikasikan bahwa tidak ada peserta didik yang menunjukkan perilaku yang mengkhawatirkan atau jauh dari standar karakter yang diharapkan.

b. Implementasi Kurikulum

Pada jenjang TK, sebagian besar lembaga telah menerapkan kurikulum berbasis *Kurikulum yang ditetapkan pemerintah Belajar* dengan fokus pada penguatan nilai karakter, kemandirian, serta perkembangan sosial-emosional anak. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, lebih dari 80% TK di wilayah kerja telah melaksanakan kurikulum berbasis projek yang terintegrasi dengan tema-tema pembelajaran kontekstual. Di tingkat SD dan SMP, Kurikulum yang ditetapkan pemerintah diterapkan secara bertahap melalui program *Implementasi Kurikulum yang ditetapkan pemerintah (IKM)*. Sekitar 70% SD dan 85% SMP di Kabupaten Gresik telah menjadi satuan pendidikan pelaksana IKM dengan kategori mandiri belajar dan mandiri berubah. Kurikulum ini menekankan pada fleksibilitas pembelajaran mendalam berdasarkan kebutuhan siswa, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk jenjang SMA dan SMK, implementasi kurikulum difokuskan pada penguatan kompetensi akademik dan vokasional. Sekolah-sekolah menengah di wilayah utara dan selatan Gresik menunjukkan komitmen tinggi dalam menerapkan *projek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja industri*. Di SMK, kurikulum juga diselaraskan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), terutama di bidang teknik, manufaktur, dan teknologi informasi, yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Gresik. Sementara itu, pada lembaga pendidikan madrasah (MI, MTs, MA), implementasi kurikulum mengacu pada *Kurikulum yang ditetapkan pemerintah* yang disesuaikan dengan regulasi

Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang Kurikulum yang ditetapkan pemerintah di Madrasah. Fokus utamanya adalah integrasi nilai-nilai keislaman dengan kompetensi abad ke-21 serta pembelajaran berbasis projek keagamaan dan sosial. Berikut tabel Pelaksanaan Kurikulum dan Capaian Pembelajaran per Kecamatan di Kabupaten Gresik yakni :

Tabel 2.42 Pelaksanaan Kurikulum dan Capaian Pembelajaran per Kecamatan di Kabupaten Gresik

Wilayah / Kecamatan	Jenjang Pendidikan	Status Implementasi Kurikulum	Fokus Pembelajaran / P5	Capaian Pembelajaran Utama	Keterangan / Catatan
Sidayu	TK, SD, MI	Kurikulum yang ditetapkan pemerintah Mandiri Berubah (SD, MI), Kurikulum 2013 (TK)	Tema lingkungan dan karakter religius	Literasi dasar meningkat, numerasi stabil	Perlu pelatihan guru PAUD dalam Kurikulum yang ditetapkan pemerintah
Bungah	SD, SMP, MI, MTs	Kurikulum yang ditetapkan pemerintah Mandiri Berubah	Kewirausahaan dan gotong royong	Capaian di atas rata-rata kabupaten	Pemanfaatan TIK masih terbatas
Dukun	SD, SMP, MI	Kurikulum 2013 transisi ke Merdeka	Profil Pelajar Pancasila tema budaya lokal	Literasi berkembang pesat	Butuh pelatihan asesmen formatif
Ujungpangkah	SD, SMP, MI	Kurikulum 2013 & Mandiri Belajar	Lingkungan dan kebencanaan	Stabil, namun numerasi perlu peningkatan	Infrastruktur TIK terbatas
Panceng	SD, SMP, MTs	Kurikulum yang ditetapkan pemerintah Mandiri Belajar	Konservasi dan ekosistem pesisir	Capaian moderat	Perlu penguatan supervisi akademik
Gresik (Kota)	SD, SMP, SMA, SMK	Kurikulum yang ditetapkan pemerintah penuh	Kewirausahaan, STEM, dan P5	Capaian tertinggi di kabupaten	Dukungan industri dan TIK kuat
Manyar	SD, SMP, SMK	Kurikulum yang ditetapkan pemerintah Mandiri Berubah	Kolaborasi industri dan inovasi lokal	Kompetensi vokasi meningkat	Sinergi SMK–industri berjalan baik
Cerme	SD, SMP, SMA	Kurikulum yang ditetapkan pemerintah Mandiri Berubah	Gotong royong dan literasi sains	Literasi tinggi, numerasi stabil	Perlu peningkatan pendampingan guru

Benjeng	SD, SMP, MI	Kurikulum yang ditetapkan pemerintah Mandiri Berubah	Kebersamaan dan moderasi beragama	Capaian pembelajaran baik	Supervisi rutin berjalan
Duduksampeyan	SD, SMP	Kurikulum yang ditetapkan pemerintah Mandiri Berubah	Proyek sosial dan budaya	Stabil di atas rata-rata kabupaten	Dukungan masyarakat tinggi
Menganti	TK, SD, SMP, SMA, SMK	Kurikulum yang ditetapkan pemerintah Mandiri Berubah	Kolaborasi, kreativitas, dan inovasi	Capaian numerasi meningkat signifikan	Sekolah unggulan di selatan
Driyorejo	SD, SMP, SMA, SMK	Kurikulum yang ditetapkan pemerintah penuh	Digitalisasi pembelajaran & wirausaha	Capaian tinggi pada vokasi	Implementasi P5 sangat baik
Wringinanom	SD, SMP, MI, MTs	Kurikulum yang ditetapkan pemerintah Mandiri Berubah	Literasi dan kolaborasi	Capaian stabil	Perlu peningkatan sarana TIK

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Keterangan:

1) Kurikulum yang ditetapkan pemerintah Mandiri Belajar = sekolah mulai menerapkan sebagian prinsip Kurikulum yang ditetapkan pemerintah.
2) Kurikulum yang ditetapkan pemerintah Mandiri Berubah = sekolah menerapkan Kurikulum yang ditetapkan pemerintah secara menyeluruh dengan adaptasi lokal.
3) Kurikulum yang ditetapkan pemerintah penuh = seluruh jenjang sudah menggunakan struktur kurikulum dan capaian pembelajaran Kurikulum yang ditetapkan pemerintah secara penuh.
4) P5 = Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Dari data di atas wilayah utara (Sidayu, Bungah, Dukun, Ujungpangkah, Panceng), Sekolah-sekolah di wilayah utara sebagian besar telah menerapkan Kurikulum yang ditetapkan pemerintah Mandiri Berubah pada jenjang SD dan SMP, sedangkan jenjang TK dan MI sebagian besar masih berada pada tahap transisi dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Implementasi Kurikulum yang ditetapkan pemerintah di wilayah ini ditandai dengan penguatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), terutama tema lingkungan dan kewirausahaan lokal pesisir.

Capaian pembelajaran di wilayah utara menunjukkan peningkatan pada aspek literasi dan numerasi dasar berdasarkan hasil Asesmen Nasional Tahun 2024, meskipun masih terdapat disparitas antar satuan pendidikan di kecamatan pesisir seperti Panceng dan Ujungpangkah yang memiliki keterbatasan sumber daya guru dan sarana TIK.

Sedangkan wilayah tengah (Kebomas, Gresik, Manyar, Cerme, Benjeng, Duduksampeyan), wilayah tengah merupakan pusat administrasi dan ekonomi Kabupaten Gresik, dengan jumlah sekolah negeri dan swasta terbesar. Hampir seluruh satuan pendidikan di wilayah ini telah sepenuhnya menerapkan kurikulum yang ditetapkan pemerintah, termasuk jenjang SMA dan SMK. Sekolah di wilayah ini menunjukkan inovasi dalam pelaksanaan projek berbasis teknologi dan industri lokal, misalnya kolaborasi SMK dengan kawasan industri Manyar dan Gresik. Capaian pembelajaran menunjukkan

hasil di atas rata-rata kabupaten, terutama pada indikator keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. SMA dan SMK di wilayah ini juga telah aktif melaksanakan pembelajaran berbasis *project-based learning* dan *blended learning* sesuai arahan SNP.

Terakhir wilayah selatan (Menganti, Driyorejo, Wringinanom, Balongpanggang, Kedamean), Sekolah-sekolah di wilayah selatan memiliki tingkat kesiapan kurikulum yang beragam. Sebagian besar SD dan SMP telah mengimplementasikan kurikulum yang ditetapkan pemerintah Mandiri Berubah, sementara TK dan MI masih menggunakan Kurikulum 2013 dengan penyesuaian terbatas. Wilayah ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap penguatan kompetensi sosial-emosional peserta didik dan penerapan pembelajaran mendalam. Namun demikian, capaian pembelajaran pada aspek numerasi masih perlu diperkuat, terutama di sekolah-sekolah yang berlokasi jauh dari pusat kecamatan. Penguatan pendampingan dan pelatihan guru menjadi kebutuhan utama agar implementasi kurikulum lebih merata dan efektif.

3. Analisis Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran di Kabupaten Gresik menunjukkan hasil yang bervariasi antarwilayah. Berdasarkan data hasil Asesmen Nasional (AN) dan laporan capaian pembelajaran tahun 2024 pada setiap wilayah.

Tabel 2.43 Hasil Asesmen Nasional (AN) Dan Laporan Capaian Pembelajaran

Wilayah	Kecamatan	Jenjang Pendidikan	Rata-Rata Literasi	Rata-Rata Numerasi	Capaian Karakter (P5)	Kategori Umum	Keterangan Utama
Kota	Gresik, Kebomas, Manyar	TK–SMA/SMK, MI–MA	86	84	90	**Sangat Baik**	Wilayah ini menunjukkan capaian tertinggi di seluruh jenjang, didukung akses teknologi, guru bersertifikat, dan pelaksanaan kurikulum yang ditetapkan pemerintah yang sudah mapan.
Tengah	Cerme, Duduksampeyan, Benjeng, Balongpanggang	TK–SMA/SMK, MI–MA	82	80	86	**Baik**	Capaian stabil pada tingkat menengah. Dukungan kolaboratif antara pengawas dan sekolah penggerak cukup berperan dalam peningkatan kualitas pembelajaran.
Selatan	Menganti, Kedamean, Wringinanom, Driyorejo	TK–SMA/SMK, MI–MA	80	78	88	**Baik**	Penguatan karakter siswa sangat baik melalui kegiatan P5. Namun perlu penguatan pada aspek literasi dan numerasi dasar.
Utara	Bungah, Sidayu, Dukun, Ujungpangkah, Panceng	TK–SMA/SMK, MI–MA	77	74	83	**Cukup**	Mengalami tantangan dalam pemerataan mutu guru dan fasilitas. Perlu peningkatan pelatihan dan dukungan infrastruktur belajar.
Bawean	Sangkapura, Tambak	TK–SMA/SMK, MI–MA	72	70	84	**Cukup**	Capaian masih terbatas akibat kondisi geografis dan keterbatasan sarana digital, namun menunjukkan semangat adaptasi terhadap Kurikulum yang ditetapkan pemerintah.

Sumber**:** Dinas Pendidikan Kab. Gresik (2025)

Keterangan:

1) Rata-rata literasi dan numerasi diperoleh dari hasil gabungan capaian Asesmen Nasional (AN) dan evaluasi internal Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2024.
2) Capaian karakter (P5) dinilai berdasarkan pelaksanaan *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila* di satuan pendidikan negeri dan swasta
3) Kategori capaian:

   ≥ 85% = Sangat Baik

   75–84% = Baik Sekali

   65–74% = Baik

   < 65% = Cukup

Secara keseluruhan, Kabupaten Gresik menunjukkan capaian pembelajaran yang cukup baik dan merata, dengan wilayah kota sebagai pusat capaian tertinggi, disusul wilayah tengah, selatan, utara, dan Bawean. Aspek karakter (P5) justru menjadi kekuatan bersama, mencerminkan keberhasilan sekolah dalam membangun profil pelajar Pancasila. Namun, tantangan masih ada dalam pemerataan kualitas numerasi dan literasi, terutama pada wilayah selatan dan kepulauan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindak lanjut strategis berupa penguatan kapasitas guru, peningkatan akses TIK, dan pendampingan implementasi Kurikulum yang ditetapkan pemerintah agar kesenjangan capaian antar wilayah dapat semakin diperkecil pada jenjang TK dan SD menunjukkan peningkatan dalam aspek perkembangan literasi dasar dan numerasi awal. Sebagian besar peserta didik telah mencapai capaian minimal yang ditetapkan dalam Capaian Pembelajaran PAUD dan Fase A. sedangkan jenjang SMP capaian literasi dan numerasi berada pada kategori *cukup baik*, dengan rata-rata di atas skor nasional. Namun, masih ditemukan kesenjangan capaian antara sekolah di wilayah perkotaan (seperti Kecamatan Gresik dan Manyar) dengan sekolah di wilayah perbatasan (seperti Panceng dan Balongpanggang). Pada jenjang SMA dan SMK menunjukkan peningkatan signifikan dalam kompetensi literasi dan berpikir kritis. SMK di wilayah industri seperti Kebomas dan Driyorejo memiliki capaian keterampilan

vokasional di atas rata-rata nasional. Sedangkan jenjang MI, MTs, dan MA capaian pembelajaran keagamaan dan akademik menunjukkan peningkatan, terutama pada aspek penguasaan literasi Al-Qur'an, numerasi dasar, dan pemahaman konsep sains.

Implementasi kurikulum dan capaian pembelajaran di Kabupaten Gresik telah mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan, khususnya *Standar Isi* dan *Standar Kompetensi Lulusan* sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 20 dan 21 Tahun 2016, serta penyesuaian dengan *Capaian Pembelajaran Kurikulum yang ditetapkan pemerintah* (Keputusan Kepala BSKAP Nomor 033/H/KR/2022). Meskipun sebagian besar satuan pendidikan telah memenuhi standar, beberapa wilayah masih memerlukan pendampingan intensif, terutama dalam penyusunan modul ajar, penguatan asesmen formatif, dan penjaminan mutu pembelajaran berbasis data hasil Asesmen Nasional. Secara umum, implementasi kurikulum dan capaian pembelajaran di Kabupaten Gresik telah berjalan dengan baik pada seluruh jenjang pendidikan. Kabupaten Gresik menunjukkan kesiapan tinggi dalam melaksanakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan pencapaian standar mutu pendidikan nasional. Namun demikian, masih diperlukan penguatan kapasitas guru dalam perencanaan pembelajaran mendalam serta pemerataan kualitas capaian antarwilayah agar mutu pendidikan di Kabupaten Gresik semakin merata dan berkelanjutan.

c. Prestasi Akademik dan Non-Akademik

Selain Rapor Pendidikan sebagai sebagai tolok ukur capain luaran penyelenggaraan pendidikan, prestasi akademik dan non akademik juga mencerminkan mutu penyelenggaraan pendidikan yang sistemik dan holistik. Sekolah dengan mutu pendidikan yang baik tidak hanya mampu mencetak peserta didik yang unggul dalam pengetahuan, tetapi juga membekali mereka dengan karakter, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk bersaing di berbagai bidang kehidupan. Berikut adalah capaian prestasi akademik dan non akademik peserta didik pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan di Kabupaten Gresik. Prestasi akademik berkaitan

dengan pencapaian siswa dalam bidang keilmuan dan mata pelajaran. Indikatornya dapat berupa nilai ujian, capaian asesmen nasional, olimpiade sains, lomba mata pelajaran, maupun kompetisi ilmiah lainnya. Sementara prestasi non akademik meliputi keberhasilan siswa dalam bidang olahraga, seni, keterampilan, kewirausahaan, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

Tabel 2.44 Data Rekapitulasi Prestasi Akademik dan Non Akademik Jenjang SMA/SMK

NO	NAMA PESERTA	JENIS BIDANG LOMBA	JUARA	TINGKAT KEJUARAAN	NAMA SEKOLAH	TAHUN	KATEGORI LOMBA
1	Sahroni	Batminton	1	Lokal (Kabupaten/Kota)			
2	Mohammad Jamilul Anbiya'	OSN Kabupaten	2	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMAN 1 DUKUN	2025	Individu
3	Putri Inka Berliana Ramadhani	OSN Kabupaten	2	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMAN 1 DUKUN	2025	Individu
4	Jenesa Aprilia	Business Plan	3	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
5	Nayla Indah Syafitri	Business Plan	3	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
6	Ratna Candra Ningtyas	Business Plan	3	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
7	Varabilah Arianti	Kompetisi Literasi Bahasa Indonesia	3	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Individu
8	Nabila Dzatin Nuha	Literasi Bahasa Indonesia	1	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Individu
9	Muhammad Rezal	LBB	3	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
10	Muhammad Rezal	LBB	3	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2025	Kelompok
11	Meyka Sofiyana P.	Liga Hockey	3	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
12	Rahma Nur Aini	Liga Hockey	3	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
13	Lisatul Fatima	Liga Hockey	3	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
14	Shobirotul Shafiyah	Liga Hockey	3	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok

NO	NAMA PESERTA	JENIS BIDANG LOMBA	JUARA	TINGKAT KEJUARAAN	NAMA SEKOLAH	TAHUN	KATEGORI LOMBA
15	Attalia Putri Ramadhani	Liga Hockey	1	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
16	Sheryl Putri Yusinta	Liga Hockey	1	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
17	Nuril Hidayatus Sholikha	Liga Hockey	1	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
18	M. Noval Rizky Hidayat	Liga Hockey	1	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
19	Asthi Agustinawati	Liga Hockey	1	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
20	Nur Habibah	Liga Hockey	1	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
21	Syarifah Suciati	Liga Hockey	1	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
22	Zulfiatul Qilbi	Liga Hockey	1	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
23	Ulung Bayu Wahyono	Liga Hockey	1	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
24	Ahmad Kambali	Liga Hockey	1	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
25	Zahra Lainufar Adz Zakiyah	Liga Hockey	1	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
26	Armanda Ricky Alamsyah	Welding	1	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN	2025	Individu
27	Shollahuddin Al Ayyubi	Welding	1	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN	2024	Individu
28	Gian Maulana Ragil Santosa	Mechanical Engineering Cad	2	Lokal (Kabupaten/Kota)	SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN	2024	Individu
29	Fionna Evelyna Riyyani	Lomba Business Plan	1	Regional (Provinsi)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok

NO	NAMA PESERTA	JENIS BIDANG LOMBA	JUARA	TINGKAT KEJUARAAN	NAMA SEKOLAH	TAHUN	KATEGORI LOMBA
30	Zahra Lainufar Adzdzakiyyah	Business Plan	1	Regional (Provinsi)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
31	Winda Nur Qomariyah Dan Muhammad Aflah	Acounting Competition	2	Regional (Provinsi)	SMK ISLAMIC QON	2025	Kelompok
32	Muhammad Rezal	Lomba Keterampilan Baris-Berbaris	2	Regional (Provinsi)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
33	Muhammad Rezal	Lomba Keterampilan Baris-Berbaris	1	Regional (Provinsi)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
34	Muhammad Kevin Insani	Lomba Keterampilan Baris-Berbaris	2	Regional (Provinsi)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
35	Muhammad Rezal	Lomba Keterampilan Baris-Berbaris	1	Regional (Provinsi)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
36	Attalia Putri Ramadhani	Kejurprov Kabaddi	3	Regional (Provinsi)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
37	Nuril Hidayatis Sholikhah	Kejurprov Kabaddi	3	Regional (Provinsi)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
38	Miftah Hidayatul Putri Kurnia	Kejurprov Kabaddi	3	Regional (Provinsi)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
39	Shafwa Bilqis Azahra	Kejurprov Kabaddi	3	Regional (Provinsi)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
40	Attalia Putri Ramadhani	Kejurprov Hockey	1	Regional (Provinsi)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
41	M. Noval Rizky Hidayat	Kejurprov Hockey	1	Regional (Provinsi)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
42	Sheryl Putri Yusinta	Kejurprov Kabaddi	3	Regional (Provinsi)	SMK ISLAMIC QON	2024	Kelompok
43	Arfah Isna Syarah	Pencak Silat	2	Nasional	SMK ISLAMIC QON	2025	Individu
44	Sabrina Roesdiana Ilmi	Pencak Silat	3	Nasional	SMK ISLAMIC QON	2025	Individu

NO	NAMA PESERTA	JENIS BIDANG LOMBA	JUARA	TINGKAT KEJUARAAN	NAMA SEKOLAH	TAHUN	KATEGORI LOMBA
45	Sabrina Roesdiana Ilmi	Pencak Silat	3	Nasional	SMK ISLAMIC QON	2024	Individu
46	Arfah Isna Syarah	Pencak Silat	2	Nasional	SMK ISLAMIC QON	2025	Individu
47	Arfah Isna Syarah	Pencak Silat	1	Nasional	SMK ISLAMIC QON	2024	Individu

Sumber : Dokumen Cabang Dnas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Gresik

Data capaian prestasi akademik pada SMA terlihat belum cukup banyak pada tingkat regional maupun nasional, seperti pada kejuaraan Olimpiade Sains (OSN). Sementara capaian prestasi akademik pada SMK sudah sampai pada kejuaraan tingkat regional, meskipun didominasi oleh satu SMK Negeri. Hal ini mengindikasikan bahawa partisipasi dan tingkat daya saing dalam prestasi akademik, baik di SMA maupun SMK perlu adanya perbaikan, mulai identifikasi, pembinaa sampai pengembangan potensi akademik peserta didik secara terstruktur, baik di SMA maupun di SMK dengan daya dukung yang memadai. Identifikasi kejuaran dan partisipasi mengikuti kejuaraan bidang akademik juga perlu dilakukan sehingga memiliki peluang lebih banyak dalam pemerolehan kejuaraan pada tingkat regional, nasional maupun internasional. Prestasi non akademik teridentifikasi bidang kesenian, olah raga dan keterampilan lain. Prestasi non akademik didominasi oleh satu SMAK, yaitu SMK ISLAMIC QON.

Capaian prestasi akademik dan non akademik pada jenjang SMA dan SMK di Kabupaten Gresik relatif kurang disebabkan bukan semata karena kurangnya kemampuan peserta didik, tetapi lebih disebabkan oleh sistem pembinaan, fasilitas, dan budaya berprestasi yang belum berkembang optimal. Dengan pembinaan yang terarah dan dukungan berkelanjutan, sekolah di daerah pun memiliki peluang besar untuk menorehkan prestasi di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.

Tabel 2.45 Data Rekapitulasi Prestasi Akademik dan Non Akademik Jenjang SD/SMP

NO	TAHUN	NAMA	LEMBAGA	JUARA	TINGKAT
1.	2023	Muhammad Danish Hanafi	SD Alam Muhammadiyah Kedayang Kebomas Gresik	Juara 1 Kids'Athletics Putra	Provinsi
		Cikal Naurah Atresia Yuri	UPT SD Negeri 105 Gresik	Juara 2 Kids'Athletics Putri	Provinsi
		Nienda Meisha Aulia Putri	UPT SMP Negeri 24 Gresk	Juara 2 Atletik Putri	Provinsi
		Krishna Adi Syahputra	UPT SD Negeri 54 Gresk	Juara 2 Bulutangkis Putra	Provinsi

NO	TAHUN	NAMA	LEMBAGA	JUARA	TINGKAT
		Kevin Maulana Pattirane	UPT SMPN 18 Gresik	Juara 2 Bulutangkis Putra	Provinsi
		Muhammad Satriya Ardhiansyah	UPT SMP Negeri 8 Gresik	Juara 3 Karate Komite Perorangan Putra	Provinsi
2.	2024	Prastya Adzin Arya Pratama	UPT SMP Negeri 29 Gresik	Peringkat 5 Besar OSN IPS	Provinsi/ Mewakili Ke Nasional
		Aila Mahendra	UPT SMP Negeri 17 Gresik	Peringkat 5 Besar OSN IPS	Provinsi/ Mewakili Ke Nasional
		Ahmad Riza	UPT SMP Negeri 1 Gresik	Juara 2 Pencat Silat Putra O2SN	Provinsi
		Eka Rizky Andriani	MTS NU Trate Gresik	Juara 3 Pencat Silat Putri O2SN	Provinsi
		Hana Humaida Saksono	SMP Semen Gresik	Juara Harapan 1 FLS2N	Seni Ilustrasi
3.	2025	Melinda Yuana Sesilia	UPT SMP Negeri 8 Gresik	Juara 2 Cabor Karate Putri	Provinsi
		Muhammad Fikri Rahmansyah	SMP Muhammadiyah 12 Gresik	Juara 3 Bidang Matematika	Nasional
		Fadhil Hisyam	UPT SMP Negeri 1 Gresik	Juara 3 Bidang IPS	Nasional
		Fathan Octavino Pratama	UPT SD Negeri 13 Gresik	Cabang Senam Putra	Nasional
		Mahardhika Putra Hadany	SD Muhammadiyah 1 Menganti	Cabang Senam Putra	Nasional
		Kayla Azzahra Putri	UPT SD Negeri 43 Gresik	Cabang Senam Putri	Nasional

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (2025)

Data capaian prestasi menunjukkan perkembangan progresif dengan karakteristik berbeda antara prestasi akademik dan non-akademik. Tahun 2023 mencatat enam prestasi tingkat provinsi yang didominasi bidang non-akademik, meliputi Kids' Athletics (tiga medali), atletik putri, bulutangkis putra, dan karate putra dari berbagai SD dan SMP, tanpa capaian akademik yang

menonjol. Tahun 2024 menandai titik balik dengan munculnya dua siswa SMP yang meraih Peringkat 5 Besar OSN IPS tingkat provinsi dan mewakili ke tingkat nasional dari UPT SMP Negeri 29 dan dari UPT SMP Negeri 17, disertai keberagaman prestasi non-akademik melalui pencak silat O2SN dan Juara Harapan 1 Seni Ilustrasi FLS2N. Terobosan signifikan terjadi pada 2025 dengan enam prestasi, termasuk dua prestasi akademik tingkat nasional (Juara 3 Matematika dan IPS), tiga prestasi senam tingkat nasional, serta satu prestasi karate tingkat provinsi, yang mengindikasikan peningkatan kualitas pembinaan dan identifikasi potensi siswa yang lebih optimal.

Pergeseran dari dominasi prestasi tingkat provinsi bidang olahraga tahun 2023 menuju lima medali nasional bidang akademik dan senam tahun 2025 menunjukkan tren positif, meskipun distribusi prestasi akademik masih terbatas pada Matematika dan IPS serta belum melibatkan banyak sekolah, berbeda dengan prestasi non-akademik yang tersebar di berbagai sekolah negeri dan swasta. Pola ini menunjukkan bahwa keterbatasan perolehan prestasi bukan semata kemampuan individu, melainkan terkait kebutuhan peningkatan sistem identifikasi bakat sejak dini, pembinaan terstruktur dan berjenjang, ketersediaan fasilitas serta pelatih berkualitas yang merata di seluruh sekolah, dan mekanisme monitoring capaian yang konsisten untuk meningkatkan frekuensi capaian pada tingkat regional, nasional, dan internasional.

9. Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur capaian hasil belajar peserta didik serta efektivitas proses pembelajaran di satuan pendidikan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana peserta didik dapat menuntaskan jenjang pendidikan sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembangunan pendidikan di Kabupaten Gresik, analisis terhadap angka kelulusan menjadi dasar dalam menilai kualitas penyelenggaraan pendidikan, pemerataan kesempatan belajar, serta keberhasilan pelaksanaan kurikulum pada setiap jenjang. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap angka kelulusan perlu dilakukan secara

berkelanjutan guna memastikan peningkatan mutu pendidikan dan ketercapaian tujuan pembangunan sumber daya manusia di daerah.

a. Angka Kelulusan SD/MI Sederajat

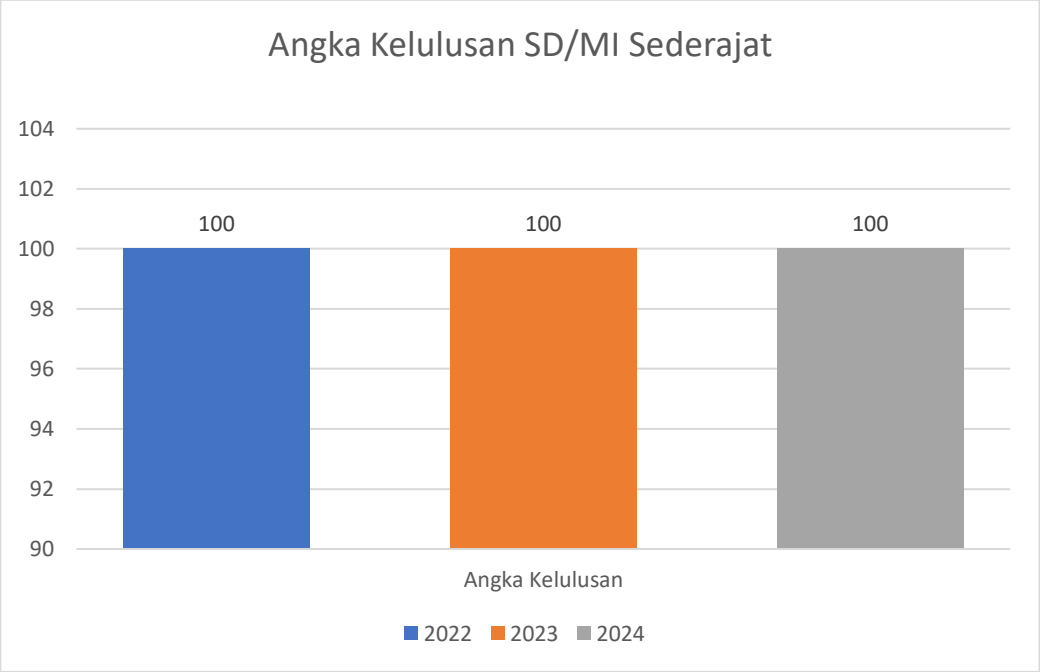

Gambar 33. Angka Kelulusan SD/MI Sederajat
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (2025)

Berdasarkan grafik di atas, tingkat kelulusan pada jenjang SD/MI sederajat menunjukkan capaian yang sangat baik dan stabil. Selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024, angka kelulusan berada pada posisi 100%. Pada tahun 2022, Kabupaten Gresik berhasil meluluskan 12.447 siswa SD, pada tahun 2023 sebanyak 12.793 dan tahun 2024 sebanyak 12.317 siswa. Kondisi ini menggambarkan bahwa seluruh peserta didik yang menempuh pendidikan di jenjang SD/MI berhasil menyelesaikan studinya dengan baik sesuai standar yang ditetapkan. Stabilitas capaian ini juga menjadi indikator bahwa proses pembelajaran dan sistem evaluasi di tingkat dasar telah berjalan efektif serta mampu menjamin keberlanjutan pendidikan ke jenjang berikutnya.

b. Angka Kelulusan SMP/MTs Sederajat

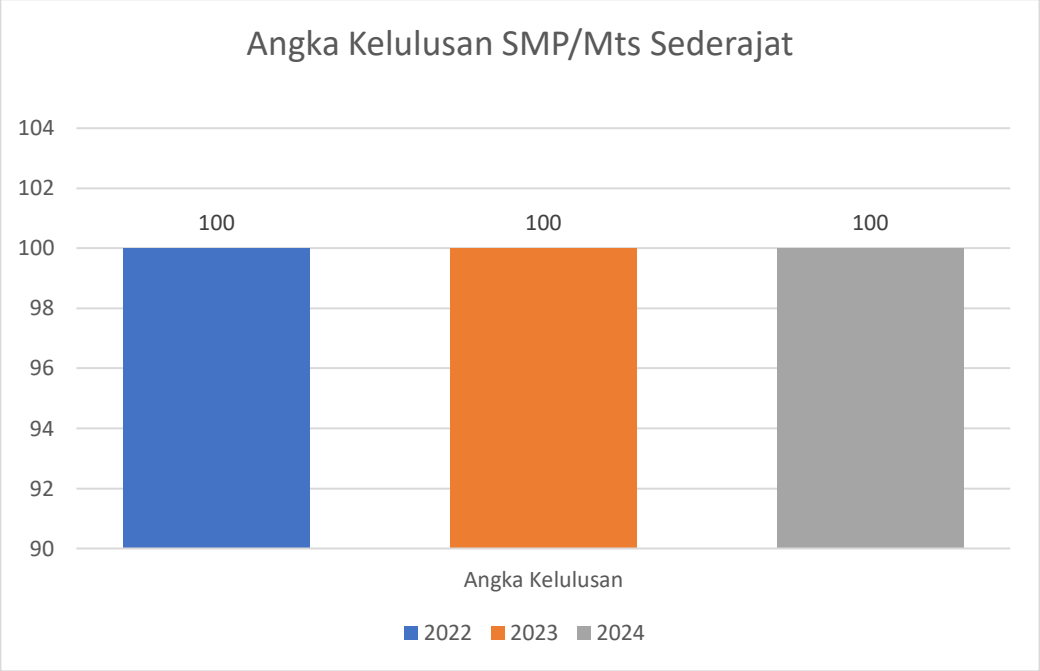

Gambar 34. Angka Kelulusan SMP/MTs Sederajat
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (2025)

Grafik di atas menunjukkan bahwa angka kelulusan pada jenjang SMP/MTs sederajat di Kabupaten Gresik selama tiga tahun terakhir, yaitu 2022 hingga 2024, berada pada posisi 100 persen secara konsisten. Tahun 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik berhasil meluluskan 11.201 siswa, tahun 2023 sebanyak 11.370 siswa dan 2024 sebanyak 11.508 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh peserta didik yang mengikuti proses pendidikan di tingkat menengah pertama berhasil menuntaskan pendidikannya dengan baik. Stabilitas angka kelulusan ini mencerminkan efektivitas sistem pembelajaran dan penilaian yang diterapkan, serta menunjukkan bahwa tidak terdapat kendala signifikan yang menghambat penyelesaian pendidikan pada jenjang tersebut.

10. Profil Layanan Anak Berkebutuhan Khusus

Penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, memperoleh

akses terhadap pendidikan yang layak, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangannya.

Profil layanan ABK disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, sebaran, serta kapasitas layanan pendidikan inklusif di satuan pendidikan. Profil ini tidak hanya mencakup jumlah peserta didik ABK, tetapi juga ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana penunjang, serta bentuk intervensi layanan yang telah dan akan dikembangkan.

Pemetaan profil ini menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan dan strategi penguatan layanan ABK, baik melalui satuan pendidikan reguler penyelenggara pendidikan inklusif maupun satuan pendidikan luar biasa. Dengan demikian, layanan pendidikan bagi ABK dapat terlaksana secara lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang pendidikan. Berikut adalah tabel mengenai jumlah peserta didik dengan berkebutuhan khusus di Kabupaten Gresik berdasarkan kecamatan.

Tabel 2.46 ABK di Kabupaten Gresik

Kecamatan	Jumlah Siswa ABK
Wringinanom	12
Driyorejo	114
Kedamean	8
Menganti	30
Cerme	116
Benjeng	10
Balongpanggang	12
Duduksampeyan	0
Kebomas	223
Gresik	93
Manyar	154
Bungah	18
Sidayu	99
Dukun	9
Panceng	7
Ujungpangkah	38
Sangkapura	3
Tambak	3
Total	949

Sumber: Kemendikdasmen.go.id (2025)

Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kabupaten Gresik tahun terakhir tercatat sebanyak 949 siswa yang tersebar di seluruh kecamatan dengan komposisi yang tidak merata. Konsentrasi tertinggi berada di Kebomas (223

siswa), disusul Manyar (154 siswa), Cerme (116 siswa), dan Driyorejo (114 siswa). Keempat wilayah ini menjadi kantong terbesar populasi ABK di Gresik. Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Sangkapura dan Tambak hanya mencatat 3 siswa, dan Duduksampeyan tercatat tidak ada ABK terdata.

Sebaran yang timpang ini mencerminkan adanya perbedaan kapasitas dan ketersediaan layanan pendidikan inklusif antarwilayah. Wilayah dengan jumlah ABK tinggi umumnya merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk dan ketersediaan satuan pendidikan yang lebih banyak, sehingga potensi deteksi dini dan layanan pendampingan juga lebih tinggi. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah ABK rendah perlu dicermati apakah kondisi tersebut benar-benar mencerminkan populasi atau justru menandakan masih terbatasnya pendataan dan deteksi kebutuhan khusus di lapangan.

Dalam konteks layanan pendidikan dasar, jumlah ABK menjadi indikator penting terhadap kemampuan sistem pendidikan daerah dalam menjangkau kelompok rentan. Ketimpangan distribusi ini menggambarkan tantangan dalam pemerataan akses layanan pendidikan inklusif, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun dukungan layanan pendampingan. Kondisi ini erat kaitannya dengan upaya pemenuhan standar minimal pelayanan pendidikan, terutama dalam memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memperoleh hak pendidikan yang setara.

Dari perspektif pembangunan manusia, keberadaan ABK yang belum terlayani secara optimal dapat berdampak terhadap komponen pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Partisipasi pendidikan ABK berpengaruh pada rata-rata lama sekolah dan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, distribusi ABK yang tidak merata ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan penguatan layanan inklusif di Kabupaten Gresik, agar capaian pembangunan pendidikan dapat lebih merata di seluruh wilayah.

11. Persepsi Mutu

a. Persepsi Mutu dari Sisi Penyedia

Berdasarkan hasil pendataan hingga tanggal 5 Oktober 2025, jumlah keseluruhan penyedia layanan pendidikan yang menjadi responden dalam survei

mencapai 6.326 orang. Komposisi tersebut terdiri atas 36 Pengawas Sekolah, 1.245 Kepala Sekolah, 4.631 Guru, 595 Tenaga Administrasi Sekolah (TAS), 79 Laboran, 103 Tenaga Perpustakaan, dan 137 Konselor Sekolah. Jumlah ini mencerminkan keterwakilan yang proporsional dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Gresik, baik pendidikan dasar maupun menengah. Berikut adalah pie chart yang menunjukkan proporsi jumlah total responden Kabupaten Gresik berdasarkan jenis responden. Chart ini menggunakan data dari file yang meliputi kategori: Pengawas, Kepala Sekolah, Guru, Peserta Didik, Masyarakat/Orang Tua, Laboran, Konselor Sekolah, Perpustakaan, dan TAS (Tenaga Administrasi Sekolah), dengan total data 26.041 responden

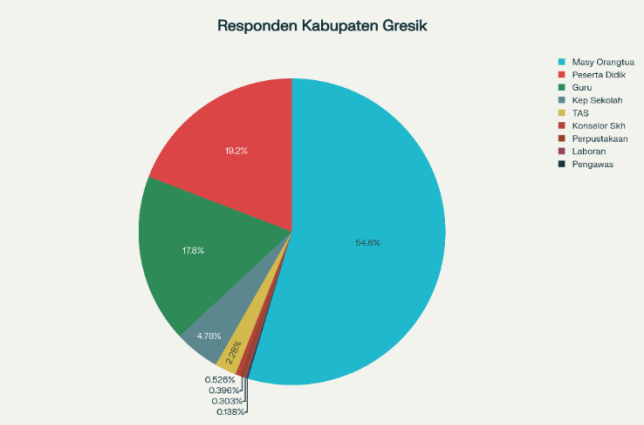

Gambar 35. Pie chart Data Total Responden Kabupaten Gresik

Berikut akan di jabarkan persepsi mutu Pendidikan dari sisi penyedia layanan pendidikan Kabupaten Gresik. Penyedia layanan pendidikan di Kabupaten Gresik mencakup seluruh unsur tenaga kependidikan yang berperan langsung dalam mendukung proses pendidikan, meliputi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, serta tenaga kependidikan lainnya seperti Tenaga Administrasi Sekolah (TAS), Laboran, Tenaga Perpustakaan, dan Konselor Sekolah. Setiap kelompok memiliki kontribusi strategis dalam memastikan terselenggaranya pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan arah pembangunan pendidikan daerah.

Analisis deskriptif dari seluruh data persepsi mutu penyedia pendidikan di Kabupaten Gresik, yang mencakup Pengawas, Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan (TAS, Laboran, Perpustakaan, Konselor Sekolah), menunjukkan

bahwa komponen profesionalisme, digitalisasi, pemerataan fasilitas, serta implementasi standar nasional pendidikan menjadi kunci penentu mutu layanan pendidikan di daerah ini.

Jika dilihat dari Persepsi Mutu Pengawas, Instrumen evaluasi pengawas mempunyai kualitas validitas sangat baik dalam pengukuran aspek mutu pendidikan, menyoroti kepuasan terhadap capaian akademik, kesetaraan kesempatan belajar, transparansi informasi publik, dan kemitraan sekolah-masyarakat. Namun, aspek pendidikan inklusif dan profesionalisme pengawas masih perlu penguatan, termasuk perhatian pada kurikulum berkebutuhan khusus dan keaktifan organisasi profesi. Sedangkan dari Persepsi Mutu Kepala Sekolah, Kepala Sekolah menilai pentingnya kurikulum adaptif, sistem penilaian transparan, dan umpan balik pembelajaran dalam meningkatkan mutu. Ketersediaan fasilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan layanan konselor masih terbatas, serta butuh peningkatan pelatihan manajemen anggaran, menandakan perlunya penguatan pada aspek inklusivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah. Dari Persepsi Guru di Gresik menekankan kebutuhan penguatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, terutama pada pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Tantangan utama mencakup keterbatasan fasilitas pendidikan, beban administratif tinggi, dan partisipasi orang tua yang masih perlu penguatan. Inovasi kurikulum, kolaborasi, serta pelatihan berkelanjutan sangat diharapkan untuk menunjang peningkatan mutu secara menyeluruh.

Hasil analisis deskriptif lainnya menunjukkan bahwa persepsi mutu penyedia layanan Pendidikan dari sisi tenaga kependidikan berada pada rentang skor 3,1 hingga 3,7 dalam skala Likert 1–4. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja dan kualitas layanan berada dalam kategori baik hingga sangat baik. Indikator yang dinilai meliputi kompetensi manajerial, kemampuan administrasi dan tata kelola sekolah, penguasaan teknologi digital, inovasi pembelajaran dan layanan, serta efektivitas pelayanan terhadap peserta didik dan pemangku kepentingan pendidikan. Secara lebih rinci, rata-rata skor persepsi pada beberapa kelompok tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1) Tenaga Administrasi Sekolah (TAS): 3,07 – 3,73
2) Laboran: 3,07 – 3,55

3) Tenaga Perpustakaan: 3,14 – 3,73

4) Konselor Sekolah: 3,10 – 3,40

Nilai-nilai tersebut menggambarkan bahwa tenaga kependidikan di Kabupaten Gresik telah menunjukkan kinerja positif dalam mendukung fungsi pendidikan, meskipun masih terdapat variasi antar indikator yang memerlukan tindak lanjut kebijakan penguatan kompetensi. Jika Persepsi Mutu Tenaga Kependidikan (TAS, Laboran, Perpustakaan, Konselor), Tenaga kependidikan menunjukkan kompetensi dasar yang baik sesuai standar nasional, namun kebutuhan pelatihan digitalisasi, manajemen laboratorium, perpustakaan digital, dan layanan konseling berbasis teknologi sangat tinggi (90–100%). Dukungan digital, pelatihan manajerial, inklusivitas, serta sinergi lintas sektor adalah urgensi reformasi di bidang ini agar tenaga kependidikan mampu mendukung sistem pendidikan yang modern, inklusif, dan adaptif.

Tabel 2.47 Persepsi Mutu dan Penyedia

Komponen	Fokus Mutu	Tantangan Utama
Pengawas	Kepuasan hasil, transparansi, kemitraan	Inklusivitas, keaktifan profesi
Kepala Sekolah	Kurikulum adaptif, penilaian transparan	Fasilitas & layanan kebutuhan khusus, manajemen
Guru	Kompetensi digital & pedagogik, inovasi	Fasilitas, admin, partisipasi orang tua
Tenaga Kependidikan	Digitalisasi, manajemen, layanan konseling	Keterbatasan sarpras, pelatihan, sinergi sektor

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Pengembangan kompetensi seluruh penyedia layanan pendidikan Gresik perlu difokuskan pada:

1) Peningkatan digitalisasi dan pelatihan teknis berkelanjutan
2) Pemerataan sarana dan prasarana pembelajaran
3) Penguatan inklusivitas, profesionalisme, dan sinergi lintas sektor
4) Pembinaan karakter, inovasi, dan kesejahteraan tenaga pendidikan

Upaya sistematis dalam empat fokus utama di atas diharapkan mampu mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Gresik secara

berkelanjutan, adaptif, dan inklusif. Jika dianalisis data dari sisi standar mutu pendidikan berdasarkan data persepsi penyedia pendidikan di Kabupaten Gresik:

1) Analisis Deskriptif Standar Mutu Pendidikan Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap persepsi mutu penyedia pendidikan yang terdiri dari Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan (TAS, Laboran, Pustakawan, dan Konselor Sekolah), dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Gresik secara umum telah berjalan dengan baik namun masih memerlukan penguatan pada aspek profesionalisme, digitalisasi, pemerataan fasilitas, dan implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2) Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Dari sisi Pengawas dan Kepala Sekolah, mutu kurikulum dipandang cukup adaptif terhadap kebutuhan peserta didik, namun kurikulum inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus masih kurang optimal. Pengawas menilai perlunya penguatan dalam penerapan kurikulum berbasis kebutuhan lokal dan karakter peserta didik, sedangkan Kepala Sekolah menyoroti pentingnya umpan balik pembelajaran dan transparansi sistem penilaian agar capaian belajar lebih terukur dan adil.
3) Standar Proses dan Penilaian Pendidikan. Guru memberikan penekanan pada inovasi pembelajaran dan penguatan kompetensi pedagogik serta profesional. Proses pembelajaran masih menghadapi kendala pada pemanfaatan teknologi digital, terutama di sekolah yang fasilitasnya terbatas. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung proses belajar juga perlu ditingkatkan sebagai bagian dari penerapan standar proses yang partisipatif dan kolaboratif. Selain itu, Kepala Sekolah menyoroti pentingnya penilaian autentik dan transparan yang sesuai dengan standar nasional, agar mampu mencerminkan kemampuan riil peserta didik.
4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Secara umum, kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan telah memenuhi standar minimal nasional. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan pelatihan berbasis digitalisasi, manajemen laboratorium dan perpustakaan digital, serta layanan konseling berbasis teknologi masih sangat tinggi (90–100%). Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara tuntutan era digital dan kesiapan sumber daya manusia di satuan pendidikan.

5) Standar Sarana dan Prasarana. Baik Kepala Sekolah maupun Guru menyatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan masih belum merata, terutama fasilitas pendukung pembelajaran digital dan ruang layanan kebutuhan khusus. Keterbatasan ini berdampak pada pemerataan mutu antar sekolah, khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Gresik.
6) Standar Pengelolaan dan Pembiayaan. Kepala Sekolah menyoroti perlunya pelatihan manajemen anggaran dan pengelolaan keuangan sekolah yang efisien dan akuntabel. Pengawas menekankan pentingnya transparansi informasi publik serta kemitraan antara sekolah dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan yang partisipatif. Hal ini sejalan dengan upaya penerapan tata kelola pendidikan yang profesional dan berintegritas.
7) Standar Penilaian dan Evaluasi Pendidikan. Instrumen pengawasan menunjukkan validitas yang sangat baik dalam mengukur mutu penyelenggaraan pendidikan, namun monitoring aspek inklusivitas dan penguatan organisasi profesi masih perlu diperluas. Evaluasi mutu pendidikan perlu diarahkan tidak hanya pada hasil belajar, tetapi juga pada proses, etos kerja, dan kepuasan layanan pendidikan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Analisis tematik terhadap data survei menunjukkan bahwa tantangan utama penyedia layanan pendidikan meliputi terbatasnya kesempatan pelatihan berkelanjutan, ketimpangan akses terhadap teknologi digital, dan belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana pendukung. Kebutuhan prioritas pengembangan mencakup peningkatan kapasitas tenaga kependidikan dalam hal adaptasi teknologi informasi, manajemen administrasi modern, serta pengembangan inovasi layanan berbasis digital. Peningkatan kualitas SDM ini diperlukan untuk memperkuat efektivitas layanan dan produktivitas institusi pendidikan secara keseluruhan.Dari seluruh komponen standar mutu pendidikan, diperoleh bahwa upaya peningkatan mutu di Kabupaten Gresik memerlukan strategi pengembangan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Fokus prioritas pengembangan diarahkan pada empat bidang utama, yaitu:

1. Peningkatan digitalisasi dan pelatihan teknis berkelanjutan bagi semua tenaga pendidikan.

2. Pemerataan sarana dan prasarana pembelajaran, terutama untuk mendukung pembelajaran digital dan layanan inklusif.
3. Penguatan profesionalisme, karakter, dan sinergi lintas sektor antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat.
4. Pembinaan inovasi dan kesejahteraan tenaga pendidikan sebagai pendorong motivasi dan kinerja optimal.

b. Persepsi Mutu dari sisi Pengguna

Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 4.987 peserta didik pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, serta 14.228 responden dari masyarakat dan orang tua, diperoleh gambaran umum mengenai persepsi mutu pendidikan di Kabupaten Gresik. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik peserta didik maupun masyarakat memiliki pandangan yang relatif positif terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerah ini. Aspek yang akan divisualisasikan meliputi: Kualitas Guru dan Pembelajaran, Sarana dan Prasarana Sekolah, Inovasi dan Teknologi Pembelajaran, Penguatan Karakter dan Nilai Keagamaan, Aksesibilitas dan Keadilan Layanan Pendidikan, dan Program Dukungan dan Beasiswa. Berikut dapar kita gambarkan grafik radar persepsi mutu Pendidikan dari sisi Peserta didik dan masayrakat di Kabupaten Gresik yakni:

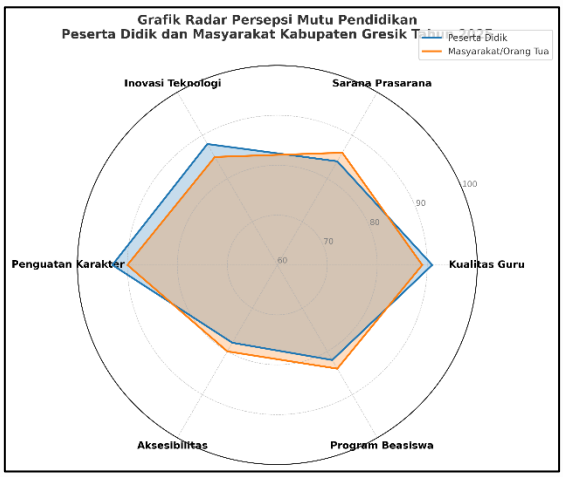

Gambar 36. Grafik Radar persepsi mutu pendidikan dari sisi murid dan masyarakat

Dilihat dari grafik diatas sebagian besar peserta didik menilai bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Gresik berada pada kategori baik hingga sangat baik. Mereka mengapresiasi kemajuan pada aspek inovasi pembelajaran,

peningkatan fasilitas sekolah, serta profesionalisme guru. Siswa juga menilai bahwa pendidikan di Gresik memiliki keunggulan karakteristik lokal, seperti penguatan nilai karakter, pendidikan keagamaan yang kuat, keberagaman kegiatan ekstrakurikuler, dan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Selain itu, program beasiswa, dukungan sarana-prasarana, dan kegiatan pengembangan minat bakat mendapat apresiasi tinggi dari peserta didik. Faktor yang dianggap paling menentukan mutu pendidikan mencakup kualitas guru, manajemen sekolah, dan ketersediaan fasilitas yang memadai.

Adapun harapan utama peserta didik meliputi peningkatan pelatihan dan kompetensi guru, pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah, optimalisasi teknologi pembelajaran, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Mereka juga mengusulkan pengembangan program inovatif berbasis teknologi informasi (IT), peningkatan kesejahteraan guru, dan penguatan layanan pendidikan inklusif. Meskipun demikian, peserta didik masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama terkait faktor ekonomi keluarga, jarak sekolah di wilayah pelosok, keterbatasan transportasi, ketidakmerataan fasilitas, dan kondisi cuaca ekstrem. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan bantuan beasiswa, perbaikan infrastruktur sekolah dan jalan, serta penyediaan transportasi sekolah bagi wilayah yang sulit dijangkau.

Hal lainnya pandangan atau persepsi mutu Pendidikan dari masyarakat dan orang tua menunjukkan kecenderungan serupa dengan peserta didik. Mayoritas responden menilai bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Gresik tergolong baik hingga sangat baik, dengan kemajuan signifikan pada prestasi siswa, inovasi pembelajaran berbasis teknologi, penguatan pendidikan karakter, dan perluasan akses pendidikan. Mereka menilai bahwa pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas SDM guru, serta kebijakan afirmatif berupa beasiswa dan bantuan pendidikan merupakan aspek krusial dalam peningkatan mutu pendidikan daerah. Faktor utama penentu mutu pendidikan menurut masyarakat adalah kompetensi dan profesionalisme guru, kelayakan sarana-prasarana sekolah, serta dukungan manajemen sekolah yang efektif dan kolaboratif dengan masyarakat.

Harapan masyarakat difokuskan pada peningkatan kualitas sarana-prasarana, pemerataan fasilitas antarwilayah, pelatihan berkelanjutan bagi guru,

serta penguatan kurikulum dan karakter peserta didik. Namun, hambatan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan ekonomi keluarga, akses fasilitas di daerah pelosok, dan kondisi infrastruktur jalan yang belum merata. Masyarakat mengusulkan solusi berupa program beasiswa dan subsidi pendidikan, transportasi sekolah gratis, serta pemerataan pembangunan sarana pendidikan di seluruh wilayah Gresik. berikut ringkasan persepsi peserta didik dan masyarakat terhadap mutu pendidikan Kabupaten Gresik yakni :

Tabel. 2.48 Ringkasan Persepsi Peserta Didik dan Masyarakat terhadap Mutu Pendidikan Kabupaten Gresik

Aspek yang Dinilai	Peserta Didik (SMP/MTs & SMA/MA/SMK)	Masyarakat/Orang Tua	Interpretasi
Kualitas Guru dan Pembelajaran	Sangat baik; guru dinilai kompeten, inovatif, dan mendukung karakter peserta didik.	Baik–Sangat baik; guru dianggap profesional dan berperan penting dalam peningkatan mutu.	Kualitas guru merupakan faktor paling berpengaruh terhadap persepsi mutu pendidikan.
Sarana dan Prasarana Sekolah	Cukup baik; diapresiasi di wilayah perkotaan, namun belum merata di pelosok.	Baik; terdapat peningkatan fasilitas, namun pemerataan masih diperlukan.	Diperlukan strategi pemerataan infrastruktur pendidikan lintas wilayah.
Inovasi dan Teknologi Pembelajaran	Tinggi; penggunaan teknologi digital diapresiasi dan diharapkan terus berkembang.	Baik; masyarakat mendukung inovasi berbasis IT di sekolah.	Inovasi digital menjadi ciri transformasi pendidikan di Gresik.
Penguatan Karakter dan Nilai Keagamaan	Sangat baik; menjadi keunggulan khas sekolah di Gresik.	Sangat baik; dianggap mendukung pembentukan moral dan etika peserta didik.	Pendidikan karakter dan nilai religius menjadi kekuatan utama sistem pendidikan daerah.
Aksesibilitas dan Keadilan Layanan Pendidikan	Masih bervariasi; terkendala jarak dan transportasi di daerah tertentu.	Cukup baik; namun ekonomi keluarga masih menjadi hambatan utama.	Pemerataan akses pendidikan dan bantuan ekonomi menjadi prioritas kebijakan.
Program Dukungan dan Beasiswa	Dianggap membantu, namun diharapkan diperluas.	Diapresiasi; dianggap efektif membantu keluarga tidak mampu.	Program afirmatif perlu ditingkatkan untuk memperkuat pemerataan kesempatan belajar.

Sumber: Diolah Peneliti dari hasil survei (2025)

Hasil survei menunjukkan bahwa peserta didik dan masyarakat/orang tua memiliki persepsi yang konsisten terhadap arah pengembangan mutu pendidikan di Kabupaten Gresik. Keduanya menekankan pentingnya kualitas guru, ketersediaan fasilitas sekolah, inovasi pembelajaran, dan pemerataan akses pendidikan sebagai faktor kunci peningkatan mutu pendidikan daerah. Tantangan utama yang masih dihadapi meliputi aspek ekonomi, keterbatasan infrastruktur, serta ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, rekomendasi strategis yang dapat dirumuskan meliputi:

1. Peningkatan pelatihan dan kesejahteraan guru secara berkelanjutan;
2. Investasi pada sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah tertinggal;
3. Pemerataan akses pendidikan dan layanan inklusif;
4. Penguatan kebijakan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

c. Perbandingan Persepsi Mutu dari Penyedia dan Pengguna

Berikut adalah pie chart yang membandingkan proporsi total data masuk pada tanggal 05-10-2025 antara Penyedia (pengawas, kepala sekolah, guru, TAS, laboran, perpustakaan, konselor sekolah) dan Pengguna (masyarakat/orangtua, peserta didik) yakni:

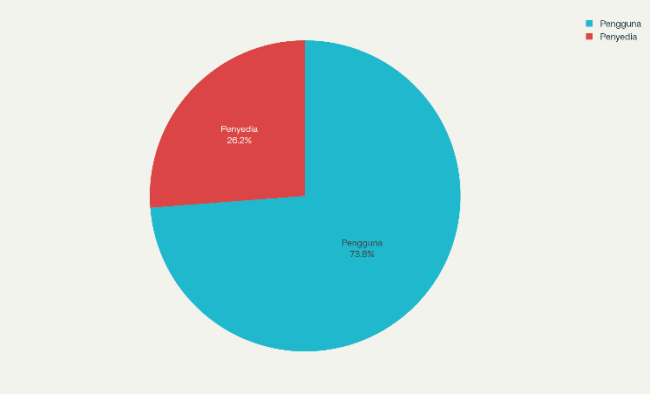

Gambar 37. Pie chart total data Responden dari sisi Penyedia dan Pengguna

Dengan strategi tersebut, sistem pendidikan di Kabupaten Gresik diharapkan mampu berkembang menjadi lebih modern, inklusif, adaptif terhadap perubahan, serta berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Terlihat bahwa proporsi Pengguna (masyarakat/orangtua, peserta didik) sebesar 73.8%, sedangkan Penyedia

(pengawas, kepala sekolah, guru, TAS, laboran, perpustakaan, konselor sekolah) hanya 26.2% dari total data yang masuk. Dapat kita persepsikan Proporsi Penyedia dan Pengguna yakni:

1. Komposisi ini menunjukkan jumlah pengguna layanan pendidikan (murid dan masyarakat) jauh lebih besar dibandingkan jumlah penyedia layanan pendidikan di Kabupaten Gresik pada waktu survei dilakukan.
2. Fenomena ini wajar dalam sistem pendidikan, karena satuan pendidikan membutuhkan SDM penyedia (guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dll) untuk melayani populasi siswa dan orang tua yang volume-nya jauh lebih tinggi.
3. Rasio yang besar pada kelompok pengguna mengindikasikan kebutuhan pelayanan yang semakin kompleks dan beragam, sehingga tuntutan terhadap kapasitas, pelayanan, dan inovasi dari pihak penyedia semakin meningkat.
4. Implikasi kebijakan daerah: Kabupaten Gresik harus terus memperkuat basis SDM pendidikan (penyedia) agar mampu mengimbangi pertumbuhan dan kebutuhan pengguna. Hal ini penting untuk menjaga mutu pelayanan dan memastikan pemerataan akses pendidikan bermutu di seluruh wilayah.

Persepsi mutu pendidikan di Kabupaten Gresik dari berbagai kelompok, baik penyedia layanan pendidikan (pengawas, kepala sekolah, guru, laboran, konselor, pustakawan, dan tenaga administrasi sekolah) maupun pengguna layanan pendidikan (peserta didik dan masyarakat/orang tua), menunjukkan kecenderungan positif dan progresif. Secara umum, seluruh kelompok memiliki pandangan yang sejalan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, dan inovasi pembelajaran menjadi faktor utama dalam memperkuat mutu pendidikan daerah.

Kelompok penyedia layanan pendidikan memandang bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan pelaksanaan berbagai program pengembangan profesional dan kebijakan pendidikan daerah.

1) Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru menilai bahwa peningkatan mutu terlihat pada aspek inovasi kurikulum, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan sarana pembelajaran. Mereka menunjukkan kesadaran tinggi terhadap pentingnya adaptasi teknologi pembelajaran, penerapan Kurikulum

yang ditetapkan pemerintah, serta penguatan pendidikan karakter. Tantangan utama terletak pada pemerataan kualitas sarana prasarana dan kebutuhan pelatihan sistematis, terutama di wilayah pinggiran dan sekolah swasta.

2) Tenaga Laboran dan Pustakawan menilai mutu pendidikan sudah baik, khususnya pada aspek pengelolaan laboratorium dan perpustakaan berbasis digital. Namun, masih terdapat keterbatasan alat, dana, serta rendahnya literasi digital. Mereka mengusulkan peningkatan pelatihan pengelolaan laboratorium dan perpustakaan digital serta pemerataan akses teknologi antarwilayah.
3) Konselor Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) menekankan pentingnya komunikasi efektif, manajemen administrasi yang tertib, dan layanan bimbingan konseling dalam membentuk karakter siswa. Mutu pendidikan dinilai semakin baik melalui penghargaan terhadap prestasi siswa, budaya sekolah yang positif, serta sinergi antar tenaga kependidikan. Kendala utama masih mencakup keterbatasan SDM dan sarana administrasi digital, sehingga diperlukan penguatan pelatihan dan integrasi teknologi manajemen sekolah.

Kelompok pengguna layanan, yakni peserta didik dan masyarakat/orang tua, juga menunjukkan persepsi positif terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Gresik.

1) Peserta Didik secara umum merasa puas terhadap layanan pendidikan, terutama pada aspek inovasi pembelajaran, penguatan karakter, dan digitalisasi sekolah. Mereka menilai bahwa mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru, manajemen sekolah, serta ketersediaan fasilitas yang memadai. Harapan utama peserta didik meliputi pemerataan fasilitas, pelatihan guru yang berkelanjutan, peningkatan akses transportasi sekolah, dan beasiswa yang lebih luas.
2) Masyarakat dan Orang Tua menilai bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan, terutama melalui program pembangunan fasilitas, pemberian beasiswa, dan digitalisasi layanan pendidikan. Faktor yang paling menentukan mutu pendidikan menurut masyarakat adalah kualitas guru dan kepala sekolah,

ketersediaan sarana prasarana, kurikulum yang adaptif, serta peran aktif masyarakat dalam mendukung sekolah. Mereka berharap adanya akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan, pemerataan layanan di seluruh wilayah, dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik.

Secara umum, hasil survei menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Gresik telah menunjukkan arah peningkatan yang signifikan. Penguatan pada aspek karakter, literasi digital, inovasi kurikulum, dan profesionalisme pendidik menjadi indikator kemajuan tersebut. Meskipun demikian, pemerataan mutu dan fasilitas antarwilayah, serta ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta, masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Rekomendasi utama yang dihasilkan dari analisis persepsi ini meliputi:

1. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk laboratorium dan perpustakaan digital.
2. Pelatihan berkelanjutan bagi guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah untuk meningkatkan profesionalisme dan inovasi pembelajaran.
3. Penguatan pendidikan karakter dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi digital.
4. Peningkatan kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan dunia usaha/industri dalam mendukung mutu pendidikan.

12. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pendidikan Kabupaten Gresik

Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Gresik menggambarkan persepsi publik dan pemangku kepentingan terhadap mutu layanan pendidikan daerah. Hasil ini menjadi indikator menilai capaian dimensi kualitas, aksesibilitas, sarana prasarana, serta keadilan dan inklusivitas pendidikan di tingkat kabupaten. Berikut histogram Indeks Kepuasan Terhadap layanan Masyarakat Kabupten Gresik yakni

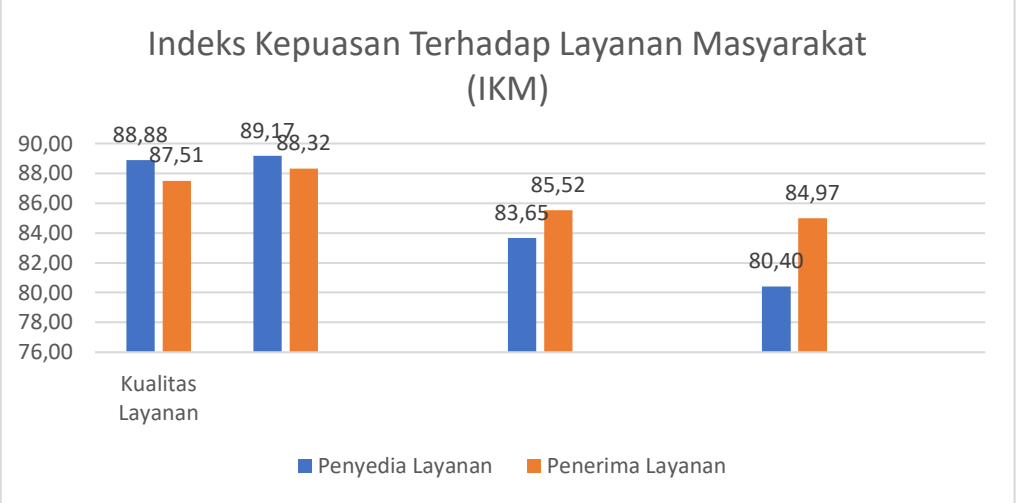

Gambar 38. Histogram Indeks Kepuasan Masyrakat

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Gresik tahun berjalan menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten dengan arah kebijakan pengembangan pendidikan. Pengukuran IKM dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan terhadap kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi penyedia layanan (pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan) maupun penerima layanan (peserta didik dan masyarakat/orang tua). Pengukuran IKM dilaksanakan berdasarkan empat dimensi utama, yaitu:

1. Aksesibilitas Layanan Pendidikan (AL) yakni menilai sejauh mana layanan pendidikan dapat dijangkau masyarakat secara mudah dan merata
2. Kualitas Layanan Pendidikan (KL) yakni mengukur profesionalisme, daya tanggap, inovasi, dan mutu hasil layanan Pendidikan.
3. Kualitas Sarana dan Prasarana (KSP) yakni menilai ketersediaan, pemerataan, dan kelayakan fasilitas pendidikan
4. Keadilan dan Inklusivitas (KI) yakni mencerminkan sejauh mana layanan pendidikan diberikan secara adil dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat.

Secara umum, capaian IKM Kabupaten Gresik berada pada kategori “sangat baik” dengan variasi capaian antar dimensi yang menggambarkan kekuatan dan area pengembangan ke depan. Berikut tabel capaian IKM Kabupaten Gresik yakni:

Tabel 2.49 Capaian IKM Kabupaten Gresik

Dimensi	Skor Penyedia (%)	Skor Penerima (%)	Kategori Umum	Keterangan Utama
Aksesibilitas Layanan (AL)	88,88	87,51	Sangat Baik	Akses layanan pendidikan luas dan merata
Kualitas Layanan (KL)	89,17	88,32	Sangat Baik	Kinerja dan profesionalisme tinggi
Kualitas Sarpras (KSP)	83,65	85,52	Baik	Perlu pemerataan dan peningkatan fasilitas
Keadilan & Inklusivitas (KI)	80,40	84,97	Baik	Perlu penguatan keadilan bagi kelompok rentan

Sumber: Diolah peneliti dari hasil angket (2025)

Hasil menunjukkan capaian tertinggi terdapat pada dimensi Kualitas Layanan Pendidikan (KL), yang menunjukkan bahwa mutu layanan, profesionalisme tenaga pendidik, serta efektivitas pengelolaan pembelajaran mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Sementara itu, dua dimensi yang masih perlu penguatan adalah Keadilan dan Inklusivitas (KI) serta Kualitas Sarana dan Prasarana (KSP), terutama dalam konteks pemerataan antarwilayah dan antarsekolah. Hasil IKM ini menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Gresik telah berjalan efektif dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Namun demikian, upaya pemerataan fasilitas pendidikan dan penguatan inklusivitas sosial masih menjadi agenda prioritas dalam implementasi RIPPD tahap berikutnya. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, memperluas investasi pendidikan di wilayah pinggiran, serta mempercepat digitalisasi dan modernisasi sarana pembelajaran. Secara keseluruhan, IKM pendidikan Kabupaten Gresik menunjukkan kinerja pelayanan publik yang unggul dan berorientasi pada mutu.

Nilai kepuasan tinggi dari seluruh kelompok responden menggambarkan keberhasilan program pendidikan daerah yang adaptif dan partisipatif. Untuk menjaga keberlanjutan capaian ini, strategi pembangunan pendidikan ke depan

perlu difokuskan pada peningkatan keadilan layanan, penguatan infrastruktur pendidikan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang profesional, inovatif, dan berkeadilan.

C. Permasalahan dan Tantangan Utama

Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan diatas terdapat beberapa temuan terukur yang menjadi basis analisis: penambahan jumlah satuan pendidikan dasar-menengah pada beberapa kecamatan, fluktuasi indikator akses (APK/APM) pada berbagai jenjang, peningkatan angka putus sekolah pada periode 2022–2023, serta masalah struktur dan mutu tenaga pendidik—termasuk distribusi PNS, status sertifikasi, dan kualifikasi formal guru.

1). Tren enrolmen dan dinamika partisipasi

Sinyal risiko pada transisi ke jenjang atas data menunjukkan bahwa meskipun jumlah lembaga (TK, SD, SMP, SMA/SMK/MA) cenderung stabil atau sedikit meningkat (mis. TK naik dari ±607 menjadi 624; SD dari 459 menjadi 465; SMP dari 120 menjadi 125; SMA stabil 52). Namun pola APK/APM menandakan problem struktural: APK SD sempat turun dari 104,2% (2022) → 98% (2024); APK SMP dan SMA juga berfluktuasi drastis; sementara APM SMA menunjukkan tren penurunan berturut-turut (78,07% → 76% → 74,89%). Penurunan APM pada jenjang menengah atas berarti proporsi anak usia sekolah yang benar-benar berada di sekolah sesuai umur makin mengecil — ini mengisyaratkan masalah retensi dan kelanjutan pendidikan (transisi ke SMA/SMK) yang mengkhawatirkan jika tidak ditangani cepat.

2). Putus sekolah: karakteristik, kejadian dini, dan implikasinya

Angka putus sekolah yang tersedia (periode 2022→2023) meningkat dari total 174 menjadi 200 kasus; perubahan paling menonjol adalah lonjakan putus pada jenjang SD (dari 55 menjadi 106 kasus). Kenaikan putus di jenjang dasar menandakan bahwa masalah terjadi sangat awal—sebuah sinyal bahaya karena putus pada SD menutup kemungkinan pemulihan jenjang berikutnya. Dokumen juga menyebut faktor penyebab umum seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya motivasi, lingkungan sosial, pernikahan dini, dan keterbatasan akses—yang semuanya dapat mempercepat keluarnya anak dari sistem pendidikan.

3). Mutu dan distribusi guru

Tantangan kuantitas dan kualitas yang bersilang dari sisi tenaga pendidik tercatat jumlah guru yang besar pada setiap jenjang (mis. guru SD ±9.662; SMP ±5.072; TK ±5.869; SMA ±4.326) tetapi struktur kepegawaian menunjukkan ketidakseimbangan strategis. Dua isu utama muncul: (a) rasio guru PNS-siswa sangat timpang pada beberapa jenjang—mis. rasio PNS pada SMK adalah 1:133 (sangat tinggi), dan rasio PNS di SD 1:52; sedangkan rasio guru keseluruhan di SD dan SMP adalah relatif baik (1:16 dan 1:17). Ketimpangan ini menandakan ketergantungan yang besar pada guru non-PNS/honor di banyak sekolah, terutama pada vokasi (SMK), yang berisiko menurunkan stabilitas kualitas dan kontinuitas pembelajaran; (b) meski banyak guru berpendidikan S1/D4 (jumlah S1/D4 mencapai ±12.067), tingkat sertifikasi masih belum merata: total guru bersertifikat ±6.904 sementara yang belum sertifikasi ±9.184—artinya jumlah guru belum tersertifikasi lebih besar daripada yang sudah, suatu isu serius untuk mutu pedagogik dan kesejahteraan profesi.

4).Ketimpangan geografis dan akses layanan spesifik

Sebaran lembaga berbasis madrasah (MI/MTs/MA) dan juga beberapa kecamatan kepulauan (mis. Dukun, Sangkapura, Ujungpangkah) menunjukkan pola konsentrasi tertentu—MTs relatif banyak di wilayah utara/kepulauan. Sementara beberapa kecamatan industri (mis. Driyorejo, Gresik) memiliki SMK lebih banyak, tetapi justru rasio PNS di SMK sangat buruk. Gambaran ini memperlihatkan tantangan ganda: (a) wilayah kepulauan/terpencil dapat menghadapi kendala infrastruktur dan guru tetap; (b) wilayah yang secara ekonomi seharusnya mampu mendukung pendidikan vokasi ternyata mengalami kekurangan PNS sehingga program-program pelatihan, standar kompetensi, dan kerjasama industri berisiko tidak berjalan optimal.

5). Implikasi operasional dan kebijakan (tantangan lintas sektor)

a) Menurunkan putus sekolah SD memerlukan kebijakan proteksi sosial (bantuan tunai bersyarat, subsidi pendidikan), deteksi dini (tracing anak tidak masuk sekolah), dan program remedial/alternatif (PKBM, pendidikan paket) yang terkoordinasi antar OPD.

b) Menutup kesenjangan PNS dan sertifikasi memerlukan reformasi rekrutmen (prioritas penempatan pada SMK dan daerah terpencil),

percepatan sertifikasi guru non-PNS, serta insentif kualifikasi profesional dan program peningkatan kompetensi berkelanjutan.

c) Untuk meningkatkan APM SMA/SMK perlu upaya kombinasi: memperluas jalur pendidikan menengah nonformal, penguatan link-and-match SMK-industri, dan program beasiswa/insentif bagi keluarga rentan agar anak tidak berhenti sekolah karena kebutuhan ekonomi.

d) Perbaikan sistem data manajemen pendidikan (SISMEN/EMIS terintegrasi) agar pemantauan putus, ketidakhadiran, dan distribusi guru realtime sehingga intervensi dapat diutamakan pada titik-titik kritis.

6).Kesenjangan Layanan Pendidikan Inklusif dan Nonformal

Selain tantangan di sektor pendidikan reguler, Kabupaten Gresik juga menghadapi ketimpangan dalam penyediaan layanan pendidikan inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) serta layanan pendidikan nonformal, yang keduanya memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian wajib belajar 13 tahun (1 tahun PAUD pra-SD + 12 tahun pendidikan dasar dan menengah). Berdasarkan data sebaran satuan pendidikan, jumlah SLB di Gresik hanya 8 unit, dengan konsentrasi tertinggi di Kebomas dan Driyorejo (masing-masing 2 SLB), sedangkan sebagian besar kecamatan tidak memiliki SLB sama sekali. Ketimpangan ini menyebabkan akses pendidikan bagi ABK tidak merata, terutama bagi anak-anak yang tinggal di wilayah perdesaan dan kepulauan. Banyak ABK harus menempuh jarak yang jauh atau bahkan tidak mendapatkan layanan pendidikan khusus sama sekali. Kondisi ini juga belum sepenuhnya terimbangi oleh implementasi sekolah inklusi di sekolah reguler. Minimnya jumlah guru pendamping khusus (GPK), keterbatasan sarana adaptif, serta terbatasnya alokasi anggaran operasional menjadi hambatan nyata dalam menjamin pemerataan akses pendidikan inklusif di Kabupaten Gresik.

Selain itu, peran PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sebagai jalur pendidikan kesetaraan menjadi sangat penting dalam konteks pencapaian wajib belajar 13 tahun, khususnya untuk menjangkau anak putus sekolah, anak tidak sekolah, serta warga belajar dewasa. Tercatat hanya ada 13 PKBM yang tersebar di beberapa kecamatan, dengan konsentrasi tertinggi di Menganti dan Gresik (masing-masing 2 PKBM). Sebagian kecamatan, terutama wilayah perdesaan dan kepulauan seperti Benjeng, Duduksampeyan, Bungah, Panceng, Sangkapura, dan

Tambak belum memiliki PKBM sama sekali, sehingga akses terhadap jalur pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C serta program literasi masih sangat terbatas. Keterbatasan jumlah dan sebaran PKBM ini berdampak pada rendahnya daya jangkau layanan pendidikan alternatif, yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen kunci dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan bagi kelompok rentan. Selain itu, banyak PKBM masih beroperasi dengan sarana prasarana sederhana dan pendanaan terbatas, sehingga belum mampu berperan optimal dalam mendukung strategi nasional wajib belajar 13 tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa akses pendidikan inklusif dan nonformal merupakan salah satu tantangan struktural utama yang perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Gresik.

BAB III
ANALISIS STRATEGIS

A. Analisis SWOT Pendidikan di Kabupaten Gresik

Pada bagian analisis strategis memuat deskripsi faktor-faktor penentu dalam menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threaths* (ancaman). Analisis internal adalah *Strength* dan *Weakness* sedang analisis eksternal adalah *Opportunity dan Threats.* Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan isu strategis yang berkembang yang dinilai mendukung dan menghambat keterlaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Gresik. Faktor-faktor penentu tersebut dipetakan sesuai dengan komponen dalam sistem penyelenggaraan pendidikan sebagai kerangka pemetaan analisis yang mencakup *input, process,* dan *output*. Pemetaan ini merujuk pada komponen-komponen dalam sistem penyelenggaraan pendidikan yang terstandar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Permendikbudristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Selain itu, analisis strategis juga merujuk pada aspek-aspek pendukung terwujudnya pendidikan dengan basis *Society 5.0* dan 21st *Skills* serta *local wisdom* yang dimiliki Kabupaten Gresik.

Ruang lingkup analisis startegis pendidikan di Kabupaten Gresik lebih banyak mendeskripsikan pembangunan pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pengelolaan pendidikan. Bidang pendidikan merupakan urusan pemerintah konkuren yang termasuk dalam pelayanan dasar sehingga pengelolaannya menjadi otonomi daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 9 di mana kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Lebih lanjut diuraikan pada Tabel 3.1 tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan dijelaskan bahwa daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam beberapa sub urusan.

Tabel 3.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pendidikan

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan
Pemerintah Kabupaten/Kota	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota
	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat
	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota

(Sumber: UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini menegaskan ada enam hal yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Khusus untuk akreditasi, kewenangan hanya ada di pemerintah pusat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada dasarnya seluruh fungsi dan unsur manajemen sub urusan manajemen pendidikan melekat pada pengelolaan masing-masing jenjang pendidikan yang telah dibagi menjadi kewenangan tingkatan pemerintahan. Berdasarkan gambaran umum kondisi pendidikan Kabupaten Gresik, berikut deskrispsi analisis SWOT sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Analisis SWOT Pendidikan di Kabupaten Gresik

No	Aspek Analisis	Faktor atau Isu Strategis	Kategori SWOT	Dampak terhadap Pembangunan Pendidikan
1	SDM Pendidikan	Sebagian besar guru bersertifikat; terdapat peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi profesional	**S**	Meningkatkan kualitas pembelajaran dan daya saing sekolah
	Guru	Rasio guru PNS sangat tidak seimbang	**W**	Kesenjangan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan
		Tingkat partisipasi pelatihan guru tinggi (khususnya Kurikulum yang dietapkan pemerintah dan literasi numerasi)	**S**	Meningkatkan kualitas pembelajaran dan adaptasi inovasi
		Rasio siswa–guru pada jenjang SD cukup ideal dibandingkan standar nasional	**S**	Menunjang proses pembelajaran efektif di banyak sekolah
	Tenaga Administrasi Sekolah	Sebagian besar sekolah memiliki tenaga administrasi dasar, namun belum merata di madrasah kecil dan wilayah kepulauan	**W**	Pengelolaan sekolah tidak optimal di wilayah terpencil
	Tenaga Perpustakaan Sekolah	Ketersediaan tenaga perpustakaan belum memadai, terutama pada jenjang SD dan PAUD	**W**	Minimnya literasi baca siswa dan budaya literasi sekolah
	Tenaga Laboran Sekolah	Tenaga laboran tersedia terutama di jenjang SMP, SMA, SMK; namun masih terbatas untuk Fisika dan Biologi	**W**	Praktikum sains belum optimal di semua satuan pendidikan
	Konselor Sekolah	Kebutuhan konselor sekolah meningkat; layanan BK belum merata di SD dan SMP	**W**	Layanan psikososial dan penanganan masalah siswa belum menyeluruh
2	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Sebagian besar ruang kelas mencukupi, namun masih ada kerusakan berat di SD/SMP; toilet layak PAUD hanya 24,65% dan SD 45,12%	**W**	Ketimpangan mutu pembelajaran dan kenyamanan belajar
		Laboratorium dan komputer cukup baik di SMP/SMA/SMK, tetapi kesenjangan masih terjadi di beberapa kecamatan	**W**	Kesenjangan mutu antar wilayah dan antar jenjang pendidikan
3	Pembiayaan Pendidikan	Pembiayaan pendidikan sebagian besar masih mengandalkan BOS reguler; potensi CSR mulai berkembang	**O**	Peluang diversifikasi sumber pembiayaan pendidikan daerah

No	Aspek Analisis	Faktor atau Isu Strategis	Kategori SWOT	Dampak terhadap Pembangunan Pendidikan
4	Pemerataan Layanan Pendidikan	Ketimpangan antara wilayah daratan vs kepulauan; SMK belum tersedia di Tambak; SLB dan PKBM belum merata	**W**	Ketimpangan akses dan kualitas layanan
		Akses SD/MI relatif merata, tetapi PAUD dan SMK masih timpang	**W**	Anak usia dini dan vokasi di daerah terpencil kurang terlayani
5	Kualitas Layanan Pendidikan	APM SMA/SMK mengalami penurunan menjadi 74,89% pada 2024	**W**	Potensi peningkatan angka putus sekolah
6	Keadilan dan inkllusivitas	Sebaran ABK timpang (tertinggi di Kebomas 223 anak; beberapa kecamatan nol)	**W**	Layanan inklusif belum merata
7	Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Masih terdapat ketimpangan sarpras dan mutu antar wilayah (daratan vs kepulauan)	**W**	Menurunkan pemerataan akses pendidikan
8	Dukungan Kebijakan Nasional	Adanya kurikulum yang ditetepkan, BOS Kinerja, dan digitalisasi pembelajaran	**O**	Memberi peluang inovasi dalam pengelolaan pendidikan daerah
9	Dinamika Demografi dan Ekonomi	Perubahan struktur penduduk usia sekolah, urbanisasi, dan pertumbuhan industri	**T**	Ketidakseimbangan persebaran siswa dan tenaga pendidik
10	Literasi Digital dan Inovasi	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pembelajaran daring dan teknologi	**O**	Meningkatkan efisiensi dan daya saing pendidikan
11	Nilai dan Budaya Lokal	Kuatnya peran pesantren dan karakter religius masyarakat	**S**	Mendorong pendidikan karakter dan akhlakul karimah
12	Tata Kelola dan Manajemen Data	Belum optimalnya pemanfaatan data pendidikan untuk perencanaan	**W**	Menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti
13	Disrupsi Teknologi dan AI	Adaptasi SDM pendidikan terhadap AI dan otomasi masih rendah	**T**	Potensi kesenjangan digital antar satuan pendidikan
14	Dukungan Dunia Usaha/Industri	CSR pendidikan dan magang vokasi mulai berkembang	**O**	Menumbuhkan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja
15	Kolaborasi Multipihak	Sinergi antara Pemkab, sekolah, pesantren, dan masyarakat masih parsial	**W/T**	Menghambat optimalisasi program pendidikan berkelanjutan

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

B. GAP Analysis antara kondisi saat ini dengan standar ideal/ target Nasional

Tabel 3.3 Gap Analysis antara Kondisi Kabupaten Gresik saat ini dengan target nasional

Aspek	Kondisi Terkini Gresik	Target Nasional (RPJPN 2025–2045)	Gap/Permasalahan
Akses PAUD	Jumlah TK/RA: 624 TK dan 225 RA. APK PAUD belum disebut spesifik, namun distribusi cukup merata.	APK PAUD ≥ 95%, APM meningkat signifikan, pemerataan akses terutama di wilayah rural.	Cakupan PAUD cukup baik namun masih ada kesenjangan antar wilayah, terutama di kepulauan dan PAUD swasta kecil.
APK SD/MI	APK SD/MI 2024: 102,59%. APM 97,10%.	APK & APM SD/MI nasional ditargetkan mendekati 100% (universal coverage).	Sudah tinggi, relatif sesuai target. Perlu stabilisasi dan pemerataan kualitas.
APK SMP/MTs	APK 2024: 94,12% (sempat turun drastis ke 75,02% di 2023). APM: 76,12%.	APK minimal 100%, APM SMP naik menuju 95% pada 2045.	APM masih jauh dari target. Ada fluktuasi besar, indikasi transisi jenjang yang lemah.
APK SMA/SMK/MA	APK 2024: 99,22% (sempat naik ke 108,93% di 2023). APM menurun: 78,07% → 74,89%.	APK 100%, APM SMA/SMK 90%+ (universal upper secondary completion).	APM rendah, dropout SMA/SMK masih ada, terutama dari keluarga rentan ekonomi.
Angka Putus Sekolah	Total 2023: 200 siswa. Terbesar di SD (106 kasus).	Target nasional <1% untuk semua jenjang.	Putus sekolah SD cukup tinggi — perlu intervensi proteksi sosial dan remedial.
Sarana & Prasarana	Banyak ruang kelas rusak sedang–berat (SD: 599 sedang, 679 berat). Toilet layak PAUD hanya 24,65%. Internet PAUD hanya 73% sekolah.	Sekolah 100% layak fisik, akses air, sanitasi, listrik, dan internet (TIK merata).	Infrastruktur dasar belum merata dan belum memenuhi standar kelayakan nasional.
Ketersediaan Guru	Total guru ±25.929. Rasio guru ideal (SD 1:16, SMP 1:17), tapi rasio **guru PNS** sangat timpang (SMK 1:133).	Rasio guru sesuai SPM dan sebaran merata, minimal 1:20 ideal dengan distribusi PNS proporsional.	Ketergantungan besar pada non-PNS, distribusi guru tidak merata (SMK dan daerah terpencil kekurangan PNS).
Kualifikasi Guru	12.067 guru S1/D4, 880 S2, 7 S3. Namun 2.092 guru masih D3 dan 957 SMAK.	100% guru minimal S1/D4; peningkatan proporsi S2/S3.	Masih ada guru di bawah standar kualifikasi.
Sertifikasi Guru	6.904 tersertifikasi (43%), 9.184 belum (57%).	100% guru tersertifikasi pada 2045.	Sertifikasi guru rendah, terutama di TK/SD.

Aspek	Kondisi Terkini Gresik	Target Nasional (RPJPN 2025–2045)	Gap/Permasalahan
Digitalisasi Sekolah	Akses internet PAUD hanya 73%; SD dan jenjang atas mendekati 100%.	Seluruh satuan pendidikan terhubung internet dan platform digital.	Kesenjangan digital PAUD dan SD dasar.
Mutu & Transisi Pendidikan	Transisi SMP → SMA/SMK menurun (APM SMA turun).	Transisi antarsatuan pendidikan ≥95%, menekan putus sekolah.	Transisi ke jenjang menengah masih lemah.
Partisipasi Masyarakat & Pemerataan	Konsentrasi madrasah di wilayah tertentu, wilayah kepulauan menghadapi kendala akses guru dan infrastruktur.	Pemerataan akses di semua wilayah, terutama daerah 3T.	Ketimpangan geografis antar kecamatan masih tinggi.
Layanan Pendidikan Inklusif (SLB)	Jumlah **SLB hanya 8 unit**, tersebar tidak merata — terkonsentrasi di Kebomas dan Driyorejo (masing-masing 2 SLB). Sebagian besar kecamatan, terutama perdesaan dan kepulauan, tidak memiliki SLB.	Akses layanan pendidikan inklusif bagi ABK merata di seluruh wilayah; semua anak ABK mendapatkan layanan pendidikan sesuai kebutuhannya	Layanan inklusif belum merata, akses ABK terhadap pendidikan masih sangat terbatas; ketimpangan geografis tinggi; minim GPK dan sarana adaptif.
Pendidikan Nonformal (PKBM)	Terdapat **13 PKBM**, dengan konsentrasi di Menganti dan Gresik (masing-masing 2 PKBM). Beberapa kecamatan seperti Benjeng, Duduksampeyan, Bungah, Panceng, Sangkapura, dan Tambak tidak memiliki PKBM.	Akses pendidikan kesetaraan menjangkau seluruh wilayah, mendukung target wajib belajar 13 tahun dan penuntasan putus sekolah.	Layanan PKBM belum merata, daya jangkau program Paket A, B, C dan literasi masih terbatas; sarpras dan dukungan pendanaan lemah.

Sumber: Diolah Peneliti (2025) mengacu pada Peta Jalan Pendidikan di Indonesia 2025-2045

C. Isu-isu strategis Pendidikan

1. Kesenjangan Alokasi Dana BOSDA di Kabupaten Gresik

a. Konteks Permasalahan

Mekanisme alokasi Dana BOSDA di Kabupaten Gresik saat ini menggunakan formula yang relatif sederhana, yakni jumlah peserta didik dikalikan besaran satuan biaya,

ditambah jumlah siswa kelas I dan VII dikalikan satuan biaya seragam sekolah. Data peserta didik bersumber dari sistem GRESIK PD SERU, sementara besaran satuan biaya mengikuti Standar Harga Satuan Belanja Pemerintah Daerah (SHSB) yang diperbarui setiap tahun. Walaupun sistem ini menonjol dalam hal transparansi dan kemudahan administratif, ia menghadapi keterbatasan serius dari sisi keefektifitasan dan keadilan. Salah satu konsekuensi yang muncul ialah:

1) Sekolah dengan jumlah rombongan belajar (Rombel) banyak namun siswa sedikit justru memperoleh alokasi dana BOSDA lebih besar dibanding sekolah dengan rombel sedikit tetapi jumlah siswa lebih banyak.
2) Akibatnya, alokasi dana tidak lagi mencerminkan kebutuhan riil berdasarkan beban layanan pendidikan.
3) Sekolah besar dengan banyak siswa sering mengalami kekurangan dana operasional, sedangkan sekolah kecil berpotensi mengalami kelebihan alokasi relatif terhadap kebutuhan aktualnya.

b. Karakteristik Kesenjangan
    1) Distorsi proporsionalitas alokasi: Sekolah dengan jumlah rombel tinggi namun siswa sedikit mendapatkan dana lebih besar daripada sekolah padat siswa tetapi rombel sedikit, sehingga alokasi tidak linear terhadap jumlah peserta didik.
    2) Kesenjangan kebutuhan riil: Distribusi dana tidak proporsional terhadap kebutuhan operasional aktual, seperti pengadaan sarana, pemeliharaan, atau dukungan pembelajaran bagi siswa.
    3) Formula penghitungan tidak mencerminkan biaya riil: Perhitungan berbasis rombel dan satuan biaya umum belum mempertimbangkan perbedaan jenis sekolah (SD/SMP), kondisi geografis, status akreditasi, dan beban kegiatan belajar.
    4) Ketergantungan pada data struktural, bukan fungsional: Ketika rombel menjadi parameter utama, alokasi cenderung bias terhadap struktur organisasi sekolah, bukan terhadap fungsi layanan pendidikan yang sesungguhnya.

c. Dampak Strategis
    1) Keterbatasan pembiayaan sekolah besar: Sekolah dengan jumlah siswa banyak menghadapi kesulitan menutupi kebutuhan dasar operasional seperti ATK,

pemeliharaan sarpras, dan kegiatan belajar, yang berdampak langsung pada keefektifitasan proses pembelajaran.

2) Ketimpangan mutu antar sekolah: Ketidakseimbangan distribusi BOSDA berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas layanan pendidikan, terutama antara sekolah besar di kawasan padat penduduk dan sekolah kecil di daerah perifer.
3) Menurunnya efisiensi anggaran pendidikan daerah: BOSDA yang tidak diarahkan pada kebutuhan riil membuat daya guna fiskal pendidikan berkurang; sebagian dana tidak menghasilkan peningkatan mutu secara proporsional.
4) Disparitas geografis dan sosial ekonomi**:** Sekolah di wilayah padat, miskin, atau terpencil cenderung dirugikan oleh formula yang seragam, sehingga sulit tercapai tujuan pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh wilayah Gresik.

d. Faktor Penyebab Utama

1) Formulasi alokasi yang tidak adaptif terhadap variasi kondisi sekolah
   Penggunaan rombel sebagai komponen utama alokasi tanpa menyesuaikan rasio siswa per rombel mengakibatkan bias sistematis terhadap sekolah dengan struktur rombel yang tidak efisien.
2) Keterbatasan kualitas dan integrasi data pendidikan
   Validasi data rombel dan peserta didik dalam GRESIK PD SERU belum sepenuhnya sinkron dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga menimbulkan risiko *data-driven misallocation*.
3) Faktor fiskal daerah yang restriktif
   Ketergantungan pada kemampuan keuangan daerah membatasi fleksibilitas dalam memperbaiki formula BOSDA; ruang inovasi kebijakan menjadi sempit saat fiskal daerah terbatas.
4) Kurangnya mekanisme evaluasi kebijakan berbasis evidence
   BOSDA belum dievaluasi secara berkala berdasarkan *funding gap analysis* atau *cost-effectiveness review*, sehingga formula lama terus digunakan meski sudah tidak relevan dengan dinamika kebutuhan sekolah.

2. Kesenjangan Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan

a. Konteks Permasalahan

Meskipun jumlah satuan pendidikan di Gresik meningkat dari tahun ke tahun (TK: 624, SD: 465, SMP: 125, SMA: 52, SMK: 61), pemerataan akses pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Angka partisipasi menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan:

1) APK SD/MI: sempat turun ke 96,99% (2023) lalu naik ke 102,59% (2024) → menunjukkan ketidakstabilan partisipasi awal.
2) APM SD/MI sudah tinggi (97,10%), namun APM SMP/MTs hanya 76,12% dan APM SMA/SMK turun dari 78,07% ke 74,89%.
3) Angka putus sekolah total tahun 2023: 200 siswa — dengan kontribusi terbesar dari jenjang SD (106 kasus).

Selain itu, akses layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan jalur pendidikan kesetaraan melalui PKBM juga masih sangat terbatas. Hanya terdapat 8 SLB di seluruh kabupaten, dengan konsentrasi di wilayah perkotaan, serta 13 PKBM yang belum menjangkau seluruh kecamatan. Ketimpangan ini memperkuat kesenjangan pemerataan akses pendidikan di wilayah perdesaan dan kepulauan.

b. Karakteristik Kesenjangan

1) Wilayah kepulauan dan pinggiran (Sangkapura, Dukun, Ujungpangkah) memiliki keterbatasan akses transportasi, jumlah guru, dan sarana belajar.
2) Siswa dari keluarga miskin rentan putus sekolah pada transisi SD–SMP dan SMP–SMA/SMK.
3) Akses PAUD masih belum merata dan sebagian besar lembaga belum memiliki dukungan infrastruktur digital yang memadai (27% belum terkoneksi internet).
4) Layanan pendidikan khusus dan nonformal belum tersebar merata sebagian besar kecamatan perdesaan dan kepulauan tidak memiliki SLB maupun PKBM, sehingga anak ABK dan anak putus sekolah sulit terlayani.

c. Dampak Strategis

1) Anak yang putus sekolah di jenjang dasar sulit kembali ke jalur formal, berpotensi menambah angka buta huruf fungsional dan pengangguran muda.

2) Ketimpangan wilayah akan memperbesar kesenjangan kualitas SDM lokal dan menghambat pencapaian *universal upper secondary education* 2045.
3) Fluktuasi partisipasi mengindikasikan ketidakstabilan sistem retensi dan transisi pendidikan di tingkat daerah.
4) Keterbatasan SLB dan PKBM memperlemah pemenuhan hak pendidikan bagi kelompok rentan dan menghambat pencapaian wajib belajar 13 tahun.

d. Faktor Penyebab Utama

1) Hambatan ekonomi keluarga (biaya sekolah tidak langsung).
2) Akses fisik terbatas di wilayah kepulauan dan perdesaan.
3) Minimnya intervensi dini terhadap anak rentan putus sekolah.
4) Kapasitas PAUD dan layanan transisi yang belum kuat.
5) Keterbatasan sistem deteksi dan intervensi berbasis data.
6) Jumlah SLB dan PKBM yang terbatas serta distribusinya yang tidak merata, minim dukungan GPK, sarpras, dan pembiayaan.

3. Mutu Pendidikan dan Capaian Belajar yang Belum Merata

a. Konteks Permasalahan

Meskipun angka partisipasi tinggi di jenjang dasar, mutu pembelajaran belum konsisten.

1) APM jenjang SMA/SMK menurun — tanda adanya kesenjangan kualitas antar jenjang.
2) Fluktuasi APK SMP dan SMA menandakan ketidakstabilan partisipasi dan retensi.
3) Fasilitas belajar banyak yang rusak: SD memiliki 679 ruang rusak berat dan 599 rusak sedang. Toilet layak PAUD hanya 24,65%.
4) Akses internet belum menyeluruh, terutama di PAUD dan SD.

b. Karakteristik Kesenjangan

1) Sekolah di daerah industri relatif lebih modern, sementara sekolah di kepulauan atau pedesaan jauh tertinggal dari segi sarana, tenaga pengajar, dan teknologi.
2) Mutu literasi dan numerasi belum setara — terlihat dari rendahnya transisi dan APM SMA.

3) Tidak semua satuan pendidikan siap mengimplementasikan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan digitalisasi pembelajaran.

c. Dampak Strategis

1) Ketimpangan mutu berimplikasi pada ketidakseimbangan kualitas SDM di masa depan.
2) Lulusan dari wilayah tertinggal akan sulit bersaing dalam pasar kerja industri maupun melanjutkan ke pendidikan tinggi.
3) Menurunnya APM SMA/SMK mengindikasikan lemahnya daya serap dan keberlanjutan belajar.

d. Faktor Penyebab Utama

1) Sarana prasarana tidak memadai.
2) Ketersediaan guru profesional tidak merata.
3) Tidak semua satuan pendidikan memiliki perangkat pembelajaran digital.
4) Minimnya program penguatan literasi dan numerasi yang sistemik.

4. Distribusi, Kualifikasi, dan Profesionalisme Guru yang Belum Ideal

a. Konteks Permasalahan

Guru merupakan faktor penentu mutu pendidikan, tetapi di Gresik masih terdapat ketimpangan signifikan:

1) Rasio guru secara umum ideal (SD 1:16, SMP 1:17), namun rasio guru PNS sangat timpang — SMK 1:133, SD 1:52.
2) Jumlah guru tersertifikasi baru 43% (6.904 orang).
3) Sekitar 3.000-an guru berpendidikan di bawah S1, mayoritas PAUD dan SD.
4) Persebaran guru profesional tidak merata, dengan kekurangan guru tetap di kepulauan dan SMK.

b. Karakteristik Kesenjangan

1) Ketergantungan besar pada guru non-PNS/honor untuk operasional sekolah, terutama di SMK dan PAUD.
2) Guru PNS cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan sekolah besar.
3) Guru vokasi (SMK) tidak sebanding dengan jumlah siswa dan program keahlian.

c. Dampak Strategis

1) Kualitas pembelajaran dan ketuntasan belajar tidak merata.

2) SMK sulit meningkatkan kualitas lulusan sesuai kebutuhan industri karena kurang guru tetap kompeten.
3) Tingginya beban kerja guru PNS berpotensi menurunkan efektivitas pembelajaran.

d. Faktor Penyebab Utama
1) Formasi PNS terbatas dan distribusi tidak adil.
2) Proses sertifikasi guru berjalan lambat.
3) Belum ada skema insentif penugasan di daerah 3T/kepulauan.
4) Keterbatasan pelatihan berkelanjutan dan link dengan industri (SMK).

5. Keterbatasan Infrastruktur dan Layanan Dasar Pendidikan

a. Konteks Permasalahan
1) Banyak ruang kelas dalam kondisi rusak sedang–berat (terutama di SD dan SMP).
2) Toilet layak masih rendah, terutama di PAUD (24,65%) dan SD (45,12%).
3) Akses air dan listrik relatif baik, tapi kontinuitas air bersih masih bervariasi.
4) Akses internet belum menyeluruh di jenjang dasar.

b. Karakteristik Kesenjangan
1) Kesenjangan fasilitas mencolok antara sekolah kota dan desa/kepulauan.
2) Fasilitas TIK lebih banyak terkonsentrasi pada SMA/SMK.
3) PAUD dan SD tertinggal dalam pemenuhan sarana pembelajaran modern.

c. Dampak Strategis
1) Lingkungan belajar yang tidak layak menurunkan motivasi dan hasil belajar.
2) Anak perempuan lebih rentan tidak nyaman bersekolah jika sanitasi tidak layak.
3) Akses TIK yang tidak merata memperlebar kesenjangan digital sejak dini.

d. Faktor Penyebab Utama
1) Minimnya investasi rehabilitasi sarpras.
2) Ketimpangan alokasi anggaran antar jenjang dan wilayah.
3) Belum optimalnya kemitraan CSR industri untuk pendidikan.

6. Tata Kelola Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat yang Lemah

a. Konteks Permasalahan
1) Data pendidikan belum dikelola secara real time dan integratif.

2) Koordinasi antar-OPD dan pemangku kepentingan pendidikan belum optimal.
3) Partisipasi masyarakat dan lembaga keagamaan belum merata.
4) Kolaborasi dengan DUDI di sektor SMK masih terbatas.

b. Karakteristik Kesenjangan
1) Respons terhadap anak putus sekolah masih bersifat reaktif, bukan preventif.
2) Pemanfaatan data (Dapodik/EMIS) belum maksimal untuk perencanaan berbasis bukti.
3) Program kemitraan masih sporadis dan tidak sistemik.

c. Dampak Strategis
1) Sulit melakukan intervensi cepat untuk retensi siswa.
2) Perencanaan pendidikan tidak sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan riil.
3) Potensi dukungan masyarakat dan industri belum termanfaatkan optimal.

d. Faktor Penyebab Utama
1) Kapasitas tata kelola belum merata di semua jenjang.
2) Sistem data dan koordinasi lintas sektor belum kuat.
3) Belum ada model kemitraan DUDI yang mapan di tingkat lokal.

7. Penguatan Ekosistem Pesantren dalam Pembangunan Pendidikan Gresik yang Berakhlakul Karimah

a. Konteks Permasalahan
1. Kabupaten Gresik memiliki banyak pondok pesantren yang berperan penting dalam pembentukan karakter dan moral peserta didik.
2. Peran pesantren belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pendidikan daerah.
3. Akses pesantren terhadap teknologi, pelatihan, dan dukungan kelembagaan masih terbatas.

b. Karakteristik Kesenjangan
1. Kurikulum pesantren masih berfokus pada aspek keagamaan, belum banyak mengembangkan literasi sains, teknologi, dan kewirausahaan.
2. Fasilitas pembelajaran digital dan infrastruktur pesantren di wilayah perdesaan masih tertinggal.
3. Kolaborasi pesantren dengan sekolah, perguruan tinggi, dan industri masih rendah.

c. Dampak Strategis
1. Potensi santri sebagai SDM religius dan produktif belum dimanfaatkan optimal.

2. Kontribusi pesantren terhadap peningkatan kualitas SDM daerah masih terbatas.
3. Arah pendidikan berakhlakul karimah belum sepenuhnya menjadi kekuatan dalam pembangunan ekonomi dan sosial daerah.

d. Faktor Penyebab Utama

1. Belum adanya kebijakan daerah yang mengintegrasikan pesantren dalam sistem pendidikan formal dan vokasional.
2. Rendahnya literasi digital dan kapasitas manajerial di kalangan pengelola pesantren.

3. Minimnya koordinasi lintas sektor dan kemitraan strategis dengan dunia industri serta perguruan tinggi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Visi dan Misi Pembangunan Pendidikan Daerah

Visi pembangunan pendidikan daerah merupakan rumusan cita-cita yang menjadi rujukan dalam menentukan arah dan tujuan utama sistem pendidikan di suatu daerah, yang disusun berdasarkan potensi, karakteristik sosial-budaya, ekonomi, keagamaan, dan lingkungan di Kabupaten Gresik. Visi ini menjadi **kompas strategis** bagi seluruh unsur pemangku kepentingan pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga keagamaan dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pendidikan secara berkelanjutan.

Visi pembangunan pendidikan Kabupaten Gresik sejalan dengan Visi Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, **"Gresik Berdaya Saing, Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan"** dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, **"Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat".** Selaras dengan Visi RPJPD dan RPJMD, rumusan Visi Pembangunan Pendidikan Kabupaten Gresik adalah, **"Terwujudnya Pendidikan Kabupaten Gresik yang *HIT* (Holistik, Inkusif, Transformatif) Bermutu, dan Berkelanjutan untuk Membangun Insan Berdaya Saing, Berkarakter dan Berakhlakul Karimah.**

Visi Pembangunan Pendidikan menjadi fondasi sekaligus sebagai kekuatan moral dan simbolik yang diharapkan dapat menginspirasi semua pemangku kepentingan pendidikan agar berpartisipasi aktif untuk mencapai kondisi ideal pembangunan pendidikan di masa depan. Selain itu, visi ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan strategis, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Oleh karena itu, perlu adanya penjabaran rumusan Visi Pembangunan Pendidikan Kabupaten Gresik sebagai berikut.

Tabel 4.1 Visi dan Penjelasan

Visi	Penjelasan
Holistik	Pembangunan pendidikan berfokus pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh intelektual, spiritual, sosial, dan kompetensi Abad 21
Transformatif	Penyelenggaraan pendidikan mampu mendorong perubahan paradigma pendidikan menuju sistem yang adaptif, kreatif, dan berbasis inovasi untuk menghadapi tantangan global dan era digital.
Inklusif	Pembangunan pendidikan menjamin pemerataan akses dan kesempatan belajar bagi seluruh warga tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan dan

Visi	Penjelasan
	berkebutuhan khusus.
Bermutu	Pembangunan pendidikan yang relevan, efektif, berkeadilan, dan dikelola secara profesional
Insan berdaya saing	Pembangunan pendidikan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten selaras dengan kebutuhan industri dan pasar regional, nasional dan global.
Berkarakter	Pembangunan pendidikan dapat menumbuhkan nilai-nilai moral, religius, dan budaya lokal Kabupaten Gresik yang mendukung terwujudnya konsep *Society 5.0* yaitu masyarakat cerdas (*super smart society*).
Berkelanjutan	Pembangunan pendidikan dilaksanakan secara terus-menerus, bertahap, dan konsisten**,** adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada keberlanjutan mutu, lingkungan, serta kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan.

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Visi Pembangunan Pendidikan Kabupaten Gresik "Terwujudnya Pendidikan Kabupaten Gresik yang *HIT* (Holistik, Inkusif, Transformatif) Bermutu, dan Berkelanjutan untuk Membangun Insan Berdaya Saing, Berkarakter dan Berakhlakul Karimah dijabarkan dalam Misi sebagai berikut.

Tabel 4.2 Misi dan Penjelasan

Misi	Penjelasan
Misi ke 1 Mengembangkan pendidikan yang holistik dan berpusat pada peserta didik	Menyelenggarakan pembelajaran yang mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan keterampilan Abad 21 (*Critical thinking, Creativity, Collaboration, Communication, Character,* dan *Citizenship*).
	Mengintegrasikan pendidikan karakter dan akhlak mulia dalam setiap mata pelajaran dan kegiatan sekolah.
	Mengoptimalkan potensi peserta didik secara menyeluruh, agar siap menghadapi tantangan global dan lokal.
Misi 2 Menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan merata	Memastikan akses pendidikan untuk semua anak, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
	Menyediakan layanan pendidikan di daerah terpencil, perkotaan, dan kawasan industri-pesantren dengan kualitas setara.
	Mengurangi kesenjangan pendidikan melalui kebijakan, program, dan pendampingan yang tepat sasaran.
Misi 3 Mendorong transformasi pendidikan melalui inovasi dan teknologi	Meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan.
	Mengintegrasikan teknologi digital dan metode pembelajaran kreatif dalam proses belajar

Misi	Penjelasan
	mengajar.
	Mendorong budaya inovasi, riset, dan kolaborasi dengan industri dan pesantren.
Misi 4 Menjamin mutu pendidikan secara berkelanjutan	Mengembangkan standar kualitas pendidikan, kurikulum, dan sistem evaluasi yang relevan dan adaptif.
	Menjamin pengelolaan lembaga pendidikan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Memastikan keberlanjutan kualitas pendidikan melalui pemantauan dan perbaikan berkesinambungan
Misi 5 Mewujudkan pendidikan yang menumbuhkan insan berdaya saing, berkarakter, dan berakhlakul karimah	Membekali peserta didik dengan kompetensi akademik dan keterampilan hidup yang siap bersaing di tingkat lokal, nasional, dan global.
	Menanamkan nilai-nilai moral, etika, religius, dan budaya lokal, sehingga peserta didik menjadi individu berakhlak mulia.
	Mengembangkan kepedulian sosial, kewarganegaraan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat.
	Integrasi nilai religius, sosial, dan kemanusiaan dengan teknologi, Pembelajaran yang mendorong inovasi berbasis nilai dan etika.

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

B. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Pendek dan Menengah

Tujuan dan sasaran strategis jangka pendek dan menengah pembangunan pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2025–2029 merupakan langkah operasional untuk mencapai tujuan jangka panjang pembangunan pendidikan. Fokus utama diarahkan pada percepatan pemenuhan layanan dasar, penguatan mutu pembelajaran, pengembangan kapasitas sumber daya manusia pendidikan, serta peningkatan tata kelola dan akuntabilitas sistem pendidikan daerah. Strategi jangka pendek dan menengah ini menjadi instrumen penting untuk mempercepat capaian indikator-indikator prioritas dalam kurun lima tahun pertama, sehingga fondasi untuk mencapai kondisi ideal jangka panjang dapat terbangun secara sistematis.

1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan (TS1)

a. Analisis Situasi dan Tantangan

Kabupaten Gresik menghadapi sejumlah tantangan dalam hal pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Masih terdapat ketimpangan

distribusi satuan pendidikan, terutama pada jenjang PAUD di wilayah kepulauan dan perdesaan, serta ruang kelas SD dan SMP yang mengalami kerusakan berat dengan rasio ruang rusak yang signifikan. Selain itu, angka partisipasi PAUD masih berada di bawah target nasional, dan keterhubungan internet di satuan PAUD belum merata. Fenomena anak tidak sekolah juga masih ditemukan di beberapa kecamatan dengan akses geografis sulit. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan jangka pendek dan menengah yang fokus pada rehabilitasi sarana, perluasan layanan, dan penguatan akses masyarakat terhadap pendidikan.

Di sisi lain, layanan pendidikan inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui SLB masih sangat terbatas — hanya terdapat 8 SLB dengan sebaran tidak merata dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Layanan pendidikan kesetaraan melalui PKBM juga terbatas dengan hanya 13 lembaga, dan sebagian kecamatan perdesaan dan kepulauan tidak memiliki PKBM sama sekali. Kondisi ini menyebabkan sebagian anak ABK dan anak putus sekolah tidak memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang layak.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Intervensi

1) Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD dan SMP secara bertahap hingga 80% dalam 5 tahun.
2) Pemenuhan fasilitas dasar pendidikan (air, toilet layak, listrik, dan akses internet) secara merata.
3) Perluasan layanan PAUD terutama di wilayah kepulauan dan perdesaan.
4) Peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan APM SD serta SMP.
5) Penguatan dukungan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan akses pendidikan.
6) Pendekatan berbasis spasial untuk mengatasi ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan.
7) Perluasan dan pemerataan layanan pendidikan inklusif melalui peningkatan jumlah SLB, sekolah inklusi, serta ketersediaan guru pendamping khusus (GPK).
8) Penguatan dan perluasan PKBM sebagai jalur kesetaraan untuk mendukung penuntasan wajib belajar 13 tahun.

c. Kondisi yang Ingin Dicapai Tahun 2029

Pada tahun 2029, Kabupaten Gresik ditargetkan telah mencapai akses layanan pendidikan yang lebih merata. Daya tampung satuan pendidikan seimbang dengan populasi anak usia sekolah di setiap wilayah, rasio ruang kelas rusak berat berkurang signifikan, akses internet PAUD mencapai 100%, toilet layak minimal 80% satuan pendidikan, serta APK PAUD dan APM SD–SMP mendekati target nasional. Selain itu, layanan pendidikan inklusif bagi ABK meningkat melalui bertambahnya jumlah SLB dan sekolah inklusi, serta PKBM menjangkau seluruh kecamatan prioritas sehingga anak putus sekolah dan warga belajar dewasa dapat memperoleh layanan pendidikan yang setara.

d. Indikator Sasaran Strategis TS1

Tabel 4.3 Indikator Strategis TS 1

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2029	Satuan
PAUD	APK PAUD	90	%
PAUD	Akses internet PAUD	100	%
PAUD	PAUD terakreditasi minimal B	80	%
SD	Rehabilitasi ruang rusak berat	80	%
SD	Toilet layak SD	80	%
SD	APM SD	98	%
SD	Putus sekolah SD	< 25	Anak
SMP	APK SMP	95	%
SMP	SMP terakreditasi minimal B	85	%
Layanan Inklusif	Persentase kecamatan dengan layanan SLB/Inklusi	80	%
Pendidikan Kesetaraan (PKBM)	Persentase kecamatan dengan PKBM aktif	80	%

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

2. Mutu dan Relevansi Pembelajaran (TS2)

a. Analisis Situasi dan Tantangan

Mutu pembelajaran di Kabupaten Gresik masih menghadapi tantangan terkait rendahnya capaian literasi dan numerasi pada jenjang SD dan SMP, belum optimalnya penerapan TIK dalam pembelajaran, serta masih terbatasnya kapasitas guru dalam menerapkan model pembelajaran aktif dan kontekstual. Sebagian satuan pendidikan juga belum memiliki infrastruktur TIK yang memadai untuk menunjang pembelajaran digital.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Intervensi

1) Peningkatan kapasitas guru dalam perencanaan pembelajaran aktif dan reflektif.
2) Penguatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di semua jenjang.
3) Program literasi dan numerasi terpadu berbasis satuan pendidikan.
4) Penguatan kepemimpinan instruksional kepala sekolah.
5) Pengembangan iklim sekolah yang inklusif dan kondusif.
6) Penguatan sinergi dengan pondok pesantren dalam pengembangan literasi keagamaan, karakter, dan kewirausahaan santri agar nilai-nilai berakhlakul karimah terintegrasi dalam proses pembelajaran.

c. Kondisi yang Ingin Dicapai Tahun 2029

Seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP telah menerapkan perencanaan pembelajaran yang efektif, minimal 50% mata pelajaran telah terintegrasi dengan TIK, serta capaian literasi dan numerasi mengalami peningkatan minimal 15 poin. Iklim sekolah menjadi lebih aman, setara, dan mendukung pembelajaran inklusif.

d. Indikator Sasaran Strategis TS2

Tabel 4.4 Indikator Strategis TS 2

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2029	Satuan
PAUD	Perencanaan pembelajaran efektif	90	%
SD	Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran	50	%
SD	Capaian literasi & numerasi	+15 poin	Nilai
SD	Refleksi pembelajaran oleh guru	80	%

SMP	Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran	50	%
SMP	Capaian literasi & numerasi	+15 poin	Nilai

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

3. SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TS3)

a. Analisis Situasi dan Tantangan

Sumber daya manusia pendidik di Kabupaten Gresik masih menghadapi ketimpangan distribusi guru antarsekolah dan kecamatan, tingkat sertifikasi pendidik yang belum optimal, serta keterbatasan jumlah guru penggerak. Hal ini berdampak langsung terhadap kualitas proses pembelajaran dan layanan pendidikan.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Intervensi

a. Percepatan sertifikasi pendidik melalui program PPG
b. Penguatan peran guru penggerak sebagai agen perubahan sekolah.
c. Redistribusi guru untuk mencapai pemerataan rasio guru.
d. Penguatan program pelatihan berkelanjutan dengan berbagai platform pemerintah.
e. Pengembangan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah.

c. Kondisi yang Ingin Dicapai Tahun 2029

Paling sedikit 70% guru telah tersertifikasi, 30% di antaranya telah menjadi guru penggerak, dan indeks distribusi guru mencapai nilai di atas 0,75. Kapasitas kepala sekolah dan pengawas meningkat melalui pelatihan berkelanjutan.

d. Indikator Sasaran Strategis TS3

Tabel 4.5 Indikator Sasaran Strategis TS 3

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2029	Satuan
PAUD	Guru bersertifikat PPG	70	%
PAUD	Kepala sekolah bersertifikat	80	%
SD	Guru bersertifikat PPG	70	%
SD	Guru penggerak	30	%
SD	Indeks distribusi guru membaik	> 0,75	Nilai

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2029	Satuan
SMP	Guru bersertifikat PPG	70	%
SMP	Guru penggerak	30	%

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

4. Tata Kelola dan Akuntabilitas (TS4)

a. Analisis Situasi dan Tantangan

Tata kelola dan akuntabilitas sistem pendidikan di Kabupaten Gresik masih menghadapi keterbatasan dalam integrasi data pendidikan, pelaporan kinerja, serta optimalisasi sistem informasi manajemen pendidikan. Hal ini berdampak pada lambatnya proses perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Intervensi

1) Digitalisasi tata kelola pendidikan melalui EMIS/SISMEN.
2) Penguatan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pendidikan.
3) Peningkatan kapasitas aparatur pendidikan dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan.
4) Peningkatan keterbukaan dan transparansi informasi publik.
5) Penetapan standar layanan dan kinerja kelembagaan yang terukur.

c. Kondisi yang Ingin Dicapai Tahun 2029

Seluruh satuan pendidikan telah terintegrasi dalam sistem EMIS/SISMEN, skor LKJIP meningkat 20%, dan Kabupaten Gresik meraih predikat WTP dari BPK. Kinerja tata kelola pendidikan menjadi transparan, terukur, dan akuntabel.

d. Indikator Sasaran Strategis TS4

Tabel 4.6 Indikator Sasaran Strategis TS 4

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2029	Satuan
Tata Kelola	Implementasi EMIS/SISMEN	100	%
Tata Kelola	Skor LKJIP	+20%	Nilai

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2029	Satuan
Tata Kelola	WTP	1	Predikat
Tata Kelola	Publikasi data pendidikan	100	%

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pendidikan

Pada hakikatnya pembangunan pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan manusia. Pendekatan yang digunakan adalah sistemik: memadukan dimensi akses, mutu, relevansi, dan tata kelola dengan penekanan pada keadilan geografis (termasuk kepulauan), inklusi, dan efisiensi manajerial.

Kerangka normatif kebijakan ini juga mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang relevan *(SDGs, Education for All, Convention on the Rights of the Child)* serta mengintegrasikan kearifan lokal dan pendekatan sosial-kultural (social cultural heritage approach) untuk memperkuat peran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Peran pondok pesantren sebagai pusat pembentukan karakter memiliki arti strategis dalam memperkuat visi pendidikan Gresik yang berakhlakul karimah, sekaligus menumbuhkan generasi yang cerdas dan berdaya saing.

1. Strategi Kebijakan

Strategi kebijakan dirumuskan sebagai rangkaian intervensi sistemik untuk mencapai tujuan strategis (TS1–TS4). Setiap strategi dirancang untuk menyasar komponen inti penyelenggaraan pendidikan: (a) pendidik dan tenaga kependidikan, (b) sarana-prasarana & TIK, (c) sistem pembelajaran & penilaian, (d) pendanaan, serta (e) tata kelola dan data. Strategi mempertimbangkan disparitas antar wilayah (daratan–kepulauan), kesenjangan gender, dan variasi kapasitas satuan pendidikan (negara vs masyarakat).

a) Strategi Pencapaian Tujuan Strategis 1 (TS1): Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

TS1 menuntut intervensi berskala serta prioritas alokasi sumber daya untuk memindahkan titik-titik kemiskinan akses pendidikan dan menghapus hambatan fisik, ekonomi, dan sosial. Strategi berikut dirancang untuk fase jangka pendek (2025–2026) dan menengah (2027–2029)

i. Rehabilitasi dan Peningkatan Kapasitas Fisik Sekolah

Rehabilitasi bertarget ruang kelas rusak berat SD dan SMP, sekaligus paket penyediaan sanitasi, air minum, listrik, dan konektivitas internet. Metode: intervensi paket per sekolah ('one-school-one-package') yang mengintegrasikan padat karya lokal. Output terukur: % ruang rusak berat teratasi; % sekolah dengan toilet layak; % sekolah terhubung internet.

ii. Perluasan Jangkauan PAUD & Layanan Nonformal dan Inklusif

Pengembangan fasilitas PAUD di desa/kecamatan terpencil dan kepulauan (model terdesentralisir), peningkatan jumlah dan kapasitas PKBM sebagai jalur pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C), serta perluasan layanan pendidikan inklusif melalui penambahan SLB dan sekolah reguler inklusi. Metode: dana insentif desa, kemitraan masyarakat/CSR, dan program afirmasi wilayah kepulauan

iii. Program Retensi dan Penghapusan Putus Sekolah

Deteksi dini anak berisiko putus sekolah (EMIS tracer), subsidi berbasis kondisi (conditional cash transfers untuk keluarga tidak mampu), program remedial & kesetaraan melalui PKBM sebagai jalur re-entry, serta perluasan dukungan layanan inklusi bagi ABK untuk mencegah eksklusi dini dari sistem pendidikan formal.

iv. Afirmasi & Akses Kepulauan

Skema afirmatif untuk Bawean dan pulau terluar: transportasi sekolah terjadwal, boarding support hybrid, VSAT/solusi konektivitas, dan pusat pendidikan terpadu untuk daerah kepulauan.

v. **Keterlibatan Masyarakat dan Dunia Usaha**

Mekanisme formal kemitraan: MOUs dengan dunia usaha, dana CSR terarah, komite sekolah yang diberi kewenangan pengelolaan kecil (pengelolaan aset & in-kind support).

vi. **Pendekatan Berbasis Spasial dan Data**

Alokasi berbasis peta kebutuhan (GIS + EMIS) untuk memprioritaskan wilayah intervensi, sehingga dana dan sumber daya disalurkan secara proporsional.

b) Strategi Pencapaian Tujuan Strategis 2 (TS2): Mutu dan Relevansi Pembelajaran

TS2 menuntut transformasi proses pembelajaran agar menghasilkan kompetensi dasar (literasi, numerasi), keterampilan abad-21, dan relevansi lokal–industri. Strategi berikut menekankan perubahan praktik pedagogis, kurikulum adaptif, dan pemanfaatan TIK.

1) Penguatan Kapasitas Guru dan Kepala Sekolah

Program peningkatan kapasitas berjenjang: micro-credential, pelatihan PPG lanjutan, mentoring in-situ, dan program teacher residency untuk daerah sulit. Indikator: % guru mengikuti pelatihan, % peningkatan skor praktik pembelajaran.

2) Reformasi Kurikulum & Penilaian

Adaptasi kurikulum yang ditetapkan pemerintah yang mengintegrasikan kearifan lokal dan kebutuhan vokasi. Pengembangan asesmen formatif dan nasional berbasis kompetensi untuk mendukung remedial dan pembelajaran mendalam.

3) Integrasi TIK untuk Pembelajaran Berkualitas

Penyediaan konten digital lokal, perangkat pembelajaran murah untuk kelas awal, platform pembelajaran adaptif, dan program literasi digital guru-siswa. Target: 50% mata pelajaran terintegrasi TIK pada periode menengah.

4) Sekolah Model dan Pengembangan Life-skills

Pilot sekolah model (per kecamatan) yang mengkombinasikan life-skills, kewirausahaan lokal, eksposur industri, olahraga & seni budaya untuk membentuk lulusan kompeten dan berdaya saing.

5) Peningkatan Layanan Inklusif dan Kesetaraan

Pengembangan kebijakan inklusi: ruang belajar diferensiasi, akses bagi siswa disabilitas, guru BK dan GPK (guru pendamping khusus) yang kuat, serta mekanisme deteksi dini untuk intervensi spesifik. PKBM diperkuat tidak hanya sebagai jalur remedial tetapi juga sebagai pusat literasi masyarakat, mendukung pencapaian wajib belajar 13 tahun.

c) Strategi Pencapaian Tujuan Strategis 3 (TS3): SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan

TS3 berfokus pada kualitas, kuantitas, dan distribusi pendidik/tenaga kependidikan. Intervensi kebijakan harus mengkombinasikan insentif, pengembangan karier, serta perbaikan kesejahteraan.

i. Percepatan Sertifikasi dan Profesionalisasi

Skema akselerasi sertifikasi (PPG & modular), micro-credential untuk kompetensi spesifik, serta kewajiban pembelajaran profesional berkelanjutan (CPD).

ii. Redistribusi Guru dan Skema Afirmasi

Kebijakan redistribusi berbasis data; insentif finansial non-finansial untuk penempatan di daerah terpencil/SMK; kontrak kerja rentang waktu terstruktur untuk guru honorer di daerah sulit.

iii. Pengembangan Kepala Sekolah & Pengawas

Program sertifikasi kepemimpinan, coaching, dan monitoring berbasis kinerja. Key: link antara penilaian kinerja dan kesempatan karier serta insentif.

iv. Peningkatan Kesejahteraan dan Jalur Karier

Evaluasi remunerasi lokal, pengembangan tunjangan berbasis kebutuhan geografis, serta paket kesejahteraan (kesehatan, perumahan darurat, transportasi).

v. **Penguatan Tenaga Kependidikan Non-Guru**

Rekrutmen dan sertifikasi laboran, pustakawan, tenaga administrasi, dan konselor; integrasi peran mereka dalam program pembelajaran.

c) Strategi Pencapaian Tujuan Strategis 4 (TS4): Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

TS4 memerlukan reformasi kelembagaan dan mekanisme tata kelola yang menjamin transparansi, integritas, dan efektivitas alokasi sumber daya. Strategi berikut memprioritaskan penguatan sistem data, perencanaan, pengawasan, dan partisipasi publik.

1) Penguatan Sistem Informasi & Data (EMIS/SISMEN)

Integrasi EMIS tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekolah; dashboard publik; data-quality audits; dan penggunaan GIS untuk penentuan prioritas intervensi.

2) Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja

Adopsi program budgeting/logical-framework, anggaran berbasis hasil (OBR), dan formula kebutuhan per satuan untuk alokasi sarpras & SDM.

3) Penguatan Pengawasan Internal & Eksternal

Peningkatan fungsi pengawas, audit internal berkala, serta mekanisme pelaporan masyarakat (whistleblowing) dan audit partisipatif.

2) Transparansi, Akuntabilitas & Komunikasi Publik

Publikasi laporan kinerja, anggaran, dan capaian indikator; kampanye komunikasi untuk membangun kepercayaan publik (branding pendidikan).

3) Regulasi, SOP & Standarisasi Layanan

Penyusunan SOP operasional, standar minimum layanan, pedoman kolaborasi publik-swasta, dan mekanisme penegakan kualitas.

2. Strategi Umum

Strategi pembangunan pendidikan diklasifikasikan menurut komponen sistem pendidikan. Tabel berikut merangkum strategi umum yang menjadi payung bagi program prioritas.

Tabel 4.7 Strategi Umum Program Piroritas

Komponen Sistem Pendidikan	Strategi Umum
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Percepatan sertifikasi, redistribusi berbasis data, peningkatan kesejahteraan, pengembangan jalur karier, program kepemimpinan
Pembelajaran dan Penilaian	Reformasi kurikulum lokal-global, asesmen formatif, integrasi TIK, program sekolah penggerak
Sarana Prasarana	Rehabilitasi paket sekolah, konektivitas & digital learning hubs, prioritas sanitasi dan akses air
Pendanaan	Anggaran berbasis kebutuhan & hasil, kemitraan publik-swasta, dana desa untuk PAUD & TBM
Tata Kelola	EMIS terintegrasi, SOP & regulasi, transparansi anggaran, audit berkala
Layanan Inklusif dan Nonformal	Perluasan jumlah dan kapasitas SLB & sekolah inklusi; penguatan PKBM & TBM sebagai jalur kesetaraan; afirmasi wilayah terpencil & kepulauan.

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

3. Program Prioritas

Berdasarkan arah kebijakan, berikut program prioritas yang direkomendasikan untuk 2025–2029. Program dirancang agar bersinergi, terukur, dan dapat diprioritaskan sesuai kapasitas anggaran.

a. Pemerataan Mutu dan Perluasan Akses Pendidikan (PAUD hingga Pendidikan Dasar)

1) Paket Rehabilitasi Sekolah (prioritas SD & SMP dengan ruang rusak berat).
2) Program Perluasan PAUD Desa & Kepulauan (pembiayaan operasional & APE).

3) Program Penguatan PKBM & TBM sebagai jalur kesetaraan untuk mendukung penuntasan wajib belajar 13 tahun.
4) Perluasan layanan inklusif melalui peningkatan jumlah SLB dan sekolah reguler inklusi, serta penyediaan GPK.
5) Program Retensi Anak & Paket Kesetaraan (PKBM, Paket A/B).
6) Skema Beasiswa Terarah untuk keluarga tidak mampu.
7) Program Mobilitas Pendidikan untuk Kepulauan (transport & boarding support).

b) Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Relevansi

1) Program Sekolah Model per kecamatan (life-skills & vokasi ringan).
2) Program Literasi-Numerasi Terpadu (remedial & pengayaan).
3) Digital Learning Hubs: pusat pembelajaran digital kecamatan.
4) Pelatihan guru & asesmen formatif berkelanjutan.

c) Pengembangan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1) Skema Akselerasi Sertifikasi (PPG & modular).
2) Program Insentif & Retensi untuk penempatan di daerah terpencil.
3) Program Pengembangan Kepala Sekolah & Pengawas.
4) Program Sertifikasi dan Rekruitmen Tenaga Kependidikan non-guru.

d) Tata Kelola dan Akuntabilitas

1) Implementasi EMIS/SISMEN terintegrasi & dashboard publik.
2) Reformasi perencanaan & penganggaran berbasis hasil.
3) Penguatan mekanisme audit internal & partisipatif.
4) Kampus kerja sama & ADVOCACY untuk komunikasi publik.

BAB V
PETA JALAN (ROADMAP) PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

A. Peta Jalan Sarana dan Prasarana

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah

a. Analisis Masalah Kritis

1) Total ruang kelas dalam kondisi rusak sedang dan berat masih signifikan:
   a) SD : 599 ruang rusak sedang + 679 rusak berat.
   b) SMP : 190 ruang rusak sedang + 161 rusak berat.
   c) SMA : 56 ruang rusak sedang + 77 rusak berat.
   d) SMK : 33 ruang rusak sedang + 9 rusak berat.
2) Kondisi toilet layak paling rendah di PAUD dan SD (PAUD 24,65%, SD 45,12%) berpotensi mengganggu kesehatan dan kenyamanan siswa.
3) Akses listrik hampir merata, tetapi akses internet masih timpang di PAUD (hanya 73%).
4) Konsentrasi kerusakan dan keterbatasan sarpras terbesar pada jenjang dasar (SD/PAUD), yang juga menyumbang angka putus sekolah tertinggi (106 anak di SD pada 2023).
5) Rasio guru PNS sangat timpang di SMK (1:133 siswa), meski bangunan sekolah relatif lengkap. Selain tantangan pada sekolah reguler, Kabupaten Gresik juga menghadapi kesenjangan akses layanan pendidikan inklusif dan nonformal.

b. Arah Strategis

1). Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat dan Sedang (Fokus SD & SMP)
   a) Fokus prioritas: kecamatan dengan ruang rusak tertinggi dan angka partisipasi rendah.
   b) Target rehabilitasi minimal:
      (1) SD: 100% ruang rusak berat (679) + 50% rusak sedang (300) dalam 3 tahun pertama

(2) SMP: 100% rusak berat (161) + 50% rusak sedang (95) dalam 3 tahun pertama.

2). Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di wilayah pertumbuhan penduduk tinggi & minim satuan pendidikan:

a) Prioritas: Driyorejo, Menganti, Sangkapura, Manyar.

b) Rasionalisasi: pertumbuhan TK dan SD signifikan → kebutuhan transisi jenjang meningkat.

3). Revitalisasi Sarana Sanitasi Sekolah (PAUD & SD)

a) Meningkatkan toilet layak dari 24–45% → minimal 80% dalam 5 tahun.

b) Strategi: desain toilet modular hemat biaya, sistem sanitasi air bersih terstandar W3.

4). Digitalisasi Infrastruktur Sekolah

a) Target: 100% sekolah (terutama PAUD & SD) memiliki akses internet stabil dalam 4 tahun.

b) Mekanisme: kerjasama ISP lokal, satelit daerah terpencil, integrasi jaringan USO.

5). Pendekatan Programatik

a) Rehabilitasi terintegrasi dengan peningkatan mutu guru dan manajemen sekolah *(school-based management).*

b) Pendekatan "satu paket intervensi per sekolah": ruang kelas + toilet + air + internet → bukan parsial.

6). Penguatan Akses Sarana Prasarana SLB dan PKBM

a) Peningkatan jumlah dan kualitas SLB di kecamatan yang belum memiliki layanan pendidikan inklusif.

b) Rehabilitasi dan penyediaan fasilitas aksesibilitas dasar (ram, toilet inklusif, ruang terapi belajar).

c) Penguatan sarpras PKBM untuk memperluas layanan kesetaraan di wilayah perdesaan dan kepulauan.

d) Integrasi perluasan akses PKBM dengan community learning hub dan skema wajib belajar 13 tahun

c. Tahap Implementasi

Tabel 5.1 Tahap Implementasi Sarana dan Prasarana

Tahap	Fokus	Aksi Strategis	Indikator
2025–2026	Pemulihan kritis	Rehabilitasi ruang rusak berat SD/SMP, pemetaan lokasi rawan	80% ruang rusak berat tuntas
2027–2028	Penguatan	Rehabilitasi ruang rusak sedang, revitalisasi sanitasi	Toilet layak PAUD & SD capai 70%
2028–2029	Konsolidasi & modernisasi	Internet 100%, toilet layak 80%, USB di titik strategis	100% sekolah memiliki sarpras standar minimal nasional

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

2. Perluasan Akses untuk Pulau Bawean

a. Analisis Masalah Kritis (Baseline 2024)

1) Jumlah lembaga pendidikan di Sangkapura & Tambak:
   a) SD : Sangkapura 39, Tambak 30.
   b) SMP : Sangkapura 5, Tambak 3.
   c) SMA : Sangkapura 3, Tambak 1.
   d) MA : Sangkapura 12, Tambak 6.
   e) SMK : Sangkapura 4, Tambak 0.
2) Infrastruktur fisik menghadapi hambatan geografis (akses laut), berdampak pada:
   a) Ketimpangan kesempatan melanjutkan sekolah (transisi SMP → SMA/SMK).
   b) Kesenjangan tenaga PNS, terutama di SMK (rasio ekstrem 1:133 kabupaten, di Bawean lebih rendah kapasitasnya).
   c) Tidak ada SMK di Tambak → peluang vokasi tertutup bagi sebagian siswa.
3) Akses internet dan listrik lebih rentan terhadap gangguan konektivitas.
4) APM SMA/SMK kabupaten menurun terus (78,07% → 74,89%) Bawean menjadi titik kritis transisi jenjang.

b. Arah Strategis

1) Pembangunan SMK Vokasi Pulau Bawean (Tambak)
   a) Prioritas mendesak: membangun 1 SMK negeri dengan fokus kelautan, perikanan, dan ekowisata.
   b) Menjawab kebutuhan kompetensi lokal & memperluas jalur pendidikan menengah.
2) Program "Sekolah Satelit dan Transportasi Pendidikan"
   a) Penyediaan transportasi laut terjadwal bagi siswa antar-kecamatan untuk jenjang menengah.
   b) Pengembangan *boarding school hybrid* bagi siswa dari wilayah terpencil Bawean.
3) Rehabilitasi Ruang Kelas dan Sarpras Bawean
   a) Prioritas: SMP dan SMA (tingkat kerusakan sedang–berat masih tinggi).
   b) Skema padat karya lokal untuk efisiensi biaya.
5) Digitalisasi Pulau Pendidikan
   a) Perluasan jaringan internet (VSAT/satelit), integrasi e-learning untuk kompensasi jarak.
   b) Pusat belajar komunitas (*community learning hub*) untuk mendukung anak putus sekolah.
6) Penguatan Tenaga Pendidik di Kepulauan
   a) Skema afirmasi penempatan guru PNS dan insentif khusus untuk wilayah kepulauan.
   b) Program sertifikasi dan peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan lokal.

c. Tahap Implementasi

Tabel 5.2 Tahap Implementasi Perluasan Akses Pulau Bawean

Tahap	Fokus	Aksi Strategis	Indikator
2025–2026	Akses dasar	Pembangunan SMK Tambak, transportasi pendidikan, pemetaan sarpras rusak	SMK Bawean mulai operasional

Tahap	Fokus	Aksi Strategis	Indikator
2027–2028	Penguatan sarpras	Rehabilitasi ruang kelas rusak, perluasan internet & boarding hybrid	Seluruh SMP-SMA memiliki internet
2028–2029	Konsolidasi	Community learning hub, rasio guru PNS membaik, APM SMA naik	APM SMA/SMK Bawean ≥85%

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

B. Peta Jalan Penguatan SDM Pendidikan

1. Rekrutmen, Redistribusi, dan Pelatihan Guru

a) Analisis Masalah Kritis (Baseline 2024)

Ketersediaan guru di Kabupaten Gresik secara kuantitatif cukup besar, mencapai lebih dari 24 ribu orang. Namun, distribusi dan status kepegawaian menunjukkan ketimpangan serius. Rasio guru PNS terhadap siswa sangat timpang pada jenjang SMK (1:133 siswa) dan SD (1:52), mengindikasikan ketergantungan tinggi pada guru non-PNS/honorer.

Selain itu, 57% guru belum memiliki sertifikasi profesional. Ketimpangan ini paling terasa di wilayah kepulauan seperti Bawean, Sangkapura, dan Tambak, yang mengalami kekurangan guru PNS dan akses pelatihan terbatas.

b) Arah Strategis

(1) Rekrutmen afirmatif dengan prioritas pada wilayah kekurangan guru (SMK, SD, kepulauan).

(2) Redistribusi tenaga guru PNS secara proporsional antar kecamatan dan jenjang pendidikan.

(3) Pelatihan kompetensi pedagogik, digital, dan kepemimpinan kelas secara sistematis dan berkelanjutan.

(4) Skema insentif daerah khusus untuk menarik dan mempertahankan guru berkualitas di kepulauan.

(5) Penguatan mekanisme monitoring kinerja guru untuk memastikan pemerataan mutu.

c) **Tahapan Implementasi**

Tabel 5.3 Tahap Impelementasi Rekruitmen, Redistribusi dan Pelatihan Guru

Tahap (Tahun)	Fokus	Aksi Strategis	Indikator
2025–2026	Penguatan dasar SDM	Rekrutmen afirmatif, redistribusi guru PNS, pelatihan dasar	Rasio guru membaik, peningkatan guru bersertifikat
2027–2028	Pemerataan kompetensi	Pelatihan pedagogik & digital lanjutan, distribusi ke kepulauan	Pemerataan distribusi guru meningkat
2028–2029	Konsolidasi	Integrasi pelatihan & evaluasi berbasis kinerja	Mutu pembelajaran meningkat merata

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas

a) Analisis Masalah Kritis (Baseline 2024)

Kualitas kepemimpinan kepala sekolah dan efektivitas pengawasan pendidikan menjadi faktor penting dalam peningkatan mutu layanan pendidikan. Di Kabupaten Gresik, masih terdapat kesenjangan kapasitas kepemimpinan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pinggiran, terutama di kepulauan Bawean. Banyak satuan pendidikan di wilayah tersebut belum mendapatkan pengawasan dan pembinaan optimal, sehingga mutu manajemen sekolah dan pembelajaran belum merata.

Selain itu, sebagian kepala sekolah dan pengawas belum mengikuti pelatihan manajerial berjenjang dan sertifikasi kompetensi, sehingga pengambilan keputusan strategis di tingkat satuan pendidikan belum sepenuhnya berbasis kinerja dan data. Kondisi ini belum sejalan dengan arah transformasi tata kelola pendidikan yang adaptif dan berkualitas dalam misi pembangunan daerah.

b) Arah Strategis

(1) Pelatihan kepemimpinan dan manajerial berjenjang dan tersertifikasi bagi kepala sekolah dan pengawas.

(2) Penguatan supervisi berbasis kinerja dan mutu pembelajaran.

(3) Penugasan pengawas secara afirmatif ke wilayah kepulauan untuk pemerataan pembinaan mutu.

(4) Penguatan peran kepala sekolah sebagai *instructional leader*, bukan sekadar administrator.

(5) Sistem monitoring dan evaluasi kompetensi kepala sekolah dan pengawas secara terintegrasi.

c) Tahap Implementasi

Tabel 5.4 Tahap Implementasi Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas

Tahap (Tahun)	Fokus	Aksi Strategis	Indikator
2025–2026	Penguatan dasar kepemimpinan	Pelatihan manajerial dasar & sertifikasi tahap awal	Jumlah kepala sekolah & pengawas tersertifikasi meningkat
2027–2028	Penguatan sistem supervisi	Supervisi berbasis kinerja, penugasan pengawas afirmatif	Pembinaan mutu menjangkau wilayah pinggiran & kepulauan
2028–2029	Konsolidasi & integrasi	Penguatan peran *instructional leader*, M&E terintegrasi	Manajemen sekolah & mutu pembelajaran meningkat merata

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

C. Peta Jalan Penguatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran

1. Implementasi Kurikulum Nasional

a) Analisis Masalah Kritis (Baseline 2024)

Implementasi Kurikulum Nasional di Kabupaten Gresik belum merata sepenuhnya. Sebagian satuan pendidikan, terutama di jenjang SD dan wilayah kepulauan (Sangkapura dan Tambak), masih menghadapi kendala dalam penerapan pembelajaran mendalam (deep learning) dan asesmen formatif.

Akses infrastruktur pendukung pembelajaran, seperti TIK dan pelatihan kurikulum, masih timpang. Hal ini berdampak pada ketidakkonsistenan kualitas proses belajar mengajar antar wilayah. Selain itu, kapasitas sebagian guru dalam mengimplementasikan

kurikulum masih terbatas, terutama di PAUD dan SD, yang seharusnya menjadi fondasi literasi dan numerasi anak. Kondisi ini perlu dijawab dengan langkah strategis untuk memastikan kurikulum nasional benar-benar berjalan efektif di semua satuan pendidikan, bukan hanya sekolah kota.

b) Arah Strategis

(1) Pendampingan dan pelatihan intensif bagi guru dalam implementasi Kurikulum Nasional di semua jenjang, terutama PAUD–SD.

(2) Penguatan pembelajaran mendalam , asesmen formatif, dan kontekstualisasi pembelajaran sesuai karakteristik lokal.

(3) Integrasi kurikulum nasional dengan penguatan literasi dan numerasi dasar.

(4) Penguatan peran pengawas dan kepala sekolah dalam memastikan keberlangsungan implementasi kurikulum.

(5) Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum secara berkala dan terukur.

(6) Penguatan program literasi dan numerasi berbasis PKBM untuk menjangkau warga belajar putus sekolah dan masyarakat dewasa.

(7) Peningkatan kapasitas SLB dan sekolah inklusif dalam mendukung pembelajaran mendalam yang berdiferensiasi untuk ABK.

(8) Penguatan sinergi antara satuan pendidikan formal, SLB, dan PKBM dalam penuntasan wajib belajar 13 tahun.

c) Tahap Implementasi

Tabel 5.5 Tahap Implementas Kurikulum Nasional

Tahap (Tahun)	Fokus	Aksi Strategis	Indikator
2025–2026	Penerapan dasar kurikulum	Pelatihan dan pendampingan guru untuk Kurikulum Nasional	Jumlah sekolah pelaksana kurikulum meningkat
2027–2028	Penguatan praktik pembelajaran	Penerapan pembelajaran mendalam (deep learning) dan asesmen formatif	Kualitas proses belajar meningkat

Tahap (Tahun)	Fokus	Aksi Strategis	Indikator
2028–2029	Konsolidasi dan monitoring	Integrasi literasi–numerasi dan M&E kurikulum	Capaian mutu pembelajaran lebih merata

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

2. Digitalisasi Pendidikan dan Pembelajaran Berbasis TIK

a) Analisis Masalah Kritis (Baseline 2024)

Transformasi digital pendidikan di Kabupaten Gresik belum merata. Berdasarkan data, sekitar 27% PAUD dan SD belum memiliki akses internet stabil, terutama di wilayah kepulauan dan pinggiran. Ketimpangan ini menyebabkan kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran antara sekolah kota dan sekolah desa/kepulauan.

Sebagian besar satuan pendidikan juga belum optimal dalam integrasi TIK ke dalam proses belajar mengajar. Guru masih cenderung menggunakan metode konvensional karena keterbatasan pelatihan TIK dan minimnya perangkat digital. Padahal, digitalisasi pembelajaran merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi, daya jangkau, dan kualitas layanan pendidikan, serta mendukung misi transformasi pendidikan Gresik.

b) Arah Strategis

- ✓ Perluasan akses jaringan internet ke seluruh satuan pendidikan, dengan prioritas PAUD dan SD di kepulauan.
- ✓ Penyediaan perangkat TIK dasar bagi sekolah untuk mendukung pembelajaran digital.
- ✓ Pelatihan intensif bagi guru untuk meningkatkan literasi TIK dan kemampuan integrasi teknologi dalam pembelajaran.
- ✓ Pengembangan platform pembelajaran digital lokal yang mendukung kurikulum nasional dan kontekstual daerah.
- ✓ Kolaborasi dengan sektor swasta dan penyedia layanan telekomunikasi untuk mempercepat perluasan infrastruktur digital pendidikan.

c) Tahap Implementasi

Tabel 5.6 Tahap Implemetasi Digitalisasi Pembelajaran Berbasis TIK

Tahap (Tahun)	Fokus	Aksi Strategis	Indikator
2025–2026	Perluasan infrastruktur digital	Perluasan jaringan internet, penyediaan perangkat dasar TIK	Persentase sekolah yang terhubung internet meningkat
2027–2028	Penguatan literasi TIK	Pelatihan guru, integrasi TIK dalam pembelajaran	Jumlah guru kompeten TIK meningkat
2028–2029	Konsolidasi digitalisasi	Pengembangan platform digital lokal & kolaborasi	Pembelajaran digital berjalan merata

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

3. Penguatan Literasi, Numerasi dan Karakter

a) Analisis Masalah Kritis

Hasil analisis kondisi pendidikan Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa pondasi literasi dan numerasi di jenjang dasar masih lemah. Hal ini tercermin dari angka putus sekolah tertinggi yang terjadi di SD (106 anak tahun 2023) serta ketimpangan capaian belajar antara sekolah pusat kota dan kepulauan.

Selain itu, pendidikan karakter di satuan pendidikan masih belum optimal karena kegiatan pembiasaan dan program penguatan profil pelajar Pancasila belum dijalankan secara konsisten di semua sekolah. Lemahnya pondasi literasi, numerasi, dan karakter berdampak langsung terhadap capaian pembelajaran di jenjang menengah dan menurunnya APM SMA/SMK (dari 78,07% ke 74,89%).

b) Arah Strategis

- ✓ Penguatan literasi dan numerasi sejak PAUD dan SD melalui pendekatan pembelajaran kontekstual dan menyenangkan.
- ✓ Pengembangan *program community learning hub* untuk mendukung anak-anak berisiko putus sekolah.
- ✓ Integrasi penguatan karakter dengan profil pelajar Pancasila di seluruh jenjang pendidikan.

- ✓ Pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam strategi pembelajaran literasi–numerasi dan pembiasaan karakter.
- ✓ Monitoring dan evaluasi capaian literasi dan numerasi secara periodik untuk memastikan peningkatan berkelanjutan.

c) Tahap Implementasi

Tabel 5.7 Tahap Implementasi Penguatan Literasi, Numerasi dan Karakter

Tahap (Tahun)	Fokus	Aksi Strategis	Indikator
2025–2026	Penguatan pondasi literasi-numerasi	Program literasi PAUD–SD, pelatihan guru, *community learning hub*	Capaian literasi-numerasi dasar meningkat
2027–2028	Integrasi karakter	Implementasi profil pelajar Pancasila, program pembiasaan	Penguatan karakter di satuan pendidikan meningkat
2028–2029	Konsolidasi capaian	Evaluasi capaian literasi-numerasi dan karakter, replikasi model baik	APK/APM meningkat, ketimpangan capaian menurun

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

4. Penguatan Peran Pesantren dalam Pendidikan Karakter dan Kemandirian Santri

a) Analisis Masalah Kritis

Pesantren di Kabupaten Gresik memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan moralitas peserta didik, sejalan dengan visi pendidikan daerah yang berakhlakul karimah. Namun, sebagian besar pesantren belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pembangunan pendidikan daerah. Tantangan utama meliputi keterbatasan akses digital, infrastruktur pembelajaran, serta minimnya program kolaboratif dengan sekolah formal dan dunia industri.

b) **Arah Strategis**

- ✓ Penguatan sinergi antara pesantren, sekolah formal, dan perguruan tinggi untuk pengembangan program pendidikan karakter dan kewirausahaan santri.

- ✓ Peningkatan kapasitas literasi digital dan manajerial bagi pengelola pesantren.
- ✓ Integrasi nilai-nilai pendidikan pesantren ke dalam pembelajaran profil pelajar Pancasila di sekolah-sekolah.
- ✓ Pemberdayaan santri melalui program vokasi berbasis kemandirian ekonomi dan teknologi tepat guna.
- ✓ Fasilitasi sarana dan prasarana dasar untuk pesantren kecil di wilayah perdesaan dan kepulauan.

c) Tahap Implementasi

Tabel 5.8 Tahap Impelemnetasi Penguatan Peran Pesantren dalam Pendidikan Karakter dan Kemandirian Santri

Tahap (Tahun)	Fokus	Aksi Strategis	Indikator
2025–2026	Pemetaan dan pembinaan awal	Pemetaan pesantren, pelatihan digital dan manajerial	Data basis pesantren terintegrasi
2027–2028	Penguatan kapasitas dan sinergi	Kemitraan pesantren–sekolah–industri, pelatihan vokasi santri	Model kolaborasi pesantren terbentuk
2028–2029	Konsolidasi program dan kemandirian	Replikasi model pesantren mandiri dan inklusif	Pesantren berdaya saing dan berkontribusi pada SDM daerah

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

D. Peta Jalan Tata Kelola dan Pembiayaan Pendidikan

1. Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah

a) Analisis Masalah Kritis (Baseline 2024)

Tata kelola satuan pendidikan di Kabupaten Gresik masih menunjukkan ketimpangan kapasitas manajerial antar wilayah. Banyak sekolah, terutama di wilayah pinggiran dan kepulauan, masih bergantung pada instruksi dinas dan belum memiliki keleluasaan serta kompetensi kuat dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui komite sekolah masih bersifat administratif, belum optimal dalam perencanaan dan pengawasan program sekolah. Sistem perencanaan dan pelaporan keuangan sekolah juga belum sepenuhnya transparan dan terintegrasi,

sehingga efektivitas dan akuntabilitas anggaran belum maksimal. Hal ini tidak sepenuhnya sejalan dengan misi daerah dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, partisipatif, dan adaptif.

b) Arah Strategis

- ✓ Penguatan kapasitas kepala sekolah dan tim manajemen sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program berbasis data.
- ✓ Optimalisasi peran komite sekolah sebagai mitra strategis dalam perencanaan dan pengawasan.
- ✓ Implementasi sistem perencanaan dan pelaporan keuangan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- ✓ Pendampingan dan pelatihan MBS secara berjenjang, terutama untuk sekolah wilayah pinggiran dan kepulauan.
- ✓ Integrasi MBS dengan evaluasi mutu pendidikan untuk mendorong kinerja sekolah.
- ✓ Prioritas alokasi BOSDA dan BOP untuk penguatan layanan pendidikan inklusif (SLB) dan kesetaraan (PKBM).
- ✓ Pemberian insentif dan dukungan operasional bagi PKBM di wilayah perdesaan dan kepulauan.
- ✓ Penguatan mekanisme pembiayaan berkeadilan untuk memperluas akses ABK dan warga belajar dewasa.

c) Tahap Implementasi

Tabel 5.9 Tahap Implementasi Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah

Tahap (Tahun)	Fokus	Aksi Strategis	Indikator
2025–2026	Penguatan dasar MBS	Pelatihan manajemen sekolah, pendampingan awal	Jumlah sekolah dengan perencanaan mandiri meningkat
2027–2028	Penguatan sistem tata kelola	Optimalisasi peran komite sekolah, digitalisasi perencanaan	Transparansi dan akuntabilitas meningkat

Tahap (Tahun)	Fokus	Aksi Strategis	Indikator
2028–2029	Konsolidasi & integrasi	Integrasi MBS dengan sistem evaluasi mutu pendidikan	Kinerja tata kelola sekolah meningkat merata

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

2. Optimalisasi Anggaran Pendidikan dan Efisiensi Penggunaan Dana

a) Analisis Strategis (Baseline 2024)

Pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Gresik masih menghadapi sejumlah tantangan strategis. Sebagian besar anggaran masih terserap untuk belanja pegawai dan operasional rutin, sementara porsi untuk pengembangan mutu, digitalisasi, dan sarana prasarana masih terbatas. Di sisi lain, efektivitas pemanfaatan dana BOS dan DAK di tingkat satuan pendidikan belum optimal, terutama karena kemampuan perencanaan keuangan sekolah yang belum merata.

Kesenjangan antarwilayah juga terlihat dari akses terhadap sumber pendanaan tambahan, di mana sekolah di wilayah perkotaan lebih mudah membangun kolaborasi kemitraan dibanding sekolah di kepulauan dan pinggiran. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan.

Pengelolaan Dana BOSDA di Kabupaten Gresik hingga tahun 2024 masih menggunakan formula konvensional yang sederhana: jumlah peserta didik dikalikan besaran satuan biaya, ditambah biaya seragam untuk kelas awal. Sistem ini unggul dari sisi transparansi administratif, tetapi lemah dalam keadilan dan efisiensi fiskal. Ketimpangan muncul karena formula belum mempertimbangkan variasi beban layanan antar sekolah misalnya perbedaan jumlah siswa per rombel, kondisi sosial ekonomi wilayah, dan karakteristik geografis.

Sekolah dengan jumlah rombel tinggi tetapi siswa sedikit justru mendapat alokasi lebih besar dibanding sekolah padat siswa dengan rombel terbatas. Akibatnya, dana tidak mencerminkan kebutuhan operasional riil dan menimbulkan distorsi fiskal: sebagian sekolah kekurangan dana, sebagian lainnya berlebih relatif terhadap

kebutuhan. Keterbatasan sistem juga tampak dari ketergantungan pada data struktural, belum pada data fungsional seperti *school expenditure* dan *funding gap.* Sementara itu, kualitas perencanaan keuangan sekolah belum merata, dan integrasi data BOSDA–GRESIK PD SERU masih parsial. Kondisi fiskal daerah yang restriktif menambah tantangan dalam memperbaiki formula berbasis kebutuhan.

Karena itu, dibutuhkan Model BOSDA Hybrid merupakan pendekatan baru yang mengombinasikan komponen *fixed*, *need-based*, dan *performance-based grant,* agar alokasi dana lebih adaptif terhadap kebutuhan, berbasis data, serta memberi insentif atas kinerja dan efisiensi sekolah.

b) Arah Strategis

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) merupakan salah satu instrumen pembiayaan pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mendukung operasional satuan pendidikan. Selama ini, pola pembagian BOSDA umumnya didasarkan pada jumlah rombongan belajar (rombel) atau jumlah peserta didik, yang memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan, Pemerintah Kabupaten Gresik mengadopsi model BOSDA hybrid, yaitu kombinasi antara basis rombel dan basis siswa yang disesuaikan dengan kinerja sekolah, konteks wilayah, serta kapasitas fiskal daerah.

Model BOSDA Hybrid menggabungkan dua pendekatan pendanaan utama, yakni berbasis rombel dan berbasis siswa, dengan tambahan komponen kinerja dan wilayah. Pendekatan ini memastikan keseimbangan antara pemerataan dasar, efisiensi penggunaan anggaran, serta pemberian insentif berbasis hasil. Berikut adalah komponen alokasi, basis Perhitungan dan tujuan utama dari BOSDA hybrid.

Tabel 5.10 Komponen alokasi, basis Perhitungan dan tujuan utama BOSDA hybrid.

Komponen BOSDA	Basis Perhitungan	Tujuan Utama	Keterangan Tambahan
Komponen Dasar *(Base Grant)*	Jumlah Rombel × Nilai Dasar	Menjamin biaya tetap minimum per sekolah	Semua sekolah mendapat bagian dasar sesuai jumlah rombel
Komponen Variabel *(Variable Grant)*	Jumlah Siswa × Tarif per Siswa	Menyesuaikan dengan beban belajar aktual	Proporsional terhadap jumlah peserta didik
Komponen Korektif Wilayah *(Regional Adjustment)*	Faktor Wilayah × Koefisien Terpencil	Meningkatkan keadilan spasial	Sekolah di daerah kepulauan atau sulit akses mendapat tambahan
Komponen Kinerja *(Performance Bonus)*	Nilai Kinerja (A/B/C) × Persentase Bonus	Mendorong peningkatan mutu dan tata kelola	Bonus 2–10% berdasarkan hasil evaluasi BOSDA
Komponen Perlindungan *(Safety Net)*	Minimum Alokasi Sekolah Kecil	Menjamin keberlangsungan sekolah dengan siswa <120	Menjaga pemerataan antar wilayah

Formula untuk komponen BOSDA seperti yang dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

$$\text{BOSDA Total} = (\text{Rombel} \times TarifDasar) + (\text{Siswa} \times TarifVariabel) + \text{Penyesuaian Wilayah} + \text{Bonus Kinerja}$$

Kebijakan BOSDA Hybrid mendukung strategi pembangunan pendidikan Gresik yang menekankan pemerataan layanan, efisiensi fiskal, dan peningkatan kinerja sekolah. Dengan integrasi sistem digital, pengawasan *real-time*, dan evaluasi kinerja tahunan, alokasi BOSDA akan semakin adaptif terhadap perubahan kebutuhan satuan pendidikan.

Selain itu beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai arah strategis adalah:

- ✓ Meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan anggaran pendidikan di tingkat dinas maupun sekolah.
- ✓ Mendorong alokasi dana untuk program prioritas: peningkatan SDM, digitalisasi, rehabilitasi sarpras, dan penguatan mutu.
- ✓ Menerapkan sistem perencanaan dan pelaporan keuangan berbasis digital untuk efisiensi dan transparansi.

- ✓ Pemanfaatan dengan maksimal BOSDA sebagai alternatif menutup anggaran belanja kebutuhan sekolah yang tidak tercover oleh BOR Reguler atau telah dianggarkan dalam BOS Reguler namun tidak tercukupi (Peraturan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Dana BOSDA Kabupaten Gresik 2025).
- ✓ Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan penerapan prinsip no double funding, dengan cara menyesuaikan alokasi BOSDA berdasarkan kemampuan pendanaan mandiri sekolah (termasuk iuran peserta didik/SPP), agar BOSDA lebih tepat sasaran kepada sekolah dengan daya dukung keuangan rendah. Penerapan prinsip ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah atau pedoman teknis BOSDA.
- ✓ Pemanfaatan dengan maksimal bagi sekolah penerima BOP (TK dan Lembaga Pendidikan Non-formal). Untuk TK dapat digunakan sebagai pembiayaan operasional kegiatan dan 50% untuk pembayaran guru. Sementara untuk Lembaga non-formal 80% digunakan untuk honorarium guru.
- ✓ Mengembangkan kemitraan publik-swasta (CSR) untuk mendukung pembiayaan pendidikan non-rutin.
- ✓ Penguatan kapasitas manajemen keuangan kepala sekolah dan bendahara satuan pendidikan.

c) Tahap Implementasi

Tabel 5.11 Tahap Implementasi Optimalisasi Anggaran Pendidikan dan Efisiensi Penggunaan Dana

Tahap (Tahun)	Fokus Utama	Aksi Strategis	Indikator Keberhasilan
2025–2026	Desain Formula Hybrid & Validasi Data	• Penyusunan formula BOSDA Hybrid dengan lima komponen • Uji coba di sekolah dengan karakteristik beragam (urban, rural, kepulauan) • Integrasi sistem BOSDA–GRESIK PD SERU dan verifikasi lapangan.	• Formula BOSDA Hybrid disahkan melalui Peraturan Kepala Daerah. • Akurasi data sekolah ≥95%.

2027–2028	Implementasi Bertahap & Penyesuaian Adaptif	• Penerapan BOSDA Hybrid di seluruh jenjang SD dan SMP. • Penyesuaian bobot formula berdasarkan hasil uji coba. • Penguatan pelatihan keuangan sekolah dan pelaporan digital.	• 100% sekolah melaporkan BOSDA melalui sistem digital. • Efisiensi alokasi meningkat ≥20%.
2028–2029	Konsolidasi, Evaluasi Dampak, & Replikasi Lanjutan	• Evaluasi keefektifitasan BOSDA Hybrid berbasis *funding gap* dan *performance outcomes.* • Penyesuaian formula untuk PAUD dan Nonformal. • Penyusunan *policy brief* replikasi tingkat provinsi.	• Efisiensi fiskal meningkat ≥15%. • Disparitas antarwilayah berkurang signifikan. • Laporan evaluasi tahunan BOSDA Hybrid dipublikasikan.

Sumber: Diolah peneliti (2025)

BAB VI

RENCANA IMPLEMENTASI DAN MONITORING EVALUASI

A. Rencana Kerja Bertahap

1. Fokus 1: Pemerataan SDM Pendidikan dan Penguatan Infrastruktur Digital

Tabel 6.1 Rencana Kerja Bertahap Fokus 1

Tahap	Periode Waktu	Fokus Prioritas	Kegiatan Utama	Output / Capaian Antara	Penanggung Jawab Utama
Tahap I – Konsolidasi Data dan Fondasi Kebijakan	2025–2026	Pemerataan SDM dan Digitalisasi Pembelajaran	1. Integrasi data EMIS–Dapodik–SIMPEG untuk peta kebutuhan guru. 2. Audit kualifikasi guru dan tenaga kependidikan. 3. Penyusunan kebijakan redistribusi dan insentif berbasis lokasi. 4. Pilot konektivitas digital PAUD–SD di 5 kecamatan prioritas. 5. Sinkronisasi pendanaan antar-SKPD.	- Peta kebutuhan SDM per kecamatan. - Kebijakan redistribusi siap diterapkan. - 5 sekolah percontohan digital aktif.	Dinas Pendidikan; Bappeda; Dinas Kominfo; BKD; Camat; Kepala Sekolah
Tahap II – Implementasi dan Penguatan Kapasitas	2027–2028	Peningkatan Kompetensi dan Ekspansi Digitalisasi	1. Pelaksanaan redistribusi guru. 2. Pelatihan 'Gresik Digital Educator'. 3. Penguatan kepala sekolah sebagai Disgital Leader.	- 60% guru tersertifikasi digital educator. - Semua kecamatan memiliki sekolah digital.	Dinas Pendidikan; Dinas Kominfo; LPMP; Camat; Perguruan Tinggi

			4. Ekspansi infrastruktur digital ke semua kecamatan.	- 70% redistribusi selesai.	
Tahap III – Konsolidasi dan Keberlanjutan	2029	Pelembagaan dan Evaluasi Dampak	1. Penetapan Perbup Tata Kelola SDM & Transformasi Digital. 2. Pembentukan Pusat Inovasi Pendidikan Daerah (PIPD-Gresik). 3. Evaluasi dampak redistribusi & digitalisasi.	- Perbup disahkan. - PIPD-Gresik beroperasi. - Indeks digital sekolah meningkat ≥40%.	Dinas Pendidikan; Bappeda; Perguruan Tinggi; Dunia Usaha

Sumber:Diolah Peneliti (2025)

2. Fokus 2: Pemerataan dan Peningkatan Akses Pendidikan

Tabel 6.2 Rencana Kerja Bertahap Fokus 2

Tahap	Periode Waktu	Fokus Prioritas	Kegiatan Utama	Output / Capaian Antara	Penanggung Jawab Utama
Tahap I – Pemetaan Akses dan Partisipasi	2025–2026	Pemerataan dan Peningkatan Akses Pendidikan	1. Pemetaan wilayah APM rendah dan rawan putus sekolah. 2. Penguatan sistem data partisipasi. 3. Sosialisasi wajib belajar 12 tahun.	- Data partisipasi lengkap per kecamatan. - Terpetakan wilayah prioritas intervensi.	Dinas Pendidikan; Camat; Kepala Sekolah; Komite Sekolah
Tahap II – Implementasi Program Afirmasi	2027–2028	Akses Pendidikan Merata	1. Ekspansi program PAUD Holistik Integratif dan BOS Afirmasi. 2. Bantuan transportasi dan beasiswa daerah. 3. Rehabilitasi ruang belajar di wilayah defisit.	- APM SMP ≥95%. - Infrastruktur sekolah meningkat. - Partisipasi PAUD naik signifikan.	Dinas Pendidikan; Bappeda; DPRD; Komite Sekolah

Tahap III – Konsolidasi Sistem Pencegahan Putus Sekolah	2029	Sistem EWRS Terintegrasi	1. Implementasi sistem Early Warning and Response (EWRS). 2. Sinergi lintas jenjang PAUD–SMA. 3. Evaluasi efektivitas kebijakan afirmatif.	- EWRS berjalan di seluruh kecamatan. - Putus sekolah menurun ≥50%.	Dinas Pendidikan; Camat; Komite Sekolah; Perguruan Tinggi

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

3. Fokus 3: Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

Tabel 6.3 Rencana Kerja Bertahap Fokus 3

Tahap	Periode Waktu	Fokus Prioritas	Kegiatan Utama	Output / Capaian Antara	Penanggung Jawab Utama
Tahap I – Penguatan Dasar Mutu	2025–2026	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan	1. Pelatihan literasi-numerasi bagi guru. 2. Penerapan AKMI dan ANBK daerah. 3. Pendampingan sekolah literasi.	- Peningkatan skor literasi awal. - Guru terlatih AKMI.	Dinas Pendidikan; LPMP; Perguruan Tinggi
Tahap II – Pengembangan Kurikulum Kontekstual	2027–2028	Kurikulum dan Link-and-Match	1. Pengembangan kurikulum berbasis potensi lokal. 2. Teaching Factory 4.0 di SMK. 3. Magang siswa SMK di industri mitra. 4. Kolaborasi antara sekolah formal dan pondok pesantren untuk penguatan pendidikan karakter dan kewirausahaan santri.	- 70% SMK bermitra industri. - Lulusan SMK terserap ≥80%.	Disdik; Dunia Usaha; Asosiasi Industri; Kepala SMK

Tahap	Periode Waktu	Fokus Prioritas	Kegiatan Utama	Output / Capaian Antara	Penanggung Jawab Utama
			5. Integrasi program literasi, numerasi, dan vokasi dasar ke dalam kegiatan pembelajaran santri melalui kemitraan dengan SMK dan PKBM. 6. Fasilitasi pelatihan literasi digital dan manajerial bagi pengelola pesantren kecil di wilayah perdesaan dan kepulauan		
Tahap III – Evaluasi Mutu dan Relevansi	2029	Akreditasi dan Tracer Study	1. Implementasi akreditasi berbasis mutu daerah. 2. Tracer Study lulusan SMK. 3. Rekomendasi kebijakan mutu baru.	- Laporan mutu dan relevansi pendidikan daerah.	Dinas Pendidikan; Bappeda; Perguruan Tinggi Mitra

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

4. Fokus 4: Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Pendidikan Daerah

Tabel 6.4 Rencana Kerja Bertahap Fokus 4

Tahap	Periode Waktu	Fokus Prioritas	Kegiatan Utama	Output / Capaian Antara	Penanggung Jawab Utama
Tahap I – Integrasi Sistem Data	2025–2026	Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Pendidikan Daerah	1. Pembangunan Dashboard Pendidikan Gresik. 2. Integrasi EMIS–Dapodik–SIMPEG. 3. Pelatihan operator sekolah.	- Dashboard SP2-Gresik berfungsi. - Data lintas jenjang sinkron.	Dinas Pendidikan; Bappeda; Kominfo; BKD

Tahap	Periode Waktu	Fokus Prioritas	Kegiatan Utama	Output / Capaian Antara	Penanggung Jawab Utama
Tahap II – Penerapan e-Manajemen	2027–2028	Transparansi dan Akuntabilitas	1. Implementasi e-Manajemen BOS dan e-Monev Sekolah. 2. Pelaporan berbasis kinerja. 3. Audit digital pendidikan.	- 100% sekolah gunakan sistem e-manajemen.	Dinas Pendidikan; Inspektorat; Kominfo
Tahap III – Evaluasi dan Regulasi Tata Kelola	2029	Konsolidasi Regulasi	1. Evaluasi kebijakan tata kelola pendidikan. 2. Penetapan regulasi transparansi anggaran pendidikan.	- Regulasi tata kelola permanen.	Dinas Pendidikan; Bappeda; DPRD; Perguruan Tinggi

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

5. Fokus 5: Penguatan Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat

Tabel 6.5 Rencana Kerja Bertahap Fokus 5

Tahap	Periode Waktu	Fokus Prioritas	Kegiatan Utama	Output / Capaian Antara	Penanggung Jawab Utama
Tahap I – Pembentukan Forum dan Pemetaan CSR	2025–2026	Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat	1. Pembentukan Forum Pendidikan Gresik Berkolaborasi (FPGB). 2. Pemetaan potensi CSR dan dukungan industri. 3. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah.	- FPGB terbentuk. - Peta potensi CSR tersedia.	Dinas Pendidikan; Dunia Usaha; Komite Sekolah; Camat
Tahap II – Implementasi Sekolah Mitra	2027–2028	Sekolah Mitra Industri dan Masyarakat	1. Program Sekolah Mitra Industri di 5 kecamatan pilot. 2. Pelatihan kewirausahaan dan magang siswa. 3. Sekolah berbasis	- 10 Sekolah Mitra aktif. - Program CSR berjalan.	Dinas Pendidikan; Dunia Usaha; Komite Sekolah

Tahap	Periode Waktu	Fokus Prioritas	Kegiatan Utama	Output / Capaian Antara	Penanggung Jawab Utama
			masyarakat (Community School).		
Tahap III – Pelembagaan Kemitraan	2029	Perbup Kolaborasi Pendidikan	1. Penetapan Perbup Kolaborasi Pendidikan Berkelanjutan. 2. Evaluasi kontribusi CSR. 3. Replikasi praktik baik.	- Perbup disahkan. - Kontribusi CSR meningkat ≥20%.	Bappeda; Dinas Pendidikan; Dunia Usaha; DPRD

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

B. Indikator Kinerja (IKU) & Target Tahunan

Tabel 6.6 Indikator Kinerja (IKU) & Target Utama

Fokus Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029
Fokus 1	Rasio distribusi guru sesuai kebutuhan antar kecamatan	Rasio	1:1.30	1:1.25	1:1.20	1:1.15	1:1.10	1:1.00
	Persentase guru tersertifikasi 'Gresik Digital Educator'	%	0	10	25	45	60	75
	Persentase sekolah terhubung internet stabil	%	45	60	75	85	95	100
	Indeks Kesiapan Digital Sekolah	Indeks (0–100)	35	45	55	65	75	80
Fokus 2	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	74	78	82	86	90	94
	APM SMP	%	89	91	93	95	96	97
	APM SMA	%	79	81	83	85	87	89
	Angka Putus Sekolah (SD–SMA)	%	2.1	1.8	1.5	1.3	1.0	0.8
	Persentase kecamatan dengan sistem EWRS aktif	%	0	20	40	60	80	100

Fokus Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029
Fokus 3	Persentase guru mengikuti pelatihan literasi-numerasi	%	0	25	50	65	80	90
	Rata-rata skor literasi daerah (AKMI)	Skor (0–100)	53	58	63	68	72	76
	SMK bermitra dengan industri aktif	%	35	45	55	65	70	75
	Persentase lulusan SMK terserap di dunia kerja	%	60	65	70	75	80	85
	Sekolah terakreditasi A/B	%	62	65	70	75	80	85
Fokus 4	Sekolah menggunakan sistem e-Manajemen BOS/Monev	%	20	40	60	80	90	100
	Ketersediaan data terintegrasi EMIS–Dapodik–SIMPEG	%	30	60	85	95	100	100
	Pelaporan kinerja sekolah berbasis hasil belajar	%	15	30	50	75	90	100
	Laporan evaluasi kebijakan pendidikan daerah terbit	Laporan	0	1	1	1	1	1
Fokus 5	Jumlah Forum Pendidikan Gresik Berkolaborasi aktif	Forum	0	5	10	15	20	25
	Nilai kontribusi CSR untuk sektor pendidikan	% kenaikan	-	+5	+10	+15	+18	+20
	Jumlah sekolah mitra industri dan masyarakat aktif	Sekolah	0	5	10	15	20	25
	Persentase masyarakat terlibat dalam program sekolah	%	30	40	50	60	70	80

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

C. Strategi Monitoring dan Evaluasi

1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Daerah Kabupaten Gresik dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dirancang dalam Rencana Kerja Bertahap berjalan sesuai arah kebijakan, indikator kinerja, serta target tahunan yang telah ditetapkan.

Tujuan utama pelaksanaan Monev adalah:

a. Menilai konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja bertahap.
b. Mengukur efektivitas capaian indikator kinerja utama (IKU) pendidikan.
c. Mengidentifikasi hambatan implementasi serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan.
d. Menjamin akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan daerah.

2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Monev

Pelaksanaan Monev berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

a. **Berbasis Data dan Bukti:** seluruh proses pemantauan menggunakan data real-time melalui sistem EMIS dan Dapodik yang terintegrasi dalam *Dashboard Pendidikan Gresik (SP2-Gresik)*.
b. **Transparan dan Akuntabel:** hasil Monev disampaikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui laporan tahunan pendidikan.
c. **Partisipatif:** melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Kominfo, BKD, perguruan tinggi, dan masyarakat.
d. **Kontekstual dan Adaptif:** pelaksanaan evaluasi disesuaikan dengan karakteristik geografis dan sosial daerah, termasuk wilayah kepulauan.
e. **Berorientasi Hasil (Outcome-Oriented):** fokus Monev diarahkan pada perubahan kualitas layanan dan hasil belajar, bukan hanya penyerapan anggaran.

3. Mekanisme Pelaksanaan Monev

Monev RIPPD Kabupaten Gresik dilaksanakan secara berjenjang dan terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi tiga tahapan utama:

Tabel 6.7 Mekanisme Pelaksanaan Monev

Tahapan	Periode	Bentuk Kegiatan	Tujuan Utama	Pelaksana Koordinatif
Monitoring Proses	Triwulanan	Pengumpulan dan analisis data pelaksanaan program melalui SP2-Gresik, rapat koordinasi lintas bidang, serta kunjungan lapangan terbatas.	Memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan jadwal.	Dinas Pendidikan, Bappeda
Evaluasi Kinerja Tahunan	Setiap akhir tahun anggaran	Penilaian capaian indikator output dan outcome terhadap target tahunan IKU.	Mengukur efektivitas pelaksanaan dan efisiensi anggaran.	Dinas Pendidikan, Bappeda, Inspektorat
Evaluasi Dampak (Impact Evaluation)	Tahun 2029 (akhir periode)	Kajian mendalam atas hasil akhir RIPPD terhadap mutu, akses, tata kelola, dan kemitraan pendidikan.	Menilai dampak jangka menengah dan rekomendasi RIPPD periode berikutnya.	Pemerintah Kabupaten Gresik bersama perguruan tinggi mitra

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

4. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Untuk menjamin akurasi data dan validitas hasil, Monev menggunakan beberapa instrumen berikut:

a. Dashboard Pendidikan Gresik (SP2-Gresik): platform digital integratif yang menampilkan data SDM, sarana prasarana, APM, mutu, dan digitalisasi sekolah secara real-time.
b. Laporan Kinerja Pendidikan Tahunan: dokumen resmi Dinas Pendidikan yang berisi analisis pencapaian IKU.

c. Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan: dilakukan setiap dua tahun untuk menilai persepsi kualitas layanan pendidikan.
d. Audit Kinerja dan Keuangan Pendidikan: dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan.
e. Evaluasi Akademik (Policy Review): dilaksanakan oleh perguruan tinggi mitra sebagai bentuk evaluasi independen berbasis riset.

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952812, Fax (031) 3952812
Website: http://bappeda.gresik.go.id email: bappeda@gresikkab.go.id
GRESIK

Template Monev IKU - RIPPD Kabupaten Gresik

Identitas Program / IKU

Nama IKU	.....
Kaitan dengan Misi/RPJPD/RIPPD	.....
Penanggung Jawab Utama	.....
Unit Pelaksana Teknis (Jika Ada)	.....

2. Matriks Monitoring dan Evaluasi IKU

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline (Tahun Awal RIPPD)	Target Tahunan	Realisasi per Triwulan / Semester	Persentase Capaian (%)	Sumber Data & Metode Verifikasi	Analisis Capaian & Faktor Penghambat	Langkah Tindak Lanjut / Strategi Percepatan	Penanggung Jawab / PIC
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
				.....					

3. Analisis Umum Kinerja IKU

Tuliskan narasi analisis capaian IKU di sini

4. Rekomendasi Kebijakan dan Tindak Lanjut

Kebijakan / Regulasi	.....
Sinergi Antar OPD	.....
Dukungan Anggaran	.....
Kebutuhan Inovasi / Digitalisasi	.....
Keterlibatan Publik / Stakeholder	.....

5. Catatan Monitoring Lapangan (Opsional)

Tanggal / Periode	Observasi Lapangan / Temuan	Catatan Tindak Lanjut
.....	.....	.....

5. Output dan Tindak Lanjut Hasil Monev

Hasil pelaksanaan Monev dituangkan dalam:

a. Laporan Monitoring Triwulanan yang memuat progres fisik dan keuangan program.
b. Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan sebagai dasar penyusunan RKPD bidang pendidikan tahun berikutnya.
c. Laporan Evaluasi Dampak RIPPD 2029 yang berisi capaian akhir, pembelajaran kebijakan, dan rekomendasi arah kebijakan RIPPD periode selanjutnya.

Tindak lanjut hasil Monev dilakukan melalui:

a. Penyesuaian target dan strategi pelaksanaan pada tahun berikutnya.
b. Revisi kebijakan atau regulasi yang tidak efektif berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi.
c. Penguatan kapasitas aparatur dan lembaga pendidikan berdasarkan temuan evaluasi.
d. Publikasi hasil Monev secara terbuka melalui portal pendidikan daerah.

6. Penjaminan Mutu dan Akuntabilitas

Untuk memastikan obyektivitas hasil Monev, Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan mekanisme penjaminan mutu dengan melibatkan:

a. Tim Koordinasi Monev Pendidikan Daerah, terdiri atas Bappeda, Disdik, Kominfo, BKD, dan Inspektorat.
b. Evaluator Independen dari perguruan tinggi untuk melakukan *peer review* terhadap hasil evaluasi tahunan dan dampak.
c. Pelaporan Berjenjang, di mana hasil Monev dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap semester.

7. Kerangka Waktu Pelaksanaan Monev

Tabel 6.8 Kerangka Waktu Pelaksanaan Monev

Tahun	Fokus Evaluasi	Keluaran (Output Monev)
2025	Validasi baseline IKU dan uji fungsi SP2-Gresik	Laporan baseline & rekomendasi awal

Tahun	Fokus Evaluasi	Keluaran (Output Monev)
2026	Evaluasi tahap awal implementasi rencana kerja	Laporan capaian tahun pertama
2027	Evaluasi tengah periode (midterm review)	Laporan evaluasi menengah dan rekomendasi perbaikan
2028	Evaluasi pra-akhir periode	Laporan capaian hasil utama dan pembelajaran
2029	Evaluasi dampak (impact evaluation)	Laporan akhir RIPPD & rekomendasi arah kebijakan 2030–2034

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

BAB VII
PENUTUP

A. Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Utama

1. Akses dan Partisipasi Pendidikan

Akses pendidikan di Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan positif dalam hal ketersediaan satuan pendidikan di semua jenjang, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK. Jumlah lembaga TK dan SMP mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, menandakan adanya perluasan layanan pendidikan. Namun demikian, perluasan akses ini belum sepenuhnya diikuti oleh stabilitas partisipasi siswa, terutama pada jenjang menengah. Hal ini tercermin dari fluktuasi APK dan APM yang cukup tajam — misalnya APM SMA/SMK yang menurun dari 78,07% pada tahun 2022 menjadi 74,89% pada 2024.

Selain itu, angka putus sekolah mengalami kenaikan, dari 174 siswa pada 2022 menjadi 200 siswa pada 2023, dengan jumlah terbesar berasal dari jenjang SD. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan partisipasi pendidikan tidak hanya terjadi di tingkat menengah, tetapi justru mulai muncul sejak jenjang dasar. Faktor ekonomi keluarga, keterbatasan sarana, dan kurangnya intervensi dini menjadi penyebab utama fenomena ini. Situasi ini diperburuk oleh transisi jenjang yang masih lemah — banyak siswa tidak melanjutkan ke jenjang SMP atau SMA/SMK, terutama di wilayah kepulauan seperti Bawean dan wilayah perdesaan.

Rekomendasi utama untuk menjawab tantangan ini adalah memperkuat intervensi afirmatif bagi anak-anak dari keluarga rentan dan wilayah tertinggal. Pemerintah daerah perlu mengembangkan early warning system untuk mendeteksi dini siswa yang berpotensi putus sekolah, menyediakan transportasi pendidikan dan beasiswa afirmatif, serta memperkuat layanan transisi SD–SMP dan SMP–SMA/SMK. Fokus utama perlu diberikan pada jenjang SD, mengingat tingginya angka putus sekolah terjadi pada fase ini.

2. Pemerataan Akses Wilayah

Meskipun secara umum jumlah lembaga pendidikan di Gresik telah tersebar di berbagai kecamatan, ketimpangan antar wilayah masih sangat mencolok. Kecamatan-kecamatan perkotaan dan industri seperti Gresik dan Driyorejo memiliki akses pendidikan dan infrastruktur yang relatif lebih lengkap dan modern. Sebaliknya, wilayah kepulauan seperti Sangkapura dan Tambak serta beberapa kecamatan di utara masih mengalami keterbatasan fasilitas, tenaga pendidik, dan akses transportasi.

Ketimpangan juga tampak pada distribusi jenis satuan pendidikan. Sekolah vokasi (SMK) lebih banyak terkonsentrasi di wilayah daratan industri, sedangkan di Tambak bahkan belum tersedia SMK sama sekali. Di sisi lain, lembaga madrasah cukup dominan di wilayah religius dan kepulauan, namun akses ke jalur vokasi masih terbatas. Kondisi ini mengakibatkan ketidaksetaraan kesempatan bagi siswa di wilayah terpencil untuk mendapatkan layanan pendidikan yang setara dengan siswa di perkotaan.

Rekomendasi utama adalah mendorong kebijakan afirmatif untuk wilayah kepulauan dan rural, seperti pembangunan SMK vokasi di Tambak, pengembangan community learning hub, dan skema insentif bagi guru PNS atau tenaga kependidikan yang bersedia ditempatkan di daerah 3T. Pemerataan akses wilayah menjadi fondasi penting untuk menjamin keadilan pendidikan dan mengurangi kesenjangan kualitas SDM antarwilayah.

3. Mutu Pendidikan dan Sarana Prasarana

Mutu layanan pendidikan di Kabupaten Gresik belum sepenuhnya selaras dengan perluasan akses. Meskipun partisipasi di jenjang dasar relatif tinggi, mutu pembelajaran masih belum merata dan sangat bergantung pada kondisi sarana dan prasarana sekolah. Data menunjukkan masih banyak ruang kelas dalam kondisi rusak sedang hingga berat, terutama pada jenjang SD dan SMP. Selain itu, kondisi

sanitasi di banyak sekolah belum memenuhi standar — toilet PAUD yang layak hanya 24,65% dan SD 45,12%.

Kesenjangan juga terjadi pada akses teknologi pembelajaran. Hampir seluruh sekolah menengah telah memiliki akses internet, namun di jenjang PAUD sekitar 27% sekolah belum terhubung jaringan. Kondisi ini menghambat penerapan kurikulum dan digitalisasi pembelajaran di jenjang paling dasar. Ketimpangan infrastruktur ini berdampak langsung terhadap kenyamanan belajar, semangat siswa, serta efektivitas proses pembelajaran.

Rekomendasi utama adalah melakukan revitalisasi besar-besaran terhadap sarana dan prasarana dasar pendidikan, terutama pada jenjang SD dan PAUD. Pemerintah perlu memprioritaskan rehabilitasi ruang kelas rusak berat, mempercepat pembangunan toilet dan sarana sanitasi layak, serta memperluas jaringan internet pendidikan hingga ke satuan PAUD dan SD. Intervensi sarpras merupakan prasyarat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan modern.

4. Distribusi, Kualifikasi, dan Profesionalitas Guru

Ketersediaan guru di Kabupaten Gresik secara kuantitas relatif mencukupi, dengan rasio guru terhadap siswa yang cukup ideal. Namun demikian, distribusi dan kualitas guru masih timpang. Rasio guru PNS sangat tidak seimbang — di SD mencapai 1:52 dan di SMK bahkan 1:133. Ketergantungan besar pada guru non-PNS menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas mutu pembelajaran, khususnya di sekolah vokasi dan wilayah terpencil.

Selain itu, tingkat profesionalisme guru juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dari total 16.088 guru, hanya sekitar 43% yang telah tersertifikasi. Sekitar 3.000 guru juga masih memiliki kualifikasi pendidikan di bawah S1, terutama di jenjang PAUD dan SD. Ketimpangan ini tidak hanya berimplikasi pada mutu pengajaran, tetapi juga pada implementasi kurikulum, pembelajaran berbasis teknologi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sistem pendidikan nasional.

Rekomendasi utama adalah melakukan reformasi kebijakan distribusi dan peningkatan kapasitas guru. Pemerintah daerah perlu memperkuat rekrutmen ASN/PPPK untuk wilayah SMK dan kepulauan, mempercepat program sertifikasi guru, serta meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD dan SD ke jenjang S1. Program pelatihan berbasis kompetensi abad 21 dan penguatan keterampilan digital bagi guru juga sangat diperlukan untuk mendukung transformasi pembelajaran.

5. Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat

Salah satu kelemahan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan di Gresik adalah belum optimalnya tata kelola dan kolaborasi lintas sektor. Sistem data pendidikan belum sepenuhnya real-time dan terintegrasi, sehingga intervensi terhadap permasalahan seperti putus sekolah atau ketimpangan guru seringkali bersifat reaktif. Selain itu, peran masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan masih terbatas dan belum terstruktur dengan baik.

Program kemitraan SMK–industri masih bersifat parsial dan belum membentuk ekosistem vokasi yang kuat. Koordinasi lintas OPD (Disdik, Disnaker, Dinsos) juga belum maksimal, padahal persoalan pendidikan sangat terkait dengan aspek sosial dan ekonomi keluarga.

Rekomendasi utama adalah memperkuat sistem tata kelola pendidikan berbasis data dan kolaborasi multipihak. Pemerintah perlu membangun sistem monitoring pendidikan terintegrasi (Dapodik, EMIS, data sosial), memperluas keterlibatan masyarakat dan industri melalui program CSR pendidikan, serta membangun jejaring kemitraan vokasi yang berkelanjutan.

6. Kesiapan Menuju Transformasi Pendidikan 2045

Kabupaten Gresik, sebagai salah satu daerah industri utama di Jawa Timur, membutuhkan SDM yang kompetitif untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Namun saat ini, kesiapan ekosistem pendidikan daerah masih terbatas. Ketimpangan akses digital pada jenjang PAUD dan SD, rendahnya

kompetensi vokasi di SMK, serta belum kuatnya integrasi teknologi dalam pembelajaran menjadi tantangan serius.

Selain itu, penguatan soft skills, literasi digital, dan numerasi di semua jenjang belum berjalan secara sistematis. Dunia industri di Gresik yang berkembang pesat seharusnya menjadi katalisator untuk membangun ekosistem vokasi yang kuat, tetapi kolaborasi tersebut masih belum optimal.

Rekomendasi utama adalah menyusun roadmap transformasi pendidikan daerah yang berorientasi pada vokasi dan digitalisasi. Hal ini mencakup penguatan kurikulum SMK berbasis industri, integrasi teknologi pembelajaran sejak PAUD, dan program literasi digital massif bagi siswa dan guru. Dengan demikian, Gresik dapat menyiapkan SDM yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan ekonomi masa depan.

7. Efektifitas dan Efisiensi Pendanaan Pendidikan melalui Sinergi BOSNAS–BOSDA Hybrid

Kabupaten Gresik menghadapi tantangan dalam mewujudkan pendanaan pendidikan yang adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan riil sekolah. Selama ini, mekanisme Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan operasional satuan pendidikan. Namun, skema nasional tersebut masih bersifat seragam dan belum sepenuhnya mencerminkan keragaman kondisi lokal, seperti perbedaan rasio siswa per rombel, karakteristik geografis, serta daya dukung sosial ekonomi wilayah.

Sementara itu, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Gresik pada dasarnya dimaksudkan untuk melengkapi BOSNAS, tetapi formula alokasinya yang sederhana berbasis jumlah siswa dan rombongan belajar justru menimbulkan ketimpangan antar sekolah. Sekolah besar di wilayah padat penduduk kerap mengalami kekurangan dana operasional, sedangkan sekolah kecil berpotensi menerima alokasi relatif lebih besar dibanding kebutuhan aktualnya. Ketidakseimbangan ini menghambat efisiensi fiskal dan berpotensi memperlebar disparitas mutu pendidikan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi melalui penerapan Model BOSDA Hybrid dengan mengkombinasikan lima komponen. Melalui model ini, BOSDA berperan sebagai instrumen keadilan fiskal daerah yang melengkapi fungsi BOSNAS, bukan sekadar

tambahan administratif. Sinergi ini diharapkan menghasilkan sistem pendanaan pendidikan yang lebih adaptif terhadap kondisi sekolah dan wilayah.

Integrasi sistem data antara GRESIK PD SERU dan Dapodik Nasional menjadi prasyarat utama agar kebijakan pendanaan dapat berbasis bukti (*evidence-based budgeting*). Dengan data yang valid, pemerintah daerah dapat melakukan analisis *funding gap* untuk menentukan prioritas alokasi BOSDA sesuai kebutuhan aktual masing-masing satuan pendidikan. Selain itu, mekanisme pelaporan dan evaluasi digital perlu dikembangkan agar pelaksanaan BOSNAS dan BOSDA dapat dipantau secara transparan, efisien, dan akuntabel.

Rekomendasi utama adalah membangun sinergi BOSNAS–BOSDA Hybrid yang mampu memperkuat pemerataan mutu layanan pendidikan di Gresik melalui tiga langkah strategis. Pertama, menyusun formula BOSDA berbasis kebutuhan riil dan kinerja sekolah untuk menutup kekurangan dari skema BOSNAS. Kedua, mengintegrasikan sistem data, perencanaan, dan evaluasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan pendanaan berbasis bukti. Ketiga, memperkuat kapasitas manajemen keuangan sekolah dan perangkat daerah agar penggunaan dana publik benar-benar berorientasi pada hasil belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, BOSDA *Hybrid* bukan hanya menjadi pelengkap BOSNAS, tetapi berkembang menjadi instrumen strategis daerah dalam mendukung transformasi pembiayaan pendidikan menuju Gresik Emas 2045 dengan sistem yang lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan dalam mempersiapkan sumber daya manusia unggul untuk masa depan.

B. Komitmen Keberlanjutan RIPPD

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Gresik tidak berhenti pada pencapaian target jangka pendek semata, melainkan diarahkan untuk mewujudkan **transformasi pendidikan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan masa depan**. Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen menjadikan sektor pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga seluruh anak di wilayah ini memperoleh kesempatan belajar yang setara, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan **komitmen untuk menyelaraskan arah pembangunan**

pendidikan daerah dengan *Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045* serta RPJPN, dengan menekankan lima prinsip utama:

1. Pendidikan sebagai Hak Dasar dan Layanan Publik yang Merata

   Pemkab Gresik berkomitmen memastikan akses pendidikan yang merata untuk semua anak, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, geografis, atau budaya. Seluruh kebijakan pendidikan daerah akan diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan dasar 12 tahun, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan, anak dari keluarga miskin, serta masyarakat di wilayah kepulauan dan pedesaan.

2. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

   Komitmen pembangunan pendidikan daerah tidak hanya terfokus pada kuantitas satuan pendidikan, tetapi juga pada mutu proses dan hasil belajar. Pemerintah daerah akan terus memperkuat sarana prasarana, memperluas akses digital, meningkatkan kompetensi guru, dan memastikan kurikulum berjalan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dunia kerja. Transformasi mutu pendidikan ini diarahkan agar lulusan sekolah di Gresik memiliki daya saing di tingkat nasional dan global.

3. Penguatan Ekosistem Pendidikan Kolaboratif

   Pemerintah daerah menyadari bahwa keberlanjutan pendidikan tidak dapat dicapai hanya melalui peran pemerintah. Oleh karena itu, Pemkab Gresik berkomitmen membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif, dengan melibatkan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan industri (DUDI), organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat sipil. Kemitraan ini akan diarahkan untuk memperkuat vokasi, digitalisasi pendidikan, peningkatan akses, serta inovasi pembelajaran.

4. Tata Kelola yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Data

   Keberlanjutan RIPPD akan ditopang oleh sistem tata kelola pendidikan yang transparan, responsif, dan berbasis bukti (*evidence-based*). Pemerintah daerah akan memperkuat sistem perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pendidikan melalui integrasi data lintas sektor (Dapodik, EMIS, data sosial ekonomi) sehingga setiap kebijakan dapat ditujukan secara tepat sasaran dan efektif. Mekanisme pelaporan publik dan partisipasi masyarakat akan

diperluas untuk memastikan akuntabilitas dan kontrol sosial terhadap kebijakan pendidikan.

5. Keberlanjutan Kebijakan dan Konsistensi Arah Pembangunan

   RIPPD Kabupaten Gresik akan menjadi dokumen rujukan lintas periode pemerintahan, sehingga arah pembangunan pendidikan tetap konsisten dan berkesinambungan. Setiap rencana program, intervensi, dan investasi pendidikan akan dirancang dengan pendekatan jangka panjang, memastikan keberlanjutan program meski terjadi perubahan kepemimpinan. Prinsip *policy continuity* ini menjadi jaminan bahwa pembangunan pendidikan di Gresik bukan proyek sesaat, melainkan proses berkelanjutan menuju SDM unggul 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Cheng, Y. C., & Tam, W. M. (1997). Multi-models of quality in education. *Quality Assurance in Education*, 5(1), 2231.https://doi.org/10.1108/09684889710156558.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: *Qualitative, Quantitative, and* ***Mixed*** *Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Juran, J. M. (1999). *Juran's Quality Handbook* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Nomor 046/H/KR/2025 tentang *Capaian Pembelajaran pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah*;

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). An expanded sourcebook: Qualitative dataanalysis (2nd ed.). London: Sage Publications.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang *Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik- Bangkalan - Mojokerto Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*;

Peraturan Menteri Pendidikan No 6 Tahun 2019 tentang *Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 Tahun 2022 tentang *Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan*;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang *Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 47 Tahun 2023 tentang *Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang *Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang *Jabatan Fungsional Guru*;

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang *Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*;

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang *Standar Isi pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2025 tentang *Penyesuaian Kurikulum pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah*;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang *Pendidikan Profesi Guru*;

Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 2626 Tahun 2023 tentang *Model Kompetensi Guru*;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Khusus*;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi jawa Timur Tahun 2025-2045 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127)*

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;*

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045*;

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahu 2023 tentang *Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik;*

Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2021 tentang *Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;*

Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2022 tentang *Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif* ;

Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 88 Tahun 2022 tentang *Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Program Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah di Kabupaten Gresik*;

Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2024 tentang *Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah;*

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas PMA No. 94 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan ASN.

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama di Sekolah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2025 tentang Akreditasi dan Mutu Pendidikan Keagamaan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

Sallis, E. (2014). *Total Quality Management in Education* (3rd ed.). London: Routledge.

Scheerens, J. (2000). *Improving School Effectiveness*. Paris: UNESCO, International Institute for Educational Planning (IIEP).
Scheerens, J., & Bosker, R. J. (1997). *The Foundations of Educational Effectiveness*. Oxford: Pergamon.
Sugiyono. (2016). Metode penelitian kombinasi (mixed methods) (Edisi revisi). Bandung: Alfabeta.
Surat Edaran Bupati Gresik Nomor 050/101/437.71/2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
Surat Edaran Bupati Gresik Nomor 050/931/437.71/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *i Sistem Pendidikan Nasional*;
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)*;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 188.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendidikan dan Layanan Keagamaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 150.
UNESCO. (2021). *Education for Sustainable Development* (dokumen kajian/arah kebijakan global yang relevan dengan SDG 4). UNESCO.
UNICEF / Pemerintah Indonesia. (2019). *Roadmap of the SDGs in Indonesia* (ringkasan kebijakan & indikator terkait SDG 4: Quality Education). UNICEF.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Kuantitatif Jumlah Sekolah

Wilayah Kerja	Kecamatan	Jumlah Sekolah					
		PAUD	SD	MI	SMP	SMA	SMK
Kota	Gresik	31	23	10	11	4	6
	Kebomas	48	26	11	7	4	2
	Manyar	40	21	32	10	3	4
Tengah	Duduksampeyan	22	16	22	3	1	1
	Cerme	48	27	19	5	4	4
	Benjeng	38	28	20	6	3	3
	Balongpanggang	33	30	18	6	3	1
Selatan	Menganti	69	39	25	14	4	4
	Kedamean	20	21	16	4	2	2
	Wringinanom	31	30	14	6	1	4
	Driyorejo	65	42	13	12	5	6
Utara	Bungah	22	20	27	11	3	4
	Sidayu	23	16	22	7	3	2
	Dukun	28	22	29	2	4	7
	Ujungpangkah	21	18	24	7	3	4
	Panceng	27	17	27	6	1	3
Bawean	Sangkapura	37	39	30	5	3	4
	Tambak	21	30	17	3	1	1

Lampiran 1. Data Peserta Didik

Tabel Prediksi Jumlah Siswa Kabupaten Gresik 2024-2025 sampai dengan 2028-2029

No.	Tahun	RA	TK	SD	MI	SMP	MTS	SMA	MA	SMK
1.	2019-2020	9752	31018	-	50251	-	22933	-	12062	-
2.	2020-2021	9149	30397	75457	51717	34123	23235	20101	13024	21506
3.	2021-2022	9283	29672	74280	50882	35106	23627	19984	12441	23246
4.	2022-2023	9932	-	73382	51068	34177	23732	20208	12667	21563
5.	2023-2024	10529	33502	73274	50137	34715	23371	20654	12452	22265
6.	2024-2025	10733	33506	74054	50109	35666	23482	21145	12551	23134
7.	2025-2026	10940	34159	73707	50080	36463	23593	21414	12652	23560
8.	2026-2027	11152	34824	73362	50052	36869	23705	21687	12753	23994
9	2027-2028	11368	35502	73019	50023	37237	23817	21963	12855	24435
10	2028-2029	11588	36194	72677	49995	37279	23930	22243	12957	24885

Lampiran 3. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tabel Prediksi Kebutuhan Guru Kabupaten Gresik
2024-2025 sampai dengan 2028-2029

No.	Tahun	RA	TK	SD	MI	SMP	MTS	SMA	MA	SMK
1.	2019-2020	864	2684	-	4076	-	2131	-	986	-
2.	2020-2021	895	2633	4881	4262	2074	2281	1196	1201	1354
3.	2021-2022	865	2391	4697	3849	2006	2311	1223	1246	1469
4.	2022-2023	917	-	4933	4262	2103	2610	1312	1421	1467
5.	2023-2024	951	2540	5001	4076	2155	2735	1318	1473	1535
6.	2024-2025	716	2589	5053	2505	2122	1174	1320	628	1533
7.	2025-2026	729	2277	3685	2504	1823	1180	1071	633	1178
8.	2026-2027	743	2322	3668	2503	1843	1185	1084	638	1200
9	2027-2028	758	2367	3651	2501	1861	1191	1098	643	1222
10	2028-2029	773	2413	3634	2500	1864	1197	1112	648	1244

Tabel Total Data Penyedia Layanan Tenaga Kependidikan

No	Responden	SMP	SMA
1.	Laboran	42	22
2.	Konselor Sekolah	94	43
3.	Perpustakaan	28	37
4.	Tenaga Administrasi Sekolah	170	77
Total		**334**	**179**

Lampiran 4. Hasil Survei

Tabel Rekapitulasi Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Kategori	No	Responden	Jumlah Responden	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)								Total Skor Seluruh Variabel	Rata-rata persentase seluruh variabel
				Aksesibilitas Layanan Pendidikan (AL)		Kualitas Layanan Pendidikan (KL)		Kualitas Sarana dan Prasarana (KSP)		Keadilan dan Inklusivitas (KI)			
				Jumlah Skor AL	Persentase Skor AL	Jumlah Skor KL	Persentase Skor KL	Jumlah Skor KSP	Persentase Skor KSP	Jumlah Skor KI	Persentase Skor KI		
Penyedia Layanan	1	Pengawas Sekolah	36	756	87,50	3177	88,25	1615	80,11	1161	80,63	6709	84,12
	2	Kepala Sekolah	1246	26406	85,44	109109	87,57	55357	79,34	37078	74,39	227950	81,68
	3	Guru	4632	99971	89,93	418041	90,25	213184	82,19	152954	82,55	884150	86,23
	4	Tenaga Laboran	79	1686	88,92	6975	88,29	3735	84,43	2550	80,70	14946	85,58
	5	Konselor Sekolah	137	2969	90,30	12414	90,61	6738	87,83	4574	83,47	26695	88,05
	6	Tenaga Perpustakaan	102	2215	90,48	9185	90,05	4985	87,27	3295	80,76	19680	87,14
	7	Tenaga Administrasi Sekolah	595	12793	89,59	53062	89,18	28130	84,42	19109	80,29	113094	85,87
Rata-rata penyedia layanan			6827	20970,86	88,88	87423,29	89,17	44820,57	83,65	31531,57	80,40	184746,29	85,53
Penerima Layanan	8	Peserta Didik	4987	103631	86,58	436321	87,49	239030	85,59	168464	84,45	947446	86,03
	9	Masyarakat/Orang Tua	14229	302000	88,43	1268355	89,14	680919	85,45	486613	85,50	2737887	87,13
Rata-rata penerima layanan			**19216**	202815,50	87,51	852338,00	88,32	459974,50	85,52	327538,50	84,97	1842666,50	86,58

Tabel Rekapitulasi Hasil Survei Kebutuhan Pengembangan dan Pelatihan Guru

Sub Variabel	Indikator	Item Pernyataan	Jenjang	Jawaban Responden						Total Jawaban Responden
				Respon Negatif		Total Respon Negatif	Respon Positif		Total Respon Positif	
				Tidak Membutuhkan	Cukup Membutuhkan		Membutuhkan	Sangat Membutuhkan		
Karir Guru	Pengembangan karir guru	Saya sudah memahami kriteria dan syarat kompetensi dan administrasi untuk pengembangan jenjang karier guru dan sertifikasi.	SPS &TPA	2,63	14,91	17,54	54,39	28,07	82,46	100,00
			KB	0,74	2,95	3,69	62,41	33,91	96,31	100,00
			TK/RA	0,08	5,18	5,26	60,02	34,72	94,74	100,00
			SD/MI	0,34	1,79	2,12	39,25	58,63	97,88	100,00
			SMP/MTs	0,21	2,34	2,56	34,93	62,51	97,44	100,00
			SMA/SMK	1,58	3,68	5,26	45,79	48,95	94,74	100,00
		Saya memerlukan pelatihan untuk mempersiapkan diri dalam kenaikan pangkat/golongan.	SPS &TPA	0,00	8,77	8,77	56,14	35,09	91,23	100,0
			KB	2,21	6,39	8,60	43,24	48,16	91,40	100,00

Sub Variabel	Indikator	Item Pernyataan	Jenjang	Jawaban Responden						
				Respon Negatif		Total Respon Negatif	Respon Positif		Total Respon Positif	Total Jawaban Responden
				Tidak Membutuhkan	Cukup Membutuhkan		Membutuhkan	Sangat Membutuhkan		
			TK/RA	2,00	7,43	9,43	53,09	37,48	90,57	100,00
			SD/MI	0,73	3,13	3,85	40,03	56,11	96,15	100,00
			SMP/MTs	0,96	3,09	4,05	37,70	58,25	95,95	100,00
			SMA/SMK	3,16	5,26	8,42	43,16	48,42	91,58	100,00
	Kompetensi guru dalam memahami dan melaksanakan kurikulum serta pembelajaran	Saya membutuhkan pelatihan tentang implementasi kurikulum terbaru	SPS &TPA	0,00	1,75	1,75	43,86	54,39	98,25	100,00
			KB	0,25	2,70	2,95	36,61	60,44	97,05	100,00
			TK/RA	0,33	1,42	1,75	45,74	52,50	98,25	100,00
			SD/MI	0,06	1,23	1,28	1,23	97,49	98,72	100,00
			SMP/MTs	0,21	1,92	2,13	28,75	69,12	97,87	100,00
			SMA/SMK	1,05	2,63	3,68	38,95	57,37	96,32	100,00
		Saya sudah terbiasa menyusun perangkat pembelajaran seperti modul ajar yang kreatif dan sesuai kebutuhan Peserta Didik.	SPS &TPA	0,00	9,65	9,65	58,77	31,58	90,35	100,00
			KB	0,25	7,62	7,86	50,37	41,77	92,14	100,00
			TK/RA	0,08	4,59	4,67	56,84	38,48	95,33	100,00
			SD/MI	0,22	3,46	3,69	33,95	62,37	96,31	100,00
			SMP/MTs	0,43	3,19	3,62	43,77	52,61	96,38	100,00
			SMA/SMK	1,58	4,21	5,79	51,05	43,16	94,21	100,00
		Saya sudah menerapkan secara efektif **pendekatan, model dan strategi** pembelajaran inovatif dan atraktif	SPS &TPA	0,00	5,26	5,26	60,53	34,21	94,74	100,00
			KB	0,74	5,90	6,63	52,58	40,79	93,37	100,00
			TK/RA	0,08	4,34	4,42	61,69	33,89	95,58	100,00
			SD/MI	0,17	2,51	2,68	48,46	48,86	97,32	100,00
			SMP/MTs	0,21	2,34	2,56	42,17	55,27	97,44	100,00
			SMA/SMK	1,58	3,16	4,74	46,84	48,42	95,26	100,00
		Saya terbiasa melaksanakan pembelajaran berpusat pada Peserta Didik.	SPS	0,00	4,39	4,39	51,75	43,86	95,61	100,00
			KB	0,74	4,42	5,16	45,45	49,39	94,84	100,00
			TK/RA	0,17	1,59	1,75	51,84	46,41	98,25	100,00
			SD/MI	0,34	1,56	1,90	37,74	60,36	98,10	100,00
			SMP/MTs	0,53	1,49	2,02	36,32	61,66	97,98	100,00
			SMA/SMK	1,05	3,68	4,74	45,79	49,47	95,26	100,00
Kompetensi Guru	Kompetensi guru dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi	Saya membutuhkan pelatihan penggunaan teknologi digital (aplikasi belajar, **e-learning**, **Artificial Intelegence**, dan sejenisnya).	SPS &TPA	0,00	3,51	3,51	45,61	50,88	96,49	100,00
			KB	0,49	4,91	5,41	40,29	54,30	94,59	100,00
			TK/RA	0,25	4,17	4,42	48,33	47,25	95,58	100,00
			SD/MI	0,17	6,09	6,25	36,40	57,34	93,75	100,00
			SMP/MTs	0,53	2,24	2,77	34,19	63,05	97,23	100,00
			SMA/SMK	1,05	2,63	3,68	42,63	53,68	96,32	100,00
		Saya mampu mengembangkan media pembelajaran berbasis **Information and Technology** (IT).	SPS &TPA	0,88	15,79	16,67	50,00	33,33	83,33	100,00
			KB	0,74	11,06	11,79	45,70	42,51	88,21	100,00
			TK/RA	0,08	13,27	13,36	58,76	27,88	86,64	100,00
			SD/MI	0,17	6,03	6,20	49,47	44,33	93,80	100,00

Sub Variabel	Indikator	Item Pernyataan	Jenjang	Jawaban Responden						
				Respon Negatif		Total Respon Negatif	Respon Positif		Total Respon Positif	Total Jawaban Responden
				Tidak Membutuhkan	Cukup Membutuhkan		Membutuhkan	Sangat Membutuhkan		
			SMP/MTs	0,21	4,79	5,01	49,09	45,90	94,99	100,00
			SMA/SMK	1,58	10,00	11,58	50,53	37,89	88,42	100,00
		Saya membutuhkan pelatihan dalam memanfaatkan **platform** daring untuk pembelajaran dan evaluasi.	SPS &TPA	0,88	4,39	5,26	47,37	47,37	94,74	100,00
			KB	0,74	4,42	5,16	51,35	43,49	94,84	100,00
			TK/RA	0,50	4,67	5,18	56,51	38,31	94,82	100,00
			SD/MI	0,34	3,18	3,52	41,99	54,49	96,48	100,00
			SMP/MTs	0,43	2,66	3,09	37,27	59,64	96,91	100,00
			SMA/SMK	1,05	5,26	6,32	44,74	48,95	93,68	100,00
	Kompetensi guru dalam mengembangkan asesmen	Saya sudah mampu melakukan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif.	SPS &TPA	2,63	13,16	15,79	58,77	25,44	84,21	100,00
			KB	0,74	16,95	17,69	57,99	24,32	82,31	100,00
			TK/RA	0,50	11,69	12,19	64,94	22,87	87,81	100,00
			SD/MI	0,22	2,51	2,74	43,72	53,55	97,26	100,00
			SMP/MTs	0,21	2,66	2,88	42,81	54,31	97,12	100,00
			SMA/SMK	2,11	6,32	8,42	48,42	43,16	91,58	100,00
		Saya sudah mampu menyusun instrumen penilaian berbasis HOTS	SPS &TPA	4,39	26,32	30,70	50,88	18,42	69,30	100,00
			KB	2,46	30,71	33,17	51,11	15,72	66,83	100,00
			TK/RA	2,25	21,87	24,12	60,02	15,86	75,88	100,00
			SD/MI	0,50	5,75	6,25	50,98	42,77	93,75	100,00
			SMP/MTs	0,21	4,47	4,69	0,43	94,89	95,31	100,00
			SMA/SMK	2,11	8,42	10,53	51,58	37,89	89,47	100,00
		Saya mampu melaksanakan asesmen non-akademik (karakter, **soft skills** yang relevan profil lulusan 8 dimensi)	SPS &TPA	2,63	20,18	22,81	57,02	20,18	77,19	100,00
			KB	0,74	23,34	24,08	56,27	19,66	75,92	100,00
			TK/RA	1,50	19,03	20,53	60,35	19,12	79,47	100,00
			SD/MI	0,34	6,53	6,87	54,10	39,03	93,13	100,00
			SMP/MTs	0,21	7,03	7,24	49,95	42,81	92,76	100,00
			SMA/SMK	2,11	9,47	11,58	52,63	35,79	88,42	100,00
	Pengembangan keprofesionalan Guru	Saya sudah terbiasa menulis karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas.	SPS &TPA	9,65	35,96	45,61	42,11	12,28	54,39	100,00
			KB	10,81	37,10	47,91	41,28	10,81	52,09	100,00
			TK/RA	7,76	39,65	47,41	4,67	47,91	52,59	100,00
			SD/MI	3,69	27,14	30,82	49,41	19,77	69,18	100,00
			SMP/MTs	2,77	20,98	23,75	52,61	23,64	76,25	100,00
			SMA/SMK	4,21	26,84	31,05	47,37	21,58	68,95	100,00
		Saya membutuhkan pelatihan peningkatan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan yang saya ampu.	SPS &TPA	0,00	6,14	6,14	42,11	51,75	93,86	100,00
			KB	0,98	6,63	7,62	48,65	43,73	92,38	100,00
			TK/RA	0,25	4,51	4,76	42,49	52,75	95,24	100,00
			SD/MI	0,11	2,57	2,68	40,70	56,62	97,32	100,00
			SMP/MTs	0,32	2,88	3,19	37,06	59,74	96,81	100,00
			SMA/SMK	1,05	5,26	6,32	44,21	49,47	93,68	100,00
			SPS &TPA	2,63	17,54	20,18	53,51	26,32	79,82	100,00

Sub Variabel	Indikator	Item Pernyataan	Jenjang	Jawaban Responden							
				Respon Negatif		Total Respon Negatif	Respon Positif		Total Respon Positif	Total Jawaban Responden	
				Tidak Membutuhkan	Cukup Membutuhkan		Membutuhkan	Sangat Membutuhkan			
		Saya mampu dan terbiasa berkolaborasi dalam komunitas belajar guru (MGMP/KKG).	KB	0,74	18,18	18,92	54,79	26,29	81,08	100,00	
			TK/RA	0,42	10,93	11,35	58,68	29,97	88,65	100,00	
			SD/MI	0,28	4,41	4,69	41,49	53,82	95,31	100,00	
			SMP/MTs	0,32	5,86	6,18	19,91	73,91	93,82	100,00	
			SMA/SMK	2,11	8,95	11,05	43,68	45,26	88,95	100,00	
		Saya mampu menerapkan kepemimpinan pembelajaran dan manajemen kelas	SPS &TPA	0,88	7,89	8,77	52,63	38,60	91,23	100,00	
			KB	0,01	10,81	10,82	60,69	28,49	89,18	100,00	
			TK/RA	0,42	8,26	8,68	65,19	26,13	91,32	100,00	
			SD/MI	0,11	3,35	3,46	45,84	50,70	96,54	100,00	
			SMP/MTs	0,11	2,24	2,34	38,66	59,00	97,66	100,00	
			SMA/SMK	1,05	6,84	7,89	43,16	48,95	92,11	100,00	
		Saya berkomunikasi secara efektif dengan Peserta Didik, orang tua, dan masyarakat.	SPS &TPA	0,00	1,75	1,75	40,35	57,89	98,25	100,00	
			KB	0,74	2,46	3,19	39,56	57,25	96,81	100,00	
			TK/RA	0,17	1,00	1,17	46,33	52,50	98,83	100,00	
			SD/MI	0,06	0,73	0,78	31,88	67,34	99,22	100,00	
			SMP/MTs	0,21	1,38	1,60	31,31	67,09	98,40	100,00	
			SMA/SMK	2,11	2,63	4,74	37,89	57,37	95,26	100,00	
	Kompetensi guru dalam pendidikan inklusif	Saya membutuhkan pelatihan tentang prinsip-prinsip dasar pendidikan inklusif.	SPS &TPA	0,00	1,75	1,75	44,74	53,51	98,25	100,00	
			KB	0,98	6,63	7,62	45,21	47,17	92,38	100,00	
			TK/RA	0,67	7,18	7,85	45,83	46,33	92,15	100,00	
			SD/MI	0,78	5,86	6,64	41,82	51,54	93,36	100,00	
			SMP/MTs	2,02	4,79	6,82	39,19	53,99	93,18	100,00	
			SMA/SMK	1,58	11,58	13,16	43,16	43,68	86,84	100,00	
		Saya mampu mengadaptasi kurikulum bagi peserta didik ABK	SPS &TPA	7,02	31,58	38,60	43,86	17,54	61,40	100,00	
			KB	9,34	36,86	46,19	39,07	14,74	53,81	100,00	
			TK/RA	7,51	37,90	45,41	43,74	10,85	54,59	100,00	
			SD/MI	4,91	22,33	27,25	49,53	23,23	72,75	100,00	
			SMP/MTs	3,73	16,83	20,55	47,28	32,16	79,45	100,00	
			SMA/SMK	5,79	21,58	27,37	46,32	26,32	72,63	100,00	
		Saya membutuhkan pelatihan tentang teknik asesmen kebutuhan belajar peserta didik ABK.	SPS &TPA	5,26	11,40	16,67	44,74	38,60	83,33	100,00	
			KB	2,95	17,44	20,39	42,75	36,86	79,61	100,00	
			TK/RA	3,17	17,53	20,70	49,25	30,05	79,30	100,00	
			SD/MI	2,40	11,61	14,01	45,00	40,98	85,99	100,00	
			SMP/MTs	2,34	7,77	10,12	41,75	48,14	89,88	100,00	
			SMA/SMK	5,26	14,21	19,47	41,05	39,47	80,53	100,00	
		Saya mampu menerapkan strategi pembelajaran mendalam (deep learning) di kelas inklusif	SPS &TPA	5,26	26,32	31,58	50,88	17,54	68,42	100,00	
			KB	5,90	31,70	37,59	46,93	15,48	62,41	100,00	
			TK/RA	3,67	31,89	35,56	50,67	13,77	64,44	100,00	
			SD/MI	4,13	19,49	23,62	49,30	27,08	76,38	100,00	
			SMP/MTs	3,41	13,74	17,15	50,05	32,80	82,85	100,00	

Sub Variabel	Indikator	Item Pernyataan	Jenjang	Jawaban Responden						
				Respon Negatif		Total Respon Negatif	Respon Positif		Total Respon Positif	Total Jawaban Responden
				Tidak Membutuhkan	Cukup Membutuhkan		Membutuhkan	Sangat Membutuhkan		
			SMA/SMK	5,26	18,42	23,68	46,32	30,00	76,32	100,00
		Saya membutuhkan pelatihan manajemen kelas inklusif	SPS &TPA	1,75	8,77	10,53	52,63	36,84	89,47	100,00
			KB	2,46	13,02	15,48	45,21	39,31	84,52	100,00
			TK/RA	2,00	12,10	14,11	50,08	35,81	85,89	100,00
			SD/MI	2,18	10,11	12,28	45,73	41,99	87,72	100,00
			SMP/MTs	2,56	7,67	10,22	42,49	47,28	89,78	100,00
			SMA/SMK	5,26	9,47	14,74	45,79	39,47	85,26	100,00

Tabel Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat

https://drive.google.com/file/d/1LCYC9QRynYerDJSKkJxzAa1kRaee_LyO/view?usp=sharing

Tabel Rekapitulasi Hasil Survei Kebutuhan Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Sekolah

https://drive.google.com/file/d/10qlEpgU0Svxa8-qVFauSkbaWSkx1M9bR/view?usp=sharing

Tabel Rekapitulasi Hasil Survei Kebutuhan Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Perpustakaan Sekolah

https://drive.google.com/file/d/17JRQnscDozI2KxETCsj9igHLaijVEs3R/view?usp=sharing

Tabel Rekapitulasi Hasil Survei Kebutuhan Pengembangan dan Pelatihan Konselor Sekolah

https://drive.google.com/file/d/1BXhGuI2qQIr1FZ5my38M6nKKhYiN0ZY8/view?usp=sharing

Tabel Data Analisis Kuantitatif Tenaga Kependidikan (Tenaga Administrasi Sekolah, Laboran, Tenaga Perpustakaan dan Koselor Sekolah) SMA/SMK/MA Kabupaten Gresik

https://drive.google.com/file/d/1LHmvTdn5IsRyewblpZDmLYHdx0iB-jwy/view?usp=sharing

Tabel Data Analisis Kuantitatif Tenaga Kependidikan (Tenaga Administrasi Sekolah, Laboran, Tenaga Perpustakaan dan Koselor Sekolah) SMP/MTs Kabupaten Gresik

https://drive.google.com/file/d/1hJhwmnhP3_XTXS1VTRU4DQ8NeZrapXNd/view?usp=sharing

DATA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN GURU PAUD (SPS, KB, TK/RA)

https://drive.google.com/file/d/1e_ypBcLdnxsB--15vEyjWbhbdHtxpzfL/view?usp=sharing

DATA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN GURU SD/MI

https://drive.google.com/file/d/1WWgRKg6N4ORrSHjpP-WHhrfKe_k3AxFD/view?usp=sharing

DATA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN GURU SMP/MTs

https://drive.google.com/file/d/1PURKvzlPUBv3yfv4tCDAUEN_z5PNBVGF/view?usp=sharing

DATA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN GURU SMA/MA/SMK

https://drive.google.com/file/d/1-Hbs50JoqwGCHVFWW5ky-PVxWAGR5AhW/view?usp=sharing

DATA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH, PERPUSTAKAAN, LABORAN DAN KONSELOR SEKOLAH TINGKAT SMP/MTs KABUPATEN GRESIK

https://drive.google.com/file/d/1W9ACb37L9sLIH0XLrBN56di5FI9kZdU5/view?usp=sharing

DATA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH, PERPUSTAKAAN, LABORAN DAN KONSELOR SEKOLAH TINGKAT SMA/MA/SMK KABUPATEN GRESIK

https://drive.google.com/file/d/1KpoXuGLOE4vJPIpaTgPeJvtk_YXgqPQV/view?usp=sharing

DATA PERSEPSI MUTU PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK BERDASARKAN PESERTA DIDIK

https://drive.google.com/file/d/1fg_YInBWdvhXMz0wj6fqf6jHoIIZ0DDk/view?usp=sharing

DATA PERSEPSI MUTU PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK BERDASARKAN MASYARAKAT/ORANGTUA

https://drive.google.com/file/d/1WwxYvF5BfRwJbzdv3FGrPiMcn9zyiYs1/view?usp=sharing

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan FGD

FOTO FGD BERSAMA PKBM DAN LAYANAN ABK

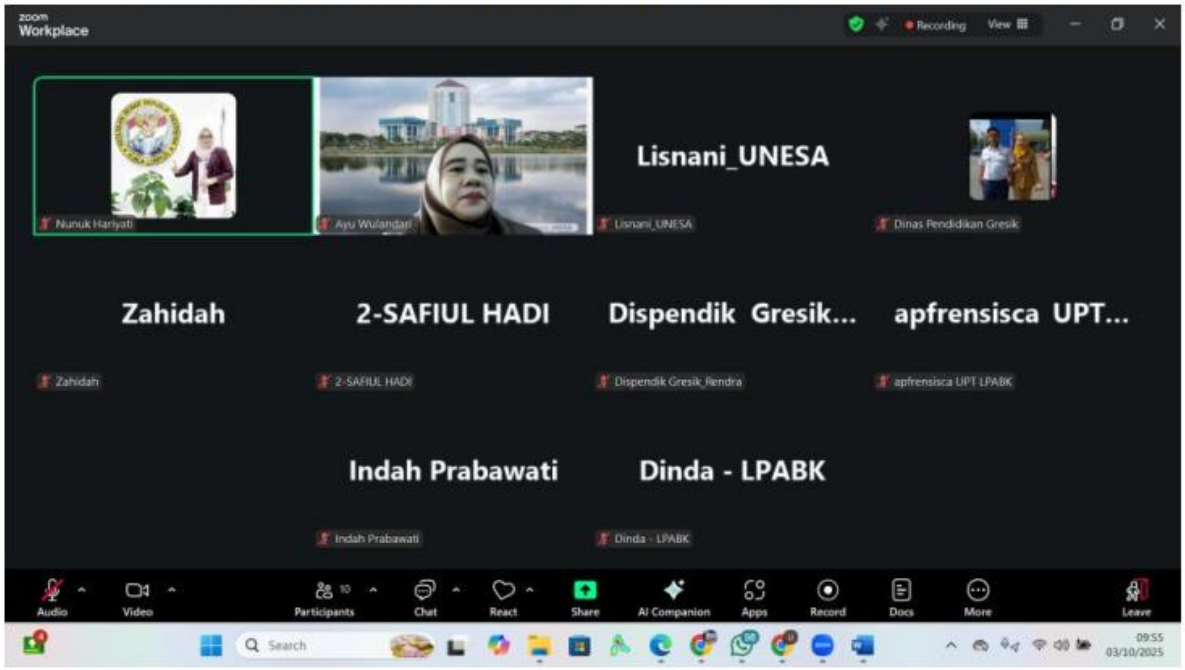

FOTO FGD BERSAMA TOKOH MASYARAKAT

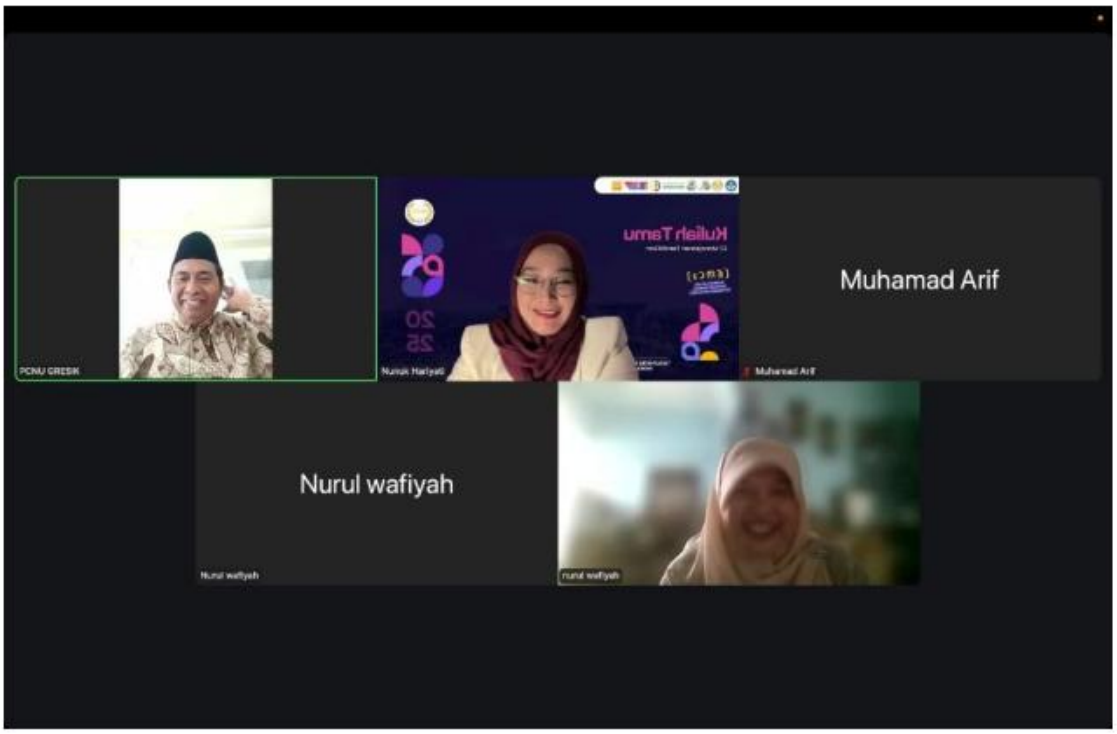

Lampiran 6. Peta Sebaran Sekolah

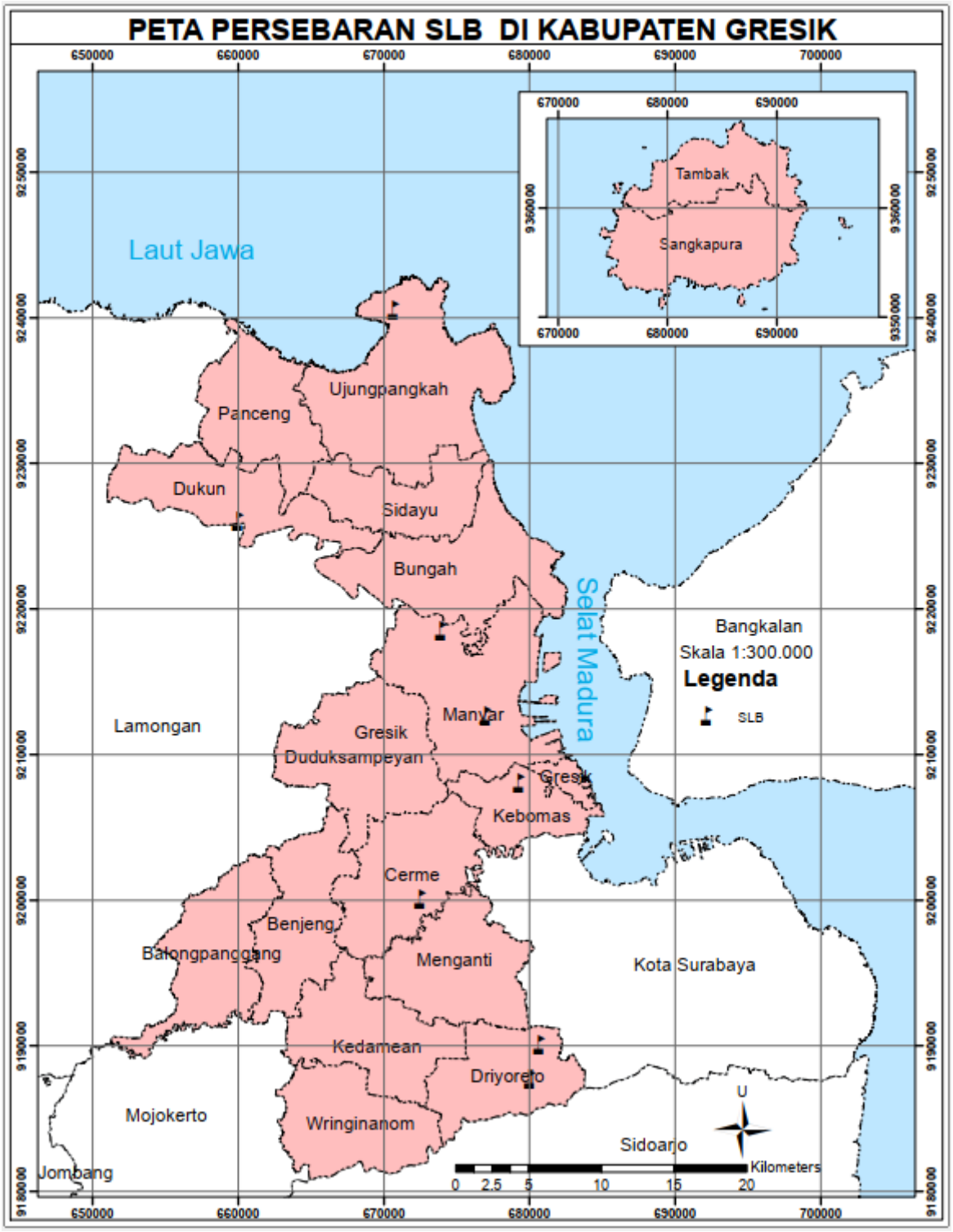

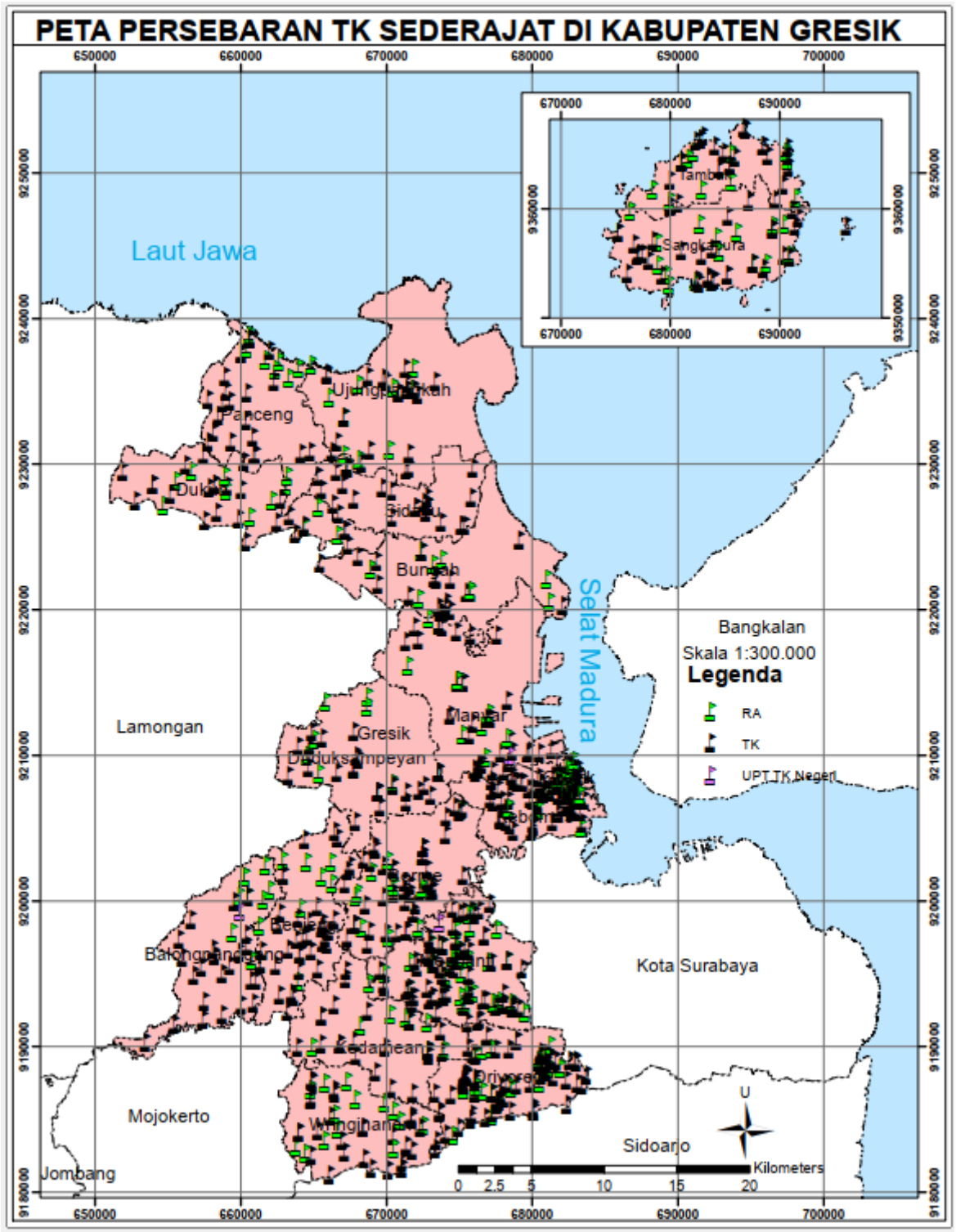
PETA PERSEBARAN TK SEDERAJAT DI KABUPATEN GRESIK
Laut Jawa
Selat Madura
Lamongan
Gresik
Bangkalan
Mojokerto
Jombang
Kota Surabaya
Sidoarjo
Bangkalan
Skala 1:300.000
Legenda
RA
TK
UPT TK Negeri
U
0 2.5 5 10 15 20
Kilometers

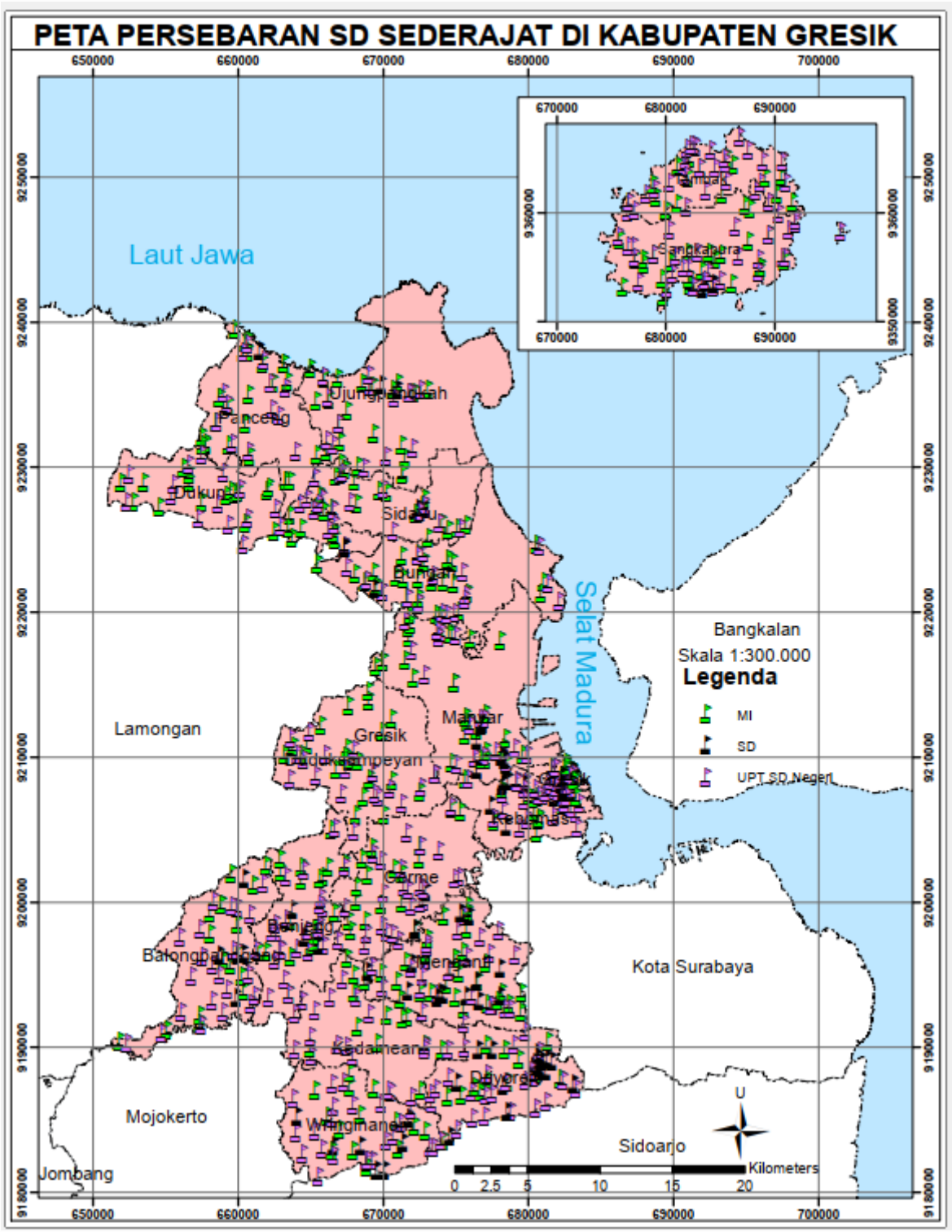
PETA PERSEBARAN SD SEDERAJAT DI KABUPATEN GRESIK
Laut Jawa
Selat Madura
Lamongan
Mojokerto
Jombang
Kota Surabaya
Sidoarjo
Bangkalan
Skala 1:300.000
Legenda
MI
SD
UPT SD Negeri
U
0 2.5 5 10 15 20
Kilometers

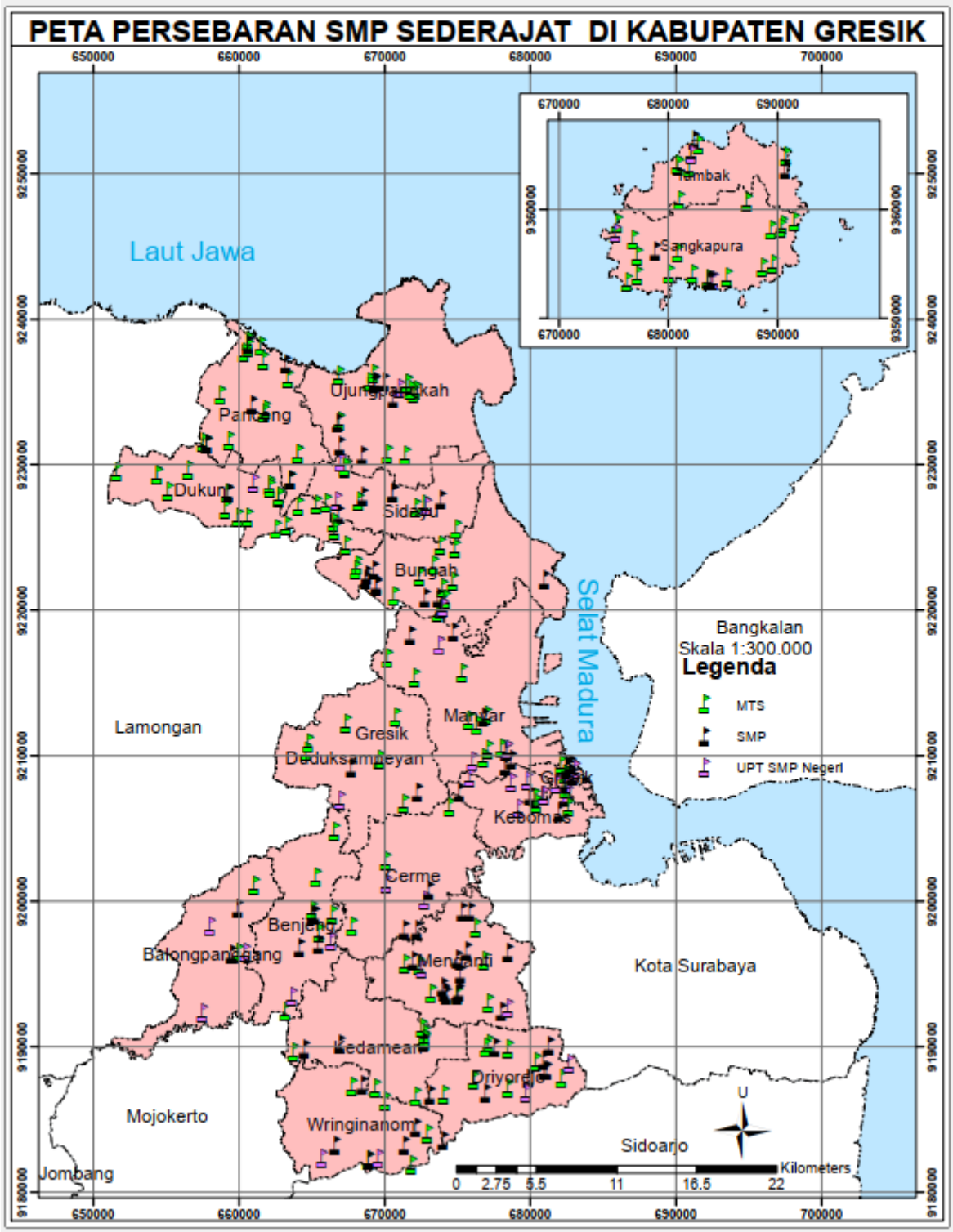
PETA PERSEBARAN SMP SEDERAJAT DI KABUPATEN GRESIK
Laut Jawa
Selat Madura
Lamongan
Mojokerto
Jombang
Kota Surabaya
Sidoarjo
Bangkalan
Skala 1:300.000
Legenda
MTS
SMP
UPT SMP Negeri
Panceng
Dukun
Sidayu
Bungah
Manyar
Gresik
Kebomas
Cerme
Benjeng
Balongpanggang
Menganti
Kedamean
Wringinanom
Driyorejo
Sangkapura
U
Kilometers
0 2.75 5.5 11 16.5 22

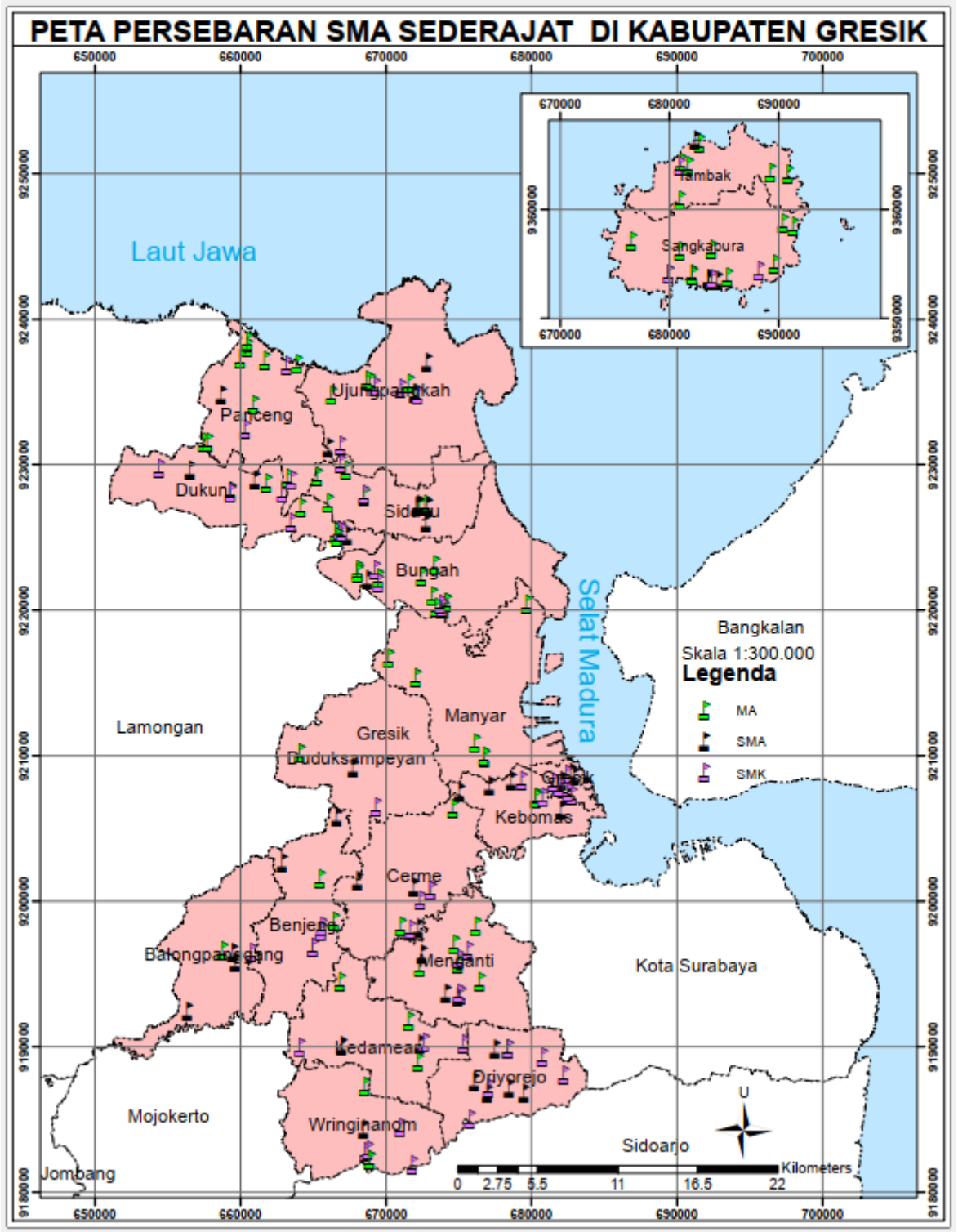
PETA PERSEBARAN SMA SEDERAJAT DI KABUPATEN GRESIK
Laut Jawa
Selat Madura
Tambak
Sangkapura
Panceng
Dukun
Sidayu
Bungah
Manyar
Gresik
Kebomas
Cerme
Benjeng
Balongpanggang
Menganti
Kedamean
Driyorejo
Wringinanom
Mojokerto
Jombang
Kota Surabaya
Sidoarjo
Bangkalan
Lamongan
Skala 1:300.000
Legenda
MA
SMA
SMK
U
0 2.75 5.5 11 16.5 22
Kilometers

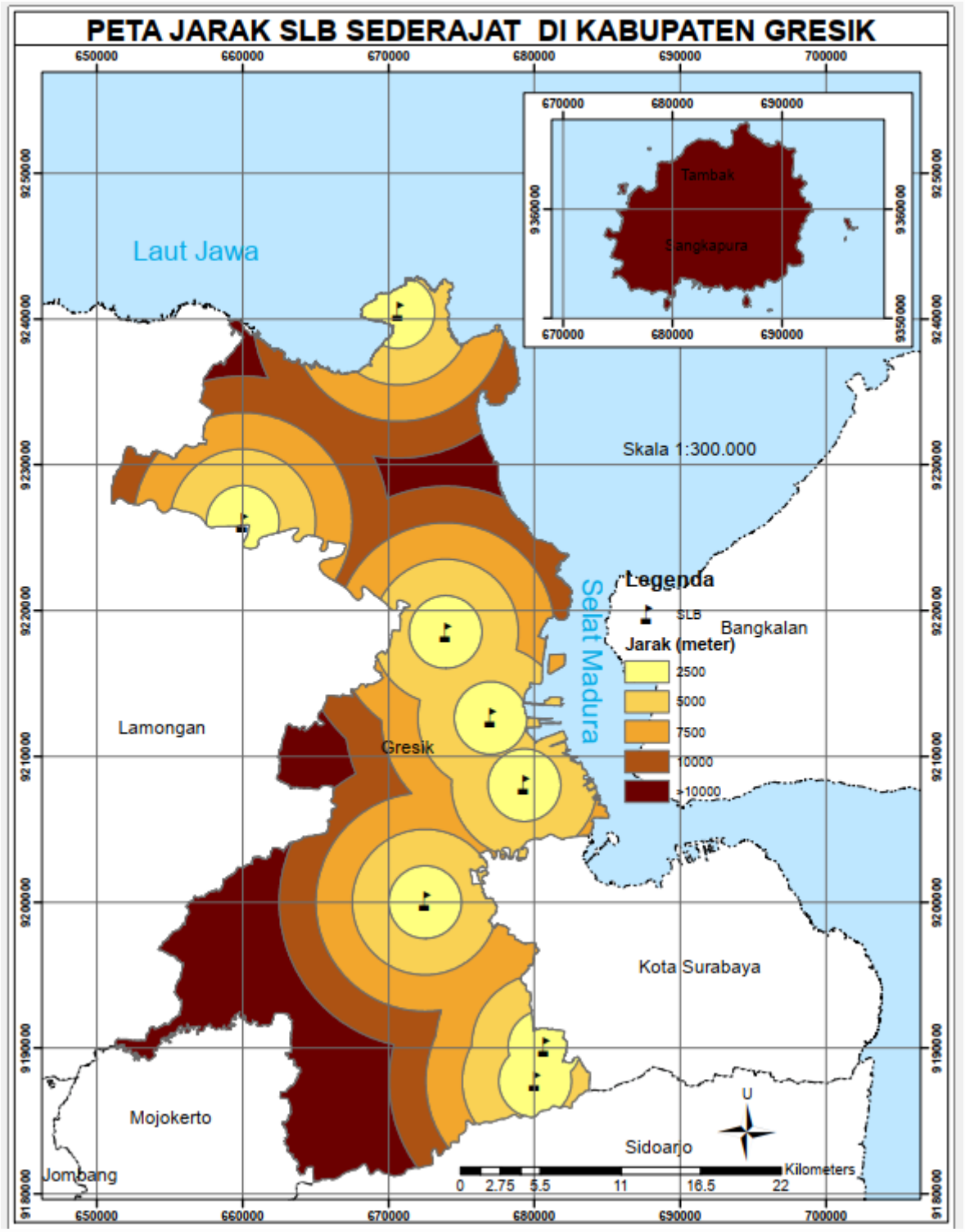
PETA JARAK SLB SEDERAJAT DI KABUPATEN GRESIK
650000
660000
670000
680000
690000
700000
9250000
9240000
9230000
9220000
9210000
9200000
9190000
9180000
Laut Jawa
Tambak
Sangkapura
Skala 1:300.000
Legenda
SLB
Jarak (meter)
2500
5000
7500
10000
>10000
Selat Madura
Bangkalan
Lamongan
Gresik
Kota Surabaya
Mojokerto
Sidoarjo
Jombang
U
0 2.75 5.5 11 16.5 22
Kilometers

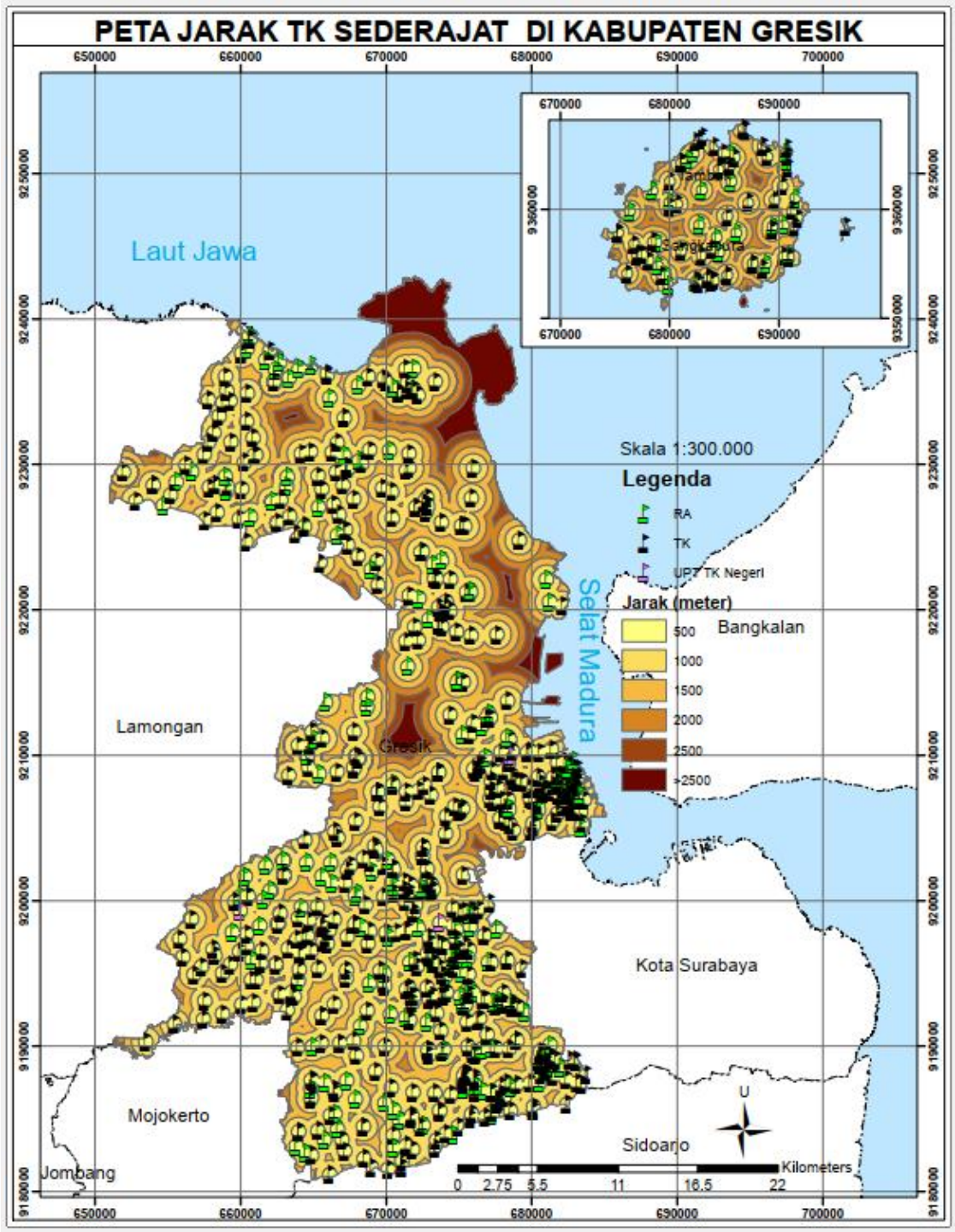
PETA JARAK TK SEDERAJAT DI KABUPATEN GRESIK
Laut Jawa
Selat Madura
Skala 1:300.000
Legenda
RA
TK
UPT TK Negeri
Jarak (meter)
500
1000
1500
2000
2500
>2500
Bangkalan
Lamongan
Gresik
Kota Surabaya
Mojokerto
Sidoarjo
Jombang
U
Kilometers
0 2.75 5.5 11 16.5 22

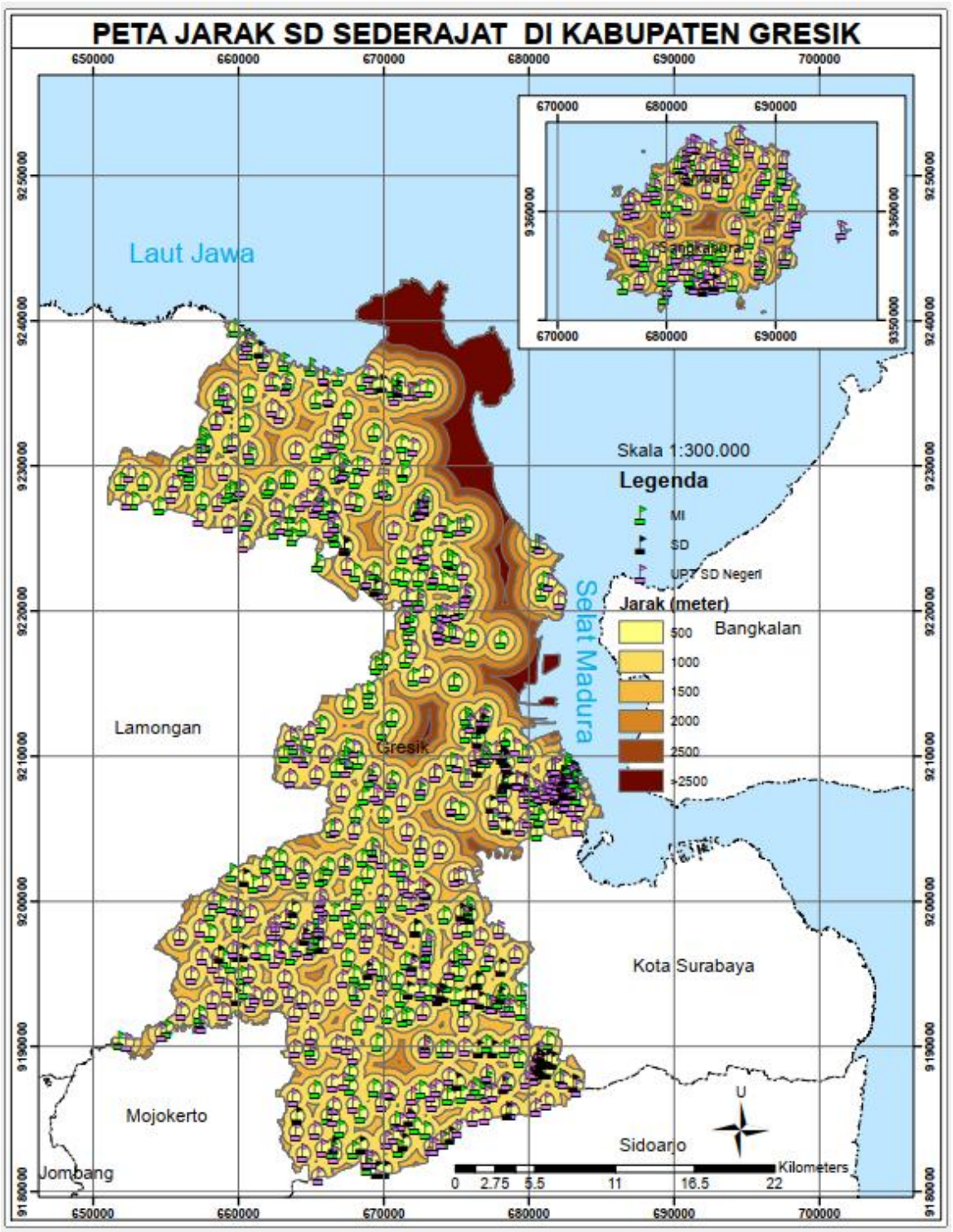
PETA JARAK SD SEDERAJAT DI KABUPATEN GRESIK
Laut Jawa
Selat Madura
Skala 1:300.000
Legenda
MI
SD
UPT SD Negeri
Jarak (meter)
500
1000
1500
2000
2500
>2500
Bangkalan
Lamongan
Gresik
Kota Surabaya
Mojokerto
Sidoarjo
Jombang
U
0 2.75 5.5 11 16.5 22
Kilometers

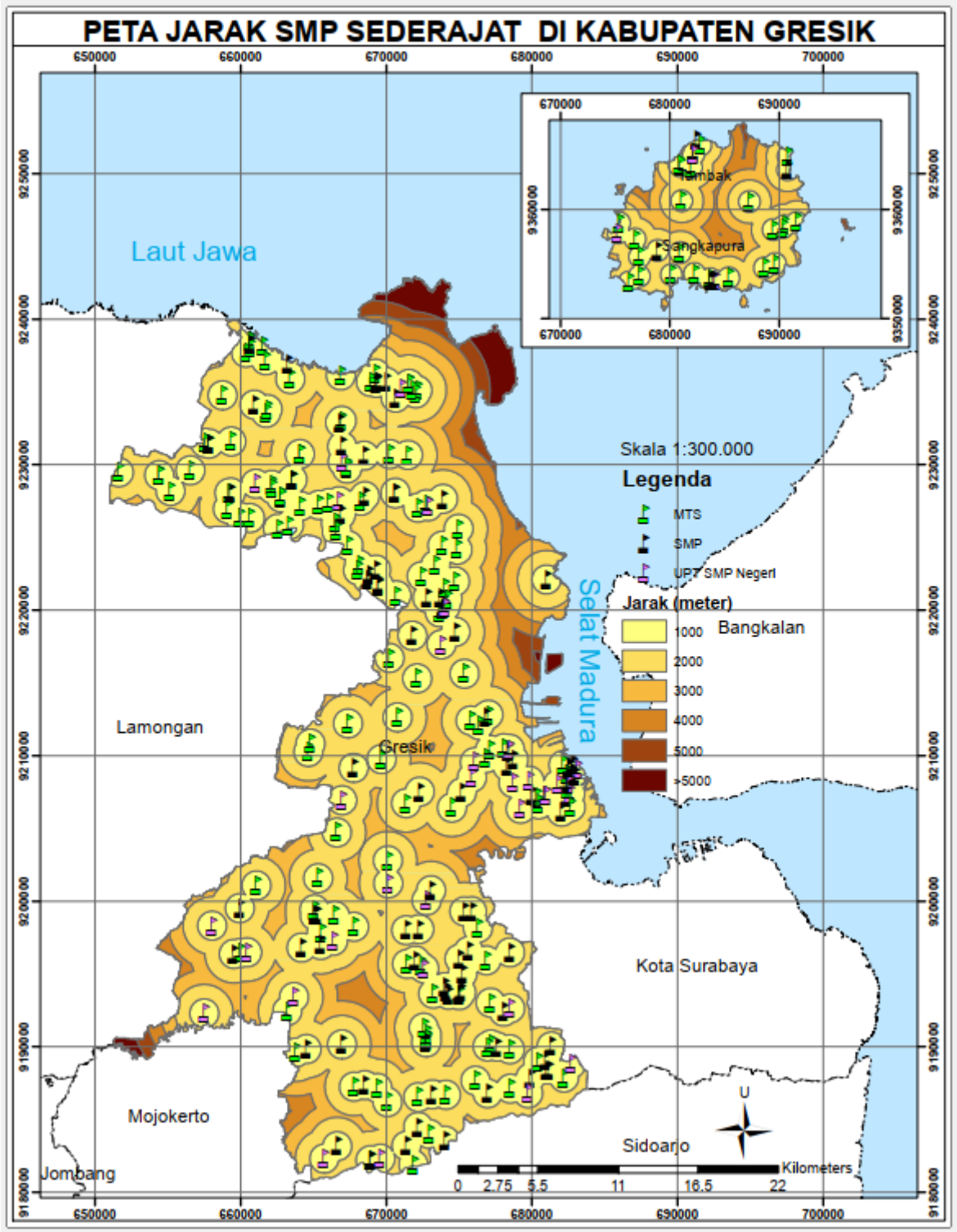
PETA JARAK SMP SEDERAJAT DI KABUPATEN GRESIK
650000
660000
670000
680000
690000
700000
9250000
9240000
9230000
9220000
9210000
9200000
9190000
9180000
Laut Jawa
Sumenep
Sangkapura
Skala 1:300.000
Legenda
MTS
SMP
UPT SMP Negeri
Jarak (meter)
1000
2000
3000
4000
5000
>5000
Selat Madura
Bangkalan
Lamongan
Gresik
Kota Surabaya
Mojokerto
Sidoarjo
Jombang
U
0 2.75 5.5 11 16.5 22
Kilometers

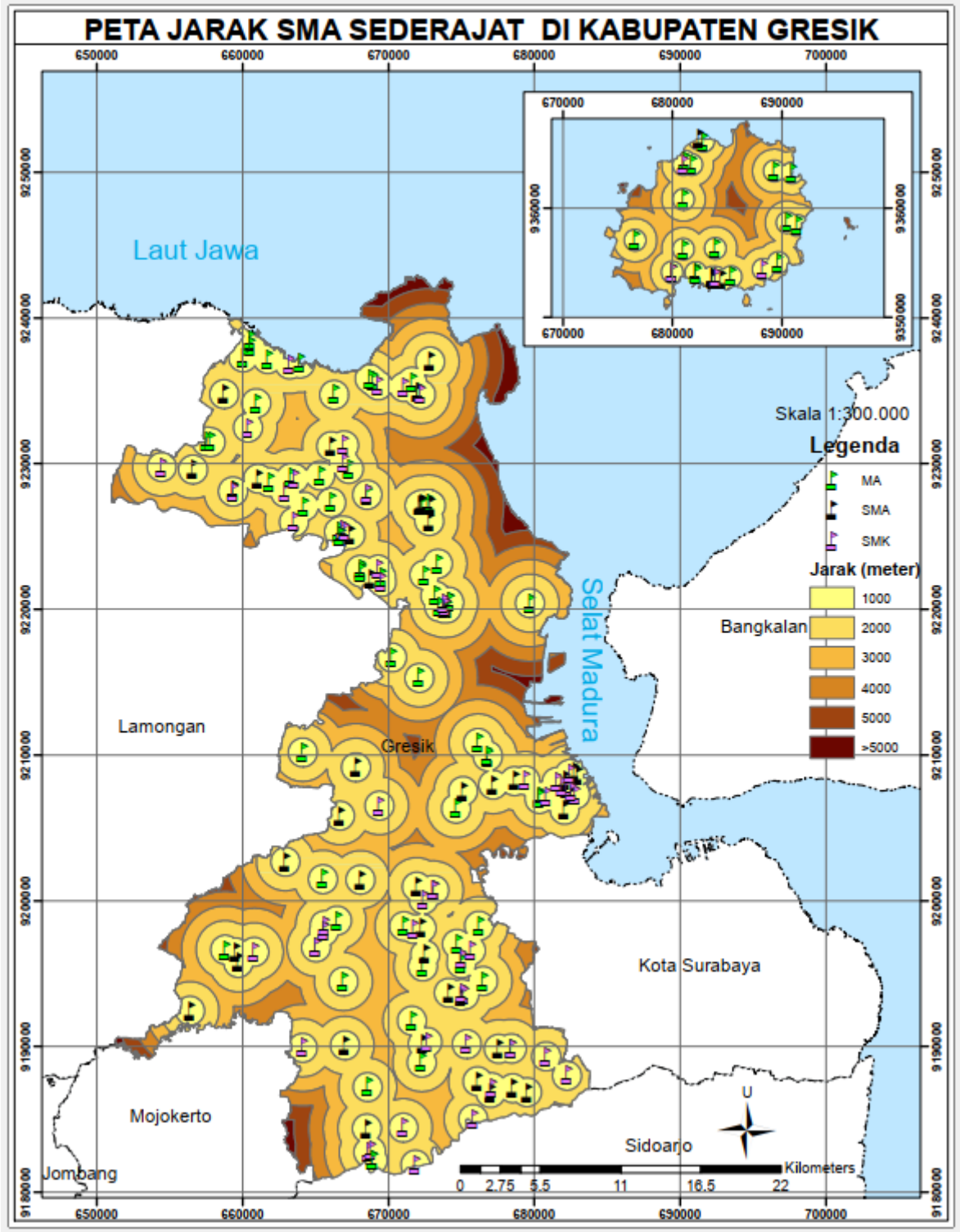
PETA JARAK SMA SEDERAJAT DI KABUPATEN GRESIK
650000
660000
670000
680000
690000
700000
9250000
9240000
9230000
9220000
9210000
9200000
9190000
9180000
Laut Jawa
Selat Madura
Skala 1:300.000
Legenda
MA
SMA
SMK
Jarak (meter)
1000
2000
3000
4000
5000
>5000
Bangkalan
Lamongan
Gresik
Kota Surabaya
Mojokerto
Sidoarjo
Jombang
U
0 2.75 5.5 11 16.5 22
Kilometers

Lampiran 7. Matriks Roadmap per Tahun

Matrik Indikator Kinerja (IKU) & Target Tahunan

Fokus Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029
Fokus 1	Rasio distribusi guru sesuai kebutuhan antar kecamatan	Rasio	1:1.30	1:1.25	1:1.20	1:1.15	1:1.10	1:1.00
	Persentase guru tersertifikasi 'Gresik Digital Educator'	%	0	10	25	45	60	75
	Persentase sekolah terhubung internet stabil	%	45	60	75	85	95	100
	Indeks Kesiapan Digital Sekolah	Indeks (0–100)	35	45	55	65	75	80
Fokus 2	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	74	78	82	86	90	94
	APM SMP	%	89	91	93	95	96	97
	APM SMA	%	79	81	83	85	87	89
	Angka Putus Sekolah (SD–SMA)	%	2.1	1.8	1.5	1.3	1.0	0.8
	Persentase kecamatan dengan sistem EWRS aktif	%	0	20	40	60	80	100
Fokus 3	Persentase guru mengikuti pelatihan literasi-numerasi	%	0	25	50	65	80	90
	Rata-rata skor literasi daerah (AKMI)	Skor (0–100)	53	58	63	68	72	76
	SMK bermitra dengan industri aktif	%	35	45	55	65	70	75
	Persentase lulusan SMK terserap di dunia kerja	%	60	65	70	75	80	85
	Sekolah terakreditasi A/B	%	62	65	70	75	80	85
Fokus 4	Sekolah menggunakan sistem e-Manajemen BOS/Monev	%	20	40	60	80	90	100
	Ketersediaan data terintegrasi EMIS–Dapodik–SIMPEG	%	30	60	85	95	100	100
	Pelaporan kinerja sekolah berbasis hasil belajar	%	15	30	50	75	90	100
	Laporan evaluasi kebijakan pendidikan daerah terbit	Laporan	0	1	1	1	1	1
Fokus 5	Jumlah Forum Pendidikan Gresik Berkolaborasi aktif	Forum	0	5	10	15	20	25
	Nilai kontribusi CSR untuk sektor pendidikan	% kenaikan	-	+5	+10	+15	+18	+20
	Jumlah sekolah mitra industri dan masyarakat aktif	Sekolah	0	5	10	15	20	25
	Persentase masyarakat terlibat dalam program sekolah	%	30	40	50	60	70	80

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Lampiran 8. Template Evaluasi Pelaksanaan RIPPD Kabupaten Gresik

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952812, Fax (031) 3952812
Website: http://bappeda.gresik.go.id email: bappeda@gresikkab.go.id
G R E S I K

Template Monev IKU - RIPPD Kabupaten Gresik

1. **Identitas Program / IKU**

Nama IKU	.....
Kaitan dengan Misi/RPJPD/RIPPD	.....
Penanggung Jawab Utama	.....
Unit Pelaksana Teknis (Jika Ada)	.....

2. **Matriks Monitoring dan Evaluasi IKU**

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline (Tahun Awal RIPPD)	Target Tahunan	Realisasi per Triwulan / Semester	Persentase Capaian (%)	Sumber Data & Metode Verifikasi	Analisis Capaian & Faktor Penghambat	Langkah Tindak Lanjut / Strategi Percepatan	Penanggung Jawab / PIC
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

3. **Analisis Umum Kinerja IKU**

Tuliskan narasi analisis capaian IKU di sini

4. **Rekomendasi Kebijakan dan Tindak Lanjut**

Kebijakan / Regulasi	.....
Sinergi Antar OPD	.....
Dukungan Anggaran	.....
Kebutuhan Inovasi / Digitalisasi	.....
Keterlibatan Publik / Stakeholder	.....

5. **Catatan Monitoring Lapangan (Opsional)**

Tanggal / Periode	Observasi Lapangan / Temuan	Catatan Tindak Lanjut
.....	.....	.....

Lampiran 9. Klasifikasi Sekolah Penerima BOSDA

1. Sekolah dengan Dasar Rombel

Salah satu dasar pemberian BOSDA adalah dengan memperhitungan jumlah rombel. Hal ini sesuai mandat Standar Pelayanan Minimal (Permendikbudristek 32/2022) bahwa layanan pembelajaran tidak boleh terhenti. Penggunaan rombongan belajar sebagai dasar alokasi merujuk pada ketentuan Standar Proses (Permendikbud 22/2016), yang menetapkan rombel sebagai unit organisasi pembelajaran. Dengan demikian, pemberian BOSDA berbasis rombel merupakan bentuk pemenuhan kewajiban daerah untuk menjamin kesinambungan layanan pendidikan, terlepas dari variasi jumlah peserta didik.

Klasifikasi sekolah yang berhak menerima BOSDA dengan model ini adalah:

a. SD/MI Negeri dan SMP/MTs Negeri

   Karena merupakan tanggung jawab langsung pemerintah daerah *wajib menerima Base Grant*, berapapun jumlah siswanya.

b. SD/MI Swasta dan SMP/MTs Swasta, dengan syarat:
   - Terdaftar dan memiliki izin operasional
   - Terinput di Dapodik/PD SERU
   - Tidak menarik iuran wajib yang menggantikan fungsi BOS/BOSDA

c. Sekolah Kecil (Rombel ≤ 4)

   Sekolah kecil dengan rombel kurang dari sama dengan 4 tetap menerima Base Grant, bahkan jika siswanya sedikit, karena menutup sekolah sama dengan melanggar hak atas pendidikan dan SPM.

d. Sekolah Inklusif / menerima ABK

   Karena layanan ini adalah kewajiban nondiskriminatif negara (UU 20 Tahun 2003 Pasal 5).

Penetapan tarif dasar BOSDA berbasis rombel:

1. Tarif Dasar *Base Grant* adalah hasil perhitungan biaya tetap minimum per rombongan belajar yang meliputi: **administrasi & ATK, utilitas, pemeliharaan ringan, bahan habis pakai pembelajaran kolektif, kegiatan kurikulum & asesmen, konektivitas minimal, pelatihan guru, serta pengelolaan kesehatan & kebersihan.**

2. Tarif Dasar ditetapkan berdasarkan metodologi bottom-up yang terdokumentasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, mengacu pada Standar Harga Satuan Belanja (SHPB) daerah dan survei pasar lokal.
3. Besaran Tarif Dasar ditinjau dan ditetapkan setiap tahun anggaran, dengan formula:

$$\textbf{TarifDasar} = \sum_{i=1}^{n} (Qty_i \times Price_i) + \textbf{Buffer}_{admin}$$

Keterangan :

Simbol	Keterangan	Contoh dalam konteks sekolah
I	Indeks item biaya tetap (1,2,3,...n)	Item 1 = listrik, Item 2 = ATK, dst.
N	Jumlah total komponen biaya tetap yang dihitung	misal ada 8 komponen biaya → n = 8
Qty_i (Quantity)	Jumlah kebutuhan item ke-i untuk **1 rombel dalam 1 tahun**	contoh: ATK = 12 paket/bulan → 12
$Price_i$ (Harga Satuan)	Harga unit item ke-i berdasarkan SHPB/kontrak/market check	contoh: harga 1 paket ATK = Rp 100.000
$Qty_i \times Price_i$	Total biaya item ke-i untuk 1 rombel per tahun	12 × Rp 100.000 = Rp 1.200.000
∑ (Sigma)	Penjumlahan seluruh komponen biaya tetap	jumlahkan semua hasil Qty × Price
$Buffer^{admin}$	Cadangan kecil (3–5%) untuk fluktuasi harga & administrasi	mis. 5% × subtotal biaya

4. Untuk sekolah dengan jumlah rombel sangat kecil, diberlakukan *Minimum Base Grant* per sekolah untuk memastikan kesinambungan layanan.
5. Semua penerima *Base Grant* wajib menyusun RKAS dan melaporkan penggunaan dana sesuai ketentuan pelaporan daerah.

Contoh penghitungan besaran BOSDA berbasis rombel:

Misalnya untuk satu rombel:

Komponen	Qty	Harga Satuan	Total
ATK dasar	12 paket	Rp 100.000	Rp 1.200.000
Listrik/air	12 bulan	Rp 150.000	Rp 1.800.000
Pemeliharaan ringan	1 paket	Rp 800.000	Rp 800.000
Kebersihan	12 paket	Rp 25.000	Rp 300.000
Pelatihan guru	1 paket	Rp 400.000	Rp 400.000

Subtotal			**Rp 4.500.000**
Buffer admin (5%)			**Rp 225.000**
Tarif Dasar per rombel / tahun			**Rp 4.725.000**

Catatan: ***Angka riil harus diambil dari SHPB Gresik.***

2. Sekolah dengan dasar jumlah siswa

Pengalokasian BOSDA berdasarkan jumlah siswa adalah dana BOSDA dialokasikan untuk menyesuaikan pembiayaan dengan jumlah peserta didik yang dilayani oleh satuan pendidikan. Pendekatan ini merujuk pada prinsip bahwa sebagian biaya operasional sekolah bersifat variabel, yaitu meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah siswa, terutama terkait kebutuhan bahan habis pakai pembelajaran, dukungan layanan kelas, pengelolaan kegiatan intrakurikuler, serta kebutuhan administrasi pembelajaran.

Penggunaan jumlah peserta didik sebagai dasar alokasi sesuai dengan mandat Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Permendagri 59/2021 dan Permendikbudristek 32/2022) yang menekankan bahwa setiap anak yang terdaftar pada satuan pendidikan berhak memperoleh layanan pembelajaran yang memadai tanpa diskriminasi. Jumlah peserta didik yang terverifikasi pada data pokok pendidikan (Dapodik/PD SERU) menjadi dasar penghitungan tarif variabel per siswa.

Dengan demikian, model ini berbasis jumlah peserta didik merupakan instrumen pembiayaan yang memastikan keadilan (*equity*) dan kesesuaian beban layanan (adequacy) antar sekolah, sehingga sekolah dengan jumlah siswa yang lebih banyak memperoleh dukungan dana yang proporsional dengan kebutuhan operasional aktualnya. Skema ini juga mencegah terjadinya underfunding pada sekolah besar serta mendukung efisiensi pengelolaan anggaran dalam kerangka pemerataan layanan pendidikan dasar.

Klasifikasi sekolah penerima BOSDA model jumlah siswa*:*

Klasifikasi	Kriteria Jumlah Siswa	Implikasi	Alasan
Kelompok I – Sekolah Skala Besar	Sekolah dengan jumlah siswa **≥ X1** (misalnya ≥ 300 siswa untuk SD, ≥ 200 siswa untuk SMP)	Mendapat full tarif variabel (Siswa × Tarif Variabel)	Karena beban layanan nyata besar, maka alokasi variabel sesuai volume siswa, efisien untuk skala besar.

Kelompok II – Sekolah Menengah	Sekolah dengan jumlah siswa antara **X2 ≤ siswa < X1** (misalnya 120–299 SD, 80–199 SMP)	Mendapat tarif penuh tapi dikontrol proporsional	Memastikan sekolah menengah-skala tetap mendapatkan variabel, namun volume lebih kecil.
Kelompok III – Sekolah Kecil/Skala Menengah Kecil	Jumlah siswa **< X2** (misalnya < 120 SD, < 80 SMP)	Mendapat tarif variabel tetapi dengan **threshold minimum** atau digabung dengan Safety Net	Untuk menghindari penalti akibat siswa sedikit yang bukan kesalahan sekolah (demografi) dan tetap adil.
Kelompok IV – Sekolah dengan Kondisi Khusus	sekolah inklusif, atau sekolah dengan proporsi siswa rentan tinggi	Mendapat tarif variabel + **penyesuaian khusus** (koefisien tambahan)	Karena beban tambahan layanan dan akses, sehingga variabel grant harus sensitif terhadap kondisi ini.

Catatan : Cara Menentukan X1 dan X2

Gunakan **sebaran jumlah siswa** tiap sekolah di Gresik (SD/MI & SMP/MTs). Kemudian:ß

1. **Urutkan sekolah berdasarkan jumlah siswa**.
2. Kelompokkan ke dalam **kuartil**:
   - Q1 = sekolah dengan jumlah siswa paling kecil
   - Q4 = sekolah dengan jumlah siswa paling besar
3. **Gunakan batas kuartil sebagai X1 dan X2**:

Batas	Rumus	Makna
X1 = nilai kuartil 75%	sekolah yang jumlah siswanya berada di 25% teratas	sekolah besar
X2 = nilai kuartil 25%	sekolah yang berada di 25% terbawah	sekolah kecil

Penetapan tari dasar BOSDA berdasarkan jumlah siswa:

$$TarifVariabel = \sum_{j=1}^{m} (Qty_j \times Price_j)$$

Keterangan:

Simbol	Arti
j	indeks komponen biaya variabel
Qty_j	kebutuhan item per siswa per tahun
$Price_j$	harga satuan (mengacu ke SHPB Gresik / e-Katalog / survei lokal)
m	jumlah komponen biaya variabel

Contoh perhitungan besaran BOSDA berdasarkan jumlah siswa.

Komponen	Qty per siswa / tahun	Harga Satuan (Rp)	Total / siswa
ATK & bahan pembelajaran siswa	12 paket	5.000	60.000
Modul/lembar kegiatan	8 modul	4.000	32.000
Penilaian & penggandaan	6 kegiatan	4.000	24.000
Kegiatan kelas (intrakurikuler)	6 kegiatan	6.000	36.000
Subtotal			**152.000**
Buffer administrasi (5%)			7.600
Tarif Variabel per Siswa			**≈ Rp 160.000 / tahun**

Catatan: ***angka riil harus diambil dari SHPB Gresik.***

3. Sekolah Dengan Dasar Lokasi Geografis (Sekolah Pinggiran)

Sekolah yang berada di wilayah pinggiran termasuk daerah dengan akses transportasi terbatas, kondisi geografis sulit, atau kepadatan penduduk rendah menghadapi beban biaya layanan pendidikan yang lebih tinggi dibanding sekolah di wilayah pusat. Kondisi ini telah diakui dalam Permendikbud Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus, serta diperkuat oleh mandat Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Permendikbudristek 32/2022) yang mewajibkan pemerintah daerah menjaga agar layanan pembelajaran tidak terhenti, tanpa memandang lokasi sekolah. Dengan demikian, dukungan BOSDA bagi sekolah pinggiran bukan bersifat bantuan tambahan, tetapi merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan yang setara bagi setiap peserta didik sebagaimana diamanatkan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk itu, dalam skema BOSDA Hybrid Kabupaten Gresik, sekolah pinggiran ditetapkan sebagai penerima Komponen Penyesuaian Wilayah (Regional Adjustment), yaitu tambahan alokasi di atas Base Grant dan Variable Grant, melalui koefisien wilayah yang mempertimbangkan jarak, aksesibilitas, dan keterbatasan infrastruktur. Pendekatan ini memastikan bahwa sekolah di daerah sulit tetap memiliki kapasitas pembiayaan yang memadai untuk menjalankan layanan pembelajaran dengan standar yang sama seperti sekolah lain, sehingga pemerataan layanan (equity) bukan hanya diukur dari jumlah anggaran, tetapi dari kemampuan sekolah untuk menyelenggarakan proses pendidikan secara layak dan berkelanjutan.

Klasifikasi sekolah yang berhak mendapatkan model ini:

Kelompok Sekolah	Kriteria Objektif	Sumber Data / Verifikasi	Hak atas BOSDA (Regional Adjustment)
Kelompok A (Sekolah Kepulauan/ Wilayah Terisolasi)	Lokasi sekolah berada di pulau kecil/akses hanya melalui laut/sungai; waktu tempuh ke kecamatan terdekat > 60 menit.	Peta wilayah, GIS, koordinasi dengan Dinas Perhubungan & Pemerintahan Kecamatan.	**Koefisien Wilayah Tinggi** (misal: 1,40–1,60 × Base Grant + Variable Grant).
Kelompok B (Sekolah di Wilayah Akses Jalan Terbatas)	Jalan menuju sekolah **belum teraspal**, atau hanya dapat dilalui kendaraan tertentu; waktu tempuh ke kecamatan 30–60 menit.	Observasi lapangan, dokumentasi desa, pemetaan Dinas PU.	**Koefisien Wilayah Menengah** (misal: 1,20–1,35 × Base Grant + Variable Grant).
Kelompok C (Sekolah dengan Kepadatan Peserta Didik Rendah karena Faktor Demografi)	Jumlah siswa **< X2** (kuartil bawah dari distribusi siswa per jenjang), bukan karena sekolah tidak diminati, tetapi karena **wilayah berpenduduk jarang**.	Data Dapodik / PD SERU + data kependudukan desa/kelurahan.	**Safety Net + Koefisien Wilayah Ringan** (misal: 1,05–1,15 × Base Grant).
Kelompok D (Sekolah Pelaksana Layanan Inklusif di Wilayah Tertinggal)	Melayani ≥ 20% peserta didik rentan (ABK / kemiskinan ekstrem / anak nelayan-gurun-tenaga migran).	Dapodik, Data DTKS, Verifikasi Dinsos.	**Koefisien Wilayah Sosial** (misal: tambahan +5–10% Variable Grant).

Cara Menetapkan Klasifikasi Sekolah:

Kelompok	Kriteria Final yang Ditetapkan
Kelompok A (Sekolah Kepulauan/Terisolasi)	Lokasi di pulau kecil atau akses ke kecamatan terdekat > 60 menit dan/atau hanya dapat dicapai melalui transportasi air.
Kelompok B (Sekolah Akses Jalan Terbatas)	Akses jalan **tidak beraspal** / rusak berat / waktu tempuh 30–60 menit menuju pusat layanan kecamatan.
Kelompok C (Sekolah Berbasis Demografi (Sekolah Kecil)	Jumlah peserta didik **< nilai Q1** berdasarkan distribusi jumlah siswa tingkat kabupaten (per jenjang).
Kelompok D (Sekolah dengan Proporsi Siswa Rentan Tinggi)	Melayani **≥ 20% peserta didik rentan** (kemiskinan ekstrem / ABK / nelayan tradisional / pekerja migran).

Penetapan Tarif Dasar BOSDA Sekolah Pinggiran

$$\text{BOSDA}_{\text{total}} = (\text{Base} + \text{Variable} + \text{TambahanD}) \times \text{KoefWilayah}$$

Keterangan

Komponen	Makna / Fungsi
Base *(Komponen Dasar)*	Jumlah rombongan belajar × tarif dasar per rombel. Digunakan untuk menjamin biaya tetap minimum satuan pendidikan (listrik, ATK, layanan minimum pembelajaran, administrasi dasar).
Variable *(Komponen Variabel per Siswa)*	Jumlah peserta didik × tarif variabel per siswa. Dialokasikan untuk kebutuhan operasional yang meningkat sesuai jumlah siswa (bahan ajar, kegiatan kelas, layanan siswa).
TambahanD *(Adjustment Sosial / Inklusif / Kerentanan)*	Tambahan alokasi untuk sekolah yang melayani peserta didik rentan (ABK, kemiskinan ekstrem, daerah migran, nelayan tradisional), dihitung sebagai persentase tambahan dari Variable Grant.
Koefisien Wilayah *(Regional Adjustment)*	Faktor pengali untuk mengoreksi disparitas biaya layanan akibat kondisi geografis atau akses (kepulauan, pegunungan, jalan rusak, desa jarak jauh).

Contoh perhitungannya

Sekolah A (Kepulauan)

Data: Rombel = 4; Siswa = 120; KoefWilayah = 1,50

1. Base = 4 × 6.100.000

   = 6.100.000 + 6.100.000 + 6.100.000 + 6.100.000

   = 24.400.000
2. Variable = 120 × 160.000
   - 160.000 × 100 = 16.000.000
   - 160.000 × 20 = 3.200.000

     ⇒ Variable = 16.000.000 + 3.200.000 = 19.200.000
3. Base + Variable = 24.400.000 + 19.200.000 = 43.600.000
4. Terapkan KoefWilayah 1,50 → Total sebelum safety net = 43.600.000 × 1,50
   - 43.600.000 × 1 = 43.600.000
   - 43.600.000 × 0,5 = 21.800.000

     ⇒ 43.600.000 + 21.800.000 = 65.400.000
5. SafetyNet = 12.200.000; karena 65.400.000 > 12.200.000

   BOSDA Final = Rp 65.400.000 / tahun

Sekolah B (Akses jalan terbatas)

Data: Rombel = 5; Siswa = 200; KoefWilayah = 1,30

1. Base = 5 × 6.100.000 = 30.500.000
2. Variable = 200 × 160.000
    - 160.000 × 200 = 160.000 × (2×100) = (16.000.000 × 2) = 32.000.000
3. Base + Variable = 30.500.000 + 32.000.000 = 62.500.000
4. Terapkan KoefWilayah 1,30 → 62.500.000 × 1,30
    - ×1 = 62.500.000
    - ×0,3 = 18.750.000

      ⇒ 62.500.000 + 18.750.000 = 81.250.000
5. SafetyNet = 12.200.000 → 81.250.000 > 12.200.000

   BOSDA Final = Rp 81.250.000 / tahun

Sekolah C (Sekolah kecil)

Data: Rombel = 2; Siswa = 45; KoefWilayah = 1,10

1. Base = 2 × 6.100.000 = 12.200.000
2. Variable = 45 × 160.000
    - 160.000 × 40 = 6.400.000
    - 160.000 × 5 = 800.000

      Variable = 6.400.000 + 800.000 = 7.200.000
3. Base + Variable = 12.200.000 + 7.200.000 = 19.400.000
4. Terapkan KoefWilayah 1,10 → 19.400.000 × 1,10
    - ×1 = 19.400.000
    - ×0,1 = 1.940.000

      ⇒ 19.400.000 + 1.940.000 = 21.340.000
5. SafetyNet = 12.200.000 → 21.340.000 > 12.200.000

   BOSDA Final = Rp 21.340.000 / tahun

**(Catatan: untuk sekolah sangat kecil, kebijakan bisa menegaskan min per sekolah tapi contoh ini tetap di atas min.)*

Sekolah D (Inklusif / proporsi rentan tinggi)

Data: Rombel = 6; Siswa = 300; Tambahan D = +10% pada Variable (0,10); (tidak ada koef wilayah lain pada contoh ini)

1. Base = 6 × 6.100.000 = 36.600.000
2. Variable dasar = 300 × 160.000
    - 160.000 × 300 = 160.000 × (3×100) = 16.000.000 × 3 = 48.000.000
3. Tambahan D = 10% × Variable dasar = 0,10 × 48.000.000 = 4.800.000
4. Variable_net = 48.000.000 + 4.800.000 = 52.800.000
5. BOSDA_before_coef = Base + Variable_net = 36.600.000 + 52.800.000 = 89.400.000

BOSDA Final = Rp 89.400.000 / tahun